

RPJMD

KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 - 2029



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.
4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Agam.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:**
 - a. Bab I memuat Pendahuluan;**
 - b. Bab II memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah;**
 - c. Bab III memuat Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;**
 - d. Bab IV memuat Program Peranglat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Pasal 4

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 bersifat indikatif.**
- (2) Perubahan terhadap target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029, dituangkan dalam RKPD.**

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.**
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
 - a) pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;**
 - b) pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan**
 - c) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.**
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.**
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.**
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :**
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;**
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan**
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.**

- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

EDI BUSTI

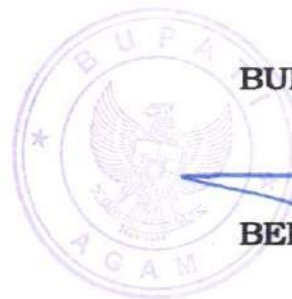
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR 2

NO REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM, PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/39/2025)

4. Kolaborasi multipihak dalam tahapan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

Bertujuan untuk penilaian menyeluruh terhadap kinerja pembangunan, mencakup tingkat pencapaian target, efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tahap ini melibatkan peran aktif pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, lembaga pengawas, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan media untuk memberikan perspektif yang objektif. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada akhir periode perencanaan, tetapi juga secara berkala untuk mendukung proses perencanaan berikutnya.

Ruang lingkup kolaborasi pada tahap ini meliputi penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan guna memperoleh perspektif yang objektif terkait dampak dan efektivitas rencana pembangunan, penyusunan laporan evaluasi yang memuat temuan, analisis, rekomendasi perbaikan, serta kesimpulan hasil evaluasi, dan penyampaian laporan evaluasi kepada seluruh stakeholder, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan.



BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1.1
1.1 Latar Belakang	1.1
1.2 Dasar Hukum.....	1.3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1.7
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Th 2025-2029 dengan RPJPD Kab. Agam Th 2025-2045	1.8
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Th 2025-2029 dengan RPJMN Th 2025-2029	1.8
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Th 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029.....	1.9
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Th 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab/Kota tetangga	1.9
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Th 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Agam	1.10
1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Th 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Agam	1.10
1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Th 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Th 2025-2029	1.10
1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Th 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Agam.....	1.10
1.4 Maksud dan Tujuan	1.11
1.4.1 Maksud.....	1.11
1.4.2 Tujuan	1.11
1.5 Sistematika	1.12
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	2.1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	2.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	2.1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2.23
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	2.49
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	2.77
2.1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026.....	2.98
2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal	2.101
2.1.7 Capaian SDGs.....	2.105
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	2.107
2.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	2.109
2.2.2 Analisa Fiskal Daerah	2.119
2.2.3 Neraca Daerah	2.123
2.2.4 Kerangka Pendanaan	2.125
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	2.134
2.3.1 Permasalahan Pembangunan	2.134
2.3.2 Isu Strategis.....	2.137

BAB III VISI, MISI dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	4.1
3.1 Pembangunan Jangka Panjang Kab. Agam Th 2025-2045.....	4.1
3.1.1 Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kab. Agam Th 2025-2045...	4.1
3.1.2 Misi RPJPD Kab. Agam Th 2025-2045	4.2
3.1.3 Arah dan Sasaeen Pembangunan RPJPD Th 2025-2045 ..	4.3
3.2 Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ..	4.8
3.2.1 Visi RPJMN Th 2025-2029	4.8
3.2.2 Misi RPJMN Th 2025-2029	4.9
3.2.3 Sasaran Pembangunan RPJMN Th 2025-2029	4.10
3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Prop. Sumatera Barat Th 2025-2029	4.11
3.3.1 Visi RPJMD Sumatera Barat	4.11
3.3.2 Misi RPJMD Sumatera Barat.....	4.12
3.3.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat	4.13
3.4 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029	4.17
3.4.1 Visi RPJMD Tahun 2025-2029	4.17
3.4.2 Misi RPJMD Tahun 2025-2029	4.19
3.4.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Th 2025-2029	4.30
3.4.4 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan RPJPD Tahun 2025-2029	4.35
3.4.5 Keterkaitan Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029	4.35
3.4.6 Keterkaitan Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.....	4.37
3.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	4.38
3.5.1 Arah Kebijakan dan Strategi, Program Unggulan pada Tujuan dan Sasaran Per Misi	4.38
3.5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	4.49
3.5.3 Pentahapan Pembangunan	4.51
3.6 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029	4.87
3.6.1 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan.....	4.87
3.6.2 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Ketahanan Pangan.....	4.89
3.6.3 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kesehatan Untuk Semua	4.90
3.6.4 Arah kebijakan Perluasan Akses Pendiidkan dengan pembangunan dan Revitalisasi pendidikan Dasar dan menengah	4.91
3.6.5 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan .	4.91
 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	4.1
4.1 Program Perangkat Daerah.....	4.1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4.62
4.2.1 Indikator Makro Pembangunan.....	4.62
4.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Visi	4.63
4.2.3 Indikator Kinerja Utama.....	4.63

4.2.4	Indikator Kinerja Daerah.....	4.68
BAB V PENUTUP		5.1
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan RPJMD	5.1
5.1.1	Pedoman Transisi.....	5.1
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan.....	5.1
5.1.3	Komunikasi Publik.....	5.2
5.2	Pengendalian dan evaluasi	5.3
5.2.1	Pengendalian Pelaksanaan RPJMD	5.3
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD Th 2025-2029	5.4
5.3	Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah	5.5
5.4	Tata Kelola Saru Data Indonesia Kabupaten Agam.....	5.7
5.5	Kolaborasi Multipihak dalam Perencanaan Pembangunan	5.8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kab. Agam.....	2.1
Tabel 2.2	Rencana Peruntukan Pola Ruang.....	2.4
Tabel 2.3	Status Daya Dukung Air Kab. Agam menurut Kecamatan.....	2.5
Tabel 2.4	Luas Sawah Kabupaten Agam.....	2.9
Tabel 2.5	Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang	2.9
Tabel 2.6	Kapasitas Air Baku Kab. Agam.....	2.11
Tabel 2.7	Indikator Pembentukan IKLH Kab. Agam	2.13
Tabel 2.8	Kelas Bencana Kabupaten Agam	2.16
Tabel 2.9	Proyeksi Jumlah Penduduk.....	2.19
Tabel 2.10	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	2.20
Tabel 2.11	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	2.22
Tabel 2.12	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Agam Periode 2020 - 2024 (Juta Rupiah)	2.25
Tabel 2.13	Kontribusi PDRB Sektor ADHB dan ADHK Kabupaten Agam Periode 2020 – 2024.....	2.26
Tabel 2.14	Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Agam	2.43
Tabel 2.15	Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kab. Agam	2.44
Tabel 2.16	Persentase Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal Kab. Agam	2.45
Tabel 2.17	Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kab. Agam ADHB (M)	2.52
Tabel 2.18	Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Agam	2.55
Tabel 2.19	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Agam.....	2.58
Tabel 2.20	Proporsi jumlah UKM non pertanian Kabupaten Agam Tahun 2019-2023.....	2.59
Tabel 2.21	Proporsi jumlah IKM Kabupaten Agam Tahun 2019-2023.....	2.59
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama Kabupaten Agam.....	2.62
Tabel 2.23	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kabupaten	2.63
Tabel 2.24	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Agam	2.78
Tabel 2.25	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Agam	2.82
Tabel 2.26	Capaian Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Agam.....	2.85
Tabel 2.27	Capaian Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Agam.....	2.88
Tabel 2.28	Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Agam.....	2.92
Tabel 2.29	Capaian Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Kab. Agam	2.93
Tabel 2.30	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam ...	2.95
Tabel 2.31	Capaian Urusan Pengawasan	2.96
Tabel 2.32	Capaian Urusan Kewilayahan	2.97
Tabel 2.33	Capaian Urusan Pemerintahan Umum.....	2.98
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Agam	2.99
Tabel 2.35	Capaian SPM Kabupaten Agam	2.101
Tabel 2.36	Realisasi APBD Tahun 2020-2024 Kabupaten Agam	2.110
Tabel 2.37	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2.118
Tabel 2.38	Neraca Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024	2.124
Tabel 2.39	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2026-2030 (Rp juta).....	2.125
Tabel 2.40	Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2026-2030 (Rp juta)	2.126

Tabel 2.41	Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2026-2030 (Rp juta)	2.128
Tabel 2.42	Belanja Pegawai Kabupaten Agam Tahun 2027-2030 (Rp juta)	2.129
Tabel 2.43	Belanja Pegawai Kabupaten Agam Tahun 2027-2030 (Rp juta)	2.130
Tabel 2.44	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026-2030 (Rp juta)	2.132
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 Tahap I Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2029	3.5
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	3.13
Tabel 3.3	Indikator Sasaran Visi RPJMD 2025-2029	3.19
Tabel 3.4	Rumusan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029	3.32
Tabel 3.5	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029	3.35
Tabel 3.6	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029	3.36
Tabel 3.7	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	3.37
Tabel 3.8	Arah kebijakan dan Strategi Misi I	3.39
Tabel 3.9	Arah kebijakan dan Strategi Misi II	3.40
Tabel 3.10	Arah kebijakan dan Strategi Misi III	3.42
Tabel 3.11	Arah kebijakan dan Strategi Misi IV	3.44
Tabel 3.12	Arah kebijakan dan Strategi Misi V	3.47
Tabel 3.13	Arah kebijakan dan Strategi Misi VI	3.48
Tabel 3.14	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	3.49
Tabel 3.15	Pentapahan Tema Pembangunan RPJMD	3.51
Tabel 3.16	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi I	3.53
Tabel 3.17	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi II	3.54
Tabel 3.18	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi III	3.56
Tabel 3.19	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi IV	3.61
Tabel 3.20	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi V	3.66
Tabel 3.21	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi VI	3.71
Tabel 3.22	Program Prioritas RPJMD	3.73
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	4.2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	4.64
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	4.69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Agam.....	2.6
Grafik 2.2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kab. Agam	2.10
Grafik 2.3	Konsumsi Listrik Per Kapita Kab. Agam	2.12
Grafik 2.4	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman Kab. Agam.....	2.13
Grafik 2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Agam	2.14
Grafik 2.6	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Agam	2.15
Grafik 2.7	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Agam.....	2.17
Grafik 2.8	Laju dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Agam.....	2.17
Grafik 2.9	Kepadatan Penduduk Kabupaten Agam	2.18
Grafik 2.10	Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk	2.19
Grafik 2.11	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	2.21
Grafik 2.12	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan	2.23
Grafik 2.13	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Agam.....	2.24
Grafik 2.14	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Agam dengan Provinsi Sumatera Barat	2.27
Grafik 2.15	Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Agam dengan Provinsi Sumatera Barat	2.28
Grafik 2.16	Perbandingan TPAK dan TPT Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat.....	2.29
Grafik 2.17	Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun	2.30
Grafik 2.18	Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat.....	2.32
Grafik 2.19	Perbandingan P1 dan P2 Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat.....	2.33
Grafik 2.20	Perkembangan dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam	2.34
Grafik 2.21	Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Agam.....	2.35
Grafik 2.22	Rata-rata Lama Sekolah Kab. Agam	2.35
Grafik 2.23	Pengeluaran Per Kapita pertahun Penduduk Kabupaten Agam	2.37
Grafik 2.24	Usia Harapan Hidup Kabupaten Agam	2.37
Grafik 2.25	Angka Kematian Ibu Kabupaten Agam	2.38
Grafik 2.26	Prevalensi Stunting (SSGI) Kabupaten Agam.....	2.39
Grafik 2.27	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis Kabupaten Agam	2.39
Grafik 2.28	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Agam...	2.40
Grafik 2.29	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Agam	2.41
Grafik 2.30	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Agam	2.42
Grafik 2.31	Persentase Nagari Madani Level 5 Kabupaten Agam.....	2.45
Grafik 2.32	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Agam	2.47
Grafik 2.33	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Agam.....	2.48
Grafik 2.34	Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Agam.....	2.48
Grafik 2.35	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Agam.....	2.49
Grafik 2.36	Persentase Pekerja Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kabupaten Agam	2.50
Grafik 2.37	Pengeluaran Per Kapita per Bulan Penduduk Kabupaten Agam	2.51
Grafik 2.38	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (Sektor Jasa Lainnya)	2.53

Grafik 2.39	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (Sektor Jasa Lainnya)	2.54
Grafik 2.40	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Agam..	2.54
Grafik 2.41	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Agam	2.56
Grafik 2.42	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Agam	2.57
Grafik 2.43	Rasio PDRB Jasa Keuangan Kabupaten Agam	2.57
Grafik 2.44	Kunjungan Wisatawan Asing Dan Yang Menginap Kab. Agam..	2.60
Grafik 2.45	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kabupaten Agam	2.60
Grafik 2.46	Return On Asset (ROA) Kabupaten Agam	2.61
Grafik 2.47	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.64
Grafik 2.48	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	2.65
Grafik 2.49	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.66
Grafik 2.50	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Agam..	2.67
Grafik 2.51	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB Kab. Agam..	2.68
Grafik 2.52	Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Agam.....	2.68
Grafik 2.53	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau	2.70
Grafik 2.54	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	2.71
Grafik 2.55	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Agam Tahun 2019-2023	2.71
Grafik 2.56	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Agam	2.72
Grafik 2.57	Tingkat Inflasi (Agregat) Kabupaten Agam	2.73
Grafik 2.58	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Agam.....	2.74
Grafik 2.59	Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Kabupaten Agam.....	2.75
Grafik 2.60	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Tahunan Kabupaten Agam..	2.76
Grafik 2.61	Total Kredit Terhadap PDRB Kabupaten Agam	2.76
Grafik 2.62	Rasio PDRB Jasa Keuangan Kabupaten Agam	2.77
Grafik 2.63	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Agam.....	2.79
Grafik 2.64	Survey penilaian integritas (SPI) KPK Kabupaten Agam.....	2.80
Grafik 2.65	Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Agam	2.80
Grafik 2.66	Persentase potensi ATHG/Konflik sosial yang dapat diatasi	2.81
Grafik 2.67	Indeks Keamanan Kabupaten Agam.....	2.82
Grafik 2.68	Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kab. Agam	2.106
Grafik 2.69	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Agam.....	2.106
Grafik 2.70	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Kabupaten Agam.....	2.107
Grafik 2.71	Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024	2.112
Grafik 2.72	Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024.....	2.113
Grafik 2.73	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024 (Rp juta)	2.115
Grafik 2.74	Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2019-2023	2.116
Grafik 2.75	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024 (Rp juta)	2.117
Grafik 2.76	Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Agam.....	2.119
Grafik 2.77	Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Agam	2.120

Grafik 2.78	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Agam.....	2.121
Grafik 2.79	Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah	2.122
Grafik 2.80	Rasio Belanja Modal Menurut Kabupaten di Sumatera Barat...	2.123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	1.11
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Agam	2.2
Gambar 2.2	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air	2.5



BAB 1 PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 dilandasi oleh kerangka hukum yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sehingga pemerintah daerah dituntut menyusun arah pembangunan yang sesuai dengan potensi, permasalahan, serta kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan pentingnya sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkesinambungan antara pusat dan daerah, melalui dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dengan berlandaskan pada kedua regulasi tersebut, RPJMD Kabupaten Agam 2025–2029 disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Agam 2025–2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Sebagai dokumen perencanaan utama, RPJMD berfungsi menjabarkan visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih Benni Warlis dan Muhammad Iqbal yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 untuk masa bakti 2025–2029 ke dalam kerangka pembangunan yang strategis dan terukur. Dokumen ini disusun pasca penetapan kepemimpinan daerah baru hasil Pemilu 2024, sehingga memastikan kesinambungan antara komitmen politik dan agenda pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Agam menjadi

instrumen kebijakan yang memandu arah pembangunan Kabupaten Agam secara holistik dan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan.

Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai pijakan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Komitmen ini diwujudkan melalui pengintegrasian dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan keberlangsungan sumber daya bagi generasi mendatang. Setiap kebijakan, program, dan kegiatan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim dan dinamika global. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Agam tidak hanya menjadi panduan teknis pembangunan daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan kemajuan yang adil, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Agam dan dokumen perencanaan turunannya juga menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik dan Integratif.

Pendekatan tematik RPJMD Kabupaten Agam tercermin dari tema-tema pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai peta jalan yang sistematis untuk mengarahkan pencapaian sasaran pembangunan lima tahunan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Berdasarkan pendekatan spasial, Kabupaten Agam telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan yang menekankan pengembangan potensi sesuai karakteristik wilayah, pemerataan pembangunan antar kawasan, serta penguatan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, misi pembangunan daerah yang komprehensif, inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai tantangan mencerminkan pendekatan holistik dari RPJMD Kabupaten Agam. RPJMD Kabupaten Agam juga menerapkan

pendekatan integratif melalui keterpaduan program lintas pemangku kepentingan dan optimalisasi berbagai sumber pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measureable, Achievable, Result Oriented/Relevant, dan Time Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD Kabupaten Agam harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra SKPD.

RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam menyelaraskan visi dan misi Kepala Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat dalam kerangka RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, RPJMD Kabupaten Agam juga menjadi pedoman pokok dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, menjadi acuan dalam penjabaran arah kebijakan pada penyusunan RKPD setiap tahunnya, serta menjadi landasan dalam proses penganggaran melalui KUA-PPAS dan APBD.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Agam tidak hanya mencerminkan komitmen politik dan kepemimpinan Kepala Daerah, tetapi juga menjadi instrumen operasional dan strategis untuk memastikan pembangunan lima tahun ke depan berjalan selaras dengan arah pembangunan jangka panjang, sinkron dengan agenda nasional dan provinsi Sumatera Barat, serta mampu memberikan solusi nyata atas tantangan pembangunan yang dihadapi Masyarakat Kabupaten Agam.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045
11. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 7);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7);
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas serta *tematik, holistik, integratif dan spasial* (THIS).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2025-2045 Memuat Visi, Misi Daerah serta Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 20 tahun melalui pentahapan lima tahunan. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periode pertama dari RPJPD Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, selain memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030, juga harus selaras dan sinkron dengan visi dan misi RPJPD. RPJMD ini sangat strategis karena harus menjelaskan dan menuntaskan sasaran akhir RPJPD yang belum tercapai.

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025-2045

RPJMD merupakan 2025–2029 merupakan penjabaran tahap awal dari RPJPD, dengan fokus pada pencapaian sasaran antara (intermediate targets) yang mendukung terwujudnya visi jangka panjang. RPJMD merupakan instrumen operasional dalam pengimplementasian visi, misi dan sasaran pokok RPJPD secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sejalan dengan tahapan pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045, dengan memuat indikator kinerja utama yang bersumber dari target jangka menengah yang dimuat dalam pentahapan RPJPD.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman pada rencana pembangunan nasional guna tercipta keterkaitan, konsistensi dan kesinambungan antara pemerintah daerah dan nasional. Hal ini dipertegas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJMN untuk memastikan program dan kegiatan daerah berkontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMN, sehingga pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman dan kerangka makro pembangunan regional. Oleh karena itu, arah kebijakan, sasaran serta program prioritas pada RPJMD Kabupaten Agam harus selaras dengan prioritas yang sudah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta kesinambungan capaian indikator pembangunan antara kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat.

Keselarasan ini memastikan pembangunan Kabupaten Agam tidak berjalan secara parsial, tapi terintegrasi dengan agenda pembangunan regional serta memperkuat sinergi lintas wilayah.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Tetangga

RPJMD Kabupaten Agam perlu memperhatikan keselarasan dengan kabupaten dan kota tetangga, hal ini merupakan bentuk koordinasi lintas wilayah yang bertujuan mewujudkan sinergi pembangunan kawasan. Keselarasan ini sangat penting terutama dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan kawasan strategis lintas batas, penanganan isu bersama seperti lingkungan, mitigasi bencana dan perdagangan antar daerah.

Kabupaten Agam berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasamana Barat, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu pembangunan di Kabupaten Agam perlu diselaraskan dengan kabupaten/kota dimaksud, guna memastikan pembangunan yang dilaksanakan tidak berjalan sendiri-sendiri dan diharapkan bisa membentuk kawasan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dan mampu meningkatkan daya saing regional dan memperkuat ketahanan wilayah secara berkelanjutan.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Agam

RTRW merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penataan pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan. Keselarasan antara RPJMD dan RTRW sangat penting guna memastikan setiap program dan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD sesuai dengan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW.

Secara substantif RPJMD mengacu kepada RTRW dalam menentukan lokasi sebaran dan skala prioritas pembangunan infrastruktur, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hal ini bertujuan agar pengelolaan ruang lebih terarah, mencegah konflik pemanfaatan lahan, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan.

1.3.6 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Agam

KLHS RPJMD merupakan wujud integrasi pembangunan berkelanjutan pada perencanaan pembangunan daerah. KLHS memastikan setiap kebijakan, rencana dan program di RPJMD mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap lingkungan. KLHS menjadi landasan ilmiah dan normatif agar arah pembangunan tidak hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian dan kualitas sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

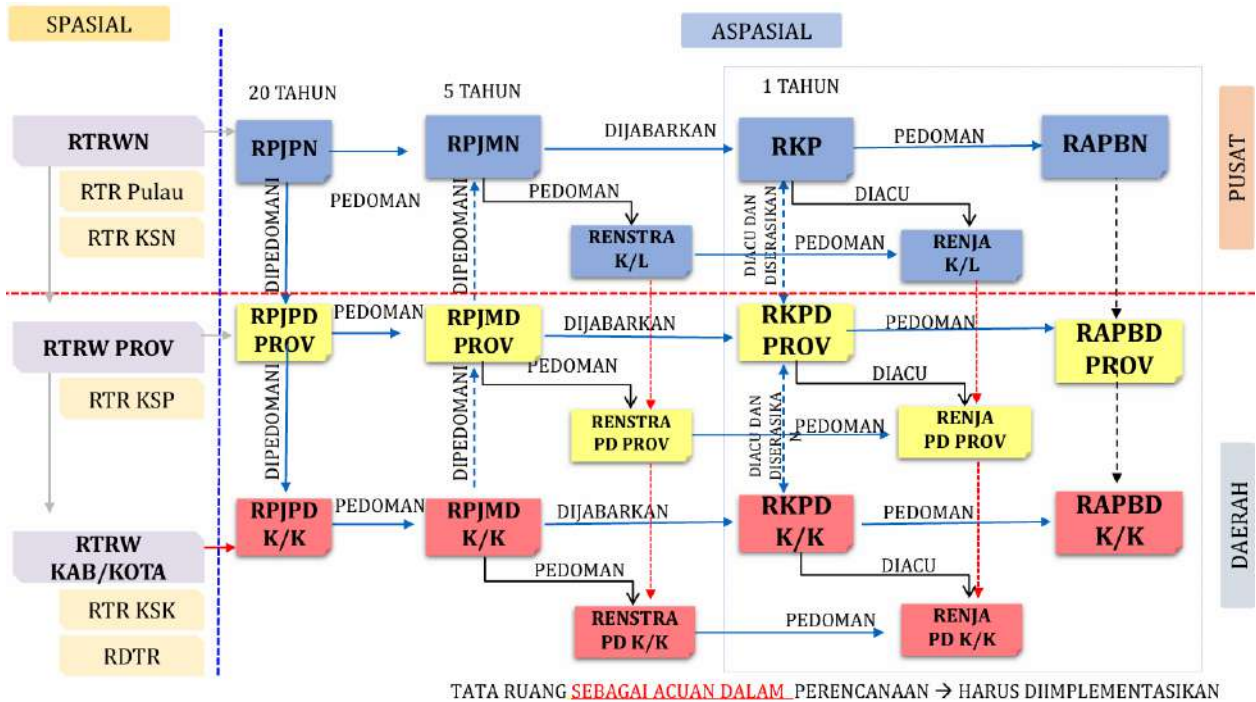
KLHS digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu lingkungan strategis, keterkaitan program pembangunan dan keberlanjutan ekologi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan. Sinergi antara RPJMD dan KLHS bertujuan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan dan meningkatkan resiliensi daerah terhadap perubahan iklim dan resiko bencana.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD mempunyai hubungan langsung dan bersifat hirarki. RPJMD merupakan dokumen induk, sedangkan Renstra merupakan penjabaran operasional dari RPJMD pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Renstra disusun dengan mengacu kepada RPJMD sehingga setiap target kinerja, indikator dan program kerja perangkat daerah selaras dengan pembangunan daerah secara keseluruhan. Renstra merupakan implementasi dari RPJMD melalui kegiatan yang lebih terukur, terstruktur dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Agam

RKPD bersifat operasional dan fungsional dan merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD. Penyusunan RKPD mengintegrasikan sasaran strategis RPJMD dengan perkembangan dan kondisi aktual serta kemampuan pendanaa daerah. Setiap program dan kegiatan yang tercantum di RKPD memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran RPJMD.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 adalah;

- Merumuskan gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan Pemerintah Provinsi Sumatera barat dan Pemerintah Pusat; dan
- Sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada periode 2025–2029 dan dalamnya tertuang arahan kebijakan dan strategi

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

- Menjabarkan visi, misi ,tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Agam terpilih periode 2021-2026.
- Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam;

- c. Merumuskan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun ke depan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Agam.

1.5. Sistematika

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodesasi kepla daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029.

3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antar RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.

4. Maksud dan Tujuan

Berisikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

5. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

a. Aspek geografi dan demografi;

Menjelaskan Posisi dan peran strategis daerah; potensi sumber daya alam; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; berketahanan energi, air dan kemandirian pangan; lingkungan hidup berkualitas; resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim; demografi.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

Menjelaskan kesejahteraan ekonomi; Kesehatan untuk semua; Pendidikan berkualitas yang merata; perlindungan social yang adiptif; beragama maslahat dan berkebudayaan maju; keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan Masyarakat inklusif.

c. Aspek Daya Saing Daerah;

Menjelaskan daya saing sumber daya manusia; iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau dan biru; Transformasi digital; integritas ekonomi domestik dan global; perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; stabilitas ekonomi makro.

d. Aspek Pelayanan Umum.

Menjelaskan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adatif; hukum berkeadilan, keamanan nasional yang Tangguh, dan demokrasi substansial; ketangguhan dipilomasi dan pertahanan berdaya gentar Kawasan; kinerja setiap urusan pemerintah daerah.

2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah.

Menjelaskan tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020-2024, serta proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2026-2030.

3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis

a. Permasalahan pembangunan daerah; dan

Mengidentifikasi permasalahan yang merupakan pernyataan kondisi yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian Pembangunan dengan kondisi

ideal yang seharusnya tersedia yang merupakan permasalahan yang bersifat dominan.

b. Isu strategis daerah.

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

a. Visi dan Misi; dan

Visi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga makna dari visi yang tercantum saat pendaftaran di KPUD.

Misi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga janji politik untuk mewujudkan Visi.

b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan rangkaian kinerja menggambarkan tercapainya visi selama 5 tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas Pembangunan yang mendukung Asta Cita.

Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkain kinerja berupa hasil penyelenggaraan Pembangunan daerah mtercapainya tujuan RPJMD.

2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan

Strategi berisikan Upaya yang akan dilakukan diantaranya optimalisasi sumber daya, penahapan Pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi

sampai *outcome* dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Subbab Program Perangkat Daerah

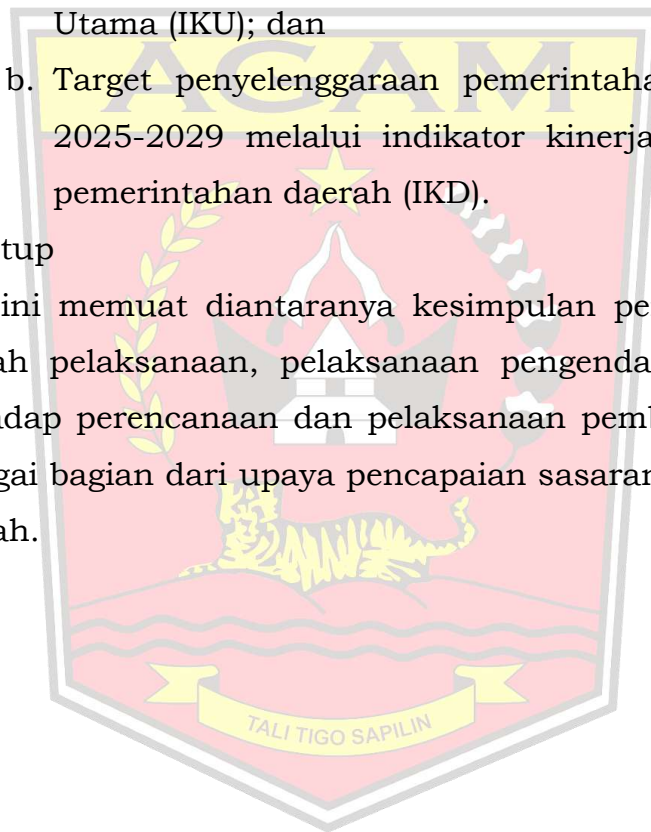
- a. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
- b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
- b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.





BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

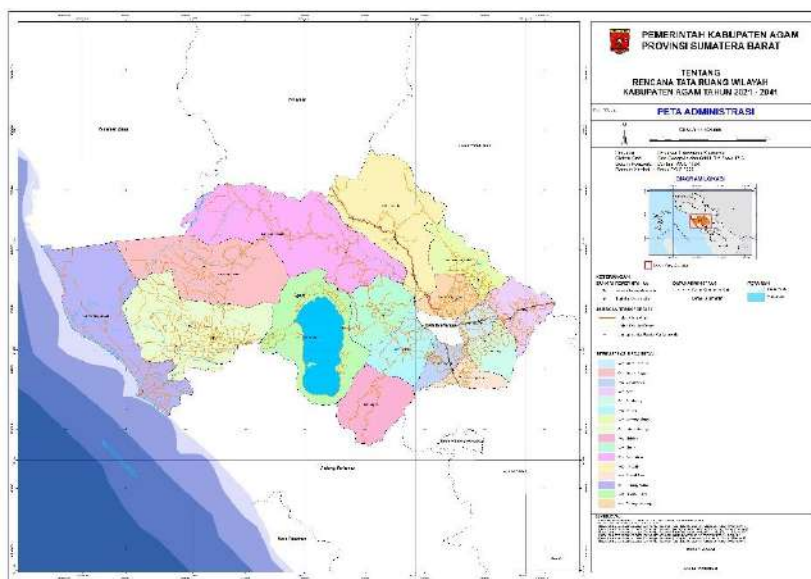
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Geografi

a. Peran Strategis Daerah

Kabupaten Agam dengan ibukota Lubuk Basung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang secara astronomis terletak antara 00o 01' 34" - 00o 28' 43" Lintang Selatan dan 99o 46' 39" - 100o 32' 50" Bujur Timur, dengan luas wilayah 2.232,30 Km². Sebelah utara, Kabupaten Agam berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman. Disebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Batas wilayah Kabupaten Agam disebelah timur adalah Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar serta disebelah Barat adalah Samudera Indonesia.

Posisi Kabupaten Agam cukup unik karena terdiri dari dua bagian wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sangat kontras. Wilayah bagian barat merupakan dataran rendah, dengan ciri-ciri: memiliki panjang garis pantai ± 43 km dan dua pulau yaitu pulau Tengah dan Pulau Ujung. Sementara itu, wilayah bagian timur merupakan dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, lereng dan Lembah dengan gunung terkenal, yaitu Gunung Marapi dan Singgalang yang menentukan lanskap Kabupaten Agam, dengan ketinggian masing-masingnya mencapai 2.891 dan 2.877 meter di atas permukaan laut. Posisi Kabupaten Agam cukup strategis, karena dilewati oleh jalur lintas Tengah dan Barat Sumatera, dan juga berperan sebagai penghubung jalur lintas barat, tengah, dan timur Sumatera. Selain itu, juga dilalui oleh tiga sungai yang cukup besar yaitu Batang Antokan, Batang Masang, dan Batang Agam.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Agam
Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

Total luas wilayah Kabupaten Agam adalah 2.232,30 KM2 yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 92 nagari. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Palembayan, dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banuhampu. Secara detail, proporsi dan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Agam disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Agam

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1	Tanjung Mutiara	205,73	9,22
2	Lubuk Basung	278,40	12,47
3	Ampek Nagari	268,69	12,04
4	Tanjung Raya	244,03	10,93
5	Matur	93,69	4,20
6	IV Koto	68,72	3,08
7	Malalak	104,49	4,68
8	Banuhampu	28,45	1,27
9	Sungai Pua	44,29	1,98
10	Ampek Angkek	30,66	1,37
11	Canduang	52,29	2,34
12	Baso	70,30	3,15
13	Tilatang Kamang	56,07	2,51
14	Kamang Magek	99,60	4,46
15	Palembayan	349,81	15,67
16	Palupuh	237,08	10,62
Jumlah		2.232,30	100

Sumber: RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

b. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Kabupaten Agam sangat besar dalam memfasilitasi peningkatan kesejahteraan bagi penduduknya, meliputi dimensi ekonomi, keuangan, sosial, dan budaya. Kabupaten Agam terkenal dengan tanahnya yang subur, sumber daya airnya yang cukup, dan iklim yang konsisten yang kondusif untuk kegiatan pertanian. Bidang pertanian, khususnya di sektor pangan, telah menjadi ciri khas Kabupaten Agam, menjadikan daerah tersebut sebagai pusat produksi pangan dan pariwisata. Selain itu, wilayah ini menawarkan kearifan lokal yang kaya dari warisan adatnya, yang terus dilestarikan dari waktu ke waktu. Masyarakat Kabupaten Agam memiliki modal sosial budaya yang kuat yang memainkan peran penting dalam kemajuan masyarakat lokal dan generasi mendatang. Sangat penting untuk mensinergikan kekuatan ganda ini untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan daerah melalui partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lokal dan regional.

Namun dilain sisi perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam terkait dengan kerentanan sumber daya tersebut. Kerentanan menunjukkan potensi kehilangan atau penurunan ketersediaan dan kualitas sumber daya alam, sehingga berdampak pada ketahanan ekosistem, kesejahteraan manusia, dan vitalitas ekonomi. Hal ini tergambar dari, 53% wilayah Kabupaten Agam menunjukkan kerentanan tinggi terhadap Kawasan Pembangunan Berkelanjutan (SDA), sementara 38% dan 9% masing-masing menunjukkan kerentanan sedang dan rendah. Daerah yang ditandai dengan peningkatan kerentanan terhadap sumber daya alam terutama terletak di kabupaten Tanjung Raya, Palupuh, dan Kamang Magek.

c. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Skema pengaturan tata ruang untuk kabupaten melibatkan rencana distribusi komprehensif yang menunjuk area untuk fungsi yang dilindungi dan kegiatan budidaya. Di Kabupaten Agam, rencana tersebut terdiri dari 62.769 Ha (28,20%) untuk kawasan lindung dan 159.820 Ha (71,80%)

untuk kawasan budidaya. Rincian spesifik untuk peruntukan ruang wilayah dapat ditemukan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2. Rencana Peruntukan Pola Ruang

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	%
A	Kawasan Lindung	62.769	28,20
1	Badan Air	10.671	4,79
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya		
a	Kawasan Hutan Lindung	20.006	8,99
3	Kawasan Perlindungan Setempat	3.686	1,66
4	Kawasan Konservasi		
A	Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam)	18.080	8,12
B	Kawasan Suaka Alam (Suaka Margasatwa)	3.355	1,51
C	Kawasan Perlindungan Alam (Taman Wisata Alam)	6.574	2,95
D	Kawasan Konservasi Perairan	11	0,01
7	Kawasan Lindung Geologi		
5	A Kawasan Keunikan Bentang Alam	310	0,14
6	Kawasan Ekosistem Mangrove	75	0,03
B	Kawasan Budidaya	159.820	71,80
1	Kawasan Hutan Produksi		
A	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	7.323	3,29
B	Kawasan Hutan Produksi Tetap	2.492	1,12
C	Kawasan Hutan Produksi Konversi	8771	3,94
2	Kawasan Pertanian		
A	Kawasan Tanaman Pangan	25.768	11, 58
B	Kawasan Hortikultura	30.620	13,76
C	Kawasan Perkebunan	73.552	33,04
3	Kawasan Pertambangan dan Energi		
A	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	10	0,004
4	Kawasan Permukiman		
A	Kawasan Permukiman Perdesaan	7.637	3,43
B	Kawasan Permukiman Perkotaan	3.647	1,64
	LUAS TOTAL	222.589	100

Sumber: RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

- Daya Dukung Air

Air mempunyai fungsi yang sangat vital bagi lingkungan terutama bagi tanaman. Kekurangan air akan mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman serta akan berpengaruh pada kemampuan dalam menyediakan jasa lingkungan hidup salah satunya sebagai penyedia pangan. Status daya dukung air Kabupaten Agam dilihat berdasarkan SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Berdasarkan status ketersediaan air di Kabupaten Agam dapat diketahui status air sudah terlampaui seluas

18.592,13 hektar (8,35 persen) yang tersebar di seluruh kecamatan. Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat status air menurut kecamatan.

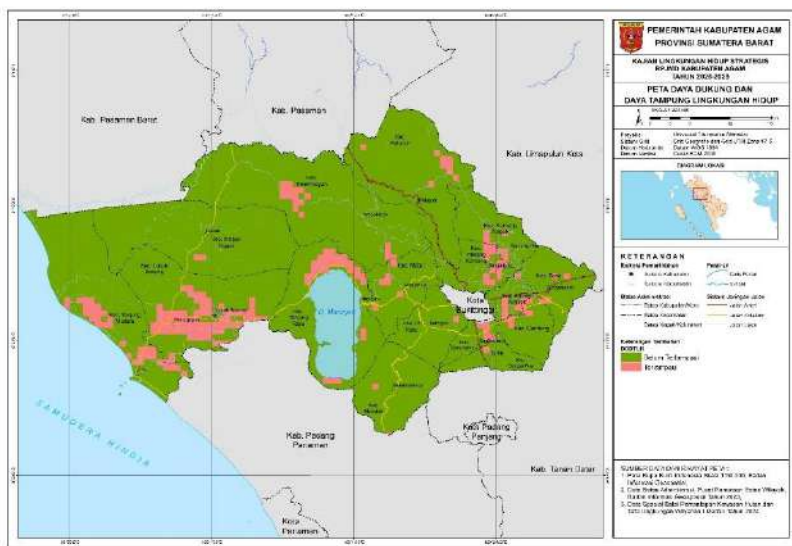
Tabel 2.3. Status Daya Dukung Air Kabupaten Agam Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	TOTAL (Ha)
1	Ampek Angkek	2.496,68	546,66	3.043,35
2	Ampek Nagari	26.491,09	170,87	26.661,96
3	Banuhampu	2.462,27	401,69	2.863,96
4	Baso	7.224,50	346,86	7.571,36
5	Candung	4.874,61	565,67	5.440,28
6	IV Koto	7.693,04	85,46	7.778,50
7	Kamang Magek	7.444,22	550,65	7.994,87
8	Lubuk Basung	18.102,69	6.389,59	24.492,29
9	Malalak	11.070,65	114,74	11.185,38
10	Matur	8.317,17	546,44	8.863,61
11	Palupuh	22.150,64	769,12	22.919,75
12	Pelemбаяn	34.141,78	1.512,61	35.654,39
13	Sungai Pua	4.002,43	139,14	4.141,58
14	Tanjung Mutiara	20.957,76	2.824,36	23.782,13
15	Tanjung Raya	21.713,73	2.555,12	24.268,85
16	Tilatang Kamang	4.809,36	1.073,13	5.882,49
	Total	203.952,62	18.592,13	222.544,75

Sumber : KEMENLHK / KLHS RPJMD Agam

Berikut disajikan peta daya dukung dan daya tampung air kabupaten Agam berdasarkan SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

Gambar 2.2. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air

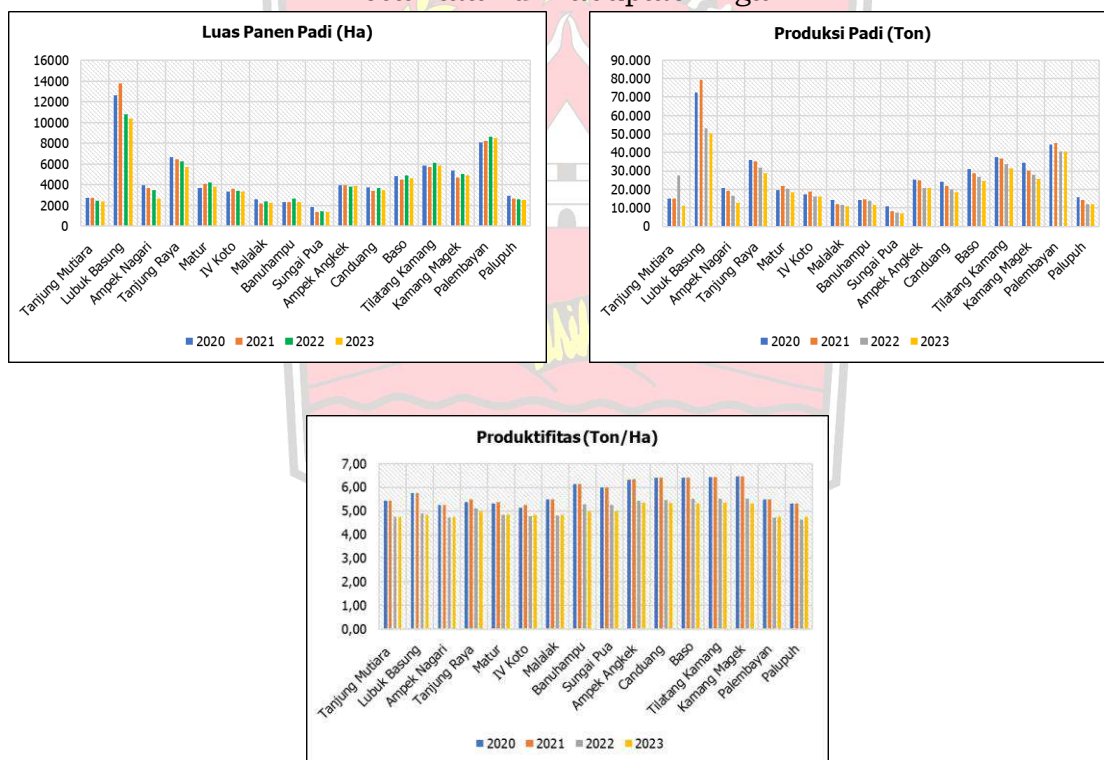


Sumber : KEMENLHK

- Daya Dukung Pangan

Produksi padi berdasarkan kecamatan tertinggi di Kecamatan Lubuk Basung (50.409 ton) dengan luas panen 10.415 Ha. Sedangkan produksi padi terendah di Kecamatan Sungai Pua (7.070 ton) dengan luas panen 1.414 Ha. Jika dilihat secara keseluruhan, terjadi penurunan luas panen, produksi, dan produktifitas padi di Kabupaten Agam. Secara keseluruhan terjadi pengurangan luas panen seluas 3.709 hektar pada tahun 2023. Dimana luas panen padi pada tahun 2022 adalah 71.939 hektar menjadi 68.230 hektar pada tahun 2023. Penurunan luas panen terluas yaitu di Kecamatan IV Nagari dengan luas pengurangan 834 hektar. Luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Agam berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Agam secara umum, luas panen, produksi dan produktifitas padi dapat dilihat pada Gambar 3.32.

Grafik 2.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Agam



Sumber : BPS Kabupaten Agam / KLHS RPJMD Agam

Daya dukung dan daya tampung lingkungan pada dasarnya ditentukan oleh layanan lingkungan yang disediakan yang dikategorikan menjadi 20 jenis yang berbeda, diatur ke dalam 4 kelompok layanan utama: penyediaan, pengaturan, budaya, dan pendukungan. Layanan

penyediaan menunjukkan produk yang dihasilkan oleh ekosistem yang digunakan langsung oleh manusia. Kabupaten Agam memiliki daya dukung jasa penyediaan pangan yang cukup besar. Menurut data RTRW, sekitar 37% dari total luas lahan di Kabupaten Agam menunjukkan daya dukung layanan pangan yang tinggi atau sangat tinggi. Sebaliknya, ketersediaan layanan penyediaan air bersih di Kabupaten Agam memiliki daya dukung yang rendah, hanya 29,74% daerah yang menawarkan layanan air bersih yang tinggi atau sangat tinggi.

Layanan manajemen iklim Kabupaten Agam terletak dalam kategori tinggi dan sangat tinggi, mencakup hampir 50% dari total luas wilayah. Kecamatan Palupuh, Ampek Nagari, Palembayan, Malalak, dan Tanjung Raya merupakan kontributor utama dalam penyediaan layanan manajemen iklim. Sekitar 42,85% dari luas lahan ditetapkan di bawah kategori moderat untuk layanan pengelolaan air dan banjir. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar luas lahan, sekitar 39%, termasuk dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. Dalam konteks layanan pencegahan dan perlindungan bencana, 52% wilayah Kabupaten Agam diklasifikasikan sebagai tinggi atau sangat tinggi, terkonsentrasi di Kecamatan Ampek Nagari, Lubuk Basung, Tanjung Raya, dan Palembayan. Adapun layanan regulasi pemurnian air, sebagian besar wilayah, 48%, dinilai rendah atau sangat rendah. Layanan pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Agam juga sebagian besar diklasifikasikan sebagai rendah atau sangat rendah, mencakup 51,2% dari luas lahan, sementara hanya sekitar 21% yang dikategorikan tinggi atau sangat tinggi.

Jasa kultural mencakup layanan yang diberikan oleh lingkungan alam yang berkontribusi untuk mendukung kehidupan sosial dan budaya manusia. Kabupaten Agam didominasi daya dukung rendah hingga sangat rendah di bidang layanan perumahan dan ruang hidup, terhitung 49,35% dari luas wilayah. Daya dukung yang tinggi dan sangat tinggi, mewakili 27,13%, tersebar di hampir semua kecamatan, kecuali Kecamatan Tanjung Raya. Distribusi ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari area kabupaten yang cocok untuk pengembangan perumahan. Dalam hal

layanan rekreasi dan ekowisata, Kabupaten Agam memiliki daya dukung yang dominan tinggi dan sangat tinggi, mencakup sekitar 47,33% dari total luas wilayah. Selain itu, wilayah ini menunjukkan daya dukung yang relatif tinggi untuk layanan budaya estetika, dengan 48,51% tanah termasuk dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. Kapasitas tinggi ini terutama terkonsentrasi di kecamatan Tanjung Raya, Palembayan, Ampek Nagari, dan Lubuk Basung.

Jasa pendukung mengacu pada layanan penting yang diperlukan untuk menghasilkan jasa lainnya. Kapasitas Kabupaten Agam untuk memberikan layanan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, serta perlindungan lingkungan, relatif rendah, dengan hanya 31,05% dari total lahan yang termasuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi. Demikian pula, layanan dukungan untuk siklus pemeliharaan dan produksi primer di Kabupaten Agam terbatas, dengan hanya 28,20% dan 34,75% dari total luas lahan yang tergolong sangat tinggi dan tinggi. Di sisi lain, daya dukung jasa pendukung keanekaragaman hayati di Kabupaten Agam sebagian besar tinggi, dengan 39,50% dari total lahan menunjukkan kapasitas yang sangat tinggi dan tinggi untuk jasa ini. Daerah dengan kapasitas yang sangat tinggi dan dukungan keanekaragaman hayati yang kuat terutama terkonsentrasi di kecamatan Tanjung Raya, Palupuh, dan Palembayan.

Alih fungsi lahan menimbulkan ancaman bagi kelestarian lingkungan, karena merupakan kejadian umum di berbagai daerah. Konversi lahan dari fungsi aslinya ke fungsi yang berbeda dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Proses ini sering menimbulkan beberapa masalah, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati akibat kerusakan habitat, serta dampak pada ekosistem perairan dan ketersediaan pangan. Alih fungsi lahan umumnya berupa konversi fungsi lahan pertanian, tahun 2009 luas sawah mengalami penurunan 3.492 Ha, atau sekitar 11,7% yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Luas Sawah Kabupaten Agam

Tahun	Luas Sawah (ha)
2024	26.330
2023	26.330
2022	26.330
2021	26.330
2020	27.250
2019	27.277
2018	27.277
2017	27.277
2016	27.206
2015	27.149
2014	27.149
2013	27.149
2012	28.642
2011	29.822
2010	29.822
2009	29.822

Sumber: Dinas Pertanian Agam 2025

Pada sisi lain, ketaatan terhadap pemanfaatan tata ruang menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2024 indeks ketaatan terhadap tata ruang sudah mencapai 99,99, meningkat dari 98,50 pada tahun 2020. Angka ini merupakan menggambarkan persentase ijin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan. Capaian periode 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5. Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks ketaatan terhadap tata ruang	98,50	98,66	98,55	99,98	99,99

Sumber: Dinas PUTR Agam 2025

d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

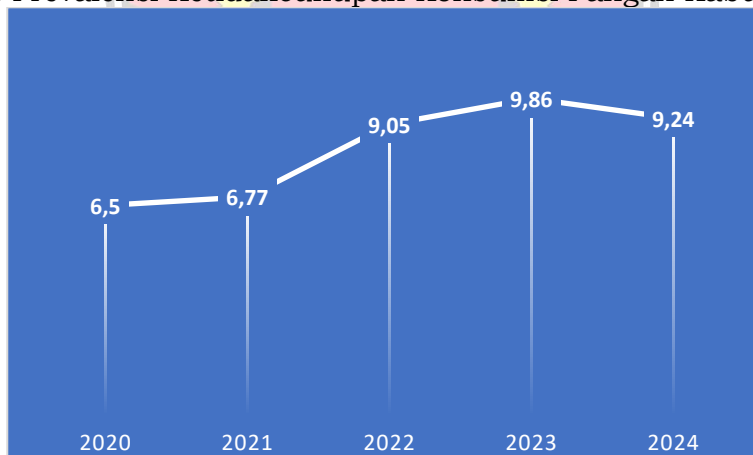
Kabupaten Agam memiliki kekayaan alamnya yang melimpah serta keberagaman ekosistem yang menunjang kehidupan masyarakat. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat tantangan nyata yang memerlukan pendekatan holistik dan integratif, khususnya dalam pengelolaan sektor energi, air, dan pangan. Ketiga sektor ini merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Gambaran mengenai ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dapat dijelaskan melalui indikator seperti, prevalensi

ketidakcukupan konsumsi pangan, konsumsi listrik per kapita dan akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum.

1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Semakin tinggi nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. Berdasarkan data 5 tahun terakhir di Agam tergambarkan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya semakin meningkat. Capaian angka prevalensi ditahun 2020 sebesar 6,5 dan terus naik hingga 9,24 pada tahun 2024. Artinya 9,24 persen penduduk Agam tidak mengonsumsi cukup kalori, dan hal ini merupakan indikator kerawanan pangan dan dapat berdampak pada kesehatan terutama pada ibu dan anak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2.2 : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Agam



Sumber : BPS (2025)

2. Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku adalah jumlah maksimum air yang dapat disediakan oleh suatu sumber air atau sistem penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun pertanian. Kapasitas ini dapat diukur dalam berbagai satuan, seperti liter per detik (l/d atau lps), meter kubik per detik (m^3 /detik), atau liter per hari (l/hari). Berdasarkan data PDAM Kabupaten Agam, kapasitas air baku ditahun 2024 mencapai 0,11 meter kubik per detik. Sumber air tersebut tersebar di 9 lokasi, meliputi Lubuk Basung, Batu Kambing, Tiku, Maninjau, Matur, IV Koto, IV Angkat, Sungai Puar dan Baso. Berikut disajikan sebaran dan kapasitas air baku kabupaten Agam.

Tabel 2.6 : Kapasitas Air Baku Kabupaten Agam

No	Unit SPAM	Sumber	No	l/dt	M ³ /dt
1	Lubuk Basung	Mata Air Silayang		60	0,06
		Sungai Batang Antokan (Lubuk Sao)		400	0,40
		Sungai Silasung		200	0,20
		Mata Air Arikir		100	0,10
2	Batu Kambing	Sungai Balai Badak		250	0,25
3	Tiku	Sungai Cacang Randah		100	0,10
		Sungai Cacang Randah		100	0,10
4	Maninjau	Mata Air Koto Gadang		50	0,05
		Sungai Koto Tinggi		200	0,20
5	Matur	Mata Air Tanjung Lurah		40	0,04
6	IV Koto	Mata Air Rimbo Takuruang		30	0,03
7	IV Angkat	Mata Air Tarok		30	0,03
8	Sungai Puar	Mata Air Tabek Barawak		50	0,05
		Mata Air Tabek Barawak		50	0,05
9	Baso	Mata Air Sungai Janiah		20	0,02
		Mata Air Batu Putih		100	0,10
		Mata Air Batu Putih		100	0,10

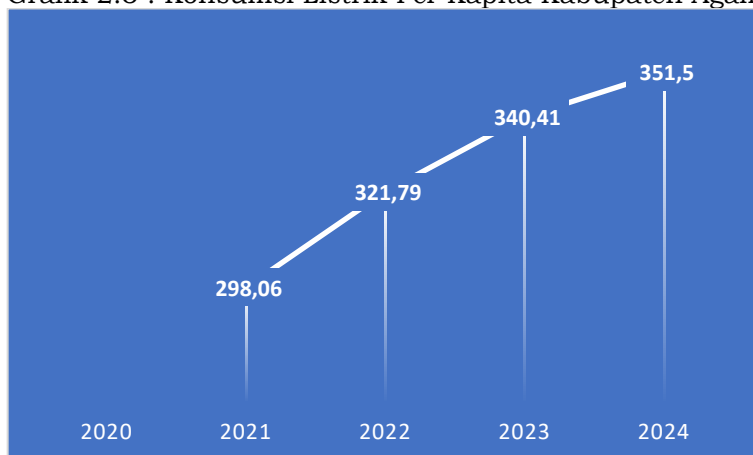
Sumber : PDAM Tirta Antokan Kab. Agam (2025)

3. Konsumsi listrik per kapita

Konsumsi Listrik per kapita adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan

ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Agam di tahun 2024 mencapai 162.966 pelanggan. Pelanggan tersebut dilayani oleh enam Unit Layanan Pelanggan seperti ULP Baso, ULP Bukit Tinggi, ULP Koto Tuo, ULP Lubuk Basung, ULP Lubuk Sikaping dan ULP Padang Panjang. Total daya yang disalurkan melalui ULP tersebut mencapai 186.332.450 kWh pada tahun 2024. Konsumsi Listrik perkapita Agam dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.3 : Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Agam



Sumber : PLN 2025 (diolah)

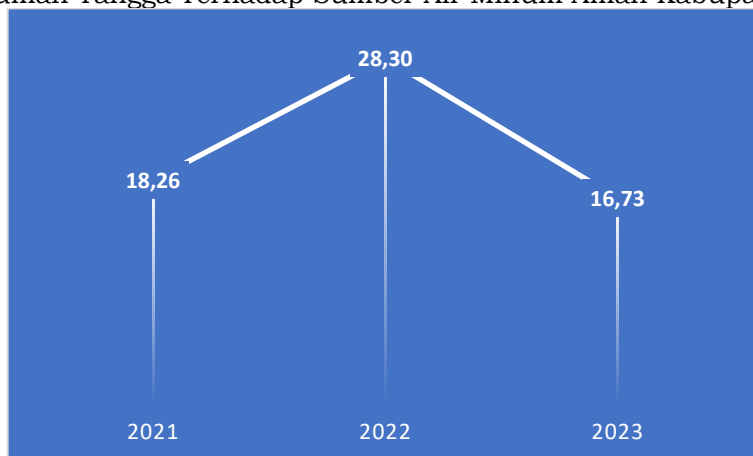
Konsumsi Listrik perkapita Agam meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2021 konsumsi perkapita sebesar 298,06 kWh dan terus meningkat menjadi 351,5 kWh di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Agam menggunakan lebih banyak energi listrik setiap tahunnya.

4. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman

Akses rumah tangga terhadap sumber air minum aman dihitung berdasarkan akses terhadap air siap minum perpipaan. Akses tersebut harus memenuhi kriteria seperti rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan, lokasi sumber air minum berada di dalam atau di luar rumah (on premises), tersedia setiap saat dibutuhkan; dan memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan data BPS, capaian akses rumah tangga di Agam terhadap sumber air minum aman tersebut bergerak naik dan turun. Di tahun 2021 tercatat sebanyak

18,26 persen rumah tangga telah memiliki akses dan meningkat signifikan di tahun 2022 menjadi 28,3 persen. Namun di tahun 2023 capaian tersebut turun menjadi 16,73 persen. Sementara untuk tahun 2024 data belum tersedia. Ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Agam masih menggunakan air dari sumber yang tidak terjamin keamanannya. Kedepannya diperlukan perluasan dan perbaikan jaringan air bersih dan edukasi masyarakat soal pentingnya air aman.

Grafik 2.4 :
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman Kabupaten Agam



Sumber : BPS (2025)

d. Lingkungan Hidup Berkualitas

Salah satu mekanisme yang efektif untuk menyajikan data lingkungan yang komprehensif adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indeks gabungan yang mensintesis data dari beragam indikator keberlanjutan seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH berperan penting sebagai alat yang holistik untuk mengevaluasi kualitas lingkungan dan mengkomunikasikannya dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan standar kategorisasi yang jelas, IKLH muncul sebagai instrumen yang sangat relevan dalam memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan.

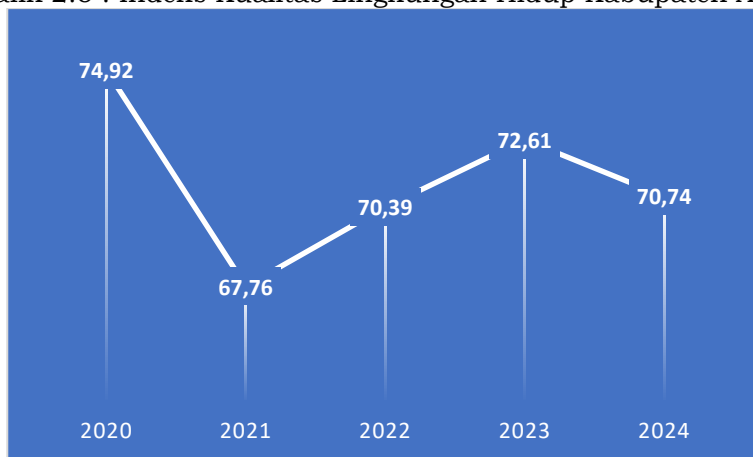
Tabel 2.7 : Indikator Pembentuk IKLH Kabupaten Agam

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indek Kualitas Air	65,00	85,00	54,61	61,28	65,00
Indek Kualitas Udara	90,67	91,66	91,12	90,94	91,40
Indek Kulaitas Tutupan Lahan	47,56	47,22	47,14	48,01	50,93

Sumber : DLH Agam (2025)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. IKLH pada tahun 2024 turun menjadi 70,74 dari 72,61. Beberapa faktor penghambat diantaranya keterbatasan alat sampling, keterbatasan akses jalan dan mobilisasi alat pada beberapa lokasi sampling, pengaruh cuaca dan beberapa data yang dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mempengaruhi nilai IKLH. Berikut disajikan capaian IKLH Kab Agam.

Grafik 2.5 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam



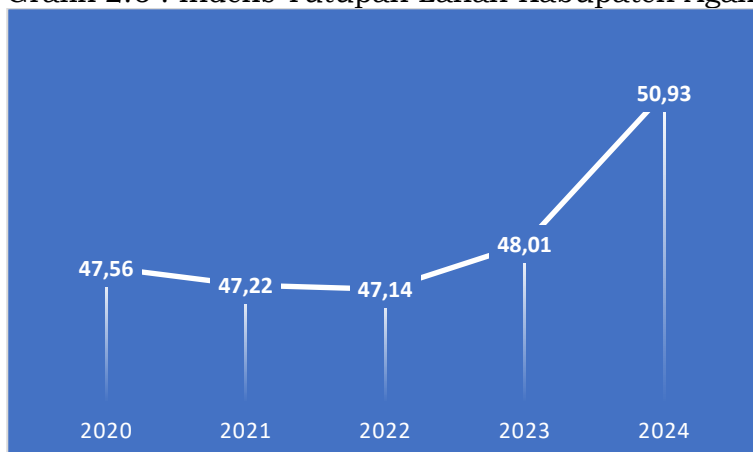
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Agam (2025)

Kendala yang dihadapi saat ini terkait dengan luasnya rentang kendali lingkungan hidup, yang melibatkan semua stakeholder, sehingga tidak semuanya dapat dikendalikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.

e. Indeks Tutupan Lahan

Indeks tutupan lahan menggambarkan kemampuan wilayah mempertahankan fungsi ekologisnya melalui proporsi tutupan lahan yang masih baik. Nilainya mencerminkan perbandingan antara tutupan lahan aktual dengan tutupan lahan ideal yang diperlukan agar fungsi hidrologi, keanekaragaman hayati, dan penyangga iklim tetap berjalan.

Grafik 2.6 : Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Agam



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Agam (2025)

Nilai Indeks tutupan lahan Agam meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 47,56 dan meningkat menjadi 50,93 pada tahun 2024. Semakin besar nilai indeks ini, semakin baik kondisi lingkungan dari sisi tutupan lahan. Hal ini mengindikasikan semakin menguatnya fungsi ekologis wilayah kabupaten Agam.

f. Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Mayoritas Wilayah Kabupaten Agam tergolong wilayah rentan bencana yang dikategorikan sebagai daerah rawan longsor, rawan gelombang pasang surut, rawan banjir, dan rawan gempa. Kerentanan signifikan terhadap pergerakan tanah terdapat di kecamatan Ampek Nagari, Baso, Canduang, IV Koto, Lubuk Basung, Malalak, Matur, Palembayan, Palupuh, Sungai Pua, dan Tanjung Raya. Total wilayah dengan kerentanan pergerakan lahan yang tinggi meliputi 35.126,68 hektar atau 32,94% dari total luas wilayah rawan. Wilayah pesisir di Kecamatan Tanjung Mutiara rentan terhadap gelombang. Daerah rawan banjir di Kabupaten Agam umumnya ditemukan di sepanjang aliran air seperti Batang Tikus, Batang Sungai Pingai, Batang Kalulutan. Selain itu, wilayah yang berisiko terkena bencana Gunung Marapi di Kabupaten Agam terdiri dari lima kecamatan yakni Banuhampu, Baso, Canduang, Ampek Angkek, dan Sungai Pua. Semua kabupaten di Kabupaten Agam menghadapi risiko gempa berdasarkan hasil analisis risiko kerentanan

dengan tingkat risiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi, sehingga sebagian besar wilayah berada di bawah risiko sedang.

Tabel 2.8. Kelas Bencana Kabupaten Agam

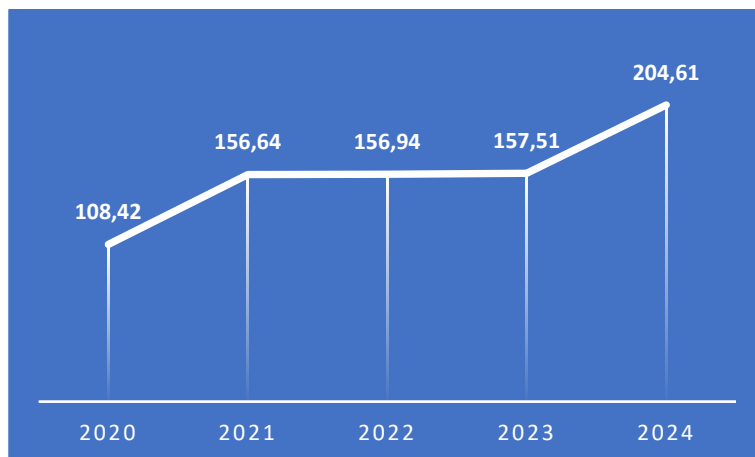
No	Jenis Bahaya	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	31.230,57	Tinggi
2	Banjir Bandang	17.495,91	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	69.603,80	Tinggi
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	793,17	Tinggi
5	Gempa Bumi	227.663,00	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	139.784,98	Tinggi
7	Kekeringan	227.663,00	Sedang
8	Letusan Gunung Api Merapi	5.117,27	Tinggi
9	Letusan Gunung Api Tandikat	8.711,51	Rendah
10	Tanah Longsor	101.510,15	Tinggi
11	Tsunami	2.413,62	Tinggi

Sumber : BPBD Agam (2025)

Menurut data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 88 nagari memiliki kerentanan sedang terhadap perubahan iklim, sedangkan 4 nagari dalam kategori rendah dalam hal kapasitas untuk beradaptasi. Tingkat risiko perubahan iklim menunjukkan bahwa 88 nagari diklasifikasikan dalam kategori risiko rendah, sedangkan 4 nagari lainnya dikategorikan memiliki risiko sangat rendah.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Indeks ini biasanya mencakup berbagai faktor yang berkontribusi terhadap risiko bencana, seperti topografi, kondisi geologi, kerentanan sosial dan ekonomi, serta adanya infrastruktur yang dapat mempengaruhi tingkat kerentanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Semakin tinggi nilai IRB suatu wilayah, semakin besar risiko bencana yang dimiliki wilayah tersebut, dan semakin pentingnya upaya mitigasi yang perlu dilakukan di wilayah tersebut. Kabupaten Agam termasuk wilayah dengan risiko bencana yang tinggi. Hal ini tercermin dari nilai IRBI tahun 2024 sebesar 204,61 yang masuk ke kategori “tinggi”. Jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat, kabupaten Agam merupakan wilayah dengan resiko bencana tertinggi berdasarkan nilai IRBI.

Grafik 2.7 : Indeks Resiko Bencana Kabupaten Agam



Sumber: BNPB 2025

2.1.1.2. Demografi

a. Kependudukan

Penduduk kabupaten Agam pada tahun 2024 tercatat sebanyak 533.254 jiwa (BPS). Dalam kurun waktu 23 tahun, kabupaten Agam mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 30,35 persen dimana pada tahun 2000 penduduk Agam tercatat sebanyak 414.972 jiwa. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan pola migrasi penduduk. Secara rata-rata pertumbuhan penduduk 2000 hingga 2024 sebesar 1,45 persen setiap tahunnya.

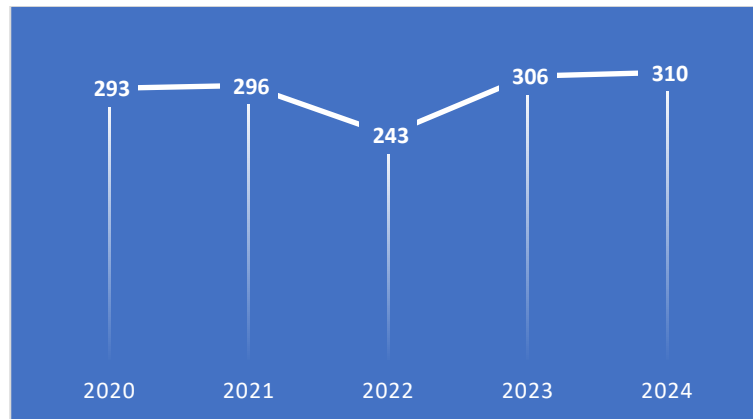
Grafik 2.8 : Laju dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Agam



Sumber: BPS 2025

Sementara kepadatan penduduk dikabupaten Agam pada tahun 2024 mencapai 310 jiwa/km², meningkat dari tahun 2020 sebesar 293 jiwa/km². Kepadatan penduduk Agam disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.9 : Kepadatan Penduduk Kabupaten Agam



Sumber: BPS 2025

b. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

Melihat pola pertumbuhan penduduk dalam 20 tahun terakhir, diperkirakan penduduk Agam akan terus bertambah seiring waktu. Pertambahan penduduk tentunya akan mempengaruhi juga kebutuhan dimasa depan, seperti infrastruktur, pangan, pekerjaan, lingkungan dan sebagainya. Dengan melihat dinamika pertumbuhan penduduk, pemerintah dituntut untuk dapat merencanakan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan. Untuk itu perlu dilakukan proyeksi pertumbuhan penduduk untuk membantu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang mungkin timbul akibat perubahan dalam ukuran dan struktur penduduk.

Proyeksi penduduk adalah perkiraan tentang jumlah penduduk suatu daerah berdasarkan waktu. Proyeksi penduduk biasanya dibuat berdasarkan data historis mengenai laju pertumbuhan penduduk. Proyeksi penduduk Agam hingga tahun 2045 dihitung oleh BPS Kabupaten Agam dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti Total Fertility Rate (TFR), Infant Mortality Rate (IMR) dan Migrasi Penduduk mengalami peningkatan menjadi sekitar 700.622 jiwa di tahun 2045, seperti disajikan pada tabel berikut:

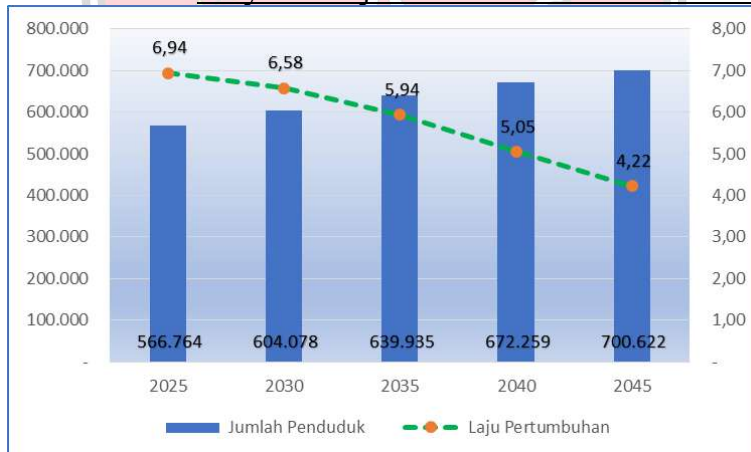
Tabel 2.9. Proyeksi Jumlah Penduduk

Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
540.905	566.764	604.078	639.935	672.259	700.622

Sumber: hasil proyeksi BPS Kabupaten Agam

Jumlah penduduk Agam diproyeksikan akan bertambah sebanyak 159.717 jiwa hingga tahun 2045. Artinya dalam periode tersebut pertumbuhan penduduk mencapai 22,79 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya, hasil proyeksi laju pertumbuhan penduduk kedepannya akan sedikit mengalami perlambatan dengan perkiraan laju pertumbuhan rata-rata pertahun diproyeksikan sebesar 1,03 persen. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk per lima tahun disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.10. Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber: diolah dari hasil proyeksi BPS Agam

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk juga akan semakin tinggi. Dengan membandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah, tingkat kepadatan penduduk kabupaten Agam di Tahun 2045 diproyeksikan menjadi 315 jiwa/km². Rencana Kawasan Permukiman Kabupaten Agam di Tahun 2041 merencanakan peruntukkan untuk kawasan permukiman seluas 112,84 km². Jika disandingkan dengan kawasan yang diperuntukkan untuk permukiman, maka tingkat kepadatan penduduk di Tahun 2045 mencapai 6.209 jiwa/km². Kedepannya dibutuhkan kebijakan penyediaan infrastruktur

dan layanan yang memadai, pengembangan wilayah baru atau optimilisasi lahan, serta mitigasi dampak negatif dari kepadatan penduduk yang tinggi.

1. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin mengacu pada perbandingan jumlah individu pria dan wanita dalam suatu populasi atau kelompok tertentu. Rasio jenis kelamin dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan. Rasio jenis kelamin yang seimbang biasanya mendekati 1:1, yang berarti jumlah pria dan wanita dalam populasi relatif seimbang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pengukuran rasio jenis kelamin memiliki beberapa tujuan strategis yang dapat membantu penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih inklusif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender.

Rasio penduduk Agam berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024 mencapai 101,87 yang artinya penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya dibanding perempuan. Dari total penduduk 533.254 jiwa, tercatat 267.450 jiwa laki-laki dan 265.804 perempuan. Pada Tahun 2045 hasil proyeksi menunjukkan penduduk laki-laki berjumlah 352.396 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 348.226 jiwa. Secara persentase jumlah penduduk laki-laki terhadap total penduduk meningkat dari 50,91 persen di Tahun 2023 menjadi 50,30 persen di Tahun 2045.

Tabel 2.10. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

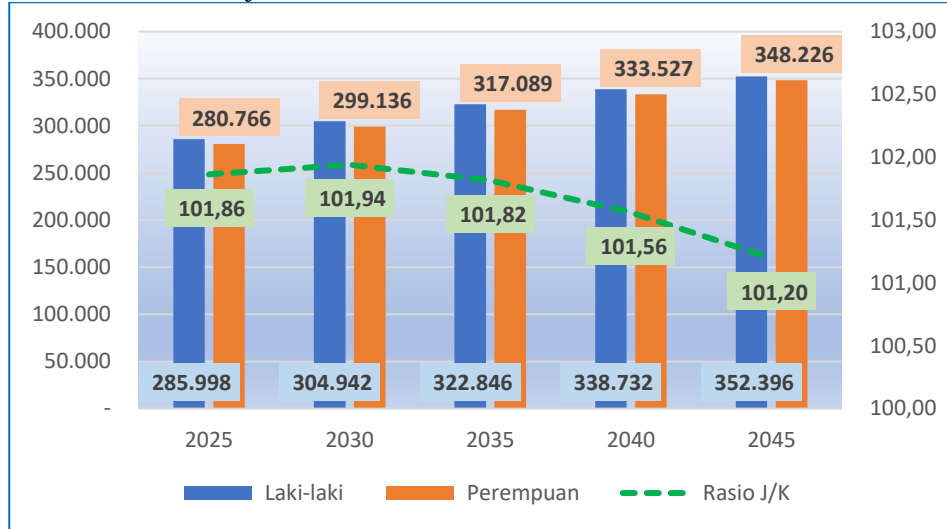
Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	267.450	285.998	304.942	322.846	338.732	352.396
Perempuan	265.804	280.766	299.136	317.089	333.527	348.226
Rasio	101,87	101,86	101,94	101,82	101,56	101,20

Sumber: hasil proyeksi BPS Agam

Dari hasil proyeksi hingga Tahun 2045, didapatkan bahwa rasio penduduk laki-laki akan sedikit menurun dengan penambahan penduduk. Pada Tahun 2045 rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin sebesar 101,2 dimana penduduk laki-laki berjumlah 352.396 jiwa dan penduduk

perempuan sebanyak 348.226 jiwa. Perkembangan rasio jenis kelamin penduduk disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.11. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: diolah dari hasil proyeksi BPS Agam

2. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Rasio Ketergantungan Penduduk (*Defendency Ratio*) adalah ukuran yang menggambarkan hubungan antara kelompok usia yang tidak produktif dengan kelompok usia produktif. Usia non produktif adalah penduduk berumur 0-14 tahun dan penduduk berumur diatas 65 tahun. Sementara usia produktif adalah penduduk berumur 15-64 tahun. Rasio ini mencerminkan jumlah orang yang tidak produktif secara ekonomi seperti anak-anak yang masih tergantung pada orang tua atau lansia yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah orang yang diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Rasio ketergantungan penduduk yang tinggi dapat menunjukkan beban ekonomi yang lebih besar, karena populasi yang bekerja harus mendukung lebih banyak orang yang tidak bekerja. Di sisi lain, rasio yang lebih rendah dapat menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi jika populasi usia produktif dapat dimanfaatkan secara efektif. Perubahan dalam rasio ketergantungan penduduk dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk kebijakan pensiun, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan

ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang rasio ketergantungan penduduk penting bagi perencanaan pembangunan jangka panjang.

Rasio Ketergantungan Penduduk Agam Tahun 2024 adalah sebesar 48,47. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi 46 hingga 47 penduduk usia non produktif. Jika dilihat lagi berdasarkan kelompok umur, rasio ketergantungan pada kelompok 0-14 tahun sebesar 28,97 dan kelompok umur diatas 65 tahun sebesar 16,06. Kelompok umur 0-14 merupakan kelompok usia non produktif yang proporsinya lebih tinggi menjadi beban ekonomi.

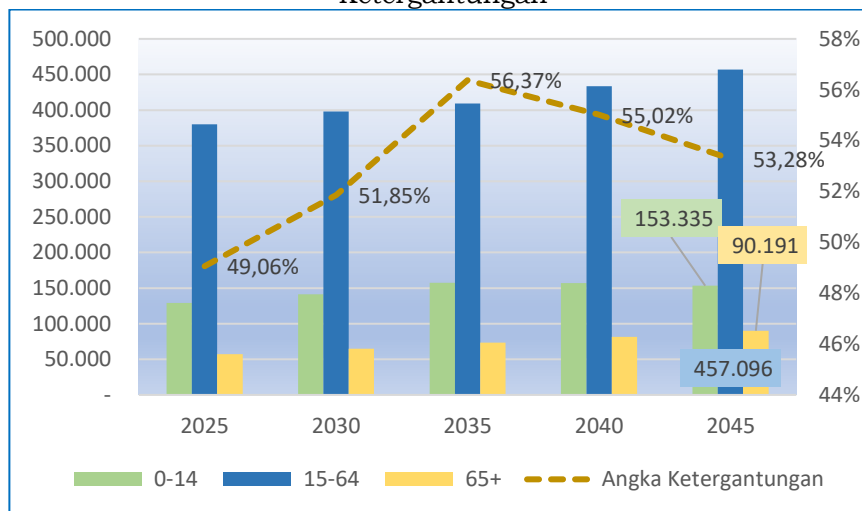
Tabel 2.11. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0 - 14 tahun	115.270	129.136	141.209	157.325	156.915	153.335
15 - 64 tahun	368.627	380.222	397.804	409.237	433.657	457.096
> 65 tahun	57.008	57.406	65.065	73.373	81.687	90.191
Angka ketergantungan	48,47	49,06	51,85	56,37	55,02	53,28

Sumber: diolah dari hasil proyeksi BPS Agam

Pada Tahun 2045 diproyeksikan angka ketergantungan sebesar 53,28. Angka ketergantungan tersebut meningkat seiring pertambahan penduduk, terutama dipengaruhi oleh peningkatan penduduk usia 65 tahun keatas. Dalam periode 2023 hingga 2045 penduduk usia 65 tahun keatas diproyeksikan akan menjadi 90.191 jiwa, bertambah hingga 76 persen atau hampir dua kali lipat. Sementara penduduk usia 0-14 tahun diproyeksi akan bertambah 25 persen ditahun 2045 menjadi 153.335 jiwa. Lebih lanjut, pertumbuhan penduduk usia 0-14 tahun akan mengalami perlambatan di periode 2040 hingga 2045. Perlambatan tersebut diproyeksikan sejalan dengan proyeksi tingkat fertilitas (*total fertility rate*) yang turun hingga angka 2,22 di tahun 2045.

Grafik 2.12. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan



Sumber: diolah dari hasil proyeksi BPS Agam

Disisi lain, proyeksi angka penduduk usia produktif semakin tinggi di Tahun 2045 menjadi 457.096 jiwa. Secara persentase penduduk usia produktif mencapai 65,45 persen dari total penduduk. Artinya Kabupaten Agam mendapatkan bonus demografi yang cukup besar. Bonus demografi menjadi kesempatan yang baik bagi suatu daerah. Ketika jumlah penduduk usia produktif meningkat, maka jumlah potensial tenaga kerja dalam suatu perekonomian juga akan meningkat. Para pekerja ini akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, menghasilkan pendapatan dan menggerakkan perekonomian dengan pengeluaran belanja yang dilakukan. Sehingga dengan jumlah penduduk usia produktif yang meningkat, maka peluang pertumbuhan ekonomi semakin besar. Tetapi, jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi

kinerja ekonomi daerah. PDRB menjelaskan tentang ukuran ekonomi pada daerah tertentu yang direpresentasikan oleh nilai output yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi baik dari sisi produksi dan pengguna akhir. Sehingga, analisis perkembangan PDRB sangat penting untuk memahami aktivitas ekonomi dan ukuran ekonomi daerah. Kapasitas ekonomi daerah berbanding lurus dengan PDRB-nya, Dimana PDRB yang lebih besar menunjukkan potensi ekonomi yang lebih besar pula.

Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap nilai PDRB Kabupaten Agam. Baik PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan ADHK (Atas Dasar harga Konstan) mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun demikian, memasuki periode “*new normal*” PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Agam kembali meningkat seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi. Pasca pandemi, peningkatan PDRB ADHB terlihat lebih tinggi dibanding PDRB ADHK. Perbedaan ini menunjukkan kenaikan harga yang menjadi bagian dari perhitungan PDRB ADHB.

Grafik 2.13. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Agam



Sumber: BPS, 2025

Sektor utama yang berkontribusi pada PDRB ADHB Kabupaten Agam adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pada Tahun 2020, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang Rp 6,1 triliun dari PDRB. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menjadi kontributor terbesar kedua menyumbang sebesar p 3,8 triliun. Pasca pandemi, nilai PDRB kedua sektor ini kembali meningkat secara stabil. Secara sama, PDRB ADHK

Kabupaten Agam juga didominasi oleh kedua sektor tersebut. Selain itu, pola kontribusi kedua sektor ini terhadap PDRB ADHK juga terlihat sama jika dibandingkan dengan PDRB ADHB.

Tabel 2.12.
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Agam Periode 2020 - 2024 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.113,6	6.331,3	6.867,4	7.378,2	7.906,6	4.350,7	4.496,2	4.595,7	4.738,0	4.823,0
B. Pertambangan dan Penggalian	748,3	778,9	838,1	949,6	999,7	504,0	518,9	534,8	554,8	579,8
C. Industri Pengolahan	1.981,9	2.121,7	2.389,8	2.677,7	2.891,0	1.596,0	1.640,8	1.729,3	1.843,4	1.906,7
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,0	5,2	5,5	5,9	6,2	3,4	3,5	3,7	3,9	4,1
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,2	10,5	11,3	12,0	13,4	7,5	7,6	7,8	8,0	8,7
F. Konstruksi	1.893,3	1.969,1	2.203,3	2.439,3	2.537,6	1.088,7	1.105,3	1.149,3	1.218,4	1.256,0
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.838,6	4.058,6	4.721,6	5.146,1	5.528,5	2.752,7	2.901,9	3.057,3	3.189,2	3.350,4
H. Transportasi dan Pergudangan	1.296,8	1.370,9	1.538,8	1.745,7	1.858,8	941,0	981,8	1.020,5	1.079,1	1.161,2
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	159,3	170,8	208,3	237,4	248,2	90,4	94,2	110,1	119,1	124,9
J. Informasi dan Komunikasi	1.187,0	1.273,2	1.451,8	1.581,4	1.682,4	1.082,1	1.145,6	1.233,5	1.319,9	1.400,3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	245,9	275,2	301,6	315,8	336,0	173,8	187,6	195,0	200,3	212,0
L. Real Estate	387,9	402,9	449,7	513,4	565,3	269,1	275,9	292,1	311,1	327,7
M,N Jasa Perusahaan	7,4	7,5	8,2	9,4	9,9	5,4	5,5	5,9	6,3	6,5
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	961,1	1.045,2	1.101,2	1.174,1	1.279,5	556,4	559,4	554,3	565,9	616,3
P. Jasa Pendidikan	1.123,7	1.165,0	1.314,7	1.405,6	1.477,0	706,0	720,7	763,7	778,5	802,5
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	260,4	287,6	316,5	349,3	380,5	177,7	188,2	198,2	208,9	221,0
R,S,T,U Jasa Lainnya	156,1	166,9	196,6	221,7	254,9	104,4	109,5	121,2	131,1	145,6
Produk Domestik Regional Bruto	20.376	21.440	23.924	26.162	27.975	14.409	14.942	15.572	16.276	16.946

Sumber: BPS, 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Agam relatif tidak berubah selama lima tahun terakhir. Secara konsisten, perekonomian Kabupaten Agam didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Masing-masing sektor tersebut berkontribusi sebesar 30% dan 19% secara rata-rata selama Tahun 2020 – 2024 pada PDRB ADHK. Pola yang sama juga terlihat pada PDRB harga berlaku. Sektor lain yang juga berkontribusi cukup besar adalah industri pengolahan dan konstruksi dengan kontribusi sebesar 10%

dan 11% masing-masingnya pada PDRB ADHK. Sementara itu kontribusi perekonomian tersier yang mencakup semua sektor jasa-jasa masih sangat kecil. Setidaknya, hal ini mengindikasikan dua hal yaitu, (a) perekonomian Kabupaten Agam masih mencirikan perekonomian agraris, (b) selama ini Kabupaten Agam cenderung menerapkan model pertumbuhan tidak seimbang (*unbalance growth*) yang fokus pada sektor kunci.

Tabel 2.13.

Kontribusi PDRB Sektoral ADHB dan ADHK Kabupaten Agam Periode 2020 - 2024

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28
B. Pertambangan dan Penggalan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
C. Industri Pengolahan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Konstruksi	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
H. Transportasi dan Pergudangan	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
J. Informasi dan Komunikasi	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
L. Real Estate	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
M,N Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
P. Jasa Pendidikan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Produk Domestik Regional Bruto	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS, 2025

Selama periode 2020-2024, Kabupaten Agam memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,17% per tahun. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Agam mencapai angka 4,12 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam memiliki pola yang sama dengan Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam relatif lebih tahan (*resilience*) terhadap pandemi. Hal ini terbukti dari nilai pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan

Provinsi Sumatera Barat. Ketahanan perekonomian Kabupaten Agam terhadap pandemi dipengaruhi oleh struktur perekonomian dimana pandemi covid tidak terlalu sensitif terhadap sektor pertanian dibandingkan sektor sekunder dan tersier. Namun demikian, pada masa pemulihan (*recovery*), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam sedikit lebih rendah dibanding capaian provinsi Sumatera Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam yang sejalan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Agam dipengaruhi secara kuat oleh perekonomian nasional secara keseluruhan dan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun provinsi berdampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Agam. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Agam harus memastikan keselarasan antara strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi makro daerah dan agenda ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap berpijak pada potensi ekonomi daerah.

Grafik 2.14. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Agam dengan Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BPS, 2025

b. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan ekonomi dan/atau standar hidup. PDRB per kapita yang lebih tinggi menandakan tingkat kesejahteraan atau standar hidup yang lebih besar di wilayah tertentu. Dalam kasus Kabupaten Agam, analisis PDRB per kapita dikategorikan

menjadi PDRB nominal per kapita dan PDRB riil per kapita. PDRB nominal digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Agam secara keseluruhan tanpa terlibat dalam pembelian barang dan jasa aktual (potensi permintaan), sedangkan PDRB per kapita riil digunakan untuk mengukur daya beli konsumen untuk berbagai jenis barang dan jasa pada titik harga yang beragam (permintaan efektif).

Secara rata-rata PDRB perkapita Kabupaten Agam masih berada dibawah Provinsi Sumatera Barat. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, PDRB perkapita harga berlaku Kabupaten Agam kembali meningkat secara perlahan sejak tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2024 PDRB per kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. PDRB perkapita 2024 mencapai 50,02 juta rupiah meningkat dari 47,41 juta, sementara PDRB perkapita Sumatera Barat sebesar 57,05 juta.

Grafik 2.15. Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Agam dengan Provinsi Sumatera Barat



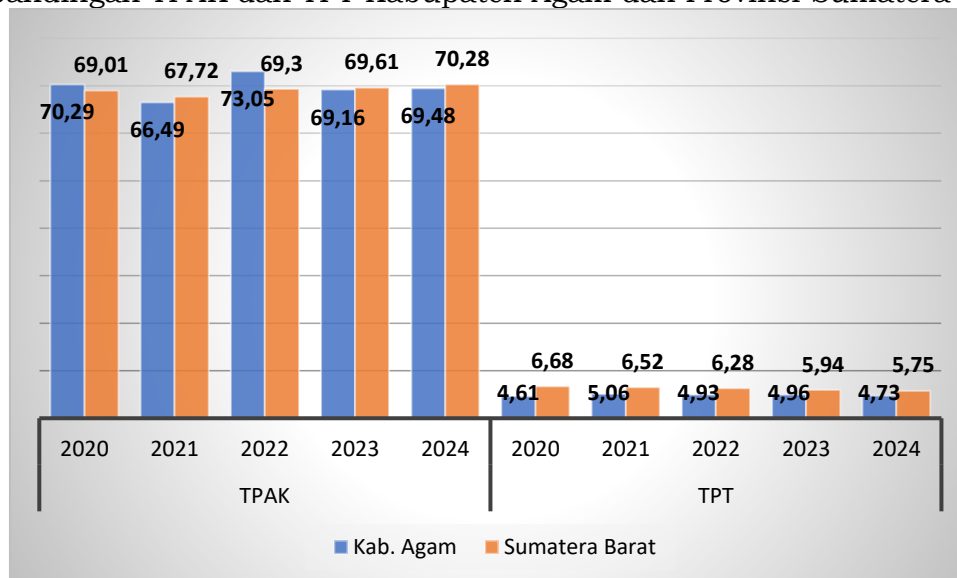
Sumber: BPS, 2025

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjelaskan tentang rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk usia kerja). TPAK menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif atau dikenal juga dengan penawaran tenaga kerja (labor supply) pada suatu wilayah. TPAK Kabupaten Agam selama lima tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pada Tahun 2020 TPAK

Kabupaten Agam adalah 70,29 persen yang berarti sebesar 70,29 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja. Penawaran tenaga kerja mengalami fluktuasi, dan pada tahun 2024 TPAK Kabupaten Agam turun menjadi 69,48 persen. Sementara TPAK Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 70,28 persen.

Grafik 2.16.
Perbandingan TPAK dan TPT Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BPS, 2025

Peningkatan TPAK setiap tahunnya seharusnya diikuti oleh peningkatan penduduk yang bekerja. Peningkatan TPAK yang tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang bekerja akan menjadi beban bagi perekonomian atau lebih dikenal dengan pengangguran. Grafik dibawah ini menunjukkan korelasi negatif antara TPAK dan Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan TPAK sejalan dengan peningkatan atau penurunan jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Agam. Walaupun demikian, perlu peningkatan dalam pengelolaan aspek ketenagakerjaan supaya tren peningkatan TPAK diikuti oleh tren penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) secara konsisten.

d. Gini Rasio

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan penting menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan ekstrim menunjukkan ketidakadilan. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi salah satu indikator untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. *Gini Ratio* dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : tingkat Ketimpangan Tinggi (*Gini Ratio* 0,50-0,70), tingkat Ketimpangan Sedang (*Gini Ratio* 0,35-0,50), dan tingkat Ketimpangan Rendah (*Gini Ratio* 0,20-0,35).

Pada Tahun 2024 ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Agam turun dibanding kondisi tahun sebelumnya. Hal ini tergambar dengan semakin turunnya angka gini rasio dari 0,255 di Tahun 2023 menjadi 0,249 pada Tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat Agam berada pada tingkat ketimpangan rendah. Sementara ditingkat provinsi, angka gini rasio juga mengalami peningkatan dari 0,280 ditahun 2023 menjadi 0,283 pada tahun 2024. Perkembangan Gini Rasio tahun 2021-2024 disajikan pada berikut.

Grafik 2.17. Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun

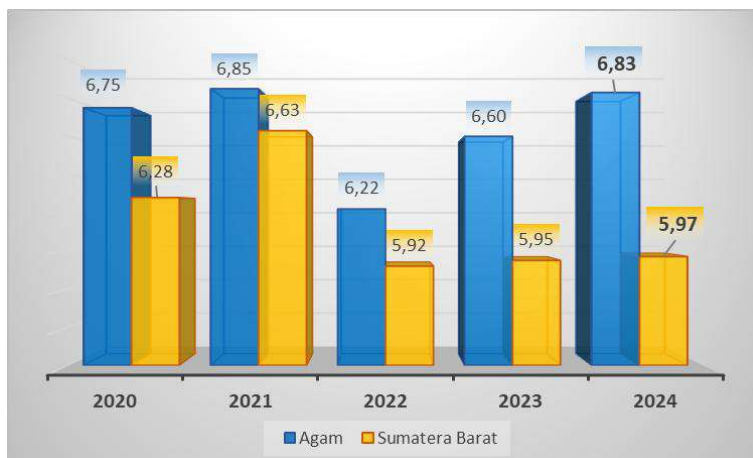


e. Penduduk Miskin dan Ketimpangan Pendapatan

Garis kemiskinan di Kabupaten Agam meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Hal ini merupakan salah satu dampak dari kenaikan harga makanan dan bukan makanan yang menjadi komponen penyusun garis kemiskinan. Berdasarkan nilai garis kemiskinan yang ditetapkan, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Fluktuasi jumlah penduduk miskin berbanding lurus dengan fluktuasi persentase penduduk miskin. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2024 dari 33,10 ribu orang menjadi 34,82 ribu orang. Sementara persentase penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan dari 6,75 persen pada Tahun 2020 menjadi 6,83 persen pada Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Agam sedikit lebih tinggi dengan pola pergerakan yang sama. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam sedikit lebih rendah dibanding Provinsi Sumatera Barat, dengan pola pergerakan yang berbeda. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat secara konsisten terlihat menurun selama lima tahun terakhir, sementara itu ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam relative berfluktuasi. Korelasi antara persentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Agam mengimplikasikan bahwa terdapat kesamaan distribusi pendapatan yang direpresentasikan oleh relatif meratanya distribusi pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran rendah, 40 persen penduduk dengan pengeluaran menengah, dan 20 persen penduduk dengan pengeluaran tinggi. Namun demikian, pemerataan distribusi tersebut secara *aggregate* masih berada dibawah pengeluaran Sumatera Barat.

Grafik 2.18. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BPS, 2025

Potret terhadap kemiskinan juga bisa dideskripsikan melalui indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan (P2) kemiskinan. Nilai P1 menggambarkan perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Nilai P1 yang lebih rendah menunjukkan konvergensi pengeluaran rata-rata penduduk miskin menuju kemiskinan, disertai dengan semakin meratanya pendapatan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Nilai P2 menjelaskan tentang penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai P1 Kabupaten Agam di Tahun 2024 sebesar 0,50 dan nilai P2 sebesar 0,07. Terlihat ada kemajuan dalam penurunan nilai P2 di Kabupaten Agam selama lima tahun terakhir. Kelangsungan upaya untuk mengurangi kedalaman kemiskinan harus tetap dipertahankan bahkan lebih dioptimalkan lagi melalui penerapan strategi dan kebijakan ekonomi yang inklusif bagi kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Selain itu, kebijakan yang tepat sasaran dan pemberdayaan ekonomi, terutama di daerah-daerah dengan konsentrasi kemiskinan yang tinggi, sangat diperlukan untuk mendukung rumah tangga yang selama ini termarginalkan.

Grafik 2.19. Perbandingan P1 dan P2 Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat

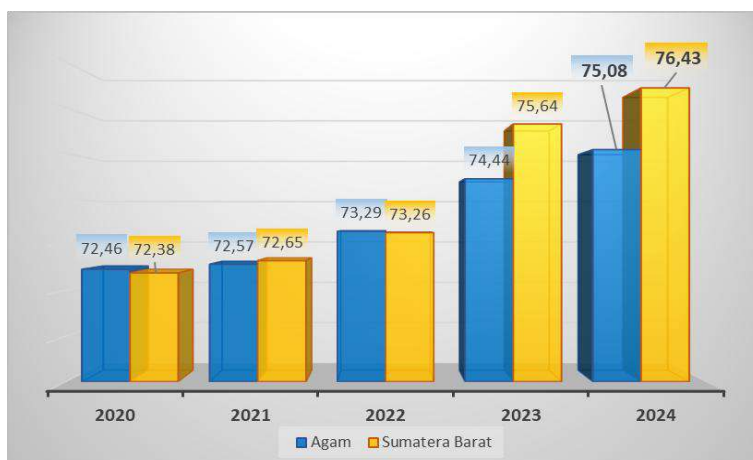


Sumber: BPS, 2025

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komprehensif pencapaian keseluruhan aspek fundamental pembangunan manusia yakni panjang umur dan sehat, memperoleh pengetahuan, dan mempertahankan standar hidup yang layak. IPM merupakan rata-rata geometrik dari indeks yang dinormalisasi untuk tiga dimensi tersebut. Dimensi kesehatan ditentukan oleh angka harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan dinilai dengan menggunakan rata-rata lama sekolah pada orang dewasa berusia 25 tahun ke atas, serta harapan lama sekolah anak pada usia mulai bersekolah. Dimensi standar hidup diukur berdasarkan pendapatan per kapita per bulan. Di Indonesia, IPM berfungsi sebagai determinan dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah. IPM Kabupaten Agam tumbuh secara konsisten selama periode 2020 – 2024. Pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Agam adalah 72,46 dan naik menjadi 75,08 pada Tahun 2024. Berdasarkan klasifikasinya, IPM Kabupaten Agam lima tahun terakhir termasuk dalam kategori tinggi.

Grafik 2.20. Perkembangan dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam



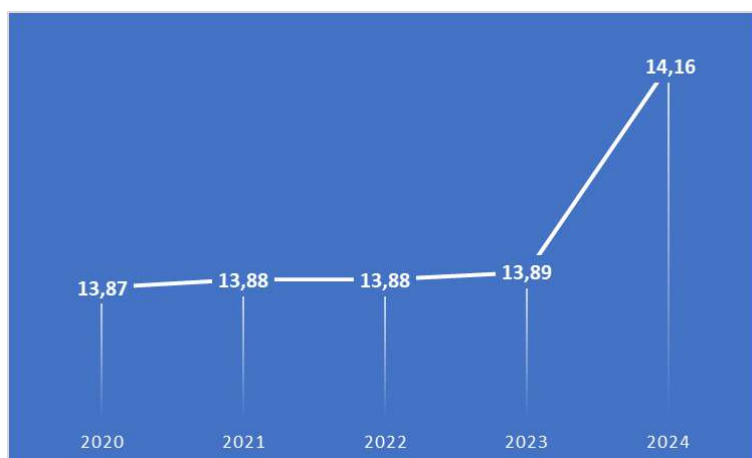
Sumber: BPS, 2025

Dua indikator IPM penyusun dimensi pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka HLS dan RLS masing-masingnya didefinisikan sebagai kemungkinan anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu dan tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah.

1) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun keatas di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Agam pada Tahun 2024 adalah sebesar 14,16 tahun, meningkat dibanding Tahun 2023 sebesar 13,89 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan diikuti oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 14,16 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Diploma III. Faktor faktor yang mempengaruhi harapan lama sekolah meliputi berbagai sektor, baik kondisi ekonomi masyarakat, akses dan kualitas layanan pendidikan, maupun dukungan kesehatan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu upaya peningkatan harapan lama sekolah seiring sejalan dengan upaya peningkatan perekonomian, pendidikan dan juga kesehatan.

Grafik 2.21. Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Agam

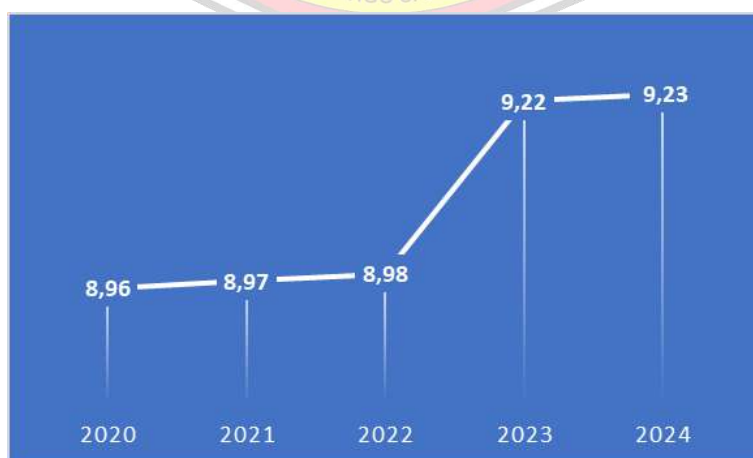


Sumber : BPS, 2025

2) Indikator Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah atau *years of schooling* digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Agam pada kurun waktu Tahun 2020-2024 cenderung meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2024 rata-rata lama sekolah kabupaten Agam mencapai 9,23 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Agam disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.22 : Rata-rata Lama Sekolah Kab. Agam



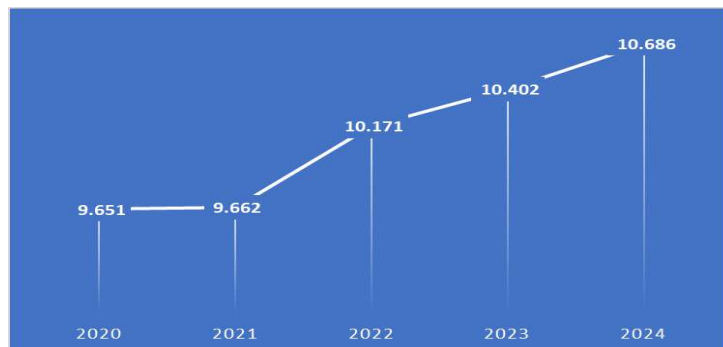
Sumber : BPS, 2025

Capaian IPM pada dimensi pendidikan dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang paling dipengaruhi oleh: kemampuan individu memperoleh pendidikan dan ketersediaan pendidikan bagi masyarakat. Sehingga, akselerasi laju pertumbuhan HLS dan RLS dapat dilakukan dengan membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui pemerataan pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari sisi penyediaan, pemerataan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dapat diwujudkan dengan memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas baru, pelaksanaan inisiatif revitalisasi sekolah, peningkatan laboratorium, dan peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik. Secara tidak langsung, program ini juga menjadi solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran pada tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Agam.

3) Pengeluaran Per Kapita

Dimensi ekonomi IPM dinilai berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Rata-rata pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran perkapita Kabupaten Agam dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran perkapita masyarakat Agam mengalami lonjakan dari 9,65 juta pada Tahun 2020 menjadi 10,68 juta rupiah ditahun 2024. Hal ini memberikan sinyal positif setelah terjadinya resesi ekonomi di Tahun 2021. Perkembangan data nilai pengeluaran perkapita masyarakat di Kabupaten Agam pada kurun waktu Tahun 2021-2024 sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.23 : Pengeluaran Per Kapita pertahun Penduduk Kabupaten Agam



Sumber : BPS, 2025

2.1.2.2. Kesehatan

a. Usia Harapan Hidup (tahun)

Usia Harapan Hidup (UHH) mencerminkan rata-rata harapan hidup seseorang sejak lahir dan merupakan salah satu indikator utama kualitas hidup dan layanan kesehatan di suatu daerah. Di Kabupaten Agam, nilai UHH menunjukkan tren meningkat dari 73.79 tahun pada 2020 menjadi 74.39 tahun pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan pelayanan kesehatan, kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, serta penurunan angka kematian dini. Kontribusi signifikan berasal dari pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis, dan program promotif-preventif oleh Dinas Kesehatan.

Grafik 2.24 : Usia Harapan Hidup Kabupaten Agam



Sumber : BPS (2025)

b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) mengukur jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan merupakan indikator penting dalam menilai akses serta kualitas layanan kesehatan ibu. Nilai AKI Kabupaten Agam dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. AKI Tahun 2020 sebesar 124.7 dan meningkat menjadi 285.5 pada Tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 189.04 pada 2024. Lonjakan ini sebagian besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat akses ke fasilitas kesehatan serta keterlambatan penanganan komplikasi persalinan.

Grafik 2.25 : Angka Kematian Ibu Kabupaten Agam



Sumber : BPS (2025)

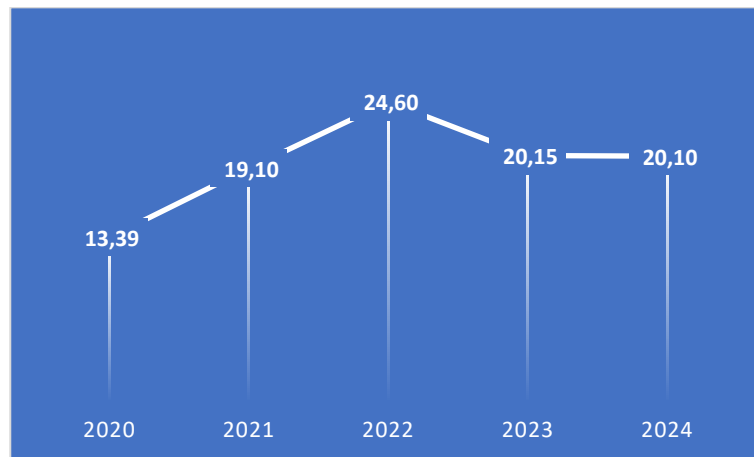
Penurunan setelah Tahun 2021 mengindikasikan pemulihan sistem kesehatan dan efektivitas intervensi seperti pelatihan bidan desa, peningkatan sarana transportasi darurat. Untuk menurunkan AKI secara berkelanjutan, dibutuhkan revitalisasi Posyandu, program ibu hamil risiko tinggi, dan monitoring ketat oleh tim pendamping keluarga.

c. Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek)

Prevalensi Stunting mengukur proporsi balita yang mengalami kekurangan gizi kronis dan pertumbuhan terhambat. Data Kabupaten Agam menunjukkan peningkatan dari 19,1% pada 2021 menjadi 24,6% di 2022, namun mengalami penurunan ke 20,1% pada 2024. Angka ini masih di atas ambang batas WHO sebesar 20%. Masih tinggi angka stunting

disebabkan oleh dampak sosial-ekonomi pasca pandemi, keterbatasan akses pangan bergizi, serta kurangnya edukasi gizi pada keluarga. Untuk itu diperlukan integrasi lintas sektor dalam upaya pencegahan stunting seperti serta penguatan data balita gizi buruk.

Grafik 2.26 : Prevalensi Stunting (SSGI) Kabupaten Agam

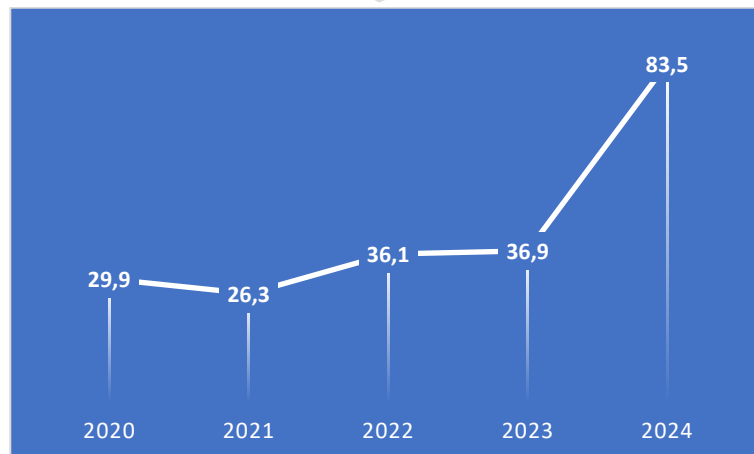


Sumber : Dinas Kesehatan (2025)

- d. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis mengukur sejauh mana sistem kesehatan berhasil menemukan dan menangani kasus TB. Data menunjukkan capaian meningkat drastis dari 29,9% pada Tahun 2020 menjadi 83,5% pada Tahun 2024, setelah mengalami stagnasi di kisaran 36% pada 2022-2023.

Grafik 2.27 : Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis Kabupaten Agam



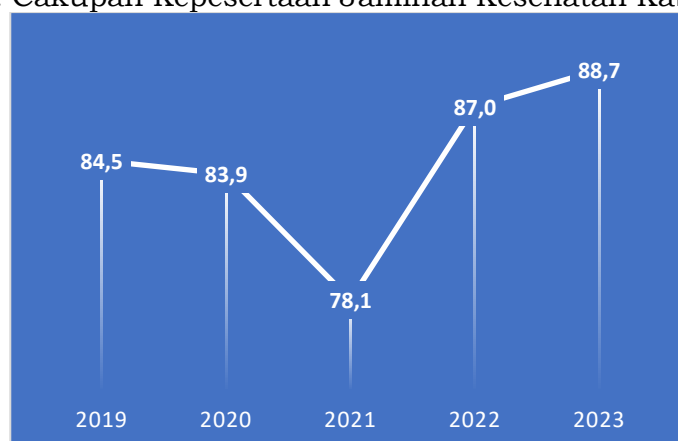
Sumber : Dinas Kesehatan (2025)

Kenaikan signifikan ini mengindikasikan penguatan program surveilen TB melalui pelibatan kader kesehatan dan penggunaan teknologi diagnostik seperti TCM (Tes Cepat Molekuler). Disamping itu kemitraan dengan klinik swasta dan peningkatan edukasi terhadap masyarakat juga berperan besar. Untuk keberlanjutan, Kabupaten Agam perlu menargetkan skrining kelompok risiko tinggi dan memperluas sistem pelaporan berbasis elektronik.

e. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional mengacu pada jumlah masyarakat yang memiliki akses pada program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada Tahun 2019, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Agam mencapai 84,5 persen, yang menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif tinggi dalam program jaminan kesehatan nasional. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan bertahap dalam cakupan kepesertaan. Pada Tahun 2020, cakupan turun menjadi 83,9 persen, dan terus mengalami penurunan menjadi 78,1 persen pada Tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kebijakan atau program jaminan kesehatan, serta perubahan dalam kondisi ekonomi atau sosial yang mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap program tersebut. Pada Tahun 2023 cakupan kepesertaan kembali meningkat mencapai 88,7 persen, menandakan adanya tren positif dalam peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Grafik 2.28 : Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Agam



Sumber : Dinas Kesehatan (2025)

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk suatu wilayah dalam menyelesaikan pendidikan formalnya. Indikator ini mencerminkan tingkat aksesibilitas, kualitas, dan partisipasi dalam sistem pendidikan. Nilainya dari Tahun 2020 ke 2024 mengalami tren meningkat, dimana Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 sebesar 8,96 tahun dan meningkat menjadi 9,23 Tahun pada Tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan semakin baiknya akses dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk tenaga pendidik yang berkualitas.

Grafik 2.29 : Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Agam



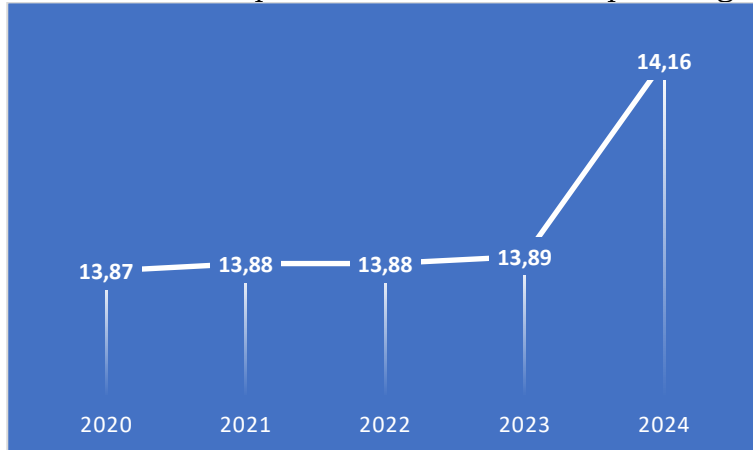
Sumber : BPS (2025)

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah menggambarkan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Sejalan dengan angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah di kabupaten Agam juga mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir dari 13,87 Tahun di 2020 menjadi 14,16 Tahun di 2024. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat diharapkan minimal setara dengan jenjang Diploma I atau Diploma II. Sejalan dengan rata-rata lama sekolah, peningkatan ini menggambarkan semakin baiknya akses dan kesadaran

masyarakat terhadap pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kemampuan ekonomi yang semakin baik.

Grafik 2.30 : Harapan Lama Sekolah Kabupaten Agam



Sumber : BPS (2025)

c. Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV, S1, S2 dan S3. Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Di Tahun 2024 proporsi penduduk berkualifikasi berpendidikan tinggi di Agam mencapai 11,91 persen dari total penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Total sebanyak 38.793 penduduk yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi, dengan rincian sebanyak 3.494 orang berijazah D1 dan D2, 7.867 orang berijazah D3, 26.167 orang berijazah S1, 1218 orang berijazah S2 dan 47 orang berijazah S3. Berikut disajikan penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Agam.

Tabel 2.14 : Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Agam

Kecamatan	D I-II	D III	S 1	S 2	S 3
Tanjung Mutiara	145	261	854	17	1
Lubuk Basung	668	1.409	4.540	251	6
Tanjung Raya	226	489	1.683	40	2
Matur	203	203	758	19	0
IV Koto	155	323	1.009	46	4
Banuhampu	311	783	2.682	159	10
Ampek Angkek	408	1.163	3.587	199	10
Baso	175	662	1.968	93	3
Tilatang Kamang	319	890	2.817	165	2
Palupuh	62	103	370	8	0
Palembayan	169	253	865	13	1
Sungai Pua	130	321	1.130	42	3
Ampek Nagari	150	188	678	22	0
Candung	166	374	1.552	78	3
Kamang Magek	163	378	1.416	59	2
Malalak	44	67	258	7	0
Total	3.494	7.867	26.167	1218	47

Sumber : BPS (2025)

- d. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi

Tingkat literasi di Kabupaten Agam dapat dilihat melalui dua pendekatan utama yaitu tingkat melek huruf dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Berdasarkan data BPS, tingkat melek huruf di Kabupaten Agam tergolong sangat tinggi. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Agam pada Tahun 2023 mencapai 99,66 persen dan pada Tahun 2024 sebesar 99,97 persen. Ini berarti sebagian besar penduduk Agam secara fungsional dapat membaca dan menulis. Sementara Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mengukur tingkat pembangunan literasi dikalangan masyarakat Indonesia untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana masyarakat memiliki akses, kemampuan, dan kemauan dalam memanfaatkan sumber-sumber literasi, terutama perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Agam pada Tahun 2023 mencapai 47,98 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 72,92. Capaian Tahun 2024 ini menempatkan Agam dalam kategori "Tinggi",

menunjukkan bahwa Kabupaten Agam telah mencapai kemajuan signifikan dalam pembangunan literasi masyarakat.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Cakupan jaminan ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kab. Agam pada Tahun 2024 terdapat 55.945 peserta aktif jaminan ketenagakerjaan. Peserta terbanyak berasal dari kategori tenaga kerja penerima upah atau pekerja sektor formal (PU) yang mencapai 42.019 orang. Sementara tenaga kerja bukan penerima upah sebanyak 12.640 orang. Pada jasa konstruksi peserta ketenagakerjaan sebanyak 1.286 orang. Cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan masih rendah yaitu sebesar 19,92 persen. Sementara sesuai amanat Permendagri no 15 tahun 2024, pemerintah daerah diarahkan agar dapat meningkatkan Cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan minimal 20 persen.

Tabel 2.15 : Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Agam

Angkatan Kerja	Kepesertaan			Peserta Aktif	Persentase
	PU	BPU	Jasa Konstruksi		
280.902	42.019	12.640	1.286	55.945	19,92%

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan (2025)

b. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Disabilitas merupakan kondisi keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensoris yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Disabilitas dapat bersifat permanen dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa orang-orang dengan disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh

tetap atau buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Agam tahun 2022 mencapai 19,53 persen, atau secara jumlah tercatat sebanyak 639 penyandang disabilitas. Tahun 2023 capaian indikator tersebut turun menjadi 9,3 persen atau 198 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal.

Tabel 2.16 Persentase Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal Kabupaten Agam

Uraian	2022	2023
Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	19,53	9,3
Jumlah penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	639	198

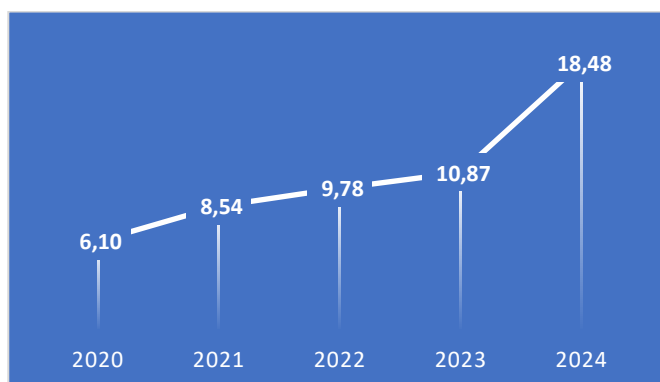
Sumber: BPS Sumatera Barat 2024

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Persentase Level Nagari Madani

Peran agama Islam dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Agam sangatlah sentral dan mendasar. Agama tidak hanya menjadi keyakinan spiritual, tetapi juga membentuk sistem nilai, norma sosial, hingga tata pemerintahan adat. Salah satu program yang telah lama dijalankan dalam mensinergikan peran agama, budaya dan adat istiadat adalah Gerakan Nagari Madani. Untuk menggambarkan sejauh mana keberhasilan Gerakan nagari madani tersebut, dibuat pengukuran dengan menggunakan beberapa kriteria yang nantinya akan membagi nagari ke beberapa level, dimana nantinya diharapkan semua nagari mencapai level nagari madani. Level nagari madani meningkat setiap tahunnya.

Grafik 2.31 : Persentase Nagari Madani Level 5 Kabupaten Agam



Sumber : DPMN Agam (2025)

Pada Tahun 2020 terdapat 5 nagari yang sudah mencapai level nagari madani, atau secara persentase sebesar 6,10 persen. Jumlah ini terus meningkat hingga ditahun 2024 terdapat 13 nagari atau 18.4 persen yang sudah mencapai level nagari madani.

b. Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Persentase cagar budaya yang dilestarikan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak dari total cagar budaya yang ada telah dilakukan upaya pelestarian oleh pemerintah. Cagar budaya dianggap dilestarikan jika telah dilakukan upaya seperti registrasi dan penetapan hukum, pemeliharaan fisik (restorasi, konservasi) dan pengamanan dari kerusakan atau alih fungsi. Berdasarkan data dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Agam, pada Tahun 2024 terdapat 52 situs cagar budaya yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati. Situs tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Agam. Namun dalam perkembangannya, belum semua situs tersebut terpelihara secara fisik.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

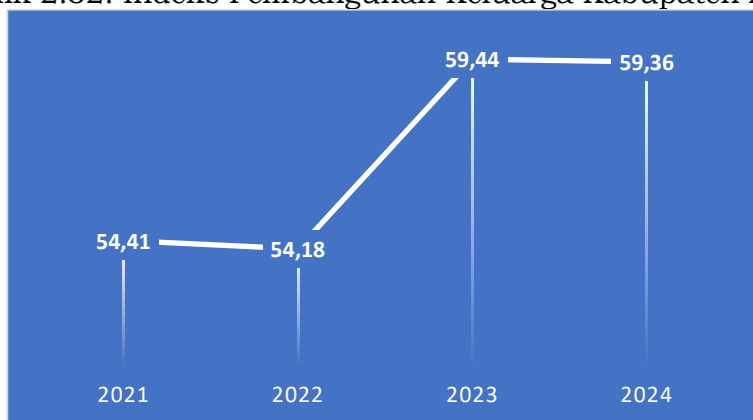
Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

a. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga di Indonesia. Indeks ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memantau dan mengevaluasi kondisi keluarga di berbagai aspek kehidupan. IPK digunakan sebagai alat untuk membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang memerlukan intervensi program kesejahteraan keluarga. Berdasarkan data Sistem Informasi Peringatan Dini Penduduk (SiPerindu) capaian IPK Kabupaten Agam di Tahun 2024 sebesar 59,44. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2021 angka IPK sebesar 54,41.

Grafik 2.32: Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Agam

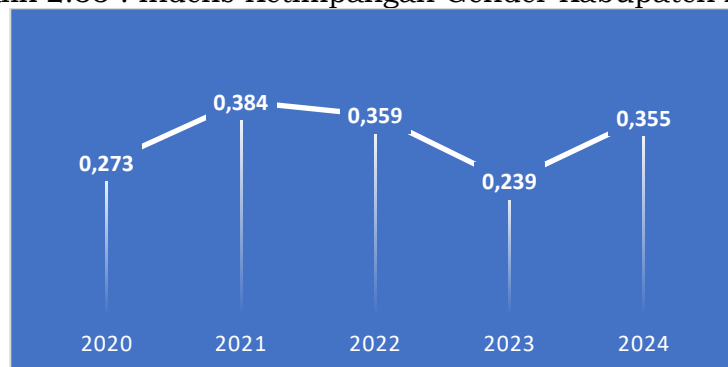


Sumber : BPS (2025)

b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan atau ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. Indeks ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. IKG dapat dihitung dengan berbagai cara, tetapi pada umumnya, nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna antara gender, sementara nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin besar di mana satu gender mendominasi yang lain. Pada tahun 2020 hingga 2024 angka IKG Kabupaten Agam bergerak naik dari 0,273 menjadi 0,355 di Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa ada perubahan dalam kondisi kesetaraan gender di Kabupaten Agam selama periode tersebut.

Grafik 2.33 : Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Agam

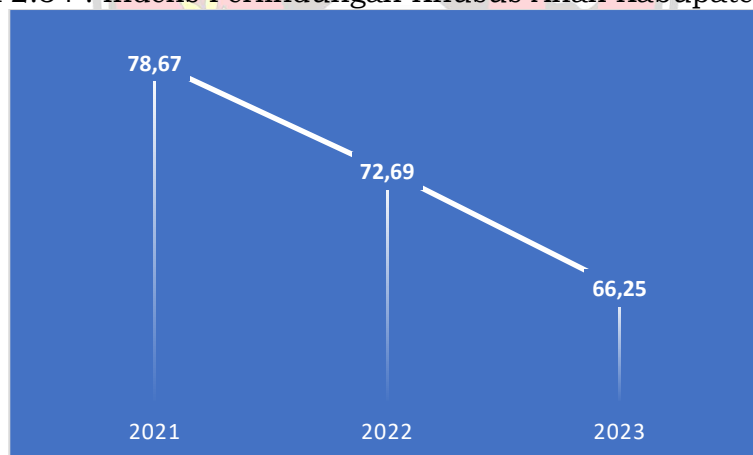


Sumber : BPS (2025)

c. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perlindungan yang diberikan kepada anak-anak, terutama mereka yang memerlukan perhatian khusus. Indeks ini membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia.

Grafik 2.34 : Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Agam



Sumber : BPS (2025)

IPKA berfungsi sebagai panduan dalam mengevaluasi implementasi perlindungan anak secara nasional dan regional, sehingga kebijakan dapat disesuaikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan anak-anak. Data capaian dalam tiga terakhir menunjukkan terjadinya penurunan, dimana pada Tahun 2021 nilai Indeks Perlindungan Khusus Anak sebesar 78,67 dan turun menjadi 66,25 pada Tahun 2024. Hal ini

menunjukkan adanya penurunan kinerja dan efektivitas perlindungan terhadap anak-anak dalam kondisi khusus selama tiga tahun terakhir.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan Penduduk (Dependency Ratio) adalah ukuran yang menggambarkan hubungan antara kelompok usia yang tidak produktif dengan kelompok usia produktif. Usia non produktif adalah penduduk berumur 0-14 tahun dan penduduk berumur diatas 65 tahun. Sementara usia produktif adalah penduduk berumur 15-64 tahun. Rasio ini mencerminkan jumlah orang yang tidak produktif secara ekonomi seperti anak-anak yang masih tergantung pada orang tua atau lansia yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah orang yang diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Rasio ketergantungan penduduk yang tinggi dapat menunjukkan beban ekonomi yang lebih besar, karena populasi yang bekerja harus mendukung lebih banyak orang yang tidak bekerja. Di sisi lain, rasio yang lebih rendah dapat menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi jika populasi usia produktif dapat dimanfaatkan secara efektif.

Grafik 2.35 : Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Agam



Sumber : BPS (2025)

Rasio Ketergantungan Penduduk Agam Tahun 2024 adalah sebesar 49,06. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban

ekonomi 49 penduduk usia non produktif. Angka ini meningkat dalam lima tahun terakhir, dimana pada Tahun 2020 rasio ketergantungan sebesar 48,57. Berikut disajikan rasio ketergantungan penduduk Agam Tahun 2020 sampai 2024.

b. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Lulusan Pendidikan Menengah merupakan penduduk yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA dan Lulusan Pendidikan Tinggi merupakan penduduk yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dari diploma hingga doktoral. Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. Sementara bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Grafik 2.36 : Persentase Pekerja Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kabupaten Agam



Sumber: BPS Sumatera Barat 2025 (diolah)

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi bergerak turun naik sepanjang tahun. Di Tahun 2019 persentasenya mencapai 77,38 persen, meningkat di Tahun

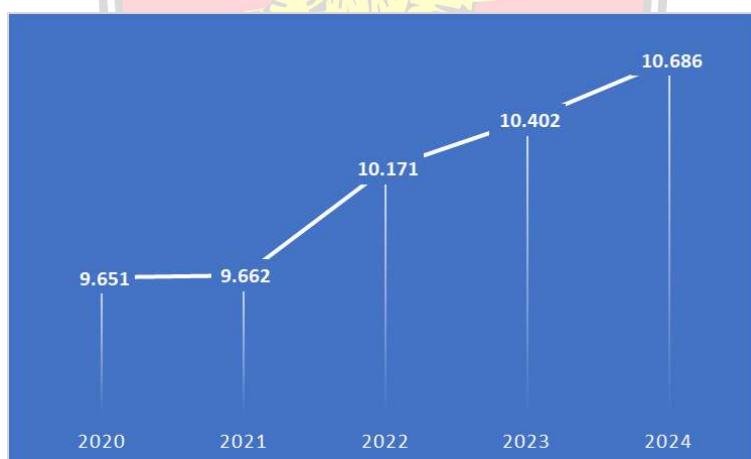
2021 menjadi 79,62 persen. Di Tahun 2023 capaiannya kembali turun menjadi 72,39 persen.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan

Dimensi ekonomi IPM dinilai berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Rata-rata pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran perkapita Kabupaten Agam dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran perkapita masyarakat Agam mengalami lonjakan dari 9,65 juta pada Tahun 2020 menjadi 10,68 juta rupiah di Tahun 2024. Hal ini memberikan sinyal positif setelah terjadinya resesi ekonomi di Tahun 2021. Perkembangan data nilai pengeluaran perkapita masyarakat di Kabupaten Agam pada kurun waktu Tahun 2021-2024 sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.37 : Pengeluaran Per Kapita per Bulan Penduduk Kabupaten Agam Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

b. Produktifitas Total Daerah

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa dari berbagai sektor lapangan usaha yang dihasilkan suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai PDRB Kabupaten

Agam ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) tahun 2024 mencapai 27,97 triliun rupiah, meningkat dari Tahun 2023 sebesar 26,16 triliun rupiah. Sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Agam Tahun 2024 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai 7,90 triliun atau secara persentase mencapai 28,26 persen. Selanjutnya diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai 5,52 triliun (19,76 persen), sektor Industri Pengolahan dengan nilai 2,89 triliun (10,33 persen) dan sektor Konstruksi dengan nilai 2,53 triliun (9,07 persen). Lebih rinci perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17 : Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kab. Agam ADHB (miliar)

SEKTOR LAPANGAN USAHA	2023		2024	
	Nilai PDRB (Miliar)	Nilai PDRB (Miliar)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.378,2	7.906,6	28,26	7,16
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.970,4	6.459,5	23,09	8,19
Kehutanan dan Penebangan Kayu	149,8	157,0	0,56	4,75
Perikanan	1.257,9	1.290,2	4,61	2,57
Pertambangan dan Penggalian	949,6	999,7	3,57	5,27
Industri Pengolahan	2.677,7	2.891,0	10,33	7,97
Pengadaan Listrik dan Gas	5,9	6,2	0,02	5,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,0	13,4	0,05	11,36
Konstruksi	2.439,3	2.537,6	9,07	4,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.146,1	5.528,5	19,76	7,43
Transportasi dan Pergudangan	1.745,7	1.858,8	6,64	6,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	237,4	248,2	0,89	4,53
Informasi dan Komunikasi	1.581,4	1.682,4	6,01	6,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	315,8	336,0	1,20	6,41
Real Estate	513,4	565,3	2,02	10,11
Jasa Perusahaan	9,4	9,9	0,04	5,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.174,1	1.279,5	4,57	8,98
Jasa Pendidikan	1.405,6	1.477,0	5,28	5,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	349,3	380,5	1,36	8,94
Jasa lainnya	221,7	254,9	0,91	15,01
Produk Domestik Regional Bruto	26.162	27.975	100,00	6,93

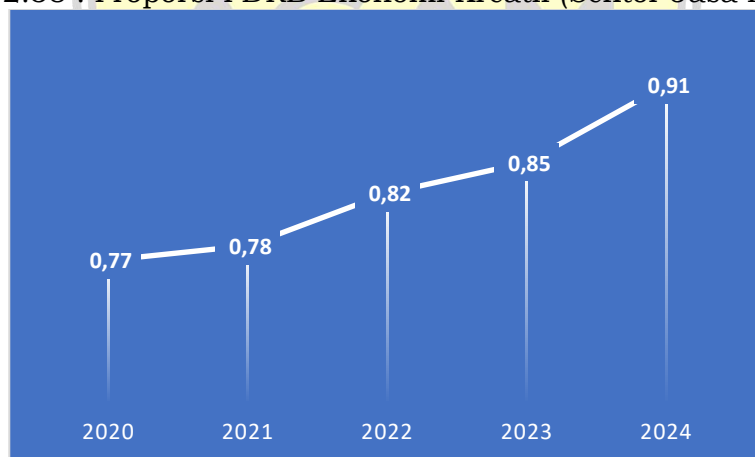
Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

c. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persentase kontribusi sektor Jasa Lainnya sebagai proksi dari sektor ekonomi kreatif terhadap total PDRB. Pada Tahun 2020 kontribusi sektor Ekonomi Kreatif ke PDRB sebesar 0,77 persen. Pada Tahun 2021, proporsi PDRB sektor Ekonomi

Kreatif mengalami peningkatan menjadi 0,78 persen. Walaupun peningkatannya tidak besar, ini menjadi indikasi awal pemulihan sektor kreatif di Kabupaten Agam. Dukungan pemulihan ekonomi dan adaptasi digital yang dilakukan beberapa pelaku usaha kreatif turut menjadi faktor dalam peningkatan ini. Pada Tahun 2023, kontribusi sektor Ekonomi Kreatif mencapai 0,85 persen dan kembali meningkat di Tahun 2024 menjadi 0,91 persen. Peningkatan ini mencerminkan peran sektor Ekonomi Kreatif yang semakin strategis dalam perekonomian Kabupaten Agam dan menandakan potensi besar sektor ini untuk terus berkembang.

Grafik 2.38 : Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (Sektor Jasa Lainnya)

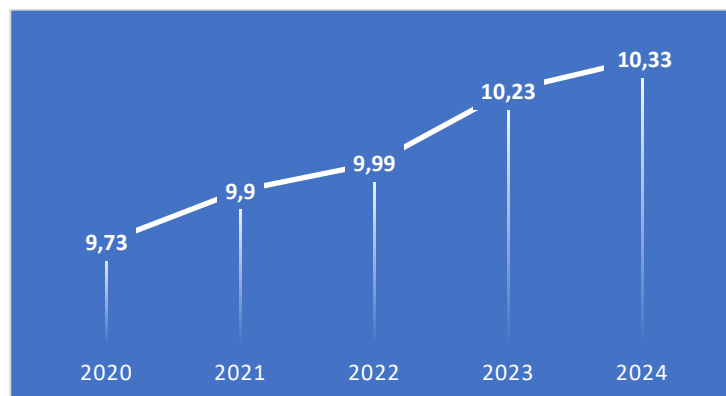


Sumber : BPS (2025)

d. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio industri pengolahan menggambarkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB. Dalam lima tahun terakhir rasio industri pengolahan Kabupaten Agam mengalami peningkatan yang signifikan, dimulai dari 9,73 pada Tahun 2020 dan meningkat hingga mencapai 10,33 pada Tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa industri pengolahan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Agam selama periode tersebut. Stabilitas ini mencerminkan keberlanjutan kegiatan ekonomi dalam sektor industri pengolahan.

Grafik 2.39 : Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Agam



Sumber : BPS (2025)

e. Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum mengukur kontribusi sektor akomodasi, termasuk restoran, hotel, kafe, dan usaha-usaha makanan dan minuman lainnya, terhadap total PDRB. Rasio sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Agam pada periode Tahun 2020 sampai 2024 bergerak naik, dari 0,78 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,89 ditahun 2024.

Grafik 2.40 : Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Agam



Sumber : BPS (2025)

Secara keseluruhan, fluktuasi dalam rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kabupaten Agam mencerminkan tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh sektor pariwisata dan industri makanan dan minuman dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan sosial, terutama sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun terjadi penurunan dan

fluktuasi, peningkatan pada Tahun 2023 menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan dalam sektor ini, yang penting untuk terus dipantau dan didukung untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Agam.

f. Rasio Kewirausahaan

Peningkatan rasio kewirausahaan bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Untuk mendorong peningkatan itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan seperti program pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, penerapan sertifikasi produk dan pengembangan produk, bantuan sarana prasarana produksi serta pendampingan untuk Usaha Mikro naik kelas. Capaian rasio kewirausahaan di Agam dihitung dengan pendekatan jumlah usaha mikro yang terdapat di Agam. Usaha mikro sebagai salah satu usaha yang dominan ditengah masyarakat Agam Tahun 2023 mencapai 17.449 unit. Jumlahnya naik cukup pesat dalam lima tahun terakhir, dimana di Tahun 2019 jumlah usaha mikro baru sebanyak 13.183 unit. Meningkatnya capaian tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah pelaku usaha mikro baru yang tumbuh seiring dengan penyediaan dana stimulus oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan modal yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi Covid-19.

Tabel 2.18 : Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah
2020	13.447
2021	16.627
2022	17.023
2023	17.449
2024	21.254

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM 2025

g. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengindikasikan persentase perempuan usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau bekerja. Pada Tahun 2020, tingkat partisipasi perempuan mencapai

58,66%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi atau pekerjaan pada saat itu. Pada Tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan kembali, dengan tingkat partisipasi perempuan mencapai 61,59%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dalam partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja setelah kemungkinan dampak dari pandemi mulai mereda. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan lagi, di mana tingkat partisipasi perempuan turun menjadi 56,10%. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Agam mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Grafik 2.41: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Agam Tahun 2020-2024



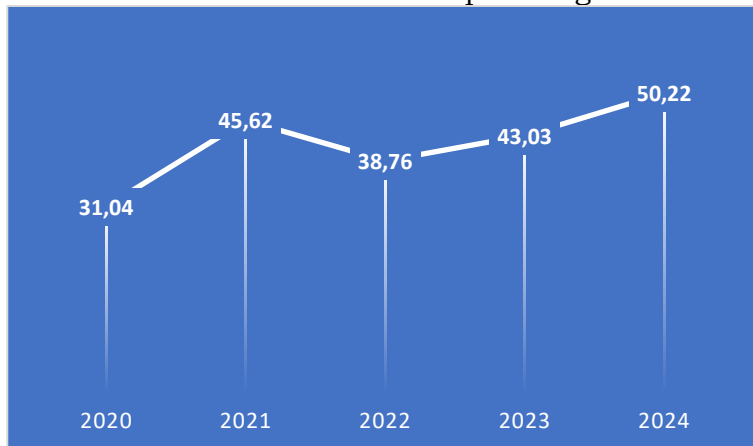
Sumber : BPS (2025)

h. Indek Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah mengukur tingkat inovasi dan kemajuan suatu daerah dalam hal pengembangan dan penerapan inovasi dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, dan layanan publik. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020 indeks inovasi daerah mencapai 31,04. Pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan dalam indeks inovasi daerah, mencapai 45,62 di Tahun 2021 dan menjadai 50,22 di Tahun 2024. Secara keseluruhan, indeks inovasi daerah merupakan indikator penting untuk

mengukur kemajuan dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi dan transformasi digital.

Grafik 2.42 : Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

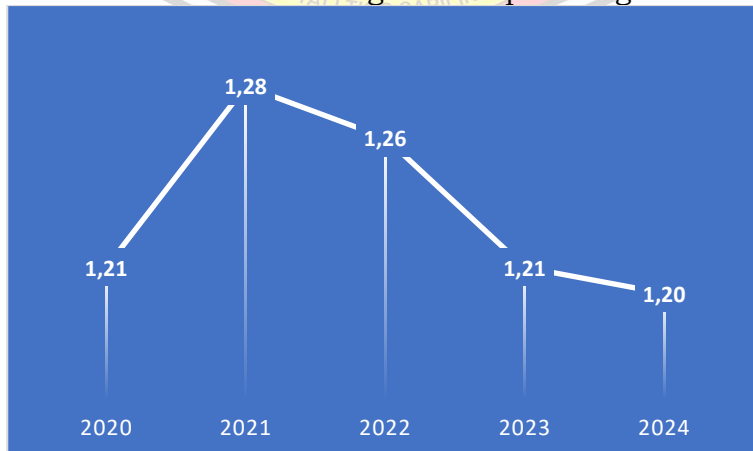


Sumber : Kemendagri (2025)

i. Rasio PDRB Jasa Keuangan

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan mengukur kontribusi dari sektor-sektor jasa keuangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tahun 2020 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan sebesar 1,21 persen dan terus meningkat hingga 1,28 persen ditahun 2022. Namun ditahun berikutnya rasio sektor Jasa Keuangan turun hingga menjadi 1,20 ditahun 2024. Penurunan rasio PDRB sektor jasa keuangan menunjukkan menurunnya peran relatif sektor ini dalam perekonomian daerah.

Grafik 2.43 : Rasio PDRB Jasa Keuangan Kabupaten Agam Tahun 2020-2024



Sumber : BPS (2025)

j. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan tingkat daya saing suatu daerah dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, inovasi, kebijakan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut. Penggunaan IDSD memberikan gambaran tentang kapasitas suatu daerah dalam bersaing baik di tingkat regional maupun global, serta membantu dalam memahami potensi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya tarik investasi. Komponen Indeks Daya Saing Daerah mencakup empat pilar utama, lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Skor IDSD Agam Tahun 2024 mencapai angka 3,62. Capaian ini berada dibawah angka IDSD Sumatera Barat, namun masih diatas rata-rata kabupaten kota se-Sumatera Barat.

Tabel 2.19 : Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Agam

Wilayah	Skor IDSD
Prov. Sumatera Barat	3,7
Agam	3,62
Rata-Rata Kab/Kota Sumatera Barat	3,6

Sumber : BRIN (2025)

k. Proporsi jumlah UKM non pertanian

Sesuai dengan kewenangan kabupaten, membandingkan jumlah unit usaha mikro non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Proporsi jumlah usaha mikro di Agam mencapai angka diatas 99 persen. Ditahun 2019 capaian proporsi mencapai 99,97 persen, Tahun 2020 hingga 2022 sebesar 99,96 dan meningkat lagi di Tahun 2023 sebesar 99,97 persen. Secara jumlah, usaha mikro meningkat dari 15.816 unit di Tahun 2019 menjadi 17.449 unit di Tahun 2023.

Tabel 2.20 : Proporsi jumlah UKM non pertanian Kabupaten Agam Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi jumlah UKM non pertanian	99,97	99,96	99,96	99,96	99,97
Jumlah Usaha Mikro	15.816	16.133	16.633	17.023	17.449
Jumlah Usaha Kecil, Menengah dan Besar	5	6	6	6	6

Sumber: Dinas Koperasi UKM Agam 2024

1. Proporsi jumlah IKM

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah di Agam mencapai angka diatas 99 persen. Capaian tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 99,88 persen. Secara jumlah, IKM meningkat dari 7.243 unit ditahun 2019 menjadi 7.759 unit ditahun 2023. Sementara jumlah industri besar sebesar 9 unit. Berikut disajikan proporsi jumlah IKM kabupaten Agam.

Tabel 2.21 : Proporsi jumlah IKM Kabupaten Agam Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi jumlah IKM	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88
Jumlah IKM	7243	7343	7453	7603	7759
Jumlah Industri Besar	9	9	9	9	9

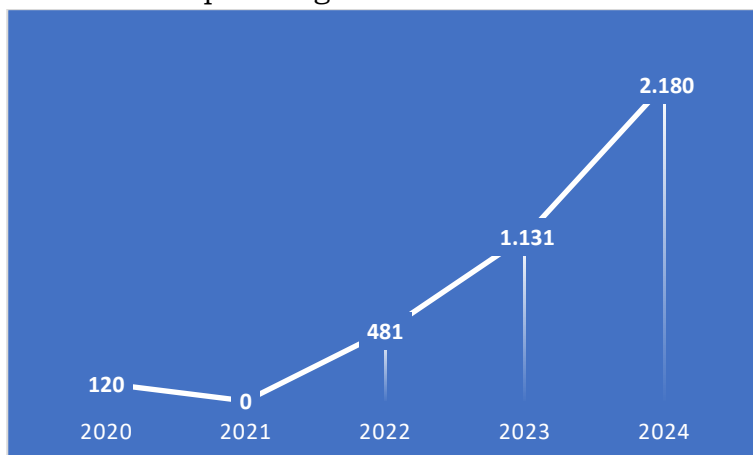
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agam 2024

m. Jumlah Tamu Asing Yang Menginap

Jumlah tamu asing yang menginap merupakan jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang, non berbintang, homestay ataupun pondok wisata. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Pada tahun 2020 tercatat jumlah wisatawan yang menginap sebanyak 120 orang. Sementara pada tahun 2020 turun menjadi 0 akibat dampak Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB). Pasca pandemi covid jumlah wisatawan yang menginap meningkat menjadi 1.131 orang ditahun 2023 hingga 2.180 ditahun 2024.

Grafik 2.44 : Kunjungan Wisatawan Asing Dan Yang Menginap Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

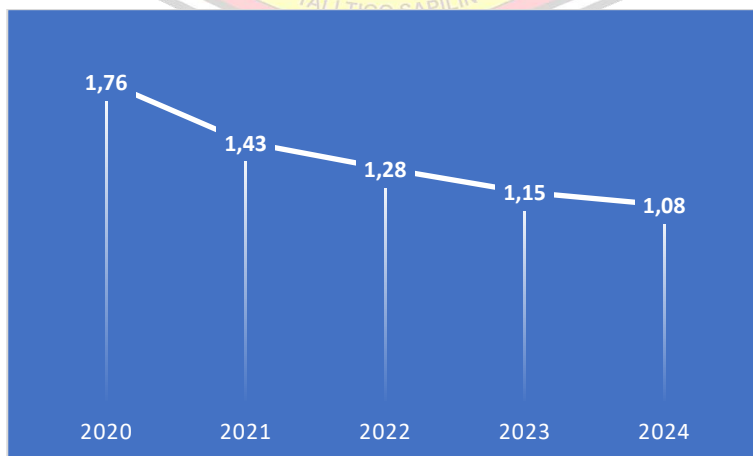


Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Agam 2025

n. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi yang merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan terhadap PDRB. Rasio tersebut di Agam menunjukkan penurunan dalam 5 tahun terakhir.

Grafik 2.45 :
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kabupaten Agam



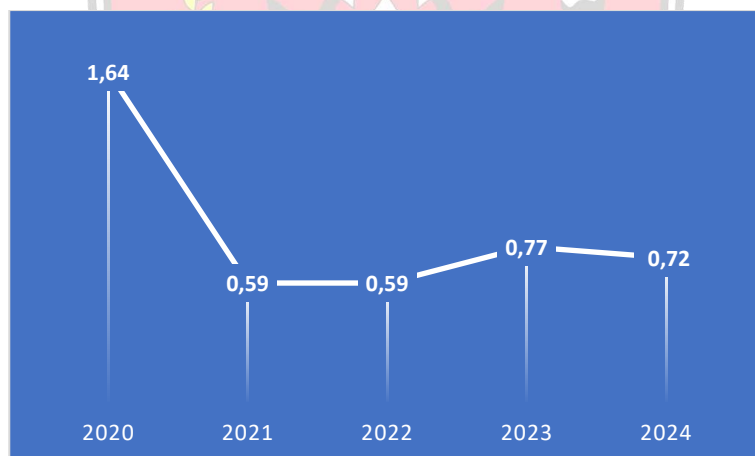
Sumber: BPS, Dinas Koperasi UKM 2025

Tahun 2019 capaian rasio volume koperasi sebesar 1,66 persen dengan nilai volume sebesar 341,69 milyar rupiah. Tahun 2020 rasio tersebut naik menjadi 1,76 dan kembali turun hingga menjadi 1,15 di Tahun 2023. Nilai volume koperasi ditahun 2024 sebesar 302,55 milyar. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

o. Return on Asset (ROA) BUMD

Return On Asset (ROA) merupakan indikator yang mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki Perusahaan. BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Agam adalah PDAM Tirta Antokan yang berlokasi di Lubuk Basung.

Grafik 2.46 : Return On Asset (ROA) Kabupaten Agam



Sumber: PDAM Tirta Antokan Kab Agam 2024

Capaian ROA PDAM Tirta Antokan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif walaupun meningkatnya tidak signifikan. Di Tahun 2019 ROA minus dengan capaian -0,05. Ditahun tersebut laba PDAM hanya sebesar 7,09 juta dengan nilai asset mencapai 12,98 milyar rupiah. Nilai ROA meningkat signifikan di Tahun 2020 mencapai 1,64 dengan nilai laba 271,28 juta rupiah. Turun di Tahun 2021, angka ROA meningkat perlahan hingga sebesar 0,72 di Tahun 2024 dengan nilai laba 216,86 juta dan nilai asset 30,28 milyar rupiah. Berikut disajikan perkembangan nilai ROA PDAM Tirta Antokan.

p. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Dalam penciptaan lapangan kerja formal, pemerintah daerah berperan penting melalui kebijakan yang mendukung investasi, program pelatihan keterampilan, serta fasilitas insentif bagi sektor swasta dan UMKM. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Agam merupakan salah satu indikator penting untuk memahami kontribusi sektor formal dalam menyediakan kesempatan kerja yang aman dan stabil bagi masyarakat setempat.

Di Kabupaten Agam, lapangan kerja formal lebih banyak tercipta dalam sektor pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya memerlukan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah pekerja di sektor formal seperti aparatur negara, tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di Tahun 2021 mencapai 15.630 orang. Sementara di Tahun 2023 jumlahnya sedikit berkurang menjadi 15.406. Berikut disajikan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya.

Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama Kabupaten Agam

Jenis Pekerjaan	2022	2023	2024
Aparatur/Pejabat Negara	11.135	10.952	10.777
Tenaga Pengajar	3.785	3.807	3.892
Wiraswasta	93.517	88.808	87.304
Pertanian/Peternakan	54.362	55.510	57.602
Nelayan	1.842	1.950	2.127
Agama Dan Kepercayaan	117	109	107
Tenaga Kesehatan	710	710	737
Pensiunan	3.611	3.581	3.671
Lainnya	109.548	110.697	113.161

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

Dalam jangka panjang, Kabupaten Agam memiliki potensi besar untuk meningkatkan proporsi lapangan kerja formal jika fokus pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti agrowisata, industri pengolahan hasil pertanian, dan ekowisata. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada sektor informal, tetapi juga dapat memperkuat ekonomi daerah dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal yang berkualitas.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam transformasi ekonomi di Kabupaten Agam mengacu pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam baik di darat (ekonomi hijau) maupun di laut dan perairan (ekonomi biru). Dalam konteks ini, PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan digunakan sebagai indikator pengukuran proksi karena sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian lokal serta berpotensi menjadi penggerak utama transformasi ke arah ekonomi berkelanjutan. Nilai PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di kabupaten Agam meningkat setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2024 mencapai 4,82 triliun rupiah.

Tabel 2.23 : PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kabupaten Agam

	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.350.680,4	4.496.224,0	4.595.695,1	4.737.955,9	4.822.995,7
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3.697.477,2	3.830.728,2	3.910.432,8	4.013.945,2	4.076.289,6
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	76.060,2	68.592,2	68.778,1	73.233,9	74.713,1
3 Perikanan	577.143,0	596.903,6	616.484,3	650.776,9	671.993,0

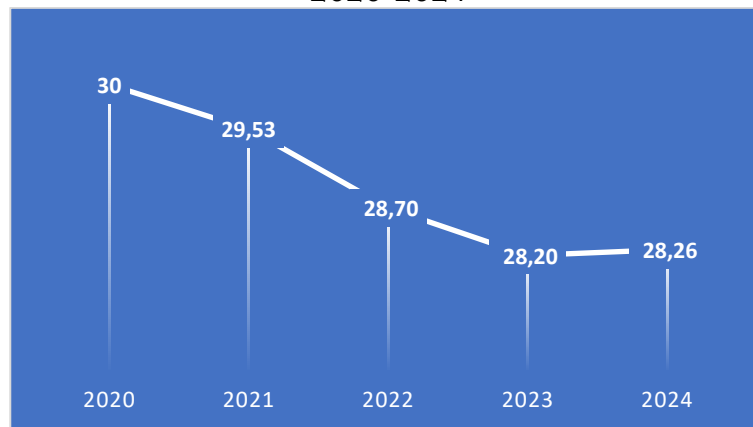
Sumber : BPS (2025)

a. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengukur kontribusi dari sektor-sektor tersebut terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Agam mengalami penurunan dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020 nilai rasio sebesar 30 persen, yang menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Agam. Namun, terjadi penurunan bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2021 turun menjadi 29,53 hingga menjadi 28,26 persen di Tahun 2024. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah fluktuasi harga komoditas,

perubahan iklim, perubahan kebijakan pemerintah, serta dampak dari perubahan pola konsumsi dan permintaan pasar.

Grafik 2.47 : Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS (2025)

- b. Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan. Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 bergerak fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang bergerak pada sektor pertanian juga bersifat fluktuatif yang mempengaruhi tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Di sisi lain, fluktuasi produktivitas tenaga kerja mengindikasikan bahwa efisiensi atau output per tenaga kerja tidak stabil, yang dapat dipengaruhi

oleh faktor musiman, perubahan teknologi, kebijakan, atau dinamika pasar.

Grafik 2.48 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



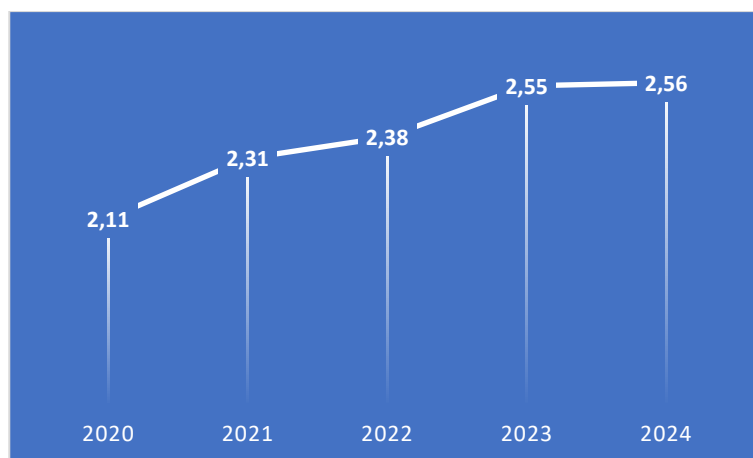
Sumber: BPS Sumatera Barat 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pengarusutamaan Transformasi Digital di Kabupaten Agam, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, merupakan upaya strategis untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Salah satu implementasi kunci dari transformasi digital ini adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Capaian Indeks SPBE Agam meningkat dalam periode Tahun 2020-2024 dari 2,11 menjadi 2,56.

Grafik 2.49 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020-2024



Sumber : Diskominfo Agam (2025)

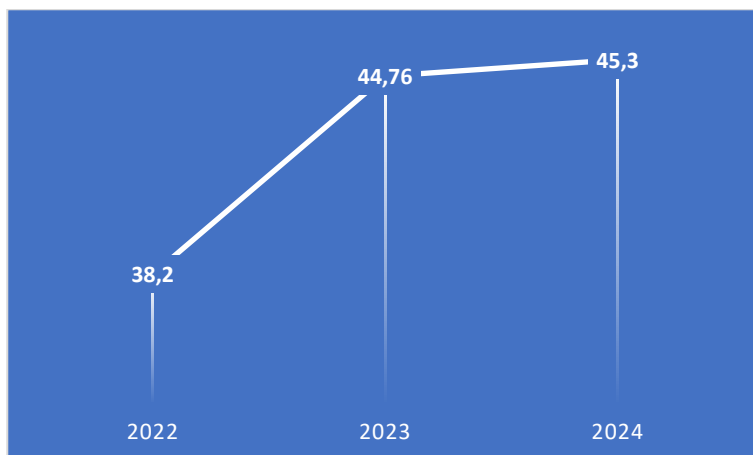
c. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang turut dihasilkan pemerintah Indonesia pada forum Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1) Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi.

Pengukuran IMDI pertama dilakukan pada Tahun 2022 dengan bersumber dari data primer dan berbagai data sekunder. Pada tahun tersebut angka IMDI Kabupaten Agam mencapai 38,20. Pada tahun 2024 diperoleh hasil IMDI sebesar 45,30 dari skala 1-100 dengan rincian nilai per pilar meliputi 54,92 untuk Infrastruktur dan Ekosistem; 64,12 untuk Keterampilan Digital; 25,87 untuk Pemberdayaan; serta sebesar 36,35 untuk Pekerjaan. Hasil IMDI memperlihatkan masih diperlukan perbaikan di berbagai aspek terkait masyarakat digital, khususnya pada aspek

pemberdayaan, sebagaimana tergambar dari pilar dan indikator pembentuknya.

Grafik 2.50 : Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Agam Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital : 2025

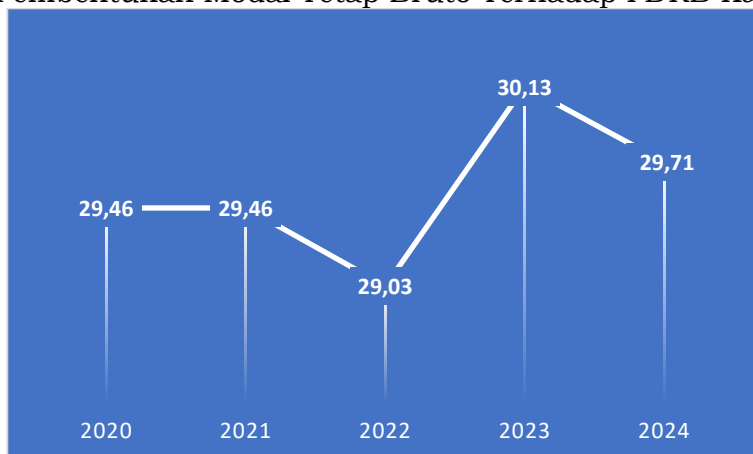
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global di Kabupaten Agam merupakan aspek strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Dengan memanfaatkan potensi lokal serta membuka diri terhadap pasar global, Kabupaten Agam dapat memperkuat perannya dalam rantai pasok global (global value chain) serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB kabupaten Agam terhadap PDRB ditahun 2020 tercatat sebesar 29,46 persen dan turun hingga 29,03 persen di tahun 2022. Ditahun 2023 angka PMTB kembali meningkat menjadi 30,13 persen dan turun kembali ditahun 2024 menjadi 29,71 persen.

Grafik 2.51 : Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB Kabupaten Agam

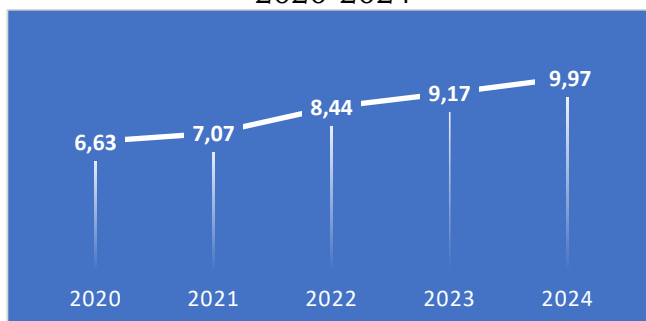


Sumber : BPS (2025)

b. Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB

Ekspor barang dan jasa terhadap PDRB merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Agam. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan daerah juga juga meningkat dan mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Proporsi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB terus meningkat dari tahun ke tahun. Ditahun 2020 proporsinya sebesar 6,63 persen dan terus meningkat hingga mencapai 9,97 persen di tahun 2024.

Grafik 2.52 : Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Agam Tahun 2020-2024



Sumber : BPS (2025)

- d. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Kabupaten Agam memiliki populasi yang cukup besar, dan sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil pertanian dan perdagangan lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok di Agam kerap dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk musim panen, kondisi cuaca, rantai distribusi, dan pasokan dari daerah lain. Karena Agam memiliki potensi agraris yang besar, kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, dan sebagian hasil ternak cenderung bisa dipenuhi dari dalam wilayah.

Persentase ketersediaan barang pokok di Kabupaten Agam tergolong cukup stabil dalam memenuhi kebutuhan harian. Sebagai gambaran, sekitar 70-80% kebutuhan pokok masyarakat Agam, seperti beras dan sayuran, dapat dipenuhi dari produksi lokal. Meski demikian, beberapa barang seperti gula, minyak goreng, dan daging tertentu masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Stabilitas ini biasanya diukur dengan membandingkan jumlah stok barang pokok dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dalam periode tertentu

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

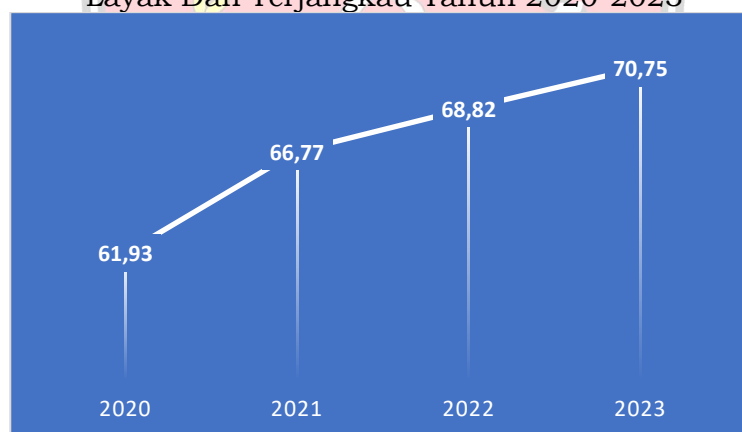
Kabupaten Agam secara geografis memiliki posisi strategis di Provinsi Sumatera Barat, dengan potensi besar dalam sektor jasa, perdagangan, pertanian, serta pariwisata. Pengembangan wilayah diarahkan untuk menjadikan Agam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, melalui pendekatan yang maju secara ekonomi, inklusif secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti akses terhadap fasilitas dan hunian yang layak.

- a. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau

Rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Secara umum rumah layak huni harus memenuhi empat kriteria meliputi ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m², memiliki akses air minum layak dan memiliki akses sanitasi layak. Persentase rumah tangga di kabupaten Agam yang memiliki akses terhadap hunian layak terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2019 tercatat sebesar 56,27 persen dan meningkat menjadi 70,75 persen rumah tangga ditahun 2023.

Grafik 2.53 : Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Tahun 2020-2023



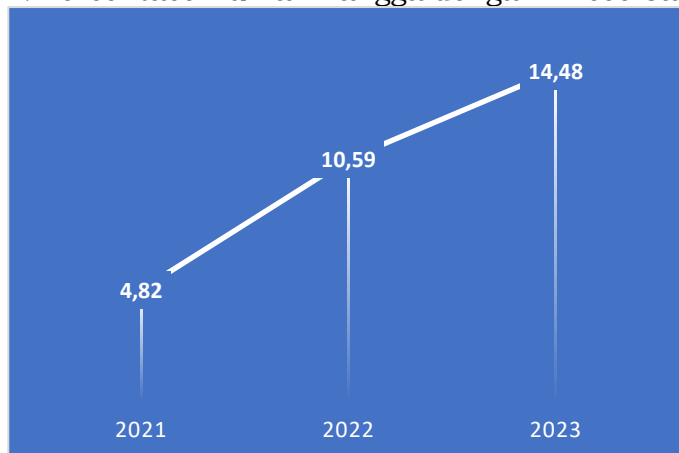
Sumber : BPS (2025)

b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sementara capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman ditahun 2023 mencapai angka 14,48 persen. Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2021 tingkat akses sebesar 4,82 persen dan tahun 2022 sebesar 10,59 persen. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan

lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Grafik 2.54 : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

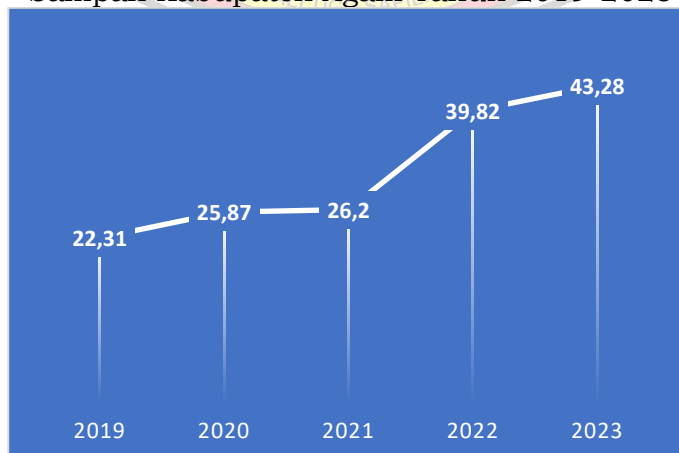


Sumber: BPS Sumatera Barat 2024

e. Persentase Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah. Pengumpulan sampah merupakan kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Grafik 2.55 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Agam Tahun 2019-2023



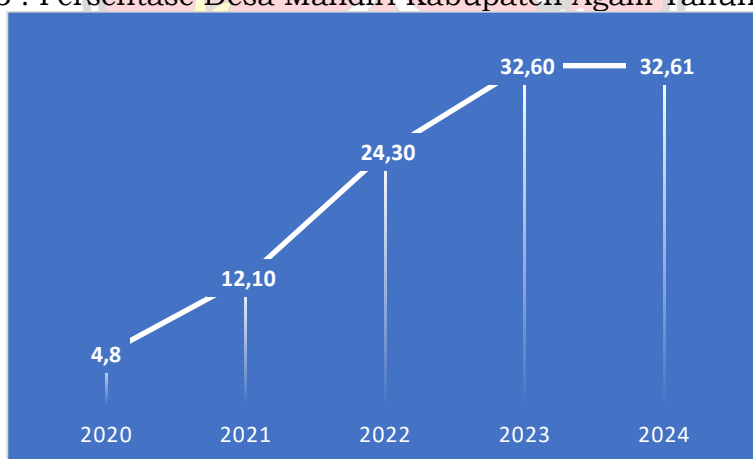
Sumber: BPS Sumatera Barat 2024

Proporsi rumah tangga di Agam yang memiliki akses layanan pengumpulan sampah meningkat dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2019 tercatat sebanyak 22,31 persen rumah tangga. Capaian ini terus naik hingga menjadi 43,28 persen di Tahun 2023.

f. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas dan transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Capaian persentase desa mandiri kabupaten Agam dalam 5 tahun terakhir meningkat cukup signifikan, dari angka 4,8 persen ditahun 2020 naik menjadi 32,6 persen ditahun 2024.

Grafik 2.56 : Persentase Desa Mandiri Kabupaten Agam Tahun 2020-2024



Sumber : Kemendes (2025)

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

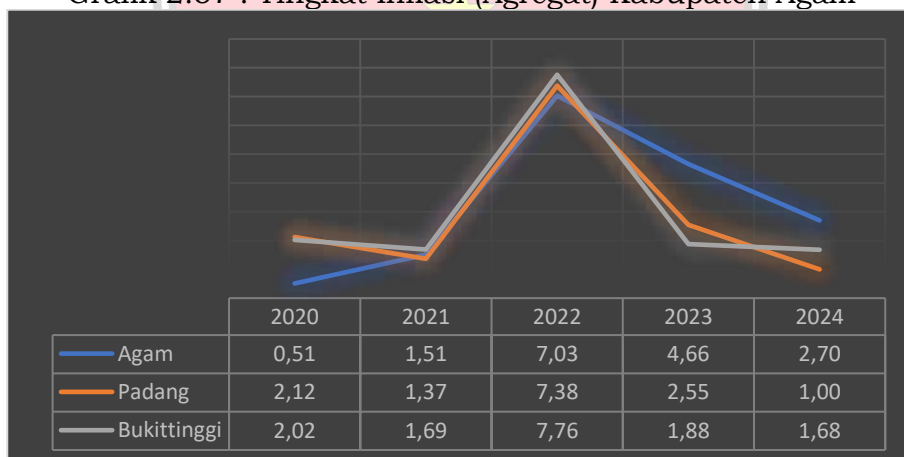
Stabilitas ekonomi makro Kabupaten Agam merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ini menyangkut kesinambungan fiskal, stabilitas moneter dan keuangan, ketahanan ekonomi, peningkatan output dan pendapatan dan pemerataan manfaat pertumbuhan.

a. Inflasi

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kondisi perekonomian yang stabil sangatlah penting. Menjaga stabilitas

perekonomian tercermin dari upaya menjaga stabilitas harga untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif dan permintaan masyarakat yang efektif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dilain sisi perlu dilakukan pemantauan terhadap dinamika inflasi dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Agam, data inflasi agregat diperoleh dari deflator PDRB. Sementara itu, analisis lebih lanjut dari inflasi dilakukan berdasarkan inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Secara umum pola pergerakan inflasi Kabupaten Agam terlihat mirip dengan pola pergerakan inflasi kedua kota tersebut. Pada tahun 2024 nilai inflasi (deflator) kabupaten Agam sebesar 2,70 persen, sementara kota Padang dan Bukittinggi masing-masing sebesar 1 persen dan 1,68 persen.

Grafik 2.57 : Tingkat Inflasi (Agregat) Kabupaten Agam

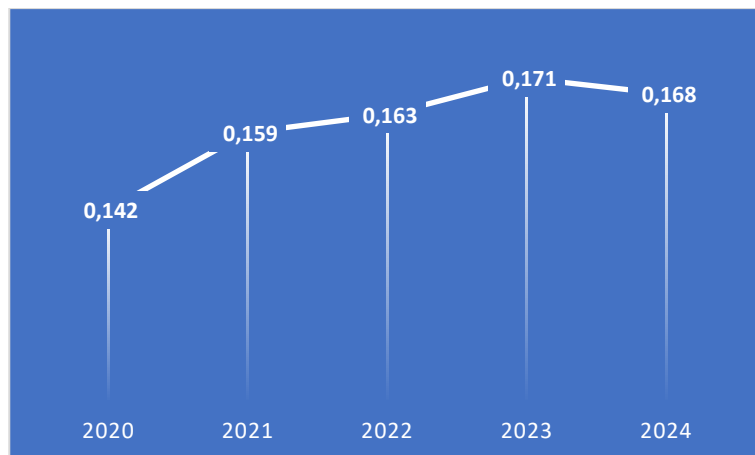


Sumber : BPS 2025 (diolah)

b. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan indikator yang mengukur rasio kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Capaian rasio tersebut di kabupaten Agam meningkat dalam 5 tahun terakhir. Rasio pajak terhadap PDRB pada tahun 2020 sebesar 0,142. Namun ditahun-tahun selanjutnya rasio pajak daerah meningkat hingga mencapai angka 0,168 ditahun 2024. Secara nilai rupiah, pajak daerah Agam meningkat dari 32,21 milyar menjadi 44,85 milyar dalam periode tersebut. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Grafik 2.58 : Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

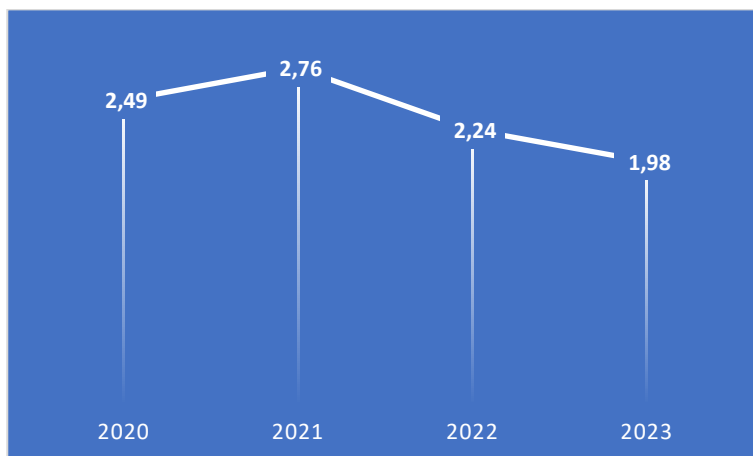


Sumber : BKEUDA, BPS (2025)

c. Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB Kabupaten Agam mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, jumlah DPK mencapai 2,33, kemudian mengalami kenaikan menjadi 2,49 pada tahun 2020, dan kembali naik menjadi 2,76 pada tahun 2021. Hal ini mungkin mencerminkan kepercayaan pihak ketiga terhadap potensi pembangunan dan investasi di Kabupaten Agam. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022, di mana jumlah DPK turun menjadi 2,24, dan kemudian turun lagi menjadi 1,98 pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan, atau penurunan minat dari pihak ketiga untuk berinvestasi di Kabupaten Agam. Penurunan ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan Kabupaten Agam untuk melakukan pembangunan ekonomi dan sosial, mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sementara peningkatan dana pihak ketiga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2.59 : Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Kabupaten Agam

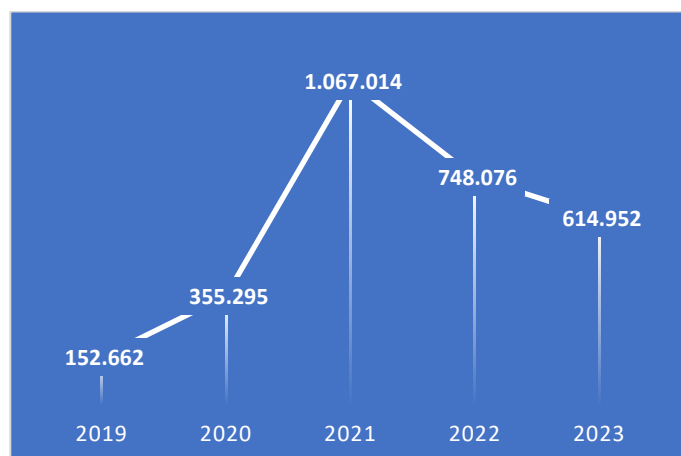


Sumber: OJK Sumatera Barat 2024 (diolah)

d. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan

Nilai Transaksi Saham merupakan jumlah total nilai transaksi yang terjadi di pasar saham. Nilai transaksi saham Kabupaten Agam mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, nilai transaksi saham rata-rata tahunan sebesar 75 miliar. Kemudian, terjadi lonjakan yang cukup besar pada tahun 2020, di mana nilai transaksi meningkat menjadi 188 miliar. Pada tahun 2021, terjadi lonjakan yang lebih besar lagi, di mana nilai transaksi saham mencapai 560 miliar. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam aktivitas perdagangan saham di Kabupaten Agam. Lonjakan ini bisa mencerminkan meningkatnya minat investor dalam pasar saham serta faktor-faktor eksternal seperti situasi ekonomi global atau kebijakan pemerintah yang mendukung pasar modal. Meskipun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, dengan nilai transaksi saham turun menjadi 393 miliar pada tahun 2022 dan 326 miliar pada tahun 2023, fluktuasi ini masih menunjukkan aktivitas perdagangan yang cukup tinggi dalam pasar saham Kabupaten Agam. Jika dirata-rata berdasarkan jumlah penduduk maka nilai transaksi saham per kapita disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.60 Nilai Transaksi Saham Per Kapita Tahunan Kabupaten Agam Tahun 2019-2023

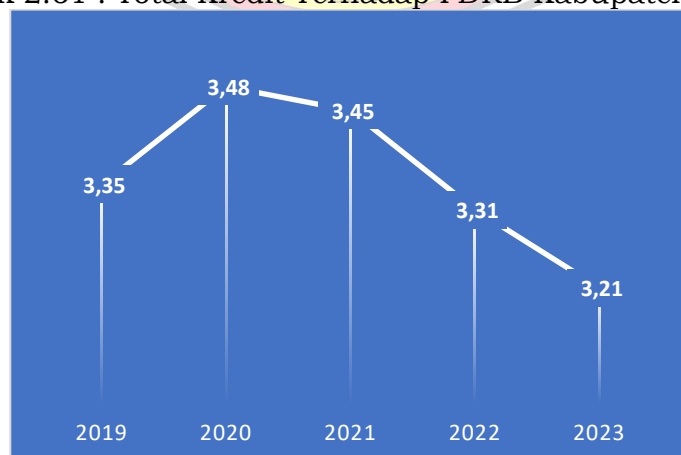


Sumber: OJK Sumatera Barat 2024 (diolah)

e. Total Kredit Terhadap PDRB

Total Kredit merupakan total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Rasio nilai kredit terhadap PDRB Kabupaten Agam mengalami fluktuasi yang relatif kecil dari Tahun 2019 hingga 2023. Pada Tahun 2019, rasio tersebut mencapai sebesar 3,35. Kemudian, rasio ini mengalami sedikit kenaikan pada Tahun 2020 menjadi 3,48, dan kembali turun menjadi 3,45 pada Tahun 2021. Penurunan ini kemudian berlanjut pada Tahun 2022 dan 2023, di mana rasio masing-masing adalah 3,31 dan 3,21.

Grafik 2.61 : Total Kredit Terhadap PDRB Kabupaten Agam



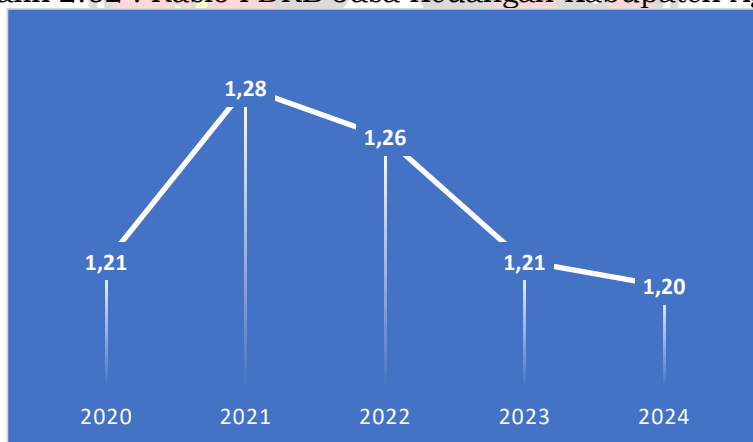
Sumber: OJK Sumatera Barat 2024 (diolah)

Meskipun fluktuasi tersebut terjadi, rasio nilai kredit terhadap PDRB yang relatif stabil menunjukkan bahwa kegiatan kredit masih merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi di Kabupaten Agam selama periode tersebut. Meskipun demikian, penurunan nilai rasio dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perlambatan dalam pertumbuhan kredit dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pergeseran dalam struktur ekonomi dan pembiayaan di wilayah tersebut.

f. Rasio PDRB Jasa Keuangan

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan mengukur kontribusi dari sektor-sektor jasa keuangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tahun 2020 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan sebesar 1,21 persen dan terus meningkat hingga 1,28 persen ditahun 2022. Namun ditahun berikutnya rasio sektor Jasa Keuangan turun hingga menjadi 1,20 ditahun 2024.

Grafik 2.62 : Rasio PDRB Jasa Keuangan Kabupaten Agam



Sumber : BPS (2025)

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum berfungsi untuk menilai sejauh mana reformasi hukum diterapkan dan dampaknya terhadap sistem hukum suatu negara. Indeks ini mengukur kualitas regulasi, akses keadilan, dan efektivitas lembaga hukum dalam pelaksanaan aturan. Melalui penilaian ini, indeks

menggambarkan dampak perubahan hukum dan kebijakan terhadap lingkungan hukum dan sosial.

Reformasi hukum biasanya mencakup perubahan dalam struktur legislatif, sistem peradilan, dan administrasi untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan efisiensi. Indeks ini menilai kinerja sistem hukum dalam menangani kasus dengan cepat dan adil, integritas lembaga peradilan, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah menggunakan indeks ini untuk mengevaluasi hasil reformasi dan mengidentifikasi area perbaikan. Indeks ini juga menyediakan dasar untuk perencanaan kebijakan dan strategi hukum di masa depan, memastikan reformasi memberikan kontribusi positif terhadap keadilan dan efisiensi hukum. Berikut capaian indeks reformasi Kabupaten Agam 2019-2023.

Tabel 2.24 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
n/a	n/a	72	n/a	77,26

Sumber: Bagian Hukum Setda Agam, 2025

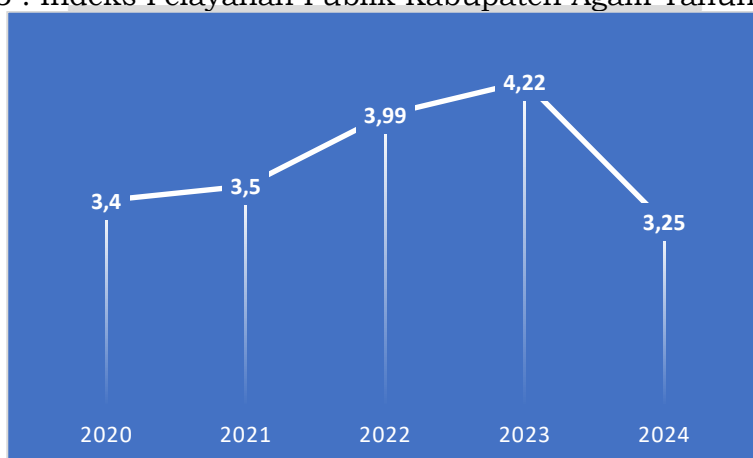
Pada Tahun 2024 capaian Indeks Reformasi Hukum sebesar 77,26, dengan kategori Baik. Reformasi hukum di Kabupaten Agam masih memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Kurangnya dukungan politik dan kebijakan dapat menghambat proses reformasi dan pengukuran IRH.

b. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintah yang efektif dan transparan memerlukan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan layanan, ketersediaan fasilitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Indeks pelayanan publik kabupaten Agam dari Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun

2020 indeks pelayanan publik mencapai angka 4,22. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk perbaikan dalam pelayanan publik, dan pemerintah daerah mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan. Peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2023, di mana indeks pelayanan publik naik menjadi 4,22. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang nyata dalam kualitas dan efisiensi layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun angka indeks kembali turun menjadi 3,25 pada Tahun 2024.

Grafik 2.63 : Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

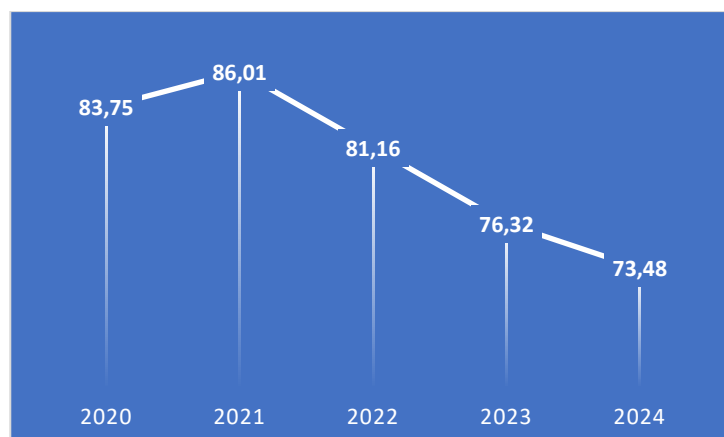


Sumber : KemenPANRB (2025)

c. Survey penilaian integritas (SPI) KPK

Survey Penilaian Integritas (SPI) merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia untuk mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah. SPI bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik-praktik korupsi telah terjadi di lingkungan tersebut serta untuk mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap korupsi. Angka SPI Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan menurun dalam 5 tahun terakhir. Ditahun 2020 angka SPI sebesar 83,75 dan naik menjadi 86,01 ditahun 2021. Namun ditahun berikutnya angka SPI turun menjadi 77,48 di tahun 2024.

Grafik 2.64 : Survey penilaian integritas (SPI) KPK Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

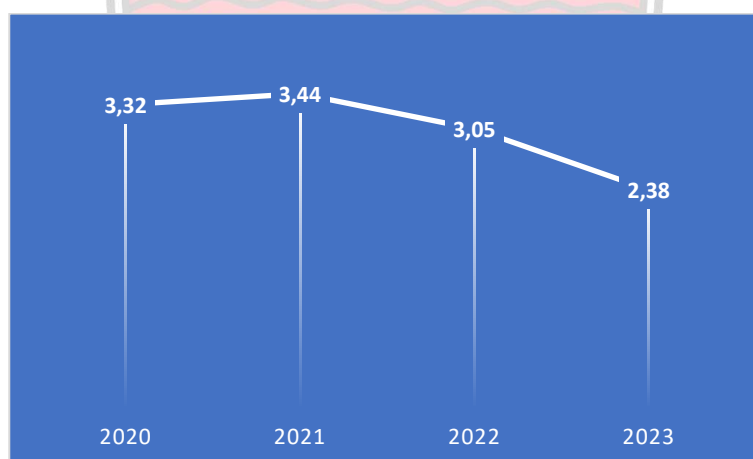


Sumber : Inspektorat Agam (2025)

d. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indeks yang mengukur tingkat kesadaran masyarakat atau pemangku kepentingan terhadap upaya antikorupsi di suatu negara atau wilayah. IPAK mencakup berbagai faktor, antara lain efektivitas lembaga antikorupsi, tingkat transparansi pengelolaan keuangan publik, penindakan kasus korupsi, dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sejalan dengan angka SPI KPK, angka IPAK di Kabupaten Agam juga menunjukkan tren penurunan.

Grafik 2.65 : Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Agam Tahun 2020-2024



Sumber : Inspektorat (2025)

Ditahun 2019 angka IPAK tercatat sebesar 3,43 dan turun ditahun 2020 menjadi 3,32. Sempat naik ditahun 2021 dengan capaian 3,44, angka

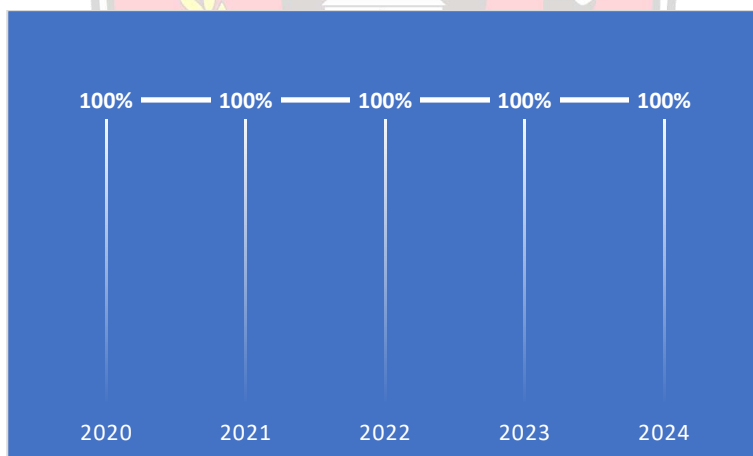
IPAK kembali turun hingga 2,83 ditahun 2023. Angka IPAK yang lebih tinggi menunjukkan persepsi yang lebih positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, sedangkan skor yang lebih rendah menunjukkan adanya kekhawatiran atau ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap efektivitas upaya tersebut.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Persentase potensi ATHG/Konflik sosial yang dapat diatasi

Persentase Penanganan Potensi Konflik adalah perbandingan antara jumlah konflik sosial dan/atau potensi konflik sosial yang ditangani sesuai dengan kewenangannya terhadap total kejadian konflik sosial dan/atau potensi konflik sosial dalam 1 (satu) tahun. Capaian indikator ini sangat baik, dimana persentase potensi ATHG/Konflik sosial yang dapat diatasi mencapai 100 persen.

Grafik 2.66 : Persentase potensi ATHG/Konflik sosial yang dapat diatasi Tahun 2020-2024



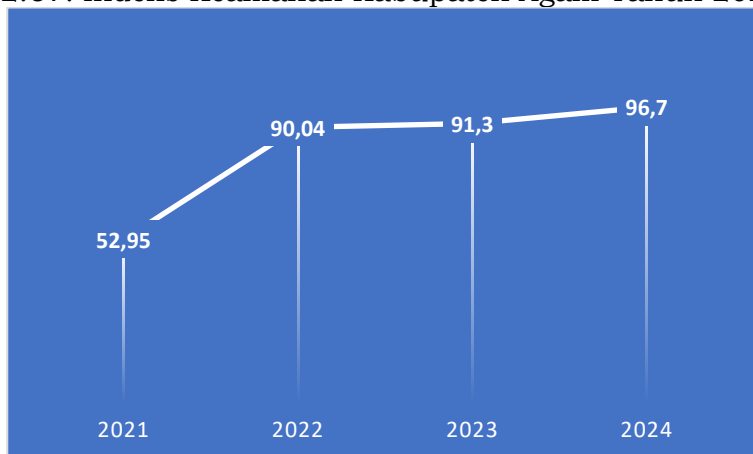
Sumber : SatPolPP Agam (2025)

b. Indeks Keamanan

Indeks keamanan merupakan salah satu indikator utama pada aspek ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Indeks ini diukur berdasarkan capaian dari beberapa indikator, meliputi angka kriminalitas per 10.000 penduduk, persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dan persentase capaian layanan waktu tanggap kebakaran. Berdasarkan data

kantor Satuan Polisi Pamong Praja capaian indeks keamanan Tahun 2024 mencapai angka 96,7. Capaian ini meningkat dibanding capaian Tahun 2023 yang sebesar 90,04. Tingginya capaian indeks tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya kinerja aparaturnya keamanan dalam mencegah dan menindak kasus kriminalitas di Kabupaten Agam.

Grafik 2.67: Indeks Keamanan Kabupaten Agam Tahun 2021-2024



Sumber : SatpolPP Agam (2025)

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan tingkat daya saing suatu daerah dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, inovasi, kebijakan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut.

Tabel 2.25 : Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
2,51	2,71	n.a	n.a	3,62

Sumber : BRIN (2025)

Penggunaan IDSD memberikan gambaran tentang kapasitas suatu daerah dalam bersaing baik di tingkat regional maupun global, serta membantu dalam memahami potensi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya tarik investasi. Nilai IDSD Agam pada tahun 2020 sebesar 2,51 atau masuk kategori tinggi. Nilai IDSD Agam meningkat ditahun berikutnya menjadi 2,71 dan pada tahun 2024 menjadi

3,62. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Barat, Kabupaten Agam menempati urutan ke-dua tertinggi dibawah Tanah Datar.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan daerah adalah kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Urusan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu urusan pemerintahan wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Disamping itu terdapat unsur pendukung, penunjang dan pengawasan urusan pemerintahan, serta unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Kinerja per urusan yang diukur merupakan indikator yang digunakan dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, sehingga data yang disajikan merupakan data dari tahun 2021 hingga 2024.

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Secara umum, indikator urusan pendidikan menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan beberapa capaian yang mengalami perbaikan, namun juga terdapat penurunan yang perlu menjadi perhatian. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs) mengalami peningkatan dari 13,88 tahun pada 2021 menjadi 14,16 tahun di Tahun 2024, menandakan peningkatan harapan masyarakat terhadap pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami kenaikan dari 8,97 tahun (Tahun 2021) menjadi 9,23 tahun (Tahun 2024). Sementara APK dan APM: APK PAUD menurun tajam di 2024 (60,05) setelah sebelumnya meningkat. APK dan APM SD serta SMP cenderung fluktuatif, menunjukkan tantangan dalam mempertahankan akses dan partisipasi pendidikan. Angka Putus Sekolah tetap rendah, menunjukkan efektivitas dalam mempertahankan siswa di jenjang dasar dan menengah. Akreditasi: Persentase lembaga pendidikan yang

terakreditasi menunjukkan fluktuasi namun cenderung membaik terutama pada SMP.

Capaian indikator kesehatan menunjukkan adanya perbaikan dan tantangan tersendiri. Angka Kematian Ibu dan Bayi mengalami fluktuasi dan justru cenderung meningkat di tahun 2024, meski persalinan di fasilitas kesehatan naik signifikan. Persentase balita stunting meningkat pada 2022 dan belum kembali ke angka rendah 2021. Prevalensi wasting juga meningkat perlahan. Penyakit Menular: Insidensi HIV dan TB mengalami penurunan, sementara capaian pengobatan TB menunjukkan peningkatan di 2024. Layanan Puskesmas seperti ketersediaan alat kesehatan dan obat esensial menunjukkan capaian baik, namun persentase Puskesmas dengan nakes sesuai anjab ABK menurun tajam di 2024. Pelayanan kesehatan sesuai standar umumnya baik, namun terjadi penurunan pelayanan untuk kelompok usia balita dan lanjut usia.

Pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Akses Air Minum dan Sanitasi meningkat signifikan dari Tahun 2021 ke Tahun 2024. Jalan Kabupaten dan Lingkungan mengalami penurunan kualitas jalan mantap dari 80,3% (Tahun 2021) menjadi 68,98% (Tahun 2024). Drainase menunjukkan sedikit perbaikan, sementara ketaatan tata ruang menurun. Pada urusan permukiman capaian penyediaan Rumah Layak Huni menurun drastis di Tahun 2024, dari hampir 100% menjadi hanya 26,18%. Penanganan RTLH menurun tiap tahun. Permukiman Kumuh mulai tertangani meskipun angkanya masih kecil. Pada urusan trantibum hampir semua indikator menunjukkan capaian maksimal, seperti penyelesaian gangguan trantibum, penegakan Perda, dan penanganan bencana. Relawan dan Pos Damkar meningkat signifikan. Pada urusan sosial, bantuan sosial bersyarat menunjukkan penurunan jumlah penerima, yang bisa mencerminkan peningkatan kesejahteraan atau perubahan kebijakan. Secara umum, capaian indikator menunjukkan kemajuan di sejumlah bidang strategis, seperti pendidikan, kesehatan dasar, dan pelayanan publik. Namun, beberapa indikator mengalami penurunan.

Tabel 2.26 : Capaian Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Agam

Urusan	2021	2022	2023	2024
Urusan Pendidikan				
Angka Harapan Lama Sekolah	13,88	13,88	13,89	14,16
Rata-rata lama sekolah	8,97	8,98	9,22	9,23
APK PAUD	63,24	64,34	65,25	60,05
APK SD	98,22	96,34	97,30	97,19
APK SMP	95,6	100,97	102,09	101,56
APM SD	98,22	88,27	88,56	88,38
APM SMP	79,70	79,02	83,17	78,52
Angka Putus Sekolah SD	0,03	0,02	0,03	0,02
Angka Putus Sekolah SMP	0,02	0,03	0,03	0,05
Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	56	81	77,08	77,23
Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	92,31	99	86,67	80,00
Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	88,22	87,52	87,53	87,30
Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	72	83,23	83,82	85,29
Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	97,72	100	100,00	99,60
Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100	100	100,00	100,00
Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	63,24	100	100,00	99,53
Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	80,87	85	90,00	15,93
Persentase murid SD yang hafal al- Qur'an Juz 30	13,25	30,95	31,35	31,22
Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	18,11	38,57	42,20	42,20
Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	13,4	22,94	23,07	23,07
Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	17,51	37,28	39,20	3,08
Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	8,3	8,75	10,00	10,00
Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	14,65	15,8	18,00	18,00
Urusan Kesehatan				
Menurunnya rasio kematian ibu	152,5	104,9	165,50	172,08
Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	n/a	67%	11,00	10,00
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	75	56,56	99,00	93,56
Meurunnya ratio kematian bayi	9,5	10,79	13,38	12,60
Persentase balita stunting	10,85	24,6	20,10	20,1
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	3,56	3,49	4,04	4,13
Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	45	50	41,70	25,20
Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,109	0,1	0,03	0,026
Insedensi TB per 100.000 penduduk	136	127	147,00	155,00

Urusan	2021	2022	2023	2024
Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	90,65	90,75	86,40	92,00
Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	35	46,80	65,40	83,50
Treatmen coverage pada pasien TB	35,3	33,40	36,00	36,00
Cakupan Posbindu aktif	68,5	68,7	70,00	100 %
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilen	23	23	23,00	23,00
Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23	23	23,00	23,00
Perentase ketersediaan prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	66	70,60	71,42	72,25
Persentase ketersediaan obat esensial Puskesmas	100	100%	100,00	100,00
Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	4,3	100	100,00	100,00
Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	13	57	78,46	42,25
Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	100	100	90,70	70,00
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9	10,95	8,50	10,10
Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	17,4	17,40%	100,00	100,00
Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	n/a	11%	100,00	50,00
Persentase rumah tangga ber- PHBS	79	83%	82,17	82 %
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	100	100,00	88,09	93,56
Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	100	98,32	96,15	98,59
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	100	100,00	90,37	93,67
Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	93,80	84,70	73,79
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	100	80,00	90,10	97,83
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	100	81,90	98,20	89,43
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	100	100,00	72,30	73,71
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	100	90,60	77,79	90,90
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	100	91,30	89,70	90,86
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	100	86,60	100,00	100,00
Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	100	100,00	100,00	83,73
Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai Standar	100	100,00	93,48	93,00
Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100	100,00	100,00	100,00
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	182	190	201,00	185,00
Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Pravalensi Stunting <14%)	46	72	77,00	85,00
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Persentase luas sawah beririgasi	70	86	68,76	51,74

Urusan	2021	2022	2023	2024
Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	80,3	72,75	74,27	68,98
Persentase penduduk berakses air minum	37,08	85,03	86,96	88,51
Persentase rumah tangga berakses sanitasi	53,8	78,38	79,27	79,50
Persentase drainase kondisi baik	n.a	40,39	40,60	40,60
Persentase jalan lingkung kondisi baik	61	50	53,30	54,25
Persentase ketaatan terhadap tata ruang	98,5	97,5	97,50	96,48
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,02	0,019	0,25	0,00
Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	70	80	75,00	33,33
Persentase Bangunan yang tertata	30	97,5	97,50	82,75
Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman				
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	99,65	99,89	26,18
Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	3,59	4,37	2,73	1,34
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	47,74	0,002	0,77	3,63
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	35	43	55,00	55,01
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100,00	100
Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100	96%	100,00	100
Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	93%	95,76	100
Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	15	15	46,00	85%
Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	31	31	31,00	31%
Persentase penanganan pra bencana	100	54,5	88,08	38%
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100	100,00	100%
Persentase penanganan pasca bencana	5,9	90%	100,00	100%
Urusan Sosial				
Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	3	10	10,00	10
Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	n/a	n/a	2,00	1
Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	35,776	34.308	20.371	20779

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMD Kab Agam (2025)

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar banyak indikator yang menunjukkan tren peningkatan dan beberapa sektor sudah konsisten di angka capaian maksimal. Pada urusan ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja fluktuatif, sempat meningkat Tahun 2022 (73,05) lalu menurun ke 69,00 (Tahun

2024). Rasio penduduk bekerja konsisten tinggi di atas 94%, menunjukkan stabilitas ketenagakerjaan. Penempatan pencari kerja meningkat signifikan, dari 963 (Tahun 2021) menjadi 1.565 (Tahun 2024), menandakan perbaikan layanan penempatan kerja.

Pada urusan Pangan, skor PPH meningkat hingga Tahun 2023, lalu menurun di 2024 (81). Cadangan pangan masyarakat meningkat stabil, menunjukkan ketahanan pangan lokal membaik. Pada urusan Lingkungan Hidup, Penanganan pengaduan, peran serta masyarakat, ruang terbuka hijau: capaian konsisten 100%. Persetujuan teknis limbah B3 kembali naik di Tahun 2024 setelah drop di Tahun 2023. Pengelolaan sampah dan ketaatan izin lingkungan meningkat progresif. Pada urusan Pengendalian Penduduk dan KB, angka IPG dan IDG relatif stabil, menunjukkan keberlanjutan upaya kesetaraan gender. Pada urusan Kepemudaan dan Olahraga Partisipasi pemuda dalam organisasi meningkat stabil. Prestasi olahraga sempat puncak di Tahun 2023 (177 medali) lalu turun di Tahun 2024. Wirausahawan muda meningkat tajam di Tahun 2024 (52,17%). Pada urusan Kearsipan Indikator menunjukkan perbaikan progresif, namun masih tergolong rendah. Pengelolaan arsip daerah masih berkategori rendah (CC).

Tabel 2.27 : Capaian Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Agam Tahun 2021-2024

Urusan	2021	2022	2023	2024
Urusan Ketenagakerjaan				
Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,49	73,05	69,16	69
Rasio penduduk yang bekerja.	94,94	95,07	95,04	95,27
Pencari Kerja yang ditempatkan	963	1.185	1.327,0 0	1565
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	63,06	64,45	64,43	n.a
Kecamatan Layak Anak	0	0	0	n.a
Nagari Layak Anak	3	2	1,00	n.a
Urusan Pangan				
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,7	85,6	86,60	81
Persentase cadangan pangan masyarakat	9.97%	12.24%	16,18	18,58
Ketersediaan pangan utama	340,72	299,70	304,00	79694
Urusan Pertanian				
Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	0	0	0	37,45

Urusan	2021	2022	2023	2024
Jumlah bidang tanah yang direstribusi	0	0	0	87
Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100	100	100,00	100
Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	23,76	56,8	100,00	50
Urusan Lingkungan Hidup				
Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100	100%	100,00	100,00
Rasio Pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	1,1	1,01%	1,09	0,00
Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	100%	100%	63,00	100,00
Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	100%	100%	100,00	100,00
Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	100%	100%	100,00	100,00
Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	50,41%	50,41%	50,41	50,41
Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	100	67%	100,00	100,00
Persentase pengelolaan persampahan.	26,21	39,82%	43,28	46,29
Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	15,38%	35,71%	56,00	62,50
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,95	97	97,19	97,37
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,07	64,45	64,43	n.a
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100,00	100
Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	48,22	55,84	61,85	65,53
Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	100	100	100,00	62,93
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	169	170 sistem	191,00	195 Sistem
Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) Berkembang	5 unit	6 unit	17 unit	28 Unit
Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Perhubungan				
Rasio ijin trayek		0,149	0,13	0,09
Jumlah uji kir angkutan umum	1,443	6.896	4.824	4570
Rasio Kejadian Kecelakaan	1,35	1,60	0,15	1,87
Urusan Komunikasi dan Informatika				
Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100%	100	100,00	100,00

Urusan	2021	2022	2023	2024
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	10	10%	10,00	10,00
Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	10	10,00	131,00
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	55,56	100%	100,00	100,00
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	100	100%	100,00	100,00
Urusan Koperasi dan UMKM				
Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	70,63	63,32	n/a	69,13
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	7	1	1	0
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	60,9	12,5 Milyar	412,31	0
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	11,72	48,72	47,01	49,75
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	36	35	6,71	7,85
Peningkatan prestasi olahraga (Jumlah perolehana medali)	44	56	177,00	88,00
Persentase wirausahawan muda		0,85	0,60	52,17
Urusan Statistik				
Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	100	100%	100,00	100
Urusan Persandian				
Indeks keamanan informasi	n/a	25,9	25,00	338
Urusan Kebudayaan				
Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	72,15	75	100,00	100,00
Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	51	52	52,00	52,00
Jumlah Pengunjung Museum	13000	14125	18.360	26381
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	6	8	9,00	10,00
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	55	80	85,00	90,00
Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	0,5	0,85	0,90	1,00
Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	23	60	70,00	80,00
Urusan Perpustakaan				
Nilai Tingkat kegemaran membaca	56,27	69,41	60,05	81,72

Urusan	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	9,30	65,04	68,66	72,92
Urusan Kearsipan				
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	0,33	28,11	55,25	57
Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip	n/a	9,5	3,00	13,63
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	0	16,6	63,33	68,33
Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	Cukup (56,66)	Cukup (36,66)	CC	51,01 (CC)

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMD Kab Agam (2025)

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Pada urusan kelautan dan perikanan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB bergerak fluktuatif. Sempat naik signifikan pada Tahun 2023 (5,56%), lalu turun menjadi 4,61% di Tahun 2024. Produksi perikanan tangkap dan kelompok nelayan stabil di kisaran ± 8.000 ton. Produksi perikanan budidaya naik tajam pada Tahun 2022 (46.332 ton), namun turun drastis pada Tahun 2023–2024. Konsumsi ikan per kapita mengalami peningkatan konsisten hingga Tahun 2023. Pada urusan pariwisata kontribusi terhadap PAD turun dari 0,63% ke 0,45%. Menunjukkan sektor ini belum memberi kontribusi optimal. Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami lonjakan besar dari Tahun 2022 (23 orang) ke Tahun 2023–2024 (>13.000). Pada urusan pertanian kontribusi sektor pertanian menurun signifikan dari 3,60% (Tahun 2021) ke 1,55% (Tahun 2024). Upaya pengendalian hama terjaga. Pengendalian penyakit hewan menular fluktuatif, tertinggi di Tahun 2023 (17,54%), tapi menurun drastis di Tahun 2024.

Pada urusan Perdagangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB stabil tinggi di kisaran 19%, menunjukkan peran sentral sektor ini. Barang sesuai ketentuan 100%. Menunjukkan pengawasan berkualitas. Pada urusan perindustrian pertumbuhan pelaku IKM cenderung meningkat, walau melambat di Tahun 2024. Kontribusi sektor industri

terhadap PDRB meningkat perlahan dari 9,94% ke 10,33%. Secara umum sektor perdagangan dan industri menunjukkan stabilitas dan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Sementara Pariwisata dan Perikanan perlu diperkuat dari sisi kontribusi ekonomi meskipun SDM dan produk meningkat. Dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan.

Tabel 2.28 : Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Agam Tahun 2021-2024

Layanan Urusan Pilihan	2021	2022	2023	2024
Urusan Kelautan dan Perikanan				
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	3,42	3,28	5,56	4,61
Produksi perikanan tangkap (ton)	8,017	8118	8.120,00	8140
Produksi perikanan budidaya (ton)	37.023,67	46332,52	30.660,68	33409
Produksi benih ikan (juta ton)	155,83	208,98	163,26	133660000
Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,83	42,58	42,63	
Cakupan Bina kelompok nelayan	100	100	100,00	37
Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8.017	8118	8.120,00	8140
Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton),	731,3	745,96	715,02	715
Urusan Pariwisata				
Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)		2 Hari	2 Hari	2 hari
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,63%	n/a	0,45	
Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	44	23	13.471,00	17287
Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	n/a	85,7	88,6	88
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	n/a	12,292	12,31	9,5 M
Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	n/a	51	55,00	44
Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	n/a	64	71,00	82
Urusan Pertanian				
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	3,60	2,08	2,65	1,55
Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	3,60	2,08	2,65	1,55
Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	3,60	2,08	2,65	1,55
Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	3,60	2,08	2,65	1,55
Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	n/a	90	85,00	90,00
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	n/a	11.61	17,54	4,53
Urusan Perdagangan				
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,01	19,82%	19,59	19,76
persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100	100,00	100
Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	0	100,00	80

Layanan Urusan Pilihan	2021	2022	2023	2024
persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	n/a	n/a	35,69	27,41
Urusan Perindustrian				
Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	1,5	2	2,05	1,75
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	9,94	10,03	10,23	10,33
Pertumbuhan industri	1,48	1,97	2,01	1,75
Cakupan Bina kelompok pengrajin	n/a	n/a	11,00	11
Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	29666	30208	30.280,00	31076
Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	n/a	n/a	n/a	9,45

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMD Kab Agam (2025)

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Data unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2021 hingga Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar aspek tata kelola pemerintahan mengalami perbaikan. Pertama, harmonisasi regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten, dengan angka 100% selama empat tahun berturut-turut. Ini mencerminkan kepatuhan regulatif yang tinggi serta keberhasilan dalam menjaga keselarasan antara kebijakan daerah dan pusat, yang menjadi fondasi penting dalam pemerintahan yang tertib hukum. Kedua, fasilitasi penyelesaian tapal batas antar kabupaten juga menunjukkan hasil yang optimal pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 dengan capaian 100%, menandakan adanya keberhasilan dalam menyelesaikan potensi konflik wilayah administratif.

Tabel 2.29 : Capaian Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024
Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100	100	100,00	100
Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupeten	100	100	100,00	n.a
Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	73,24	80,75	80,75	100
Persentase OPD dengan nilai IRB baik	n.a	31.23 (86.67 %)	31.23 (86.67 %)	n.a
Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	n.a	70	n.a	n.a
Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100	100

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMD Kab Agam (2025)

Selanjutnya, capaian reformasi birokrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan tren yang sangat positif. Pada Tahun 2021, sebanyak 73,24% OPD memiliki nilai SAKIP yang baik, dan angka ini meningkat menjadi 80,75% pada tahun 2022 dan 2023. Lebih menggembirakan lagi, di Tahun 2024 seluruh OPD tercatat memperoleh nilai SAKIP yang baik (100%). Ini mengindikasikan peningkatan signifikan dalam manajemen kinerja organisasi dan efisiensi birokrasi daerah. Secara keseluruhan, data unsur pendukung urusan pemerintahan mencerminkan perbaikan kualitas birokrasi, penguatan peran OPD, dan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Secara keseluruhan, capaian indikator penunjang pemerintahan Kabupaten Agam menunjukkan arah perbaikan yang positif, terutama dalam hal perencanaan, efisiensi belanja, dan inovasi kebijakan. Pada aspek perencanaan menunjukkan dinamika kualitas dan konsistensi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Indeks Kualitas Perencanaan Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pada urusan keuangan daerah menunjukkan perbaikan signifikan dalam efisiensi anggaran. Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja menurun drastis dari 19,47% pada Tahun 2021 menjadi hanya 0,19% pada Tahun 2024. Ini mencerminkan perencanaan anggaran yang semakin realistis dan pelaksanaan yang lebih tepat sasaran. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi pendapatan asli daerah masih belum stabil dan membutuhkan strategi optimalisasi penerimaan yang lebih presisi. Kemandirian keuangan daerah cenderung stagnan di angka rendah, sekitar 9,15–11,28%. Ini menandakan bahwa Kabupaten Agam masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, dan upaya peningkatan PAD harus menjadi prioritas. Opini BPK terhadap LKPD yang secara konsisten meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah sudah cukup akuntabel.

Tabel 2.30 : Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam

Unsur Penunjang urusan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024
Perencanaan				
Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	n/a	96,43	100,00	87,59
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	n/a	70,4	64,52	72,58
Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	90	100	100,00	88,89
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	98,5	98	100,00	100,00
Keuangan				
Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	19,47	14,97	9,75	0,19
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10,11	3,94	33,29	14,54
Kesesuaian pengalokasian anggaran	80	80	90,00	90,00
Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	9,15	11,28	10,61	10,78
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	n/a	WTP
Manajemen Aset	n/a	Baik	Baik	baik
Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	0,27	0,06	0,24	19,20
Kepegawaian				
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	290,60	337,66	340,00	255
Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32,45	32,79	72,00	27
Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28,97	22,34	3,50	40
Penelitian dan Pengembangan				
Indeks Kinerja Kelitbangan	66	23,5	79,61	95
Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	98	98	100,00	100
Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	32	47	59,21	89

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMD Kab Agam (2025)

Pada urusan kepegawaian, rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah terhadap dasar (PNS non-guru/nakes) menunjukkan peningkatan dari 290,60 pada Tahun 2021 menjadi 340,00 pada Tahun 2023, tetapi menurun ke 255 di Tahun 2024. Penurunan ini bisa disebabkan oleh pensiun massal, reorientasi kebijakan formasi, atau perubahan komposisi pegawai. Rasio pegawai fungsional naik secara signifikan di 2023 (72%), namun turun drastis ke 27% pada Tahun 2024. Kinerja bidang kelitbangan mengalami perkembangan

yang pesat. Indeks Kinerja Kelitbangan meningkat dari 66 pada Tahun 2021 menjadi 95 pada Tahun 2024, dengan lonjakan signifikan setelah sempat turun drastis ke 23,5 pada Tahun 2022. Ini mencerminkan peningkatan kapasitas lembaga litbang daerah dan kemampuannya dalam menghasilkan output berkualitas.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, aspek pengawasan di Kabupaten Agam sudah berada pada tingkat kematangan sedang, baik dari sisi SPIP maupun APIP. Capaian SPIP Kabupaten Agam selama empat tahun berada pada Level 3 (terdefinisi), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern sudah berjalan secara memadai dan terstruktur. Angka maturitas meningkat secara bertahap dari 3,06 pada Tahun 2021, 3,144 pada Tahun 2022, hingga 3,152 pada 2024. Selama empat tahun terakhir, Kapabilitas APIP juga bertahan di Level 3, dengan nilai konstan 3,00 sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2024. Ini berarti fungsi pengawasan internal di Kabupaten Agam sudah cukup kuat dalam hal kepatuhan terhadap standar pengawasan, pelaksanaan audit, dan pemantauan pengendalian. Nilai Indeks Persepsi Antikorupsi Kabupaten Agam menunjukkan penurunan selama tiga tahun berturut-turut: dari 86,03 pada Tahun 2021, menjadi 81,16 pada Tahun 2022, lalu sedikit turun lagi ke 81,03 pada Tahun 2023. Meskipun angkanya masih tergolong tinggi, tren penurunan ini perlu menjadi perhatian, karena dapat mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan pelayanan birokrasi.

Tabel 2.31 : Capaian Urusan Pengawasan Tahun 2021-2024

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	3,06	Level 3 (3,144)	3,10	Level 3 (3,152)
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	3	Level 3 (3,00)	3,00	Level 3 (3,00)
Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	2 opd	2 opd	2 opd	2opd
Indeks Persepsi Anti Korupsi	86,03	81,16	81,03	n.a

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMD Kab Agam (2025)

g. Unsur Kewilayahan

Kualitas layanan publik, khususnya di wilayah kerja Kecamatan mengalami perbaikan yang berkesinambungan. Berdasarkan indikator persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan menunjukkan tren positif yang stabil dalam empat tahun terakhir. Capaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan di Kabupaten Agam meningkat secara bertahap dari 84,31% pada Tahun 2021, menjadi 84,39% pada Tahun 2022, 85,31% pada Tahun 2023, dan 86,50% pada Tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan mulai membuahkan hasil

Tabel 2.32 : Capaian Urusan Kewilayahan Tahun 2021-2024

Unsur Kewilayahan	2021	2022	2023	2024
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (Nilai merupakan rata-rata nilai Kecamatan)				
- Kecamatan Baso - Kecamatan IV Angkek - Kecamatan Candung - Kecamatan Tilatang Kamang - Kecamatan Kamang Magek - Kecamatan Palupuh - Kecamatan Banuhampu - Kecamatan Sungai Pua - Kecamatan IV Koto - Kecamatan Matur - Kecamatan Palembayan - Kecamatan Tanjung Raya - Kecamatan Lubuk Basung - Kecamatan Ampek Nagari - Kecamatan Tanjung Mutiara - Kecamatan Malalak	84,31	84,39	85,31	86,50

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMD Kab Agam (2025)

h. Unsur Pemerintahan Umum

Aspek urusan pemerintahan umum di Kabupaten Agam menunjukkan peningkatan signifikan dalam penanganan konflik sosial dan keterbukaan informasi pelayanan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi keuangan daerah. Pada indikator Persentase potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) atau konflik sosial yang dapat diatasi menunjukkan perkembangan

signifikan. Tahun 2022 dimulai dengan capaian sebesar 92% dan mencapai 100% pada Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas deteksi dan respon terhadap potensi konflik secara optimal di tahun berikutnya. Akses publik terhadap keuangan daerah baru tersedia datanya pada Tahun 2024 dengan capaian 20%. Meskipun relatif rendah, hal ini menandai langkah awal pemerintah daerah dalam membuka ruang keterbukaan informasi anggaran kepada publik. Rendahnya angka ini mengindikasikan masih terdapat pekerjaan rumah dalam memperluas kanal komunikasi publik, memperkuat sistem informasi keuangan daerah yang mudah diakses, serta meningkatkan literasi anggaran di kalangan masyarakat.

Tabel 2.33 : Capaian Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2021-2024

Unsur Pemerintahan Umum	2021	2022	2023	2024
Persentase potensi ATHG/konflik sosial yang dapat diatasi.	n/a	92,00	81	100
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	n/a	n/a	75	100
Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	n/a	n/a	n/a	20

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMD Kab Agam (2025)

2.1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026

Visi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”. Sementara misi RPJMD ditetapkan sebagai berikut :

1. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani
2. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana
4. Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter

5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani, berlandaskan ABS-SBK.

Pencapaian visi dan misi dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

Tabel 2.34 : Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Utama		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Misi I : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC (54,05)	69,98 (baik)	75,84
2	Nilai Sakip	B	B (65,92)	B (66,91)	B (67,11)
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan (64)	Perlu Perbaikan (71,58)	Perlu Perbaikan (70,32)	Perlu Perbaikan (74,03)
4	Nilai EPPD	2,92	2,94	3,49	3,5771
5	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	38,04 (tinggi)	Tinggi (38,74)	Tinggi (38,82)	39,88
6	Indeks Profesionalitas ASN	50,6	51,80	65,48	78,81
7	Indeks SPBE	2,31 (Cukup)	2,38 (Cukup)	2,55	2,56
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,49	83,95	84,53	86,3
9	Persentase Nagari Dengan Katagori Cepat Berkembang	25,6	48,7%	60,87	69,00
10	Indek Pengelolaan Pemerintahan Nagari	430	453	454	469
Misi II: Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumbedaya daerah dan pengembangan pariwisata					
11	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	3,47	2,92	3,12	2,74
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,7	4,21	4,52	4,12
13	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	3,35	2,21	2,65	1,55
14	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	23,64	2,35	2,5	1,85
15	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	n.a	10	n.a	3,08
16	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	4,2	16,86	8,26	4,82
17	Jumlah Kunjungan Wisatawan	734610	761.422	892.145	930.617
18	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	4,33	3,95	5,74	7,60
19	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	80,3	72,75	74,27	68,98

Indikator Kinerja Utama		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
20	Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian tahun dasar (2020)	-36,6	32,77	41,42	75,76
Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana					
21	Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah (0,33)
22	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	82,53	70,31	79	86,91
23	Indeks kualitas lingkungan Hidup	67,76	70,39	72,61	70,74
24	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	98,66	98,55	99,98	99,99
Misi IV: Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter					
25	Indeks Pembangunan Manusia	72,57	73,29	73,98	75,08
26	Angka Harapan Lama Sekolah	13,88	13,88	13,89	14,16
27	Rata rata lama sekolah	8,97	8,98	9,22	9,23
28	Angka Harapan Hidup	72,53	72,89	74,22	74,39
29	Nilai Pertumbuhan Produktivitas Daerah (Juta/Kapita)	87,89	92,89 88,32 (Nilai Update)	88,52	92,97
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,06	4,93	4,96	4,73
31	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	40	91	91	92,79
32	Jumlah cabang olah raga berprestasi	44	46	46	47
33	Indeks ketahanan pangan daerah	84,48	85,34	86,4	86,92
34	Indeks Kesejahteraan Rakyat	50	72,1	76,68	88,52
35	Status IDM	Mandiri : 10	Mandiri : 20	Mandiri : 30	Mandiri : 42
		Maju : 46	Maju : 54	Maju : 47	Maju : 41
		Berkemban g : 26	Berkemban g : 8	Berkemban g : 15	Berkemban g : 9
36	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	50	88,68	90,25	90,89
37	IPG	97,01	97	97,27	97,37
38	Indek perlindungan anak	60,00	60	70,7	63,04
39	Total Fertility Rate	2,96	3	2,55	2,48
Misi V : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani, berlandaskan ABS-SBK					
40	Indeks Keamanan	52,95	90,04	91,3	96,7
41	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	6,02	3,83	3,19	2,74
42	Persentase kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan yang ditangani	83	88,00	86	100
43	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	63	85,00	85	90
44	Persentase nagari madani Level V	9	13,42	10,87	14,13
	Jumlah Nagari Madani Level				
-	V	7	9	10	13

Indikator Kinerja Utama		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	IV	39	57	49	64
-	III	26	15	28	15
-	II	10	1	4	
-	I	-	-	1	
45	Persentase Lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	72,15	75	100	100
46	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	51	52	100	94,55

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMD Kab Agam (2025)

2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat; dan
6. Sosial

Tabel 2.35 : Capaian SPM Kabupaten Agam Tahun 2021-2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Bidang Pendidikan					
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam	76.699	81.999	81999	86631
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	1.131	1.356	1901	1859
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	10.134	10423	16178	16746
Bidang Kesehatan					
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	7.103	2.595	7,538	3856
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu melahirkan yang mendapatkan layanan kesehatan	7.164	2.477	6,693	3808

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	7.104	2359	9,151	3661
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	22.574	11592	42,46	16504
Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan	52.455	23864	82,193	38241
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	214.329	227540	306,69	158035
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	67.938	17957	66,753	30918
Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	9.165	15146	19,177	7905
Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	2.478	4388	5,289	2124
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan	474	1329	1,542	716
Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	499	4316	10,046	2864
Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency)	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency) yang mendapatkan layanan kesehatan	8.380	7206	12,342	1853
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah rumah tangga yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	107.363	10,018	1500	322
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	90.589	2,467	139	478
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	2	100	100	100
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	100	100	100
Bidang Sosial					

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	150	131	100	80
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	282	373	40	40
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi Sosial diluar Panti	227	0	78	78
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti Sosial	0	0	407	407
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana	Jumlah perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	0	0	100	100
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Capaian Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	100%	100	100	100
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	130	130	58	100
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat					
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	524,829	524,829	524,829	524,829
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	524,829	524,829	524,829	524,829
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	239	239	239	284
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	301	301	301	341

Sumber : Hasil Evaluasi SPM Kab Agam (2025)

Capaian layanan pendidikan menunjukkan peningkatan dalam jumlah. Pada layanan pendidikan dasar, Jumlah warga usia 7–15 tahun yang berpartisipasi meningkat dari 76.699 siswa menjadi 86.631 siswa. Pada layanan pendidikan kesetaraan jumlah siswa meningkat dari 1.859 menjadi 1859 siswa. Hal ini menunjukkan komitmen pada pendidikan inklusif. Sementara pada layanan PAUD, Capaian meningkat secara konsisten dari 10.134 (Tahun 2021) menjadi 16.746 (Tahun 2024), menunjukkan keberhasilan dalam perluasan akses pendidikan anak usia dini.

Pada bidang kesehatan, capaian layanan Ibu Hamil, Melahirkan, dan Bayi Baru Lahir turun dari 7.103 menjadi 3.856. Namun secara tingkat capaian sudah sesuai target yang diberikan. Layanan lainnya yang mengalami penurunan target adalah pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. Namun secara capaian terhadap target sangat baik atau hampir tercapai 100 persen.

Pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Agam dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pada tahun 2024 tingkat capaian sebesar 100 persen, dimana layanan untuk Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum tercapai 322 orang dari target sebanyak 322 orang. Sementara Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik tercapai 478 orang dari target sebanyak 478 orang. Sementara pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Layanan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana pada tahun 2024 mencapai 100 unit, sementara layanan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah mencapai 100 unit.

2.1.7 Capaian SDGS

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Agam dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Agam sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

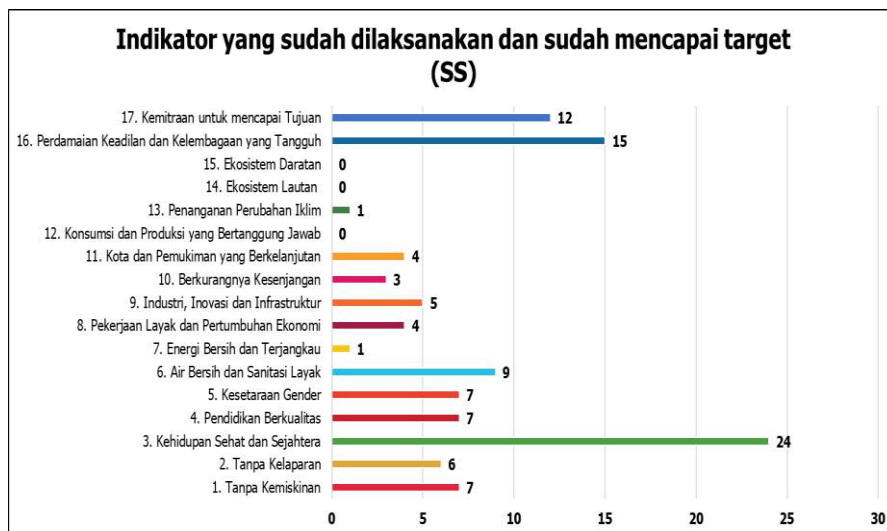
- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB); dan
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA)

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 16 TPB (kecuali TPB 14, Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan). Jumlah indikator dari 16 TPB/SDGs yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator.

1. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Kabupaten Agam adalah sebanyak 105 indikator atau dengan persentase 47,73%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat grafik berikut.

Grafik 2.68 : Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Agam

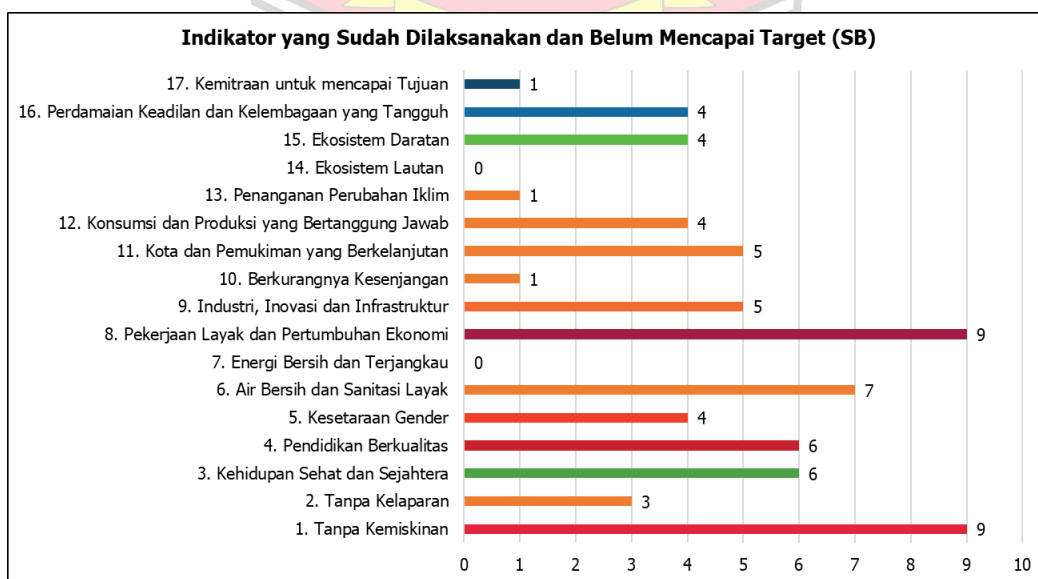


Sumber : KLHS (2025)

2. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kabupaten Agam adalah sebanyak 69 indikator atau dengan persentase 31,36%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.69 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Agam

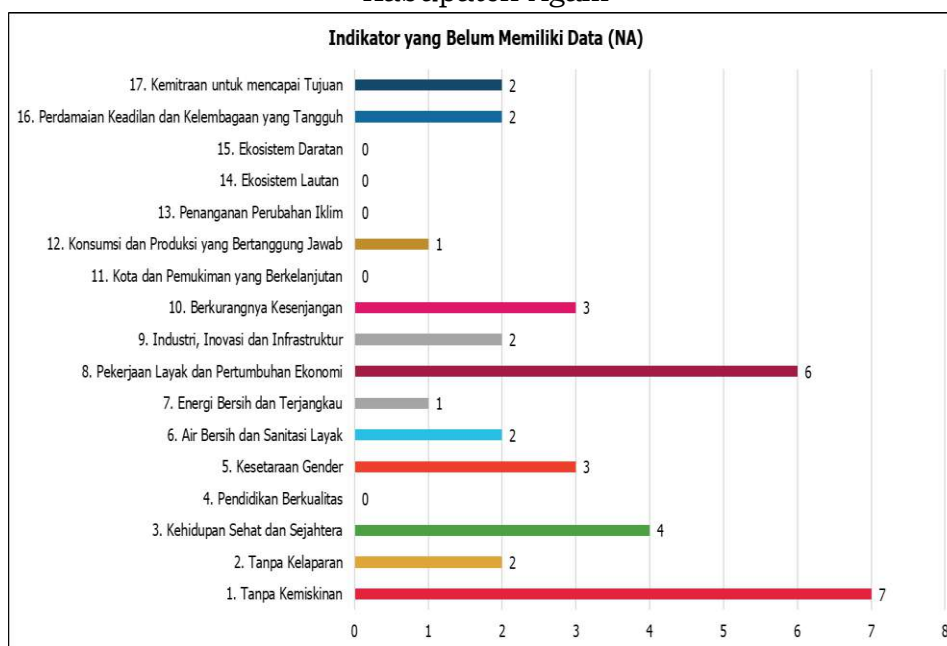


Sumber : KLHS (2025)

3. Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang tidak memiliki data adalah sebanyak 26 indikator atau 11,82%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang tidak memiliki data dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.70 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Kabupaten Agam



Sumber : KLHS (2025)

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Agam berkewajiban mengelola keuangan daerah secara tertib dan taat terhadap peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Agam mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Dalam PP No. 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah terkait dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah tersebut mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, keuangan daerah merupakan instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah dalam bidang keuangan sehingga perlu mencermati hubungan integral dan keseimbangan antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal daerah serta efektifitas pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan jangka panjang. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis kinerja keuangan daerah melalui informasi keuangan daerah meliputi analisis pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pembahasan tentang gambaran umum keuangan daerah berhubungan dengan analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan sumber pendapatan daerah dan belanja daerah serta kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk memahami kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu analisis kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut juga dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa datang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD mempunyai fungsi berikut ini:

- a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

- b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- e. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- f. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan kinerja yang semakin baik, yang antara lain ditunjukkan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Agam selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut sejak tahun 2014. Berikut disajikan realisasi APBD periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.36 : Realisasi APBD Tahun 2020-2024 Kabupaten Agam

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	1.365.885.610.415,53	1.411.504.675.335,57	1.387.989.964.289,09	1.406.808.890.968,76	1.526.670.873.804,71
Pendapatan Asli Daerah	107.162.961.554,53	129.154.679.029,57	156.668.962.118,09	148.328.271.997,76	164.717.557.880
Pendapatan Transfer –	1.190.878.325.426,00	1.208.426.737.306,00	1.230.038.837.171,00	1.254.826.618.971,00	1.361.215.315.925
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	67.844.323.435,00	73.923.259.000,00	1.282.165.000,00	3.654.000.000,00	738.000.000
Jumlah Pendapatan	1.365.885.610.415,53	1.411.504.675.335,57	1.387.989.964.289,09	1.406.808.890.968,76	1.526.670.873.804,71
Belanja Daerah	1.354.150.129.481,65	1.368.645.115.804,95	1.437.208.850.221,44	1.423.593.832.548,47	1.534.849.060.997
Belanja Operasi	1.023.188.642.188,65	1.058.552.055.579,95	1.111.767.103.274,44	1.094.309.908.639,98	1.210.859.160.870
Belanja Modal	135.090.687.654,00	142.409.062.383,00	164.566.544.086,00	155.560.100.788,00	139.007.975.111
Belanja Tidak Terduga	38.081.175.054,00	7.792.950.324,00	4.891.962.085,00	6.304.959.225,49	3.157.818.416
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	157.789.624.585,00	159.891.047.518,00	155.983.240.776,00	167.418.863.895,00	181.824.106.600
Jumlah Belanja	1.354.150.129.481,65	1.368.645.115.804,95	1.437.208.850.221,44	1.423.593.832.548,47	1.534.849.060.997,00
Surplus/Defisit	11.735.480.933,88	42.859.559.530,62	49.218.885.932,35	16.784.941.579,71	8.178.187.192,29
Pembiayaan Daerah	77.728.818.319,46	77.728.818.319,46	117.833.547.802,08	65.301.635.421,73	47.620.328.848
Penerimaan Pembiayaan	77.728.818.319,46	77.728.818.319,46	120.333.547.802,08	65.301.635.421,73	48.620.328.848
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	2.500.000.000,00	-	1.000.000.000
Pembiayaan Netto	77.728.818.319,46	77.728.818.319,46	117.833.547.802,08	65.301.635.421,73	47.620.328.848
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA)	77.728.818.319,46	77.728.818.319,46	117.833.547.802,08	65.301.635.421,73	47.620.328.848

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil.

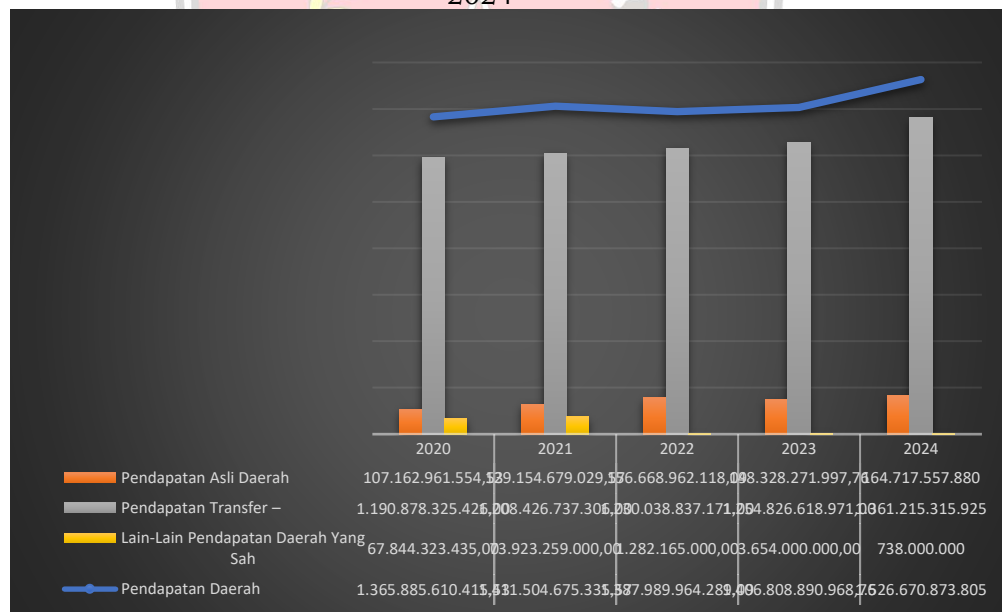
Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri dari: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah PAD Rp.107.162.961.554,53, meningkat hingga menjadi Rp 156.668.962.118,09 pada tahun 2022. Tetapi pada tahun 2023 kembali turun menjadi Rp 148.328.271.997,76 dan kembali meningkat menjadi Rp. 164.717.557.880. Secara keseluruhan, dalam 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,74%. Dalam periode yang sama, Pendapatan Dana Transfer juga mengalami pertumbuhan. Pendapatan Dana Transfer tahun 2020 Rp 1.190.878.325.426,00 dan mengalami kenaikan sehingga tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi Rp 1.361.215.315.925. Secara

keseluruhan, dalam 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun minus sebesar 2,86%. Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Dana Penyesuaian, sehingga pada tahun-tahun tersebut terjadi peningkatan yang signifikan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 adalah Rp 67.844.323.435,00 dan meningkat menjadi Rp73.923,26 juta tahun 2021, tetapi pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan sehingga pada tahun 2024 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berjumlah Rp 738.000.000. Jumlah dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.71. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

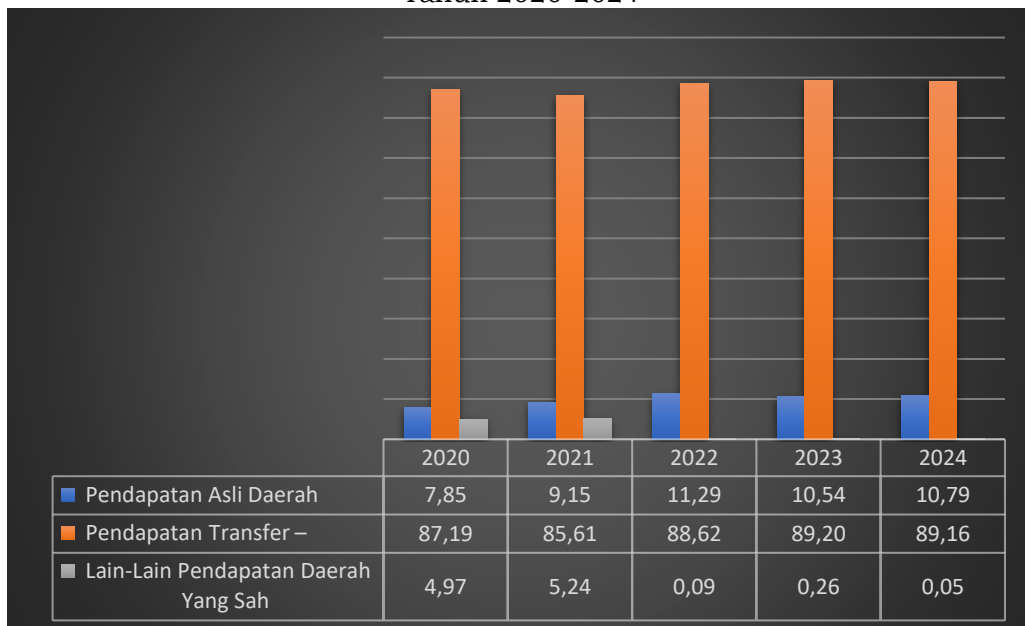


Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Agam

Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang lebih tinggi dibandingkan sumber Pendapatan Daerah lainnya sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan kontribusi PAD terhadap sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam lainnya mengalami peningkatan. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2020 adalah 7,85% dan meningkat hingga pada tahun 2022 naik menjadi 11,29% dan kembali turun menjadi 10,79% tahun 2024. Rata-rata proporsi PAD mencapai 9,92%. Kontribusi pendapatan Dana Transfer

terhadap Pendapatan Daerah juga mengalami peningkatan dari 87,19% tahun 2020 menjadi 89,16 pada tahun 2024 dengan rata-rata proporsi sebesar 87,96%. Sementara kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan dari 4,97% pada tahun 2020 menjadi 0,05% tahun 2024. Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.72 : Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Agam

b. Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 55, Belanja Daerah diklasifikasikan atas 4 kelompok, yaitu:

- 1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

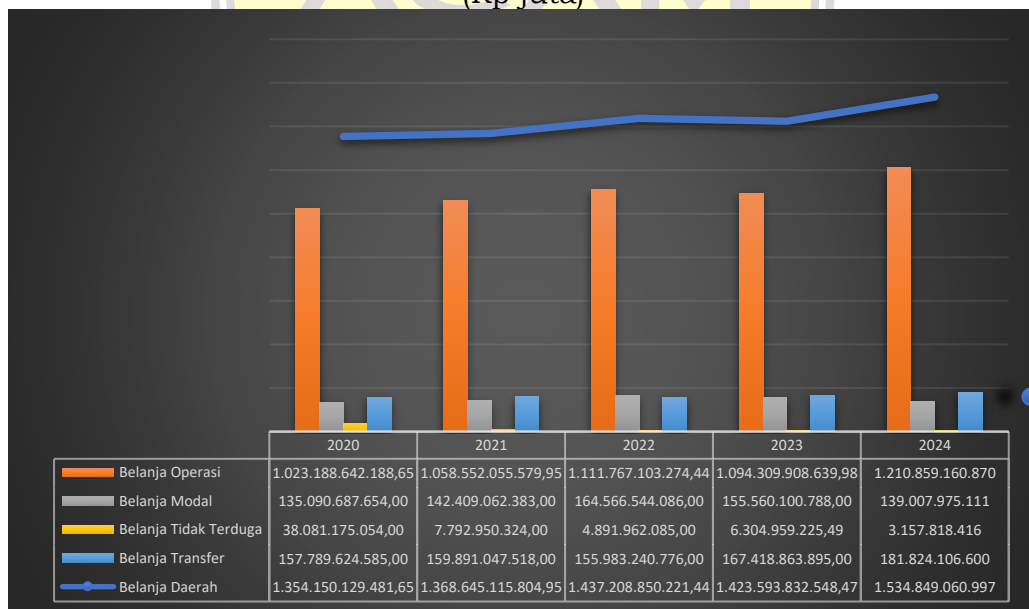
- 4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Agam mengalami peningkatan dalam 5 tahun belakang. Realisasi belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 1.354.150.129.481,65 dan meningkat hingga menjadi Rp. 1.534.849.060.997 pada tahun 2024. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Agam meningkat rata-rata sebesar 2,67% pertahunnya. Peningkatan realisasi belanja ini sejalan dengan peningkatan kemampuan daerah karena meningkatnya pendapatan daerah.

Belanja operasi mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,67%, yaitu dari Rp 1.023.188.642.188,65 pada tahun 2020 menjadi Rp 1.210.859.160.870 pada tahun 2024. Sejalan dengan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Agam yang mengalami sedikit peningkatan setelah tahun 2020, maka belanja operasi juga mengalami sedikit peningkatan. Di samping itu, peningkatan belanja transfer mempunyai pola yang sama dengan belanja operasi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,35%, yaitu dari Rp 157.789.624.585,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 181.824.106.600 pada tahun 2024. Selanjutnya komponen belanja modal, dalam kurun waktu sama hanya mengalami peningkatan rata-rata sebesar minus 0,58 pertahunnya. Belanja modal pada tahun 2020 sebesar Rp. 135.090.687.654,00, meningkat hingga Rp. 164.566.544.086,00 dan kembali turun hingga menjadi Rp. 139.007.975.111 pada tahun 2024. Faktor yang menjadi penyebab hal tersebut adalah menurunnya kapasitas kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan belanja. Kebijakan refocusing yang harus diambil atas menurunnya kemampuan pendanaan ini yang berdampak pada menurunnya belanja modal tersebut dengan memprioritaskan belanja modal yang benar-benar menyentuh langsung masyarakat khususnya pada belanja modal jalan, jembatan, irigasi dan jaringan. Komponen belanja tidak terduga mengalami penurunan paling tinggi selama 5 tahun yaitu turun rata-rata sebesar 18,34% pertahunnya.

Pada tahun 2020 jumlah belanja tak terduga sebesar Rp 38.081.175.054,00 kemudian di tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan sehingga pada tahun 2024, jumlah belanja tak terduga ini menjadi Rp 3.157.818.416. Besarnya anggaran belanja tidak terduga ditahun 2020 dialokasikan untuk penanggulangan bencana alam (tanggap darurat) dan bencana sosial yang tidakdiperkirakan sebelumnya, serta percepatan penanganan pandemi Covid-19. Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.73 : Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024 (Rp juta)

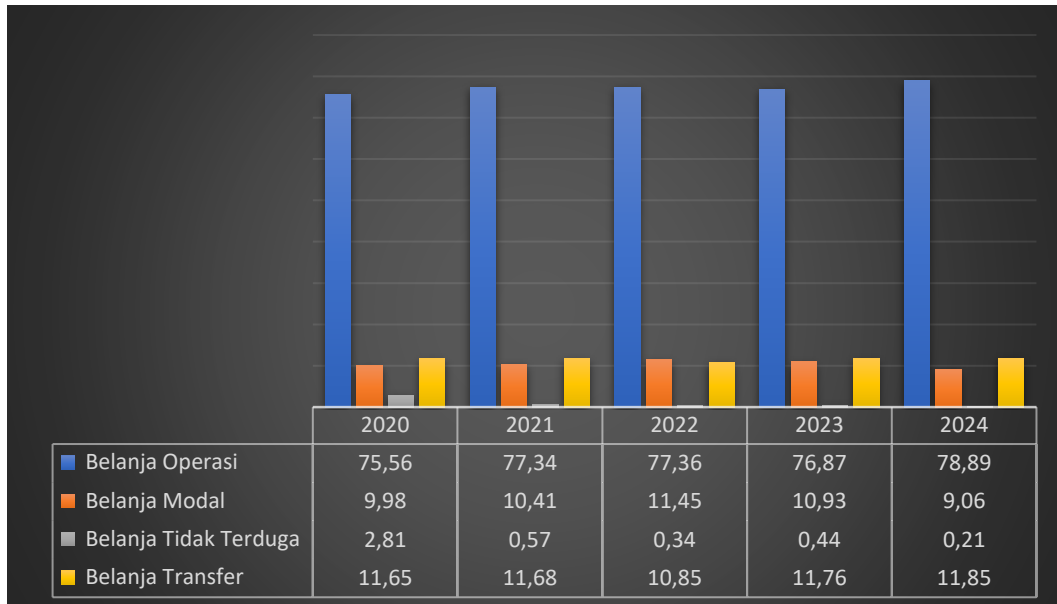


Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Agam

Proporsi terbesar dari Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam adalah untuk Belanja Operasi, di mana proporsi rata-rata tahun 2020-2024 sebesar 77,20%. Proporsi kedua terbesar dari Belanja Daerah adalah Belanja Transfer dengan proporsi rata-rata 11,56%. Kemudian diikuti Belanja Modal, dengan proporsi rata-rata dalam tahun 2020-2024 sebesar 10,36%. Rendahnya Belanja Modal ini adalah karena terbatasnya sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam dan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan Belanja Operasi. Sementara proporsi rata-rata belanj

tidak terduga sebesar 0,87 persen. Perkembangan proporsi Belanja Pemerintah Kabupaten Agam dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.74 : Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Agam

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sehingga selisihnya akan menghasilkan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Agam selama periode Tahun 2020-2024 cukup berfluktuasi. Pembiayaan netto ditahun 2020 mencapai dari Rp 65.993.337.385,58 tahun 2020 , meningkat hingga menjadi Rp 117.833.547.802,08 tahun 2022. Namun pada tahun 2023 pembiayaan netto mengalami penurunan menjadi Rp. 65.301.635.421,73 pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi Rp. 47.620.328.848 pada tahun 2024. Penerimaan Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2024 digunakan untuk Penyertaan Modal pada BUMD. Perkembangan pembiayaan daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.75. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024 (Rp juta)



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Agam

d. Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi Utang untuk tahun berikutnya. Hal ini berarti bahwa belanja yang menjadi prioritas utama dalam sebuah anggaran seperti belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Dari segi jumlah, Belanja Pegawai merupakan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama paling besar (52,72%) dibandingkan belanja lainnya. Sedangkan dari segi tingkat pertumbuhan, Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH merupakan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama yang memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun paling tinggi dibandingkan belanja lainnya. Sekalipun pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama befluktuasi, namun perkembangannya tidak banyak mengalami perubahan. Tahun 2019 pengeluaran ini berjumlah Rp1.036.110,14 juta dan menurun menjadi Rp857.456,42 juta tahun 2023, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar minus 4,62%.

Tabel 2.37. Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2020-2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	426.405	432.880	436.794	437.153	504.415
3	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.828	59.746	61.343	64.739	77.441
2	Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH	9.664	18.848	17.043	16.985	387
4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5	Belanja bagi hasil	3.086	3.403	385	-	-
		-	-	-	-	-
B	Belanja Langsung	-	-	-	-	-
1	Belanja Honorarium Non PNS	30.213	-	7.303	7.341	2.833
2	Belanja Upah Kerja	4.689	4.924	-	-	-
3	Dana Alokasi Khusus	93.100	95.276	92.155	47.863	58.348
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	173.511	190.255	214.113	241.677	237.047
5	Hibah BOS	-	-	-	-	-
6	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	9	23	442	-	-
7	Belanja premi asuransi kesehatan	28.732	33.842	19.437	38.404	34.058
8	Belanja listrik, air, telepon	2.315	2.384	3.750	3.232	21.531

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
C	Pembiayaan Pengeluaran	-	-			-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-			-
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	- 2.500		-
TOTAL						

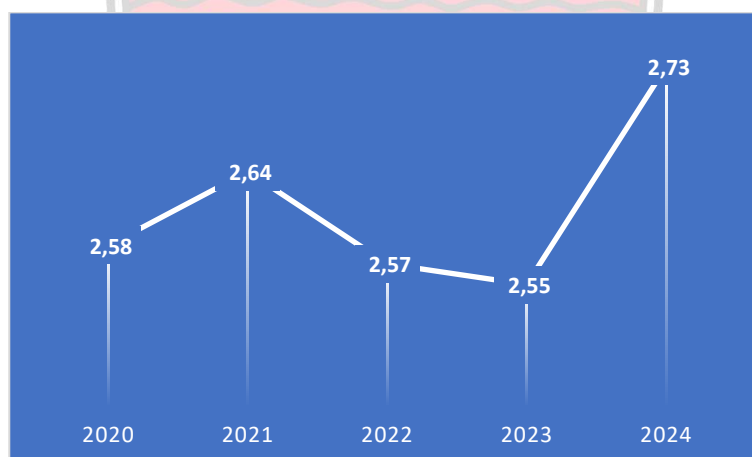
Sumber: BPS, LKPD Agam (diolah) : 2025

2.2.2 Analisa Fiskal Daerah

a. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung pemerintah, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran rill dari pendapatan daerah, sehingga diharapkan analisis rasio ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang. Rasio ini dihitung dengan membagi total pendapatan daerah dengan jumlah penduduk.

Grafik 2.76 : Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Agam Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, LKPD Agam (diolah) : 2025

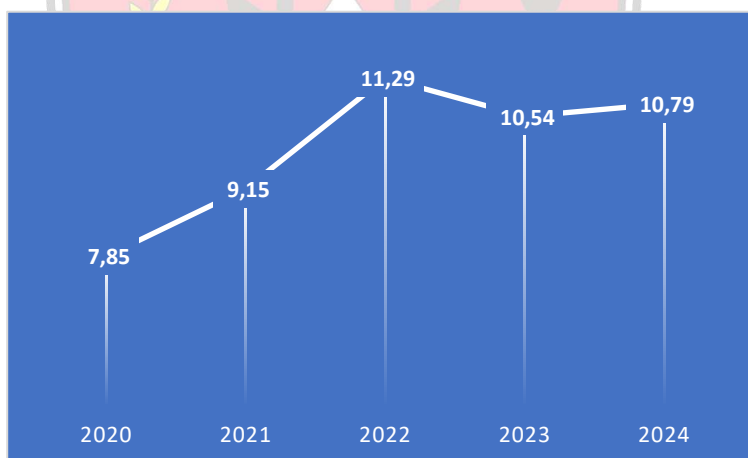
Kemampuan Pemerintah Kabupaten Agam dalam membiayai pelayanan penduduknya tahun 2020 adalah Rp2,58 Juta, dan meningkat menjadi Rp2,73 juta tahun 2024. Untuk meningkatkan rasio ini, maka

Pemerintah Kabupaten Agam harus membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan intensifikasi pemungutan berbagai sumber PAD serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan lain guna meningkatkan Pendapatan Daerah.

b. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan PAD mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah; semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini menekankan *money follows program*.

Grafik 2.77 : Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, LKPD Agam (diolah) : 2025

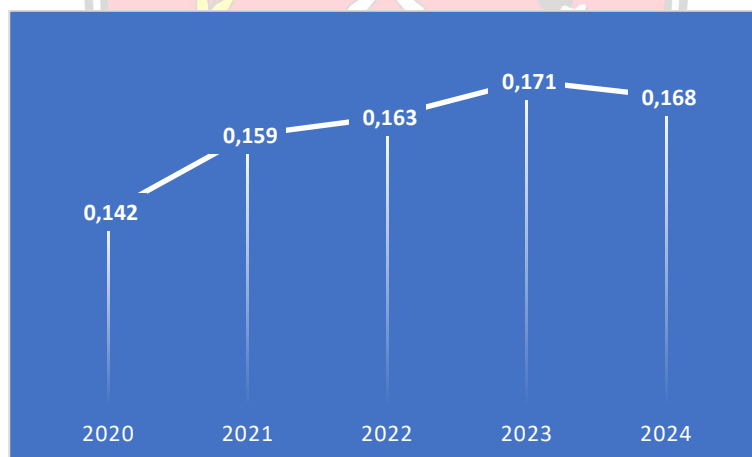
Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Agam meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rasio kemandirian sebesar 7,85% dan terus meningkat hingga menjadi 10,79% pada tahun 2024. Sekalipun capaian kinerja kemandirian keuangan di atas rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat, namun Pemerintah Kabupaten Agam seharusnya tetap membuat kebijakan dan upaya-upaya peningkatan PAD, agar kemandirian Pemerintah Kabupaten Agam bisa ditingkatkan;

mendekati capaian kinerja kabupaten lain seperti Kota Padang yang sudah di atas 20%.

c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peningkatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan daerah dalam mengkonversi potensi penerimaan menjadi realisasi penerimaan yang semakin besar. Rasio tersebut juga dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perekonomian daerah.

Grafik 2.78 : Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Agam
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, LKPD Agam (diolah) : 2025

Capaian rasio tersebut di kabupaten Agam meningkat dalam 5 tahun terakhir. Rasio pajak terhadap PDRB pada Tahun 2020 sebesar 0,142. Namun ditahun-tahun selanjutnya rasio pajak daerah meningkat hingga mencapai angka 0,168 di Tahun 2024. Secara nilai rupiah, pajak daerah Agam meningkat dari 32,21 milyar menjadi 44,85 milyar dalam periode tersebut. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Indikasi penyebab rendahnya capaian kinerja ini di antaranya adalah belum optimalnya unit pemungut pajak dan retribusi dalam

melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak dan retribusi yang masih perlu ditingkatkan. Kebijakan dan penguatan terhadap peraturan terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Agam juga perlu dilakukan agar penegakkan disiplin dan atau sanksi yang lebih keras dapat dilaksanakan secara efektif.

d. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Agam dalam mendanai Belanja Daerah relatif terkendali, namun kecenderungannya menunjukkan penurunan. Jika Tahun 2020 rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam sebesar 106,61% dan turun menjadi 102,57% pada Tahun 2024.

Grafik 2.79. Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2020-2024

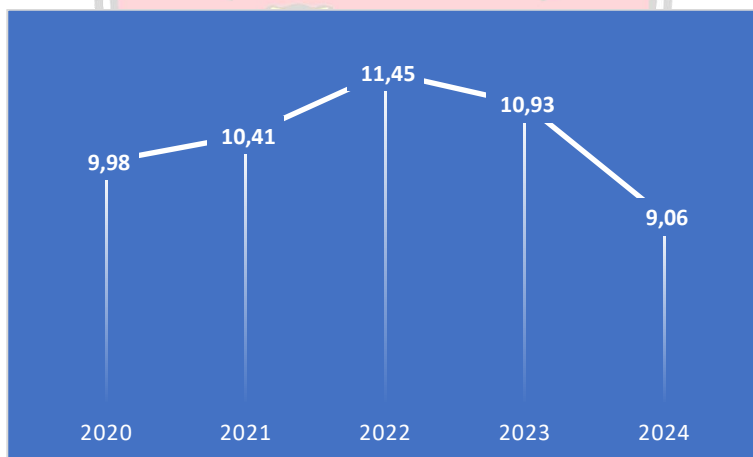


Sumber: BPS, LKPD Agam (diolah) : 2025

e. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan proporsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Modal. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif. Karena, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Di samping itu, Belanja Modal memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio Belanja Modal, diharapkan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio Belanja Modal, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Data Tahun 2020-2024 menunjukkan penurunan dalam rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Agam. Rasio Belanja Modal Tahun 2020 adalah 9.98% dan turun menjadi 9,06% Tahun 2024.

Grafik 2.80 : Rasio Belanja Modal Menurut Kabupaten di Sumatera Barat



Sumber: BPS, LKPD Agam (diolah) : 2025

2.2.3. Neraca Daerah

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, yang menggambarkan posisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas. Berikut disajikan tabel neraca pemerintah kabupaten Agam.

Tabel 2.38. Neraca Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Aset	4.040.468,41	4.143.803,71	4.177.316,91	4.414.693,59	4.358.901,71
Aset Lancar	162.057,18	207.567,75	176.965,60	210.641,62	182.184,88
Investasi Jangka Panjang	81.437,93	80.070,06	88.010,67	98.286,65	101.459,74
Aset Tetap	1.718.336,33	1.729.153,91	1.765.979,18	1.828.164,77	1.828.572,02
Aset Lainnya	58.402,77	55.110,15	57.703,00	70.253,75	67.234,22
Jumlah Aset	2.020.234,20	2.071.901,86	2.088.658,46	2.207.346,80	2.179.450,86
Kewajiban	68.500,19	30.438,10	17.784,45	98.399,53	142.486,12
Kewajiban Jangka Pendek	34.250,09	15.219,05	8.892,22	49.199,76	71.243,06
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	34.250,09	15.219,05	8.892,22	49.199,76	71.243,06
Ekuitas	1.985.984,11	2.056.682,80	2.079.766,23	2.158.147,03	2.108.207,80
Jumlah Ekuitas	1.985.984,11	2.056.682,80	2.079.766,23	2.158.147,03	2.108.207,80
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	2.020.234,20	2.071.901,86	2.088.658,46	2.207.346,80	2.179.450,86

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Agam, LKPD 2020-2024

Pekembangan jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,95% per tahun, dari Rp 2.020.234.203.341 Tahun 2020 menjadi Rp 2.179.450.857.293 Tahun 2024. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh Investasi Jangka Panjang dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 5,79%, yaitu dari Rp81.437.925.496 pada Tahun 2020 menjadi Rp 101.459.735.965 Tahun 2024. Pertumbuhan jumlah (nilai) Investasi Jangka Panjang ini sejalan dengan perkembangan kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Agam. Pertumbuhan kedua tertinggi adalah Aset Lancar, yaitu sebesar 4,71% dari Rp 162.057.182.511 tahun 2020 menjadi Rp 182.184.881.725 tahun 2024. Peningkatan Asset Lancar ini relatif stabil dari tahun ke tahun. Sedangkan pertumbuhan terendah adalah untuk Aset Tetap yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,58%. Jumlah Aset Tetap pada Tahun 2020 berjumlah Rp 1.718.336.325.528 dan naik menjadi Rp 1.828.572.023.139 pada Tahun 2024.

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Agam selama periode 2020-2024 mengalami pertumbuhan rata-rata diatas 100% per tahun, yaitu dari berjumlah Rp 34.250.092.975 pada tahun 2020 dan naik menjadi Rp 71.243.060.971 pada Tahun 2024. Kabupaten Agam tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang dalam 5 tahun terakhir. Jumlah dan perkembangan jumlah

utang yang rendah ini mencerminkan sikap kehati-hatian dan sekaligus mengurangi resiko kegagalan membayar utang dari Pemerintah Kabupaten Agam. Karena jumlah dan perkembangan jumlah utang yang rendah, maka pertumbuhan rata-rata Ekuitas Pemerintah Kabupaten Agam mendekati pertumbuhan rata-rata per tahun dari Aset, yaitu rata-rata per tahun sebesar 1,53%. Jumlah Ekuitas tahun 2020 adalah Rp 1.985.984.110.366 dan meningkat menjadi Rp 2.108.207.796.322 pada Tahun 2024.

2.2.4. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Di samping dialokasikan untuk belanja program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Program Prioritas Kepala Daerah serta alokasi untuk Belanja Daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen dari Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dilakukan dengan melihat tren realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir, memperhitungkan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Agam serta aspek-aspek lain yang berkaitan. Berikut disajikan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan periode Tahun 2026 sampai 2030.

Tabel 2.39. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2026-2030 (Rp juta)

URAIAN	Baseline	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	1.573.318	1.743.764	2.084.527	2.086.360	2.088.193	2.089.693
Pendapatan Asli Daerah	207.820	365.094	599.897	601.277	610.370	615.253
Pendapatan Transfer	1.365.498	1.328.019	1.328.019	1.328.019	1.328.019	1.328.019
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	50.652	156.611	157.064	149.805	146.422

URAIAN	Baseline	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA	1.630.294	1.743.764	2.084.527	2.086.360	2.088.193	2.089.693
Belanja Operasi	1.331.858	1.382.093	1.122.867	1.122.980	1.120.113	1.116.367
Belanja Modal	91.618	155.012	754.178	755.170	759.071	766.441
Belanja Tak Terduga	8.400	8.240	8.400	8.400	8.400	5.400
Belanja Transfer	198.418	198.418	199.082	199.810	200.609	201.486
JUMLAH BELANJA / SURPLUS/DEFISIT	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	57.976	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	-	-	-	-	-

Sumber : Data Diolah

2.2.4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Dalam menghitung proyeksi Pendapatan Daerah digunakan beberapa asumsi. Asumsi dasar untuk Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan proyeksi pendapatan daerah mempertimbangkan APBD Tahun 2025 karena sudah mendapatkan analisis berbagai pihak yang terkait.
2. Pemberlakuan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang akan diperlakukan Tahun 2025 maka perhitungan Pajak Daerah mempertimbangkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang telah disusun oleh Provinsi Sumatera Barat. Khusus untuk Retribusi Daerah dihitung dengan mempertimbangkan 10 jenis retribusi yang selama ini telah dipungut oleh Kabupaten Agam.
3. Memperhatikan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer ke Daerah dan Desa dari Pemerintah Pusat, Pendapatan transfer dari provinsi dalam 5 tahun terakhir.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang dijelaskan di atas, maka hasil proyeksi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40. Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2026-2030 (Rp juta)

URAIAN	Baseline	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	1.573.318	1.743.764	2.084.527	2.086.360	2.088.193	2.089.693
A. Pendapatan Asli Daerah	207.820	365.094	599.897	601.277	610.370	615.253
Pajak Daerah	91.558	93.000	93.492	94.240	94.994	95.754
Retribusi Daerah	94.861	250.300	485.311	485.775	493.943	497.895
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.000	14.200	14.000	14.112	14.225	14.339

Lain-lain PAD yang Sah	7.401	7.594	7.094	7.150	7.207	7.265
B. Pendapatan Transfer	1.365.498	1.328.019	1.328.019	1.328.019	1.328.019	1.328.019
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.303.018	1.265.538	1.265.538	1.265.538	1.265.538	1.265.538
Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.481	62.481	62.481	62.481	62.481	62.481
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	50.652	156.611	157.064	149.805	146.422
Pendapatan Hibah	-	50.652	156.611	157.064	149.805	146.422

Sumber : Data Diolah

Arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam periode 2026-2030 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

- Pendapatan Asli daerah meningkat dari periode Tahun 2025 sampai dengan 2030 dari Rp. 207.819.815.431,- pada Tahun 2025 menjadi Rp. 615.252.766.271,-. Peningkatan tersebut dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :
- Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah disebabkan implementasi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dan kebijakan penghapusan denda dan pokok pajak oleh pemerintah provinsi sebagai bentuk stimulus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pajak daerah yang belum di tagih secara maksimal.
- Pendapatan Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan pada Tahun 2027 hingga 2030. Hal ini dicapai dengan mengoptimalkan layanan RSUD dan Puskesmas.
- Peningkatan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah melalui peningkatan kontribusi dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun entitas lainnya.
- Transfer dari pemerintah pusat menunjukkan tren stagnan, hal ini menyesuaikan dengan pelaksanaan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

2.2.4.2. Proyeksi Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 menjelaskan bahwa Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang

digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan Pendapatan Daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta earmark.

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama termasuk earmark merupakan bagian dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang sudah pasti pengeluaran dan penggunaannya. Oleh sebab itu, pengeluaran ini menjadi prioritas pertama yang harus dialokasikan dari pendapatan yang dihasilkan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama yang dijelaskan di atas, dan membuat proyeksi berdasarkan capai pertumbuhan rata-rata per tahun 4 tahun terakhir maka dapat disusun proyeksi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Dalam proyeksi belanja pegawai juga sudah mempertimbangkan kenaikan belanja pegawai baru (P3K). Hasil perhitungan proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026-2030 (Rp juta)

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA	1.743.764	2.084.527	2.086.360	2.088.193	2.089.693
A. Belanja Operasi	1.382.093	1.122.867	1.122.980	1.120.113	1.116.367
Belanja Pegawai	887.952	861.010	861.560	862.110	862.660
Belanja Barang dan Jasa	458.835	239.606	241.166	246.371	245.073
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	25.335	15.010	13.010	8.010	5.010
Belanja Bantuan Sosial	9.971	7.240	7.244	3.622	3.624
B. Belanja Modal	155.012	754.178	755.170	759.071	766.441
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.043	447.925	445.592	447.043	448.404
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.565	85.885	86.314	84.848	89.925
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.646	172.851	173.542	177.237	177.946
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.533	43.835	44.010	44.187	44.363
Belanja Modal Aset Lainnya	225	3.682	5.711	5.757	5.803
C. Belanja Tak Terduga	8.240	8.400	8.400	8.400	5.400
Belanja Tidak Terduga	8.240	8.400	8.400	8.400	5.400
D. Belanja Transfer	198.418	199.082	199.810	200.609	201.486
Belanja Bagi Hasil	6.444	7.088	7.797	8.577	9.434
Belanja Bantuan Keuangan	191.975	191.994	192.013	192.032	192.051

Sumber : Data Diolah

Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Agam periode 2025-2029 pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat untuk membiayai pengeluaran operasional pemerintahan atau kewajiban jangka pendek yang tidak bisa ditunda termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
- 2) Pemenuhan alokasi belanja wajib sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Belanja Wajib, dimana dalam APBD termasuk alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besaran penggunaannya telah ditentukan meliputi:
 - a. Belanja pendidikan paling rendah 20 persen dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD
 - b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total Belanja Daerah paling lambat 1 Januari 2027. Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam Belanja Operasi. Pada Tahun 2027,

anggaran Belanja Pegawai diluar tunjangan guru sebesar Rp 625.358.003.000, meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp 626.908.003.000 pada Tahun 2030. Belanja pegawai dalam proyeksi belanja telah memenuhi maksimal 30 persen dari total belanja APBD, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42. Belanja Pegawai Kabupaten Agam Tahun 2027-2030 (Rp juta)

URAIAN		2027	2028	2029	2030
a	Total Belanja Daerah	2.084.527	2.086.360	2.088.193	2.089.693
b	Belanja Pegawai	861.010	861.560	862.110	862.660
c	Tunjangan guru (Tamsil dan TPG)	235.652	235.652	235.652	235.752
d	Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru	625.358	625.908	626.458	626.908
Rasio % (d/a x100)		30,00%	30,00%	30,00%	30,00%

Sumber : Data Diolah

- c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Pada proyeksi tahun 2027 anggaran belanja infrastruktur mencapai angka Rp.54.177.881.705 dan meningkat hingga sebesar Rp. 766.440.564.022 pada Tahun 2030. Angka ini telah memenuhi ketentuan minimal 40 persen belanja infrastruktur.

Tabel 2.43. Belanja Pegawai Kabupaten Agam Tahun 2027-2030 (Rp juta)

URAIAN		2027	2028	2029	2030
a	Belanja Daerah – Belanja Transfer	1.885.445	1.886.550	1.887.584	1.888.208
b	Belanja Modal	754.178	755.170	759.071	766.441
Rasio % (b/a x100)		40,00	40,03	40,21	40,59

Sumber : Data Diolah

- d. Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya meliputi
- Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
 - Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
 - Hasil penerimaan Pajak Air Tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi: penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, pengelolaan limbah
- 3) Memprioritaskan anggaran untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat kabupaten Agam.
 - 4) Memprioritaskan belanja daerah untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program unggulan daerah RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029.
 - 5) Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan megacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengaturnya.
 - 6) Menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung belanja wajib lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah seperti: belanja untuk pengawasan oleh APIP dan belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur,
 - 7) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, alokasi belanja daerah akan didistribusikan secara proporsional pada Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan

masing-masing dengan tetap mengacu kepada target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

2.2.4.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun 2026-2030 dianggarkan Rp. 0,00 setiap tahun seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.44. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026-2030 (Rp juta)

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-	-	-

Sumber : Data Diolah

Adapun arah kebijakan pembiayaan dalam pengelolaan belanja periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Optimalisasi terhadap beberapa pungutan yang menjadi hak pemerintah pada periode sebelumnya yang telah menjadi piutang daerah.
2. Melakukan analisis terhadap beberapa perusahaan daerah yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap PAD maupun dalam proses pembangunan di Kabupaten Agam dikaitkan dengan penyertaan modal pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah.

2.2.2.4. Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Earmark

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan earmark merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda

pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi utang untuk tahun berikutnya. Hal ini berarti bahwa belanja yang menjadi prioritas utama dalam APBD seperti gaji, belanja bagi hasil pada kabupaten/kota yang merupakan kewajiban setiap penerimaan pendapatan provinsi yang harus dibagi kepada kabupaten/kota berdasarkan peraturan atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan earmark Kabupaten Agam terdiri pada belanja operasi; gaji dan tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH, belanja bagi hasil kepada kabupaten kota.

2.3 Permasalahan Dan Isu Srategis

Pembangunan daerah di Kabupaten Agam telah memperlihatkan capaian kinerja yang baik dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, untuk memperkuat fondasi transformasi dalam rangka mencapai visi jangka panjang Kabupaten Agam, masih terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan dan dikelola dengan baik. Selain permasalahan pembangunan, kedepannya Kabupaten Agam juga dihadapkan pada beberapa isu strategis yaitu sebuah kondisi yang dapat menjadi peluang atau tantangan sekaligus, tergantung pada bagaimana mengelola kondisi tersebut.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan merupakan ketidaksesuaian dengan kondisi yang terjadi dengan kondisi ideal yang diinginkan. Identifikasi mengenai permasalahan pembangunan di Kabupaten Agam dapat dilihat dari dua aspek yaitu: a) tren Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan b) perbandingan antara capaian dan target IKK dan IKU. Bagian ini akan menguraikan permasalahan pembangunan berdasarkan beberapa dimensi Pembangunan. Pengelompokan permasalahan Pembangunan berdasarkan bidang Pembangunan adalah penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam rangka penguatan fondasi transformasi.

2.3.1.1. Permasalahan bidang sosial

Kabupaten Agam masih menghadapi beberapa masalah dibidang pembangunan kesehatan. Angka kematian ibu masih relatif tinggi. Selain meningkat dibanding Tahun 2021, capaian kinerja angka kematian ibu juga belum memenuhi target RPJMD periode 2021 – 2026. Sejalan dengan itu, rasio kematian bayi juga meningkat selama tiga tahun terakhir dan juga belum memenuhi target yang ditetapkan. Kabupaten Agam juga masih terkendala dengan penanganan stunting yang ditandai dengan meningkatnya persentase balita stunting dan belum terpenuhinya target penurunan stunting. Hal ini sejalan dengan menurunnya capaian imunisasi pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2021.

Dari sisi morbiditas, insidensi TB per 100.000 penduduk juga terlihat meningkat. Ternyata, peningkatan insidensi TB per 100.000 penduduk sejalan dengan penurunan Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC pada tahun 2023 sebesar 86,40 persen lebih rendah dibanding 2021 dan kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 92 persen. Selain itu, Treatmen coverage pada pasien TB juga belum memenuhi target.

Diantara permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Agam adalah belum tercapainya target harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. APK PAUD dan SD juga belum memenuhi target. Selain itu APM SD juga belum memenuhi target. Capaian akreditasi Sekolah Dasar minimal B baru tercapai 87,53% dari target 92,90% dan SMP diangka 83,82% dari target 87,10%. Kualitas Pendidikan ini diantaranya dipengaruhi oleh belum terpenuhinya kelengkapan sarana prasarana Pendidikan dan kurangnya kualitas, kuantitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.

Belum terpenuhinya pemerataan akses untuk mendapatkan jaminan perlindungan jaminan sosial. Hal ini tergambar dari cakupan jaminan layanan Kesehatan. Belum optimalnya capaian tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi jaminan layanan Kesehatan.

2.3.1.2. Permasalahan bidang ekonomi

Permasalahan utama Kabupaten Agam di bidang ekonomi adalah transformasi struktural yang tidak berjalan dengan baik. Kontribusi sektor pertanian mengalami stagnasi pada angka 29 persen, sementara itu kontribusi sektor industri pengolahan juga relatif tidak berubah selama lima tahun terakhir. Produktivitas juga masih rendah yang dicerminkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir. Kabupaten Agam juga memiliki pendapatan perkapita yang relatif rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Pada sisi investasi, Kabupaten Agam masih memiliki nilai ICOR yang masih tinggi sehingga investasi belum efisien. Kinerja sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru juga masih belum optimal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD juga menunjukkan tren yang

menurun. Dibidang ketenagakerjaan, Kabupaten Agam masih dihadapkan pada persoalan Tingkat pengangguran terbuka dan relatif tingginya angka pengangguran terdidik. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami fluktuasi yang signifikan, dari 58.24% pada Tahun 2020 menjadi 56.10% pada Tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan ketidakstabilan partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan menunjukkan tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja.

2.3.1.3. Permasalahan bidang tata kelola pemerintahan

Nilai SAKIP Kabupaten Agam Tahun 2024 sebesar 67,11 dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Nilai IPKD Kabupaten Agam masih perlu diperbaiki karena nilainya masih rendah dan belum berpredikat Baik. Indeks SPBE Kabupaten Agam Tahun 2024 adalah 2,56, namun capaian ini masih jauh dari pencapaian target yang sudah ditetapkan sebesar 3,00 (kategori Baik). Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE masih belum baik.

2.3.1.4 Permasalahan Stabilitas Ekonomi

Kabupaten Agam atau provinsi Sumatera Barat secara umum masih terkendala dengan masalah tingginya inflasi sebagai indikator stabilitas ekonomi. Selain itu, Kabupaten Agam masih terkendala dengan relative tingginya Tingkat kemiskinan jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

2.3.1.5 Permasalahan bidang sosial budaya dan lingkungan

Dibidang sosial budaya, Kabupaten Agam masih memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan bahkan lebih tinggi dari target yang ditetapkan nasional. Meskipun TFR menunjukkan penurunan, fluktuasi laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa angka kelahiran belum sepenuhnya stabil. Ketidakstabilan dalam angka kelahiran dapat mempengaruhi proyeksi demografi jangka panjang dan berpotensi

menekan infrastruktur dan layanan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, dibidang kebudayaan, kinerja jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan masih berada dibawah target.

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) masih tergolong rendah yaitu sebesar 55%. Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup juga masih rendah yaitu sebesar 50,41%. Persentase pengelolaan persampahan juga masih rendah yaitu hanya 46,29 persen. Akses Masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak juga perlu ditingkatkan. Kabupaten Agam mencakup wilayah yang ditandai dengan risiko bencana yang tinggi yang ditandai oleh nilai IRBI 2024 sebesar 204,61 yang termasuk dalam kategori risiko “tinggi”. Permasalahan lingkungan lain yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan status trofik Danau Maninjau menjadi *hipereutrofik* (kadar unsur sangat tinggi dan tercemar berat). Kondisi ini dipengaruhi kelebihan kapasitas daya tampung danau terhadap KJA.

2.3.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Berikut ini akan dijelaska isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan dibidang, sosial, ekonomi, tatakelola, stabilitas, budaya, dan lingkungan.

2.3.2.1. Isu global

Dalam era yang semakin terdampak oleh dinamika global, penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai isu global yang berkembang pesat. Isu-isu tersebut tidak hanya berdampak pada tataran internasional atau

nasional, tetapi juga memberikan konsekuensi langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Agam.

Pertama, perubahan iklim dan krisis lingkungan menjadi isu utama yang harus diantisipasi. Peningkatan suhu global, degradasi lingkungan, serta bencana alam yang semakin sering dan intens menuntut Kabupaten Agam untuk membangun sistem ketahanan terhadap bencana serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Dengan potensi geografisnya yang rawan bencana seperti longsor, banjir, dan letusan gunung api, Agam harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur hijau dan sistem peringatan dini.

Kedua, transformasi digital dan revolusi industri 4.0 mendorong perubahan fundamental dalam cara masyarakat hidup, bekerja, dan belajar. Kabupaten Agam perlu menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan perkembangan teknologi digital, termasuk penguatan ekosistem ekonomi digital, peningkatan literasi digital masyarakat, serta digitalisasi pelayanan publik. Hal ini penting untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi dan memperluas akses terhadap pendidikan dan peluang kerja berbasis teknologi.

Ketiga, ketahanan pangan dan energi menjadi isu strategis seiring meningkatnya tekanan global terhadap ketersediaan dan distribusi sumber daya akibat konflik geopolitik, disrupsi rantai pasok, serta perubahan iklim. Agam sebagai daerah agraris memiliki peluang sekaligus tantangan dalam memastikan ketersediaan pangan lokal yang cukup, aman, dan terjangkau. Diversifikasi energi baru terbarukan dan penguatan ketahanan pangan lokal menjadi fokus penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

Keempat, demografi dan mobilitas penduduk juga merupakan isu global yang berdampak pada daerah. Pertumbuhan penduduk usia produktif perlu dijawab dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang relevan dengan pasar kerja, serta perlindungan sosial yang inklusif. Selain itu, tren urbanisasi dan migrasi menuntut pengelolaan perkotaan dan wilayah perdesaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kelima, krisis kesehatan global pascapandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting tentang pentingnya sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. RPJMD Kabupaten Agam harus memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar, meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, serta memperluas kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Terakhir, tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan (good governance) menjadi tekanan global seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akuntabilitas publik. Kabupaten Agam perlu menjawab tantangan ini dengan memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan responsif.

2.3.2.2. Isu Nasional

Penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan arah pembangunan nasional. Salah satu isu nasional yang sangat krusial adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pemerintah pusat menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada Tahun 2030. Kabupaten Agam, yang memiliki tantangan geografis dan sebaran sosial ekonomi yang tidak merata, perlu merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih terfokus pada kelompok rentan dan wilayah tertinggal, serta memperkuat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan.

Isu strategis berikutnya adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Agenda pembangunan nasional mendorong peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan tuntutan era digital. Kabupaten Agam harus mengakselerasi pembangunan SDM dengan memperluas akses dan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan vokasional, serta mendukung pengembangan potensi generasi muda sebagai pelaku pembangunan daerah. Selanjutnya, isu ketahanan pangan,

energi, dan air menjadi perhatian utama nasional, terutama dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara di tengah ancaman krisis global. Agam sebagai daerah agraris memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui modernisasi pertanian, diversifikasi komoditas unggulan lokal, serta pemanfaatan sumber daya air dan energi secara efisien dan berkelanjutan.

Isu nasional lain yang harus direspons adalah transformasi digital dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan ekonomi digital, digitalisasi layanan publik, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Kabupaten Agam perlu memperkuat konektivitas digital, mempercepat adopsi teknologi oleh pelaku UMKM, serta mendorong daya saing ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri rumah tangga.

Dalam hal tata kelola pemerintahan, pemerintah pusat menekankan penerapan prinsip good governance, peningkatan efektivitas birokrasi, dan pelayanan publik berbasis digital. Kabupaten Agam harus menjawab ini dengan penguatan reformasi birokrasi, peningkatan integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, serta sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Terakhir, agenda nasional terkait pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan iklim harus diarusutamakan ke dalam perencanaan daerah. Agam, sebagai wilayah dengan potensi risiko bencana yang tinggi, harus meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, pelestarian lingkungan, serta pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim.

2.3.2.3. Isu Regional

Kabupaten Agam sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki posisi strategis secara geografis, ekonomi, dan budaya. Salah satu isu regional yang menonjol adalah kesenjangan pembangunan antarwilayah di Sumatera Barat. Beberapa daerah di provinsi ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, terutama di sektor jasa dan perdagangan, sementara daerah lain masih mengandalkan sektor primer dengan produktivitas rendah. Kabupaten Agam perlu memanfaatkan potensi unggulannya di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata,

sambil meningkatkan aksesibilitas wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan konektivitas digital.

Dari sisi lingkungan, degradasi ekosistem dan ancaman bencana alam di tingkat regional menjadi perhatian serius. Kabupaten Agam, yang berada di jalur cincin api dan memiliki topografi pegunungan, sering menghadapi risiko bencana seperti longsor, banjir bandang, dan erosi di kawasan perbukitan. Upaya mitigasi bencana dan pengelolaan ruang wilayah yang memperhatikan daya dukung lingkungan perlu diintegrasikan dengan rencana pembangunan provinsi.

Isu regional lainnya adalah mobilitas dan perdagangan antar wilayah. Letak Kabupaten Agam yang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota, seperti Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, menjadikannya jalur strategis bagi arus barang dan jasa. Peningkatan kualitas jaringan transportasi dan pengembangan pusat-pusat distribusi regional akan mendukung peran Agam sebagai simpul ekonomi antarwilayah.

Dalam bidang sosial, arus migrasi dan urbanisasi menjadi fenomena yang memengaruhi dinamika penduduk di wilayah ini. Kabupaten Agam menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan perdesaan, mengingat sebagian penduduk usia produktif cenderung bermigrasi ke kota-kota besar, sementara desa-desa menghadapi penurunan populasi produktif.

2.3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Agam

a. Kualitas dan daya saing SDM

Penguatan fondasi transformasi yang merupakan tanggung jawab dari perencanaan jangka menengah Tahun 2025 – 2029 di Kabupaten Agam memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Kualitas atau daya saing SDM terlihat dari derajat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan standar hidup layak yang biasanya diukur dari pendapatan.

Salah satu tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Agam lima tahun mendatang di bidang peningkatan kualitas SDM adalah meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan kecakapan sistem kesehatan. Terkait dengan struktur penduduk, tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Agam diantaranya adalah optimalisasi bonus demografi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yang dapat mendukung percepatan pembangunan. Selain itu, penguatan fondasi pada bidang kesehatan dan pendidikan harus diikuti pula oleh optimalisasi perlindungan sosial yang mampu mengakomodasi percepatan penurunan tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu harus dipastikan juga bahwa optimalisasi perlindungan sosial harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkeadilan dan inklusif untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap program-program perlindungan sosial.

Transformasi sosial juga terkait dengan isu sosial budaya dan agama. Masifnya budaya global yang masuk kedalam negeri bisa saja berdampak negatif terhadap apresiasi budaya dan kearifan lokal. Salah satu langkah untuk mengatasi dampak negatif ini adalah dengan tetap menjaga keselarasan antara budaya local dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, kedepannya perlu diperkuat lagi internalisasi nilai-nilai adat Minangkabau yang berdasarkan azas adat basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

b. Ekonomi kreatif sebagai pertumbuhan Ekonomi baru

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab permasalahan pembangunan, salah satu tantangan transformasi ekonomi di Kabupaten Agam adalah lambannya transformasi struktural perekonomian dari ekonomi yang berbasis pertanian pada perekonomian yang berbasis industri yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Selain lambannya transformasi struktural, fundamental perekonomian agam juga belum cukup kuat yang ditandai dengan relatif tingginya peran sektor konsumsi bersamaan dengan relatif rendahnya peran pembentukan modal tetap

bruto (investasi). Sebagai konsekuensi, pendapatan perkapita Kabupaten Agam mencatat kinerja yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional.

Sebagai bentuk adaptasi dari tantangan tersebut, Kabupaten Agam dapat memperkuat kinerja sektor basis dengan menekankan pada konsep pertanian berkelanjutan dan optimalisasi sektor industri yang berbasis pada sektor pertanian serta mempromosikan prinsip ekonomi sirkular industri. Sebagai alternatif, Kabupaten Agam dapat mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti peningkatan kinerja ekonomi kreatif atau optimalisasi sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata. Secara spesifik di bidang pariwisata, selain fokus pada peningkatan amenities, aksesibilitas, dan atraksi, pengelolaan pariwisata juga harus memperhatikan kepuasan dan pengalaman wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh sebab itu, investasi untuk pengembangan destinasi wisata yang lebih beragam masih perlu ditingkatkan dengan baik. Namun demikian, pengelolaan pariwisata secara menyeluruh harus sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, penguatan sektor UMKM melalui peningkatan keterkaitan rantai pasok UMKM dengan industri, peningkatan inovasi, adaptasi teknologi, dan digitalisasi merupakan faktor penguat bagi peningkatan kinerja ekonomi kreatif. Tidak hanya terbatas pada UMKM, tantangan digitalisasi di Kabupaten Agam juga terkait dengan inovasi digital pada sektor keuangan (fintech) dan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk didalamnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Pada sisi lain, tingkat pengangguran di Kabupaten Agam justru didominasi oleh pengangguran terdidik. Tantangan lain di Kabupaten Agam terkait ketenagakerjaan ini adalah bagaimana meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan hijau, yaitu lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap pemulihan dan keberlanjutan lingkungan. Penyediaan lapangan pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan

optimalisasi pengelolaan kekayaan laut (blue ekonomi) dan penciptaan lapangan pekerjaan yang terkait dengan ekonomi hijau.

c. Tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif

Kondisi terkini di Kabupaten Agam menunjukkan bahwa nilai SAKIP, SPBE, dan indeks profesionalitas ASN belum mencapai kinerja yang maksimal. Tantangan lain adalah rendahnya digitalisasi pada penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan belum optimal dan meratanya pelayanan publik pada masyarakat. Kondisi pelayanan publik merupakan salah satu faktor yang memunculkan isu Daerah Otonomi Baru (DOB). Isu DOB juga terkait dengan bentang alam Kabupaten Agam yang unik. Relatif jauhnya jarak pusat pemerintahan ke beberapa wilayah, mempengaruhi aksesibilitas Masyarakat terhadap pelayanan publik. Bagaimanapun juga, semua tantangan dan isu strategis di bidang tatakelola mesti diorganisir dengan baik sehingga menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

d. Ketahanan air, pangan, dan energi

Ketahanan air merupakan kondisi perlu yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan pangan dan energi. Ketahanan air yang baik berkorelasi positif dengan produksi pangan yang baik pula sehingga berdampak pada peningkatan ketahanan pangan. Perubahan iklim dapat mengganggu ketahanan air, sehingga diperlukan konservasi pengelolaan ketahanan air yang fokus pada pengelolaan daerah aliran Sungai dan hutan lindung. Tantangan lain terkait dengan ketahanan pangan adalah penurunan kualitas lahan. Penurunan kualitas lahan akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan pada pertanian dapat mengganggu ketahanan pangan. Oleh sebab itu diperlukan pertanian berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan tanpa merusak kualitas lahan.

e. Daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Agam terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Namun demikian, meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan iklim merupakan salah satu tantangan

dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk yang massif yang berdampak pada peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dapat mengancam kualitas lingkungan. Kondisi ini bisa saja menimbulkan masalah baru seperti pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, dan eksploitasi danau Maninjau semakin memperburuk kondisi lingkungan. Dari sisi ketahanan bencana, Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan indeks kerawanan bencana Indonesia yang cukup tinggi. oleh sebab itu kedepannya perlu peningkatan Upaya-upaya mitigasi bencana oleh pemerintah yang diiringi oleh peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap resiko bencana terutama bencana yang disebabkan oleh faktor manusia.

Selain itu, Upaya-upaya untuk memitigasi resiko bencana juga terkait dengan pengembangan system perlindungan sosial yang adaptif. Sebagaimana yang kita ketahui, penduduk yang menjadi korban bencana alam sering kali rentan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, perlindungan sosial yang adaptif dan responsive dapat mengurangi resiko penduduk yang terdampak bencana.



Bab 3

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III

VISI, MISI dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya pada Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah. Visi yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada proses pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, untuk direalisasikan pada periode perencanaan lima tahunan, sekaligus sebagai periode pertama pencapaian target RPJP Kabupaten Agam Tahun 2025-2045, yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pembangunan Kabupaten Agam tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Agam lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

3.1 Pembangunan Jangka Panjang Kab. Agam Tahun 2025-2045

3.1.1 Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kab. Agam Tahun 2025-2045

Pemerintah Kabupaten Agam telah menetapkan Visi Daerah Tahun 2025-2045 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yaitu:

“Agam Madani, Maju dan Berkelanjutan”

Visi tersebut membawa makna:

1. Madani Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Agam yang religius, yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai,

norma-norma, hukum dan moral adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang berlandaskan ukhuwah Islamiyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis, kesetaraan, keadilan, musyawarah dan mufakat, partisipasi, terbuka (inklusif), gotong royong dan kekeluargaan.

2. Maju Terwujudnya Kabupaten Agam yang unggul, senantiasa berinovasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah yang diperlihatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK, perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan memiliki basis yang kokoh serta kelembagaan pemerintahan yang akuntabel.
3. Berkelanjutan Terwujudnya pembangunan Kabupaten Agam yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim dan ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari.

3.1.2 Misi RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025-2045

Visi tersebut dijabarkan dalam Misi:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju SDM yang unggul, berakarakter berakhlakulkarimah
2. Mewujudkan dan transformasi ekonomi yang tangguh dan inklusif
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif
4. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah yang masyarakat demokratis, damai serta tangguh, dan stabilitas ekonomi makro daerah
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya berlandaskan “ABS SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan
6. Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

3.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Arah kebijakan pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi dengan 4 tahapan RPJMD sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan periode 2025-2029 (Pondasi Transformasi)

Arah kebijakan Kabupaten Agam periode 2025–2029 merupakan pondasi awal menuju daerah yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan, yang akan diwujudkan melalui lima misi utama. Pertama, transformasi sosial difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar dan kualitas SDM yang ditandai dengan capaian indikator seperti angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan penurunan kemiskinan. Kedua, transformasi ekonomi diarahkan pada penguatan produktivitas dan potensi lokal, yang diukur melalui kontribusi sektor industri dan pertanian terhadap PDRB, transformasi digital, serta penguatan nagari sebagai pusat ekonomi. Ketiga, transformasi tata kelola pemerintahan difokuskan pada birokrasi yang efisien dan transparan melalui reformasi hukum, pelayanan publik, dan integritas aparatur. Keempat, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, demokrasi, serta stabilitas ekonomi dicapai melalui penguatan penegakan hukum, stabilitas makro ekonomi, dan pendidikan politik. Kelima, ketahanan sosial budaya berlandaskan ABS-SBK serta pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan dilakukan melalui pelestarian budaya, penguatan keluarga, kualitas lingkungan hidup, dan mitigasi bencana, yang seluruhnya diukur dengan indikator-indikator spesifik sebagai tolok ukur keberhasilan transformasi awal Kabupaten Agam.

2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Akselerasi)

Arah kebijakan Kabupaten Agam periode 2030–2034 merupakan tahap kedua menuju terwujudnya visi Agam 2045 dengan fokus pada penguatan fondasi transformasi melalui lima misi utama. Transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas SDM produktif dan inovatif, ditunjukkan melalui peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, serta penurunan tingkat

kemiskinan. Transformasi ekonomi ditargetkan melalui penguatan produktivitas berbasis potensi lokal dengan indikator kontribusi sektor industri dan pertanian, digitalisasi, serta kemajuan nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Transformasi tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan kinerja birokrasi, partisipasi publik, serta sistem audit dan pelayanan publik yang andal. Aspek keamanan dan stabilitas diarahkan pada penguatan hukum, stabilitas sosial dan ekonomi, dengan indikator kriminalitas, indeks keamanan, dan rasio pajak daerah terhadap PDRB. Sementara itu, ketahanan sosial budaya berlandaskan ABS-SBK serta pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan ditingkatkan melalui pelestarian budaya, penguatan keluarga, kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana. Seluruh arah kebijakan ini memiliki indikator capaian sebagai tolok ukur keberhasilan transformasi Kabupaten Agam pada periode kedua.

3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039 (Ekspansi)

Arah kebijakan periode 2035–2039 merupakan tahap ketiga dalam mewujudkan Kabupaten Agam Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan, dengan fokus pada ekspansi global melalui lima misi utama. Transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas SDM dengan indikator seperti harapan hidup, lama sekolah, dan penurunan kemiskinan. Transformasi ekonomi dicapai lewat penguatan produktivitas dan potensi daerah yang tercermin dalam kontribusi PDRB, digitalisasi, dan indeks desa. Tata kelola pemerintahan diperkuat melalui reformasi hukum, pelayanan publik, dan integritas aparatur. Stabilitas wilayah dijaga melalui penurunan kriminalitas, peningkatan keamanan, serta kestabilan ekonomi melalui diplomasi dan sistem peringatan dini. Ketahanan sosial budaya dan lingkungan didorong melalui revitalisasi nilai ABS-SBK, keluarga berkualitas, kelestarian ekologi, serta pengurangan risiko bencana, yang keseluruhannya diukur dengan berbagai indikator pembangunan dan keberlanjutan.

4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045 (Perwujudan Visi)

Arah kebijakan periode 2040–2045 merupakan tahap akhir menuju Kabupaten Agam yang Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan, dengan fokus pada ekspansi global melalui lima misi utama. Transformasi sosial diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan SDM melalui layanan dasar dan kerja sama internasional, dengan target peningkatan harapan hidup, lama sekolah, dan penurunan kemiskinan. Transformasi ekonomi ditujukan untuk penguatan sektor unggulan dan ekonomi kreatif, didukung indikator seperti kontribusi PDRB sektor prioritas, digitalisasi, dan kualitas nagari. Tata kelola pemerintahan diperkuat melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan capaian pada reformasi hukum, pelayanan publik, dan integritas. Ketertiban dan stabilitas daerah ditopang oleh keamanan jangka panjang, penguatan demokrasi lokal, serta kebijakan ekonomi adaptif. Sementara itu, ketahanan sosial budaya dan lingkungan berkelanjutan dicapai melalui penguatan nilai ABS-SBK, pembangunan keluarga, kualitas lingkungan, dan mitigasi bencana. Secara keseluruhan, arah kebijakan jangka panjang 2025–2045 menekankan peningkatan kualitas SDM secara merata untuk mewujudkan masyarakat Agam yang sejahtera, unggul, dan bermartabat di tingkat global.

Sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 (tahap 1) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-209 Tahap I Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
		2025	2030
1	2	3	4
Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup	74,51	75,22
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	120	12
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) sesuai SSGI	14	12
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	80	84

Arah Pembangunan 1	Indikator Utama Pembangunan 2	2025 3	Target 2030 4
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	93
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	92,57	97
Pendidikan Berkualitas Merata yang	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	Literasi : 84,09; Numerasi : 70,45	Literasi : 84,10; Numerasi : 71,35
	Literasi Membaca	84,1	84,1
	Numerasi	70,5	71,4
	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,75	10,4
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,4	14,8
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,91	14,20
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,8	77,8
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,15	5,09
Perlindungan Sosial yang Adaptif	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	92,6	97
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	9,3	16,8
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,2	11
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,96	1,18
	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang)	1369	1860
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,91	1,03
	Proporsi jumlah UKM non pertanian	11,6	13,2
	Proporsi jumlah IKM	3,17	4,47
	Rasio Kewirausahaan	3,89	4,89
	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1,34	3,03
	ROA BUMD	1,11	0,94
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3	4,88
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	36,66	49,06
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,1	61,2
	Indek Inovasi Daerah	45,2	50

Arah Pembangunan 1	Indikator Utama Pembangunan 2	2025 3	Target 2030 4
Penerapan Ekonomi Hijau	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	28,2	26,5
Transformasi Digital	Indeks masyarakat digital indonesia	50,5	65,5
Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	10%, 100%	25%,100%
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,1	31,6
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	9,33	12,8
Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Indeks Desa	8,70	9,78
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	80	85
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,55	3,16
	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,55
	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	79	83
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	2,9	3,2
Hukum Berkeadilan dan demokratis	Persentase potensi ATHG/Konflik sosial yang dapat diatasi	100	100
	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	2,9	2,0
	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu	70	77
Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,17	0,38
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	9,04	23,1
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	1.189.437	2.384.934
	Total Kredit/PDRB	3,78	4,8
	Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)	1,25	1,5
Ketentraman Dan Ketertiban Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,20	3,50
	Indeks Keamanan	91,5	92,1
Revitalisasi Kehidupan Masyarakat Berlandaskan ABS-SBK dan Berkebudayaan	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	4%	24%
	Persentase Nagari Dengan Level Madani V	Level 5 : 17, Level 4 : 24, Level 3: 51, Level 2:	Level 5 : 32, Level 4 : 34, Level 3: 26, Level 2:
	Indeks Pembangunan Keluarga	69,53 69,54	70,78 70,80
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,23-0,22	0,21-0,19

Arah Pembangunan 1	Indikator Utama Pembangunan 2	2025 3	Target 2030 4
Masyarakat Inklusif	Indeks Perlindungan Khusus Anak	66,15	66,65
Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks tutupan lahan	69,65	69,66
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,87	77,93
	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	73,75	80,31
	RT dengan Akses Sanitasi Aman	15,23	20,94
	Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19,00	36,77
	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	28,99	47,11
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konsumsi listrik per kapita	452	664
	Prevalansi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	9,4	7,54
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,04	0,10
	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	18,00	25,50
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konsumsi listrik per kapita	452	664
	Prevalansi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	9,4	7,54
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,04	0,10
	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	18,00	25,50
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	194	188,64-178,64
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,9	77,9

Sumber: Olahan Tim Penyusun RPJMD

3.2 Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

3.2.1 Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan visi :

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi pembangunan nasional tahun 2045 mengandung makna bahwa pencapaian tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dan kolaboratif dari seluruh komponen bangsa, khususnya putra-putri terbaik Indonesia, dengan kesamaan tekad dan komitmen yang berlandaskan pada capaian serta fondasi pembangunan yang telah dirintis pada periode sebelumnya. Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Delapan Misi Presiden yang tertuang dalam Delapan Asta Cita, yang selanjutnya dioperasionalisasikan melalui 17 program prioritas pembangunan nasional lintas sektor, termasuk pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Seluruh upaya tersebut diformulasikan secara sistematis sebagai respons terhadap permasalahan strategis dan tantangan utama pembangunan, dengan pendekatan yang cepat, tepat, dan terukur, guna memperkuat struktur dasar dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3.2.2 Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMN dituangkan dalam misi yang juga merupakan Prioritas Nasional dan wujud implementasi dari Asta Cita:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

- gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Arah pembangunan wilayah Sumatera Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai kawasan pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi dan kawasan komoditas unggulan serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan.

3.2.3 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan merupakan target yang ingin dicapai dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Target-target ini juga diperluas mencakup dimensi politik luar negeri dan kelestarian lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional periode 2025–2029 menjadi wujud nyata dari penguatan proses transformasi menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Sasaran pembangunan nasional untuk periode 2025–2029 yaitu:

1. Pendapatan perkapita menuju setara negara maju, dimana pada tahun 2029 diharapkan, laju Pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029, Pendapatan Perkapita meningkat menjadi 8000 USD, distribusi

PDB Maritim meningkat menjadi 9,1%, PDB manufaktur meningkat menjadi 21,9%.

2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat dengan Global Power Index menjadi peringkat 29 di Tahun 2029

3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2025-2029

3.3.1 Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan rancangan awal Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Visi RPJMD Sumatera Barat adalah:

“ Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan ”

Visi tersebut mengandung makna, **Madani**, mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”.

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

Maju, dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat.

Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis

Berkeadilan, dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marginal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

3.3.2 Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka menjabarkan Visi diatas kedalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusun misi RPJMD sebagai berikut:

1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4. Sumatera Barat Pusat perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Membangun Infrastruktur berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UKM
8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

3.3.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2025)	Target Akhir (2030)
Misi I: Pendidikan Merata Kesehatan Berkualitas				
Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	IPM	77,19	81,1
		IMM	0,58	0,63
		Rata-rata lama sekolah	9,91	10,59
		Harapan Lama Sekolah	14,39	14,79
	Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Penduduk >15 th yang berkualifikasi PendidikanTinggi	13,38	13,87
		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	75,66
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130	85
		Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,5	16,11
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	71	93,25
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,11	93,25
		Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	98,15
Misi II : Lumbung Pamham Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan				
Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan	84,01	87,98
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,90
	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp	7.574.909	99.550.650
		Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,84	5,20
	Prevalansi ketidakcukupan	Indeks Ekonomi Hijau	68,69	72,79
		Indeks Ekonomi Biru	25,19	36,41

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2025)	Target Akhir (2030)
	konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,622
		Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,7	61,27
Misi III : Nagari/ Desa sebagai Basis Kemajuan				
Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan		Indeks Desa	7,83	11,83
		Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	39,22	40,12
		Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten (%)	4,16	4,16
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37 - 5,76	4,43 - 5,28
	Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24	1,79
		Tingkat Pengangguran Perdesaan (%)	4,60	4,14
		Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)	6,31	4,21
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	73.77
		Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	18,57
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	55,92
		Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29	46.6
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	30,83
Misi IV : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat				
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi,		Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94
		Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	4,63	4,36
		Tingkat Inflasi (%)	2,8-3,6	2,33-3,43
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	31,61
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,5	17,29
		Indeks Inovasi Daerah	72,5	74,38
	Meningkatkan investasi, perdagangan,	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	8,46 - 8,53	9,23 - 9,38

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2025)	Target Akhir (2030)
industri, dan inovasi	dan daya saing industri daerah	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,01	27,03
		Total Kredit/PDRB (%)	24,4	31,08
		Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	2.926.183	8.942.883
		Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,92	2,72
		Konsumsi listrik per kapita	707	1181,25
		Intensitas Energi Primer	160	152,50
	Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	77,73
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,2	43,73
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	15	22,50
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38	46
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41	62,88
		Mendorong pertumbuhan UKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	
	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)		86,72	89,87
	Misi V : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana			
Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	170,51	164,19-157,87
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	79,00
		Indeks Kinerja Infrastruktur	-	-
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27
	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif)	18,08	22,54
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan)	28,05	36,62
		Indeks Ketahanan Daerah	-	-
	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku (m³/detik)	1,08	2,82
		IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2025)	Target Akhir (2030)
	Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	6,41
		Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	2,95	2,50
Misi VI : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Bernasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas				
Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas		Indeks Demokrasi Indonesia	76,27	78,01
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	70,78 - 70,80
	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 - 60,65	62,98 – 63,18
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,08
	Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	76,9
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,350 - 0,330
		Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	0,350 - 0,330
	Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	62,11
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	66,65
		Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	95,5
Misi VII: Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UKM				
Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43	1,68
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	43,08	59,24
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang)	21.104.516	30.899.122
	Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	1,11	1,13
		Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	3,59	5,04
Misi VIII : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif				
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih.		Indeks Integritas Nasional	73,16	76,90
	Efisiensi dan transparansi dalam	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,9	4,18

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2025)	Target Akhir (2030)
transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Hukum	70	77,65
	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,84	4,13
		Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,5	53,13
	Meningktanya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17	1,3
		Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	2,64

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

3.4. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029

3.4.1 Visi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Kabupaten Agam merupakan gambaran kondisi masa depan yang disusun mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan dan isu strategis. Sesuai dengan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Agam tahun 2025-2029 adalah.

“Agam Madani Yang Maju, Adil Dan Sejahtera”

Visi diatas mengandung makna mendalam yang merangkum cita-cita besar dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat Agam yang berperadaban, berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta menikmati kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Visi ini juga merefleksikan karakter Kabupaten Agam sebagai daerah yang menjadikan nilai-nilai adat dan agama sebagai landasan hidup, sejalan dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Rumusan visi ini menjadi arah dan semangat dasar dalam penyusunan seluruh misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah selama periode 2025–2029. Dengan menjadikan masyarakat sebagai pusat pembangunan (people-centered development), visi ini mengajak seluruh elemen daerah untuk

berkolaborasi dalam membangun Agam yang semakin maju, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk generasi hari ini dan yang akan datang.

Visi diatas mengandung kata kunci yaitu : Agam Madani, Maju, Adil dan Sejahtera, yang merupakan cita-cita yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi diatas mengandung makna:

Agam Madani Masyarakat Agam yang religius dan berperadaban maju. Berbasiskan pada nilai-nilai, norma-norma, hukum dan moral Agama, dan 'Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai'. Masyarakat yang berlandaskan ukhuwwah islamiyyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis, terbuka (inklusif), gotong royong dan kekeluargaan. Masyarakat yang seluruh komponennya bekerja sama dalam kebaikan, bahu membahu dalam mensejahterakan masyarakat dan menguatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah SWT. Masyarakat yang bahu membahumelindungi kampung dan masyarakatdari segala ancamanpenyakit masyarakat (narkoba, minuman keras, perjudian, pornografi/pornoaksi, asusila, kriminalitas dan lainnya), menghidupkan budaya produktif dan mencerdaskan kehidupan anak nagari.

Maju, Kabupaten yang berkembang secara terpadu, mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhanarganya secara berkelanjutan.

Adil, Tercapainya keseimbangan pembangunan sebagai upaya pemerataan hasilnya. Adil dalam artian proporsional dan profesional. Adil dalam arti kewilayahan dan seluruh dimensi sektor kehidupan. Menyentuh semua sisi secara proporsional dan profesional ; setiap nagari, setiap segmen kehidupan, setiap kelompok sosial masyarakat, aspek jasmani dan rohani.

Sejahtera, Pemenuhan kebutuhan dasar lahir dan batin manusia seperti pangan, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan yang sehat dan damai. Lebih dari itu, kesejahteraan juga mencakup perasaan aman,

nyaman dan puas dalam kehidupan sehari-hari, serta adanya peluang untuk berkembang dan mencapai potensi penuh dalam kehidupan.

Tabel 3.3 Indikator Sasaran Visi RPJMD 2025-2029

Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
Peningkatan Pendapatan Perkapita	PDRB Perkapita (ADHB) Rp. Juta	50,019 Juta	49,11 Juta	119,71 juta
	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	4,61	4,79	4,91
	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	10,33	10,33	10,69
Pengentasan kemiskinan dan Kerimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,83	6,15	5,09
	Rasio Gini (Indeks)	0,249	0,253	0.250
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,12	5,39	5,79
Peninngkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3,5 (capaian 2023)	3,5	3,55
Peningkatan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	75,08	75,75	77,06
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	92,97 juta	88,52 Juta	92,11 juta
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,74	76,87	77,93

Sumber: RPJPD Kabupaten Agam 2025-2029

3.4.2 Misi Kabupaten Agam 2025-2029

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi “Agam Madani Yang Maju Adil dan Sejahtera” ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. **Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat identitas dan karakter masyarakat Kabupaten Agam yang religius, menjunjung tinggi adat istiadat, serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” mencerminkan keterpaduan antara nilai agama Islam dan adat Minangkabau sebagai dasar dalam membentuk tatanan sosial masyarakat yang harmonis, adil, dan berakhlak. Prinsip “*Syarak mangato adat mamakai*” menegaskan bahwa ajaran agama menjadi pedoman utama, yang kemudian diimplementasikan secara kontekstual melalui praktik adat dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat yang berkarakter, beriman, dan beradat merupakan fondasi utama dalam menjawab tantangan zaman, terutama di tengah derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi digital yang memengaruhi nilai dan perilaku sosial, khususnya generasi muda. Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah menurunnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama, melemahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya ketahanan sosial masyarakat terhadap perubahan, terbatasnya regenerasi tokoh adat dan agama, serta belum meratanya pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual di seluruh wilayah.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan misi pembangunan sosial budaya melalui pelaksanaan **Gerakan Penguatan ABS-SBK Berbasis Nagari** dengan tagline **Bangkik dari Surau**, sebagai bagian dari strategi menjaga dan memperkuat identitas daerah. Prioritas ini bersifat strategis untuk mencegah degradasi moral dan disintegrasi sosial, serta mendukung visi pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga diarahkan pada pembentukan manusia dan masyarakat yang

memiliki karakter kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Program Unggulan *Agam Religi* dilaksanakan melalui beberapa kegiatan utama, yaitu :

- a) Gerakan Nagari Madani
- b) Insentif bagi Pondok Pesantren, Garin, Penyuluh, Guru TPA/MDTA, guru Tahfiz dan Imam Masjid serta Beasiswa ke Timur Tengah
- c) Menciptakan Nagari Creative Hub Berbasis Masjid

Melalui pendekatan holistik dan berbasis kearifan lokal, diharapkan terbangun masyarakat Agam yang tangguh secara spiritual, kokoh dalam budaya, dan siap menghadapi dinamika zaman secara bermartabat dan berkelanjutan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut serta pentingnya menjaga identitas sosial budaya masyarakat Agam, maka pembangunan mental, pengamalan agama, dan penguatan nilai-nilai ABS-SBK ditetapkan sebagai salah satu Misi Rencana Pembangunan Daerah. Misi ini dipilih karena bersifat strategis untuk memperkuat identitas daerah di tengah arus perubahan global, menjadi upaya preventif terhadap potensi degradasi moral dan disintegrasi sosial, serta mendukung visi Kabupaten Agam yang berlandaskan pada nilai agama, adat, dan budaya. Selain itu, misi ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman, dan sejahtera.

2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

Misi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Agam untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintahan yang *baik* (*good governance*) ditandai dengan partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintahan

yang *bersih (clean government)* berarti terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan integritas tinggi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, *pemerintahan profesional* mengutamakan kompetensi aparatur, etos kerja yang tinggi, serta sistem birokrasi yang modern dan adaptif terhadap perubahan.

Tantangan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik masih perlu menjadi perhatian. Belum optimalnya pelayanan publik, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu diperkuat, begitu pula dengan efektivitas sistem pengawasan internal dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, sementara pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan masih terbatas. Budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan dan inovasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan birokrasi yang inklusif dan responsif.

Menanggapi hal tersebut, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu prioritas strategis pembangunan daerah. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur, akselerasi digitalisasi layanan publik, serta optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tata pemerintahan Kabupaten Agam mampu menjadi pendorong utama dalam menciptakan transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat.

Sebagai bentuk konkret dari upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan Program Unggulan **Agam Melayani**, yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berfokus pada

kepuasan publik. Program ini dilaksanakan melalui percepatan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta pembangunan fasilitas layanan terpadu di tingkat kecamatan. Inisiatif ini diperkuat melalui **Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi**, yang mendorong transformasi kinerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan daerah. SDM yang cerdas dan berkualitas merupakan hasil dari sistem pendidikan yang merata, inklusif, dan berbasis kompetensi. Kesehatan masyarakat menjadi prasyarat dasar untuk produktivitas dan kesejahteraan, sehingga perlu didukung oleh akses layanan kesehatan yang mudah, terjangkau, dan bermutu. Nilai keimanan dan karakter berperan penting dalam membentuk pribadi yang bermoral, disiplin, dan memiliki integritas.

Di sisi lain, inovasi dan daya saing menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan SDM diarahkan agar mampu beradaptasi, berpikir kreatif, serta memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi daerah.

Pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif, dan berdaya saing menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian dan kemajuan Kabupaten Agam. Arah pembangunan SDM tidak hanya bertumpu pada peningkatan kapasitas akademik, tetapi juga pada penguatan nilai spiritual, moral, sosial, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kualitas pendidikan yang merata, inklusif, dan berbasis kompetensi menjadi pilar lahirnya SDM yang unggul dan adaptif. Di sisi lain, peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan fondasi penting bagi produktivitas dan kesejahteraan, yang harus didukung oleh akses layanan kesehatan yang mudah terjangkau, dan berkualitas. Pembentukan karakter melalui

penguatan nilai keimanan dan integritas menjadi bagian tak terpisahkan dalam menyiapkan generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Sementara itu, kemampuan berinovasi serta daya saing yang tinggi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, transformasi digital, dan dinamika dunia kerja.

Arah kebijakan difokuskan pada penguatan pendidikan berkarakter, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, pengembangan keterampilan vokasional yang relevan dengan dunia usaha dan industri, serta penciptaan ekosistem inovasi dan kewirausahaan muda. Melalui pendekatan ini, diharapkan Kabupaten Agam mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga sehat, berintegritas, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam mendukung misi ini pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan Program Unggulan **Agam Cerdas** dan **Agam Sehat**. Program Agam Cerdas diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan berbasis karakter dan pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, Agam Sehat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk di dalamnya perluasan cakupan jaminan kesehatan dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC). Pelaksanaan prioritas ini diperkuat melalui **Gerakan Terpadu Pengembangan SDM** dan **Gerakan Terpadu Hidup Bersih dan Sehat** sebagai upaya bersama lintas sektor dalam membangun manusia Agam yang unggul secara menyeluruh.

4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan struktur ekonomi Kabupaten Agam yang kuat, inklusif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar daerah. Ekonomi yang tangguh berarti memiliki ketahanan terhadap gejolak ekonomi, krisis, serta mampu tumbuh secara berkelanjutan dengan mengandalkan potensi lokal seperti

pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Sementara itu, berkeadilan mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal.

Misi ini menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi berbasis nagari, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarsektor.

Meskipun memiliki potensi besar, perekonomian Kabupaten Agam masih menghadapi berbagai tantangan strategis. Struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional dengan produktivitas rendah dan nilai tambah yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang secara kompetitif. Selain itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, kurangnya diversifikasi produk lokal, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan potensi ekonomi kreatif, memperkuat urgensi transformasi ekonomi daerah. Perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan dampak ketidakpastian ekonomi global juga menambah kerentanan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas yang mendesak, dengan menitikberatkan pada transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pembiayaan dan pasar, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi secara adaptif.

Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Unggulan **Agam Melayani** yang diarahkan untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, mencakup dukungan permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pemutakhiran dan pengembangan aplikasi E-KUMKM untuk memperluas akses pasar. Di samping itu, revitalisasi pasar rakyat juga menjadi fokus penting sebagai

upaya menciptakan ruang perdagangan yang lebih layak, modern, tertata, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

Melalui Program Unggulan **Agam Sejahtera**, Pemerintah Kabupaten Agam juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan, Dengan mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai penyangga utama ekonomi daerah. Berbagai upaya dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan Program Sawah Pokok Murah (SPM), penyediaan asuransi pertanian, penataan jaringan irigasi, serta penguatan sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani.

Selain itu, **Gerakan Pensejahteraan Kawasan Pesisir** dikembangkan sebagai inisiatif strategis yang menasar perbaikan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui pendekatan yang holistik. Fokus kegiatan mencakup pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal seperti perikanan, wisata bahari, dan kerajinan laut, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih dan sanitasi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan.

Pemerintah Kabupaten Agam juga mendorong penguatan wirausaha muda dan ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Melalui pengembangan sektor perdagangan, usaha mikro, dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif, ditargetkan terciptanya 1.000 entrepreneur muda yang mampu bersaing di pasar nasional dan global. Potensi wisata seperti Geopark Sianok Maninjau, Pantai Tikau, dan destinasi wisata potensial nagari terus dioptimalkan dalam rangka memperkuat posisi Agam sebagai destinasi wisata unggulan dan mendukung percepatan nagari mandiri.

Keseluruhan strategi ini didukung melalui pelaksanaan berbagai gerakan terpadu, antara lain: **Gerakan Terpadu Kemandirian Pangan Berbasis Keluarga dan Nagari, Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Gerakan Terpadu Pengembangan Pariwisata, Gerakan Terpadu Pensejahteraan Masyarakat Pesisir,**

serta **Gerakan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Miskin**. Dengan sinergi berbagai sektor dan pendekatan berbasis wilayah, diharapkan terwujud kemandirian ekonomi yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Agam secara menyeluruh dan berkeadilan.

5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana

Misi ini menggambarkan komitmen Kabupaten Agam dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan terhadap risiko bencana. Pembangunan berkelanjutan berarti setiap infrastruktur dan kebijakan pembangunan dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sosial. Berkeadilan bermakna pembangunan dilakukan secara merata antarwilayah, termasuk wilayah tertinggal dan terpencil, agar semua masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil. Berwawasan lingkungan menegaskan bahwa perlindungan dan pelestarian sumber daya alam menjadi bagian integral dari proses pembangunan.

Kabupaten Agam memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi karena karakteristik topografi, kondisi geologi, serta tingginya intensitas hujan. Diperlukan penguatan kapasitas mitigasi berbasis risiko untuk menurunkan potensi kerugian. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi dan latihan berkala, serta penataan ruang yang mengarahkan perkembangan wilayah pada zona aman. Kebijakan ini mendukung stabilitas pembangunan dan menjaga keberlanjutan layanan dasar bagi masyarakat.

Kondisi Danau Maninjau juga menjadi perhatian, degradasi ekosistem akibat pencemaran limbah rumah tangga dan keramba jaring apung telah menurunkan kualitas air dan daya dukung danau. Hal ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan dan potensi pariwisata,

tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar. Di sisi lain, permasalahan pengelolaan sampah juga masih menjadi tantangan serius. Terbatasnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, kurangnya fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri turut mempengaruhi kondisi lingkungan dan kualitas permukiman.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan tangguh bencana sebagai salah satu prioritas strategis pembangunan. Misi difokuskan pada penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, sistem sanitasi, serta fasilitas pelayanan publik yang adaptif terhadap risiko lingkungan. Melalui pembangunan ini, diharapkan tercipta sistem infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan memperkuat ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Agam mengembangkan Program Unggulan **Agam Sehat** melalui inisiatif pengelolaan sampah dari sumbernya dengan pendekatan partisipatif dalam bentuk gerakan “**Buang Sampah Beli Sampah**”. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan Perda Pengelolaan Sampah di seluruh kecamatan, penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah, pembentukan kemitraan koperasi dengan bank sampah di seluruh nagari, serta peningkatan pengelolaan fasilitas TPA dan TPST Sei Jariang. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana pengangkutan serta pemeliharaan armada sampah menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.

Seluruh inisiatif ini diperkuat melalui **Gerakan Terpadu Kebersihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup**, sebagai bentuk integrasi antara pembangunan infrastruktur dan komitmen terhadap

kelestarian lingkungan untuk mewujudkan Kabupaten Agam yang bersih, sehat, tangguh, dan berkelanjutan.

6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Misi ini menekankan pengembangan wilayah yang berpusat pada nagari sebagai unit pemerintahan terdepan untuk mendorong kemandirian, memperkuat potensi lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui penguatan kapasitas nagari dan pemerataan pembangunan, diharapkan kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara adil dan berkelanjutan.

Pengembangan wilayah berbasis nagari diusung dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan nagari sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan, dengan peran sentral dalam menyusun, mengelola, serta mengawal pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi potensi sumber daya lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat nagari, diharapkan pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah.

Implementasi pembangunan berbasis nagari di Kabupaten Agam masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dan kelembagaan nagari dalam aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunan belum merata dan memerlukan peningkatan baik dari segi kompetensi maupun tata kelola yang transparan dan akuntabel, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat nagari. Kurangnya kolaborasi antar-nagari dalam pengembangan kawasan, terbatasnya ketersediaan data spasial dan sosial ekonomi yang akurat, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan di

tingkat nagari menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan pengembangan wilayah berbasis nagari sebagai arah kebijakan prioritas pada RPJMD 2025-2029 yang dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memperkuat posisi nagari sebagai basis utama pembangunan daerah. Melalui strategi pembangunan dari tingkat akar rumput, Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian wilayah, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan yang dilaksanakan

3.4.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Agam 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Agam tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Tujuan memberi ukuran apakah misi yang dilaksanakan sudah dapat menjawab isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah menetapkan tujuan pembangunan daerah yang mencerminkan arah strategis dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi selama periode lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini merupakan hasil penjabaran dari misi pembangunan dan menjadi dasar dalam penyusunan sasaran, indikator kinerja utama, serta program prioritas daerah.

Tujuan pembangunan dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis data. Setiap tujuan dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat struktur ekonomi lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Agam, tujuan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik dan ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang religius, berbudaya, dan menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau yang berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).



Tabel 3.4 Rumusan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029:

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi I : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”	Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat			Persentase Nagari Dengan Level Madani V	18,48	23,91	25,00	28,26	31,52	34,78
		1.1.1	Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	76,53	78,03	79,33	80,63	81,93	83,23
		1.1.2	Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	63,70	64,86	66,01	67,16	68,32	69,47
		1.1.3	Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Keamanan Daerah	79,45	81,30	89,68	92,70	94,55	98,83
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi	79 (BB)	81 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)	86 (A)
		2.1.1	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Maturitas SPIP	3,16	3,17	3,18	3,18	3,19	3,20
				Nilai SAKIP	B (68,61)	B (70,11)	B (71,61)	B (73,11)	B (74,61)	B (76,11)
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77,50	79,00	80,00	81,50	81,60	81,70
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,66	2,76	2,86	2,96	3,06	3,16
				Indeks Sistem Merit	270	275	280	285	290	295
				EPPD	3,581	3,585	3,589	3,592	3,596	3,600
		2.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,70	3,90	4,15	4,35	4,55
Misi III : Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berakarakter.			IPM	75,75	76,01	76,27	76,54	76,80	77,06
		3.1.1	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berakarakter	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,75	9,88	10,01	10,14	10,27	10,40
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,40	14,48	14,56	14,64	14,72	14,80
		3.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,51	74,65	74,79	74,94	75,08	75,22

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		3.1.3	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,33	0,30	0,27	0,25	0,23	0,21
				Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	39,49	44,36	44,62	44,70	46,88	51,02
Misi IV Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan			Laju pertumbuhan ekonomi	4,41	4,70	5,00	5,29	5,58	5,87
				IDSD	3,64	3,65	3,67	3,68	3,70	3,71
		4.1.1	Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	82,61	82,83	83,32	83,78	84,21	84,62
		4.1.2	Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,44	10,56	10,67	10,78	10,89	11,00
				Rasio Kewirausahaan	3,89	4,09	4,29	4,49	4,69	4,89
				Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,96	1,00	1,05	1,09	1,14	1,18
				Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03
		4.1.3	Meningkatnya investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,02	30,34	30,65	30,97	31,28	31,60
	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah			Gini Rasio	0,248	0,246	0,245	0,243	0,242	0,240
				Pendapatan per kapita (juta)	57.850	66.906	77.381	89.495	103.506	119.710
				Angka Kemiskinan	6,50	6,19	5,90	5,61	5,35	5,09
		4.2.1	Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	86,93	86,94	86,95	86,96	86,97	86,98
		4.2.2	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	4,71	4,69	4,67	4,64	4,62	4,60
				Produktivitas tenaga kerja	98,35	104,01	110,00	116,33	123,03	130,00
		4.2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	50,50	51,50	52,50	53,50	54,50	55,50
Misi 5 : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan	Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta			Indeks Risiko Bencana (IRB)	200,28	195,95	191,63	187,30	182,97	188,64
		1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,93	77,10	77,30	77,50	77,70	77,90
		2.	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,55	0,60	0,66	0,71	0,77	0,82

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana	adaptif terhadap risiko bencana.									
	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata			Indeks Pembangunan Infrastruktur	41,52	42,88	44,24	45,63	46,78	48,26
		1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	15,40	16,37	17,41	18,52	19,69	20,94
				Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	19,25	20,50	21,75	23,00	24,25	25,50
				Jalan dalam kondisi mantap	60	62	64	66	68	70
		2	Meningkatnya konektivitas wilayah	Rasio Konvektivitas	69,00	69,25	69,50	70,00	70,50	71,00
Misi VI. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari	3	Meningkatnya pemukiman rumah layak huni	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	73,75	75,06	76,37	77,69	79,00	80,31
				Persentase Nagari Mandiri	46,37	47,82	48,91	50,00	51,08	52,27
		1.	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Nagari Mandiri	43	44	45	46	47	48

3.4.4 Keterkaitan Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045

Dalam rangka memastikan kesinambungan arah pembangunan jangka menengah dengan tujuan jangka panjang daerah, sinkronisasi visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 menjadi langkah strategis untuk menjamin konsistensi kebijakan, efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, serta akselerasi terwujudnya visi daerah yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan.

Tabel 3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029
Visi: Agam Madani, Maju dan Berkelanjutan	Visi: Agam Madani Yang Maju, Adil Dan Sejahtera
Misi I: Mewujudkan transformasi sosial menuju SDM yang unggul, berkarakter berakhlakulkarimah	Misi 3 : SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
Misi II: Mewujudkan dan transformasi ekonomi yang tangguh dan inklusif	Misi 4 : EKONOMI Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
Misi III: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif	Misi 2: PEMERINTAHAN Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
Misi IV: Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah yang masyarakat demokratis, damai serta tangguh, dan stabilitas ekonomi makro daerah	Misi 1 : MADANI Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”
Misi V: Memantapkan ketahanan sosial budaya berlandaskan “ABS SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Misi 6 : PEMBERDAYAAN NAGARI Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat
Misi VI: Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan	
Misi VIII : Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Misi 5 : INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana
Misi VII: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	

3.4.5 Keterkaitan Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada arah pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025–2045. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan agenda transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Visi daerah dirumuskan selaras dengan pilar-pilar pembangunan nasional, yang mencakup pembangunan manusia unggul, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.

Tabel 3.6 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029
Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Visi: Agam Madani Yang Maju, Adil Dan Sejahtera
Misi I : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Misi 1 : MADANI Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”
Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 4 : EKONOMI Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 5 : INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana
Misi 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
Misi 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 3 : SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
Misi 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Misi 6 : PEMBERDAYAAN NAGARI Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029
Misi 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Misi 2: PEMERINTAHAN Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
Misi 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 5 : INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana

3.4.6 Keterkaitan Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan keselarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Tahun 2025–2029. Keterpaduan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan regional yang inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Sumatera Barat.

Tabel 3.7 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029
Visi: Sumatera Barat Madani yang Maju Berkeadilan	Visi: Agam Madani Yang Maju, Adil Dan Sejahtera
Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Misi 3 : SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Misi 5 : INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana
Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	Misi 6 : PEMBERDAYAAN NAGARI Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat
Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Misi 4 : EKONOMI Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM	
Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Misi 5 : INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029
Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Misi 1 : MADANI Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”
Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Misi 2: PEMERINTAHAN Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

3.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

3.5.1 Arah Kebijakan dan Strategi, Program Unggulan pada Tujuan dan Sasaran Per Misi

1. Arah Kebijakan dan Strategi Misi.1 Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai
 - a. Program unggulan Agam Religius

Sebagai bagian dari visi daerah yang berorientas pada penguatan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, Agam religius diangkat sebagai salah satu progran unggulan dengan mengangkat tag line “Bangkik dari Surau”. Program ini dirancang sebagai strategi untuk memepkuat karakter masyarakat melalaui pendekata sprirual, sosial dan budaya.

Bangkik dari Surau menjadi simbol utama gerakan ini, yang menegaskan pentingnya menghidupkan kembali fungsi surau sebagai pusat pendidikan akhlak dan pembinaan generasi muda. Surau diorientasikan bukan hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pembentukan karakter masyarakat. Melalui program ini Pemerintah Kabupaten Agam mendorong revitalisasi fisik dan fungsional masjid atau surau, penyelenggaraan kegiatan keagamaan secara terstruktur, serta kolaborasi lintas sektor antara tokoh agama, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

Agam Religius didukung dengan Gerakan Nagari Madani, Pemberdayaan masjid, Maghrib mengaji, Subuh berjamaah, Libur bersama alquran bagi pelajar, pemberdayaan lembaga keagamaan kecamatan. Insentif bagi pondok pesantren, Garin, Penyuluh, Guru TPA/MDTA, Guru Tahfiz dan Imam Masjid, serta Beasiswa ke Timur Tengah dan Nagari Creative Hub Berbasis Mesjid.

Dengan pendekatan *bottom-up* melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan Agam religius menjadi pondasi kuat dalam membangun Kabupaten Agam yang berkarakter, berdaya saing dan tetap

berakar pada nilai-nilai luhur yang berlandaskan *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*.

Tabel 3.8 Arah kebijakan dan Strategi Misi I

Tujuan : Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat		
Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama	Penguatan pendidikan keagamaan, kelembagaan keagamaan, dan kehidupan sosial religius masyarakat	Sosialisasi dan implementasi gerakan nagari madani
		peningkatan pemahaman agama dan Peningkatan kualitas serta akses pendidikan keagamaan
		Penguatan peran kelembagaan keagamaan dan Pemberdayaan pemuda dalam pelestarian adat dan agama
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal	Penguatan dan pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Penguatan peran kelembagaan dan tokoh adat
		Integrasi nilai-nilai adat dan budaya dalam sistem pendidikan formal dan non-forma
		Pelestarian dan pengembangan warisan budaya takbenda dan benda serta Penyelenggaraan event budaya daerah secara berkelanjutan
Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kapasitas dan sinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan

2. Arah Kebijakan dan Strategi Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
 - a. Program Unggulan Agama Melayani

Program Agama Melayani merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Program ini diarahkan untuk mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan agar lebih cepat, mudah, dan akuntabel. Salah satunya dengan mewujudkan pelayanan digitalisasi cepat tanggap dan fasilitasi gedung bersama di setiap kecamatan

Misi kedua menekankan pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagai prasyarat utama dalam mencapai efektivitas pembangunan daerah. Arah kebijakan dan strategi dalam misi ini difokuskan pada penguatan kelembagaan,

peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Pemerintahan yang responsif dan partisipatif menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata.

Tabel 3.9 Arah kebijakan dan Strategi Misi II

Tujuan : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel		
Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, berbasis kinerja, dan didukung oleh penguatan pengawasan internal serta pemanfaatan teknologi informasi	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
		Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal melalui manajemen resiko
		Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang berbasis kinerja
		Peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
		Peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan akses informasi dan Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
		Penerapan prinsip Good Governance dalam perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah
		Memberikan dukungan fasilitasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi serta Penyederhanaan prosedur dan waktu pelayanan
		Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Misi III : Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
- a. Program Unggulan Agam Cerdas

Program unggulan Agam Cerdas merupakan upaya strategis Bupati Agam dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul,

berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Program ini difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga menengah, termasuk penguatan pendidikan karakter, literasi digital, dan pendidikan berbasis kearifan lokal. Melalui Agam Cerdas, Pemerintah Daerah mendorong kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membentuk generasi muda yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual.

Program Agam Cerdas juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam mendukung proses pendidikan. Pemerintah Kabupaten Agam memandang pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan daerah, sehingga Agam Cerdas menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang tanggap dalam menghadapi tantangan global tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Agam Cerdas diwujudkan dengan pendidikan berkarakter dan beasiswa bagi siswa kurang mampu yang berprestasi dan fasilitasi pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Agam.

Dengan pelaksanaan yang terarah dan sinergis, Agam Cerdas diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menciptakan generasi cerdas, kreatif, dan berintegritas, sebagai modal utama dalam pembangunan Agam yang maju dan berkelanjutan

b. Program Unggulan Agam Sehat

Program agam Sehat merupakan program yang bertujuan menciptakan Kabupaten Agam sebagai wilayah yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Pembangunan ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Program ini merupakan bentuk komitmen kepala daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, melalui pendekatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Upaya yang dilakukan diantaranya Perluasan cakupan jaminan kesehatan Sebagai upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah Kabupaten Agam terus berkomitmen untuk mencapai UHC dan memperkuat program JKN. Fokus ke depan tidak hanya pada perluasan cakupan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan akses, dan keberlanjutan program. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas

kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program jaminan kesehatan.

Tabel 3.10 Arah kebijakan dan Strategi Misi III

Tujuan 3: Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing		
Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya pendidikan yang berkualitas berkarakter	Peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan yang mendorong pembentukan karakter dan daya saing peserta didik	Penguatan kurikulum berbasis nilai kearifan lokal
		Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana Pendidikan
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Penguatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata dan responsif melalui pendekatan promotif dan preventif	Pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan
		Peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM kesehatan
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan sosial budaya.
		Penguatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat
		Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda)
		Percepatan pencegahan dan penuntasan stunting.)
		Peningkatan gizi masyarakat dan fasilitasi Makan Bergizi Gratis
Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang inklusif melalui pemberdayaan pemuda dan kesetaraan gender..	Akses Pendidikan dan Pelatihan yang Merata dan Berkeadilan Gender
		Pemberdayaan Pemuda dan Partisipasi Aktif dalam aspek ekonomi, organisasi dan olahraga
		Mendorong Lingkungan yang Inklusif dan Mendukung Kesetaraan Gender

4. Arah Kebijakan dan Strategi Misi IV: Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

a. Program Unggulan Agama Sejahtera

Program unggulan Agama Sejahtera merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Kesejahteraan merupakan tujuan mutlak dari pembangunan ekonomi. Kabupaten Agam sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertanian dan perikanan. Oleh karena itu dalam mewujudkan agama sejahtera perlu dikembangkan potensi lokal sebagai kabupaten agraris sehingga kabupaten Agam mampu menjadi lumbung pangan, salah satunya adalah dengan program Sawah Pokok Murah (SPM), Asuransi komoditi pertanian dan peningkatan serta penataan jaringan irigasi dan peningkatan sarana prasarana pemasaran hasil pertanian. Pembangunan pertanian diupayakan untuk mencapai kesejahteraan petani dan peningkatan nilai tambah dan produktivitas pertanian.

Gerakan Pensejahteraan Kawasan Pesisir merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir melalui pendekatan terpadu dan berkelanjutan. Kawasan pesisir seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, kerusakan lingkungan, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, gerakan ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan mengembangkan potensi lokal, seperti perikanan, pariwisata bahari, dan kerajinan berbasis sumber daya laut. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, dermaga nelayan, air bersih, dan fasilitas sanitasi juga menjadi prioritas untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat. Untuk memperkuat daya saing masyarakat, dilakukan pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, dan adopsi teknologi.

Pengembangan sektor perdagangan, Usaha Mikro dan kewirausahaan terutama wirausahawan muda yang telah dikenal sebagai keunggulan masyarakat, baik di ranah maupun rantau ditingkatkan dengan perkembangan-perkembangan baru dalam pemanfaatan teknologi digital. Bersamaan dengan pengembangan pariwisata dengan ragam potensi alam dan budaya yang terkait dengan pengembangan ekonomi

kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk pembangunan ekonomi yang berskala luas bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Diharapkan program ini mampu mencetak 1000 entrepreneur muda dan mengembangkan pariwisata Kabupaten Agam berbasis Geopark Sianok Maninjau, Pantai Tiku dan Destinasi Wisata Potensial Nagari dan Menuntaskan nagari mandiri.

b. Program Unggulan Agam Melayani

Melalui Agam Melayani pemerintah hadir dan memfasilitasi serta mendorong pemberdayaan pelaku usaha mikro. Pemberdayaan UMKM tidak hanya sebatas dukungan modal, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan dan pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro. Selain itu dilakukan updating dan perbaikan aplikasi E-KUMKM sebagai sarana untuk membuka jaringan pasar yang lebih luas. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, Usaha Mikro dapat tumbuh menjadi entitas yang tangguh, inovatif, dan siap bersaing di pasar global. Revitalisasi pasar merupakan upaya perbaikan dan pengembangan pasar, baik dari segi fisik, manajemen, maupun fungsinya, agar menjadi tempat perdagangan yang lebih layak, modern, higienis, tertata, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Misi keempat juga diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Arah kebijakan dan strategi dalam misi ini difokuskan pada penguatan sektor-sektor ekonomi produktif berbasis potensi lokal, peningkatan daya saing usaha Mikro dan koperasi, serta pemerataan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Pembangunan ekonomi dirancang agar mampu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat.

Tabel 3.11 Arah kebijakan dan Strategi Misi IV

Tujuan : Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan		
Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan dan sektor industri pengolahan melalui penguatan	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan secara berkelanjutan dan terintegrasi
		Peningkatan dukungan infrastruktur serta peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi, pemasaran, dan rantai pasok

Tujuan : Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	kapasitas produksi, sistem agribisnis dan kemitraan	Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri pengolahan secara berkelanjutan dan terintegrasi Peningkatan dukungan infrastruktur serta peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi, pemasaran, dan rantai pasok Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri pengolahan secara berkelanjutan dan terintegrasi Peningkatan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan dan berdaya saing melalui peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, dan pengembangan kemitraan
Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian	Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro melalui penguatan daya saing, inovasi, serta sinergi antar sektor berbasis potensi lokal dan budaya
Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan daya tarik dan realisasi investasi melalui penataan iklim usaha, penguatan infrastruktur pendukung, pemanfaatan potensi lokal, serta promosi dan kemitraan	Peningkatan investasi daerah yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan berbasis potensi unggulan serta mendukung pertumbuhan inklusif.”

Tujuan 2: Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah

Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	Peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk pangan dan rantai pasok serta logistik pangan dalam mendukung penguatan cadangan pangan dan pengendalian kerawanan pangan serta Pemantauan ketersediaan dan harga secara berkala
		Peningkatan pemanfaatan pangan melalui promosi pangan bergizi dan beragam, edukasi gizi kepada masyarakat serta pengendalian mutu dan keamanan pangan.
Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi Penguatan program kewirausahaan dan inkubasi bisnis

Tujuan : Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan		
Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	yang inklusif	Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat
Meningkatnya perlindungan sosial	Penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan	Penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan

5. Arah Kebijakan dan Strategi Misi Misi V: Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana

a. Program Unggulan Agam Sehat

Selain peningkatan derajat kesehatan masyarakat Agam sehat juga ditandai dengan meningkatnya kualitas lingkungan. Program juga dilaksanakan dengan Meningkatkan kualitas lingkungan, diwujudkan dengan Penataan ulang Drainase dan Taman Ibu Kota serta Pengelolaan Sampah dari sumbernya dengan gerakan terpadu “Buang Sampah Beli Sampah”. Penataan ulang Drainase dan Taman Ibu Kota dilakukan dengan peningkatan sistem drainase Kota Lubuk Basung, pembangunan taman dan tugu di Kota Lubuk Basung dan peningkatan operasional pengelolaan taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota Lubuk Basung dengan luasan 92,28 Ha.

Pengelolaan Sampah dari sumbernya dengan gerakan terpadu “Buang Sampah Beli Sampah” ditandai dengan melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Perda Pengelolaan Sampah di 16 Kecamatan, Pembuatan Rencana Induk Pengelolaan Sampah, pembentukan kemitraan koperasi dengan bank sampah di seluruh Nagari, meningkatkan Operasional dan Maintenance pengelolaan sampah pada TPA dan TPST Sei Jariang, meningkatkan sarana pengangkut sampah dan meningkatkan pemeliharaan sarana pengangkut sampah. Agam Sehat diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat Agam yang berkualitas, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Misi kelima juga menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Arah kebijakan dan strategi dalam misi ini juga menekankan pentingnya integrasi aspek pelestarian lingkungan hidup dan

penguatan ketangguhan terhadap risiko bencana. Dengan demikian, pembangunan diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan iklim dan potensi bencana.

Tabel 3.12 Arah kebijakan dan Strategi Misi V

Tujuan : Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana		
Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
		Peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dan peningkatan pengelolaan limbah.
		Rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penyelamatan Danau Maninjau
		Pemberdayaan hutan sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga hutan dengan memanfaatkan nilai ekonomi hutan bagi masyarakat
		Pengelolaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan air, pangan, dan energi.
	Meningkatnya ketahanan daerah	Peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
		Penguatan penyediaan infrastruktur dan tata ruang berbasis ketahanan wilayah.
Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar.	Peningkatan akses dan layanan air minum.
		Penguatan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan limbah domestik
		Peningkatan infrastruktur drainase

Tujuan : Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana		
Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Meningkatnya konektivitas wilayah	Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan Peningkatan Layanan dan penguatan keselamatan sarana transportasi Peningkatan akses jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah blank spot
	Peningkatan pemukiman rumah layak huni	Peningkatan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau Penataan Kawasan permukiman yang aman dan berkelanjutan

6. Arah Kebijakan dan Strategi Misi VI: Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Misi keenam menekankan pengembangan wilayah yang berpusat pada nagari sebagai unit pemerintahan terdepan untuk mendorong kemandirian, memperkuat potensi lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui penguatan kapasitas nagari dan pemerataan pembangunan, diharapkan kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara adil dan berkelanjutan.

Tabel 3.13 Arah kebijakan dan Strategi Misi VI

Tujuan : Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari		
Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari	Meningkatnya kemandirian desa	Penguatan tata kelola pemerintahan nagari yang partisipatif dan akuntabel
		Pemberdayaan ekonomi desa berbasis potensi lokal
		Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat
		Penguatan kolaborasi antar nagari dan antar wilayah

Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah disusun sebagai pedoman terpadu yang mengintegrasikan visi, misi, serta prioritas pembangunan ke dalam langkah-langkah strategis yang terukur dan berkesinambungan. Ini bertujuan memastikan keterpaduan antar sektor, konsistensi antara rencana jangka menengah dan tahunan, serta efektivitas

pencapaian sasaran pembangunan sesuai potensi dan tantangan yang dihadapi daerah, sebagaimana tabel berikut:

3.5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Tata Ruang Kabupaten Agam tahun 2021-2041 dan arah pembangunan wilayah Kabupaten Agam dalam RPJMN tahun 2025-2029, berikut dijabarkan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Agam:

Tabel 3.14 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

No	Wilayah	Potensi	Arah Kebijakan Pembangunan
1	Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai kawasan pesisir	- Perikanan tangkap - Pengolahan hasil perikanan - Wisata bahari - Wisata religi	1. Pengembangan kawasan pesisir 2. Peningkatan sumber daya manusia 3. Penataan dan pengembangan kawasan wisata
2	Kecamatan Lubuk Basung sebagai Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan berskala Kabupaten atau beberapa kecamatan	- Sebagai ibu kota Kabupaten Agam - Pertanian, tanaman pangan dan hortikultura - Tanaman Perkebunan	1. Penataan ibu kota 2. Pembangunan sarana prasarana pelayanan pemerintahan 3. Pembangunan sarana prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan 4. Pembangunan sarana prasarana produksi pertanian
3	Danau Maninjau sebagai salah satu 15 Danau Prioritas, KSPN (Kecamatan Tanjung Raya)	- Perikanan budi daya dengan pembatasan sesuai zonasi dan daya tampung danau - Industri pengolahan hasil perikanan - Pertanian tanaman pangan - Wisata budaya, religi dan alam	1. Dukungan terhadap program pemerintah dalam penanganan Danau Maninjau 2. Pengalihan mata pencarian berbasis perikanan darat 3. Peningkatan produktivitas pertanian
4	Matur-Palembayan dan IV Koto yang merupakan Kawasan Prioritas Pedesaan	- Kawasan Pengembangan tebu, kopi dan pengolahannya - Agrowisata dan wisata minat khusus - Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1. Peningkatan konektifitas 2. Dukungan sarana prasarana pertanian 3. Peningkatan kapasitas petani dan pemanfaatan teknologi pertanian 4. Pengembangan pasar agro dan pasar wisata 5. Peningkatan kapasitas dan peran BUMNAG 6. Pengembangan dan pengelolaan agrowisata dan wisata minat khusus
5	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau (Kec. Tanjug Raya, Tanjung Mutiara, Matur, Malalak, Banuhampu, Sungai Pua, Candung, Baso, IV Angkek, IV Koto, Kamang Magek, Tilatang Kamang, Palupuh)	- Kawasan wisata Danau Maninjau - Kawasan wisata pantai Tiku - Wisata alam dan minat khusus - Wisata heritage (budaya dan sejarah), wisata religi - Pengembangan Agrowisata	1. Peningkatan konektifitas 2. Penataan waterfront Danau Maninjau 3. Pengembangan pariwisata berbasis CBT (Community Based Tourism) 4. Pengembangan dan pengelolaan agrowisata dan wisata minat khusus

No	Wilayah	Potensi	Arah Kebijakan Pembangunan
		- Pengembangan ekonomi kreatif subsektor kuliner, fesyen tradisional, kerajinan tangan, dan seni pertunjukan.	5. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif
6	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau (Tanjung Raya, Palembayan, Matua, IV Koto, Banuhampu, Sungai Pua, Candung, IV Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Palupuh)	- Pengembangan kawasan sentra produksi padi - Pengembangan kawasan sentra hortikultura - Peningkatan kontribusi subsektor peternakan dalam mendukung ketahanan pangan - Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan	1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 2. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) melalui program Sawah Pokok Murah 3. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani 4. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura 5. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian 6. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi 7. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan 8. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar 9. Fasilitasi Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian 10. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area
7	Pengembangan Kawasan Geopark (IV Koto, Kamang Magek, Baso, Banuhampu, Sungai Pua, Matur, Malalak, Tanjung Raya, Palupuh)	- Pengembangan wisata minat khusus - Pengembangan wisata edukasi - Pengembangan kawasan konservasi - Peningkatan stutus geopark Sianok Maninjau Unesco Global Geopark (UGGp)	1. Konservasi kawasan geopark 2. Penguatan kelembagaan pengelolaan geopark; 3. Peningkatan infrastruktur penunjang kawasan; 4. Pengembangan pariwisata berbasis konservasi dan edukasi; 5. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi; 6. Promosi dan kerja sama kemitraan strategis tingkat nasional dan internasional.

No	Wilayah	Potensi	Arah Kebijakan Pembangunan
8	Pengembangan Infrastruktur	- Pengembangan infrastruktur regional	1. Fasilitas dan dukungan terhadap pembangunan jalan tol padang-pekanbaru dan preservasi ruas jalan Maninjau-Lubukbasung-Padangsawah-Simpang Ampek, Bukittinggi-Lubuksikaping 2. Fasilitas dan dukungan terhadap pembangunan sabo dam sebagai upaya mitigasi bencana alam gunung api 3. Pembangunan TPST Regional Bukittinggi-Agam-Padangpanjang 4. Pengembangan SPAM Regional Bukittinggi-Agam-Padangpanjang

Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041, RPJMN 2025-2029

3.5.3 Pentahapan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan sebuah rencana yang sistematis dan terstruktur. yang memuat tahapan-tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan. Penahapan pembangunan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi aktual daerah, potensi dan tantangan yang ada, hingga prioritas pembangunan nasional dan regional. Melalui penahapan yang terencana dengan baik, diharapkan setiap program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.15 Pentapahan Tema Pembangunan RPJMD

Tahap I (2026) (1)	Tahap II (2027) (2)	Tahap III (2028) (3)	Tahap IV (2029) (4)	Tahap V (2030) (5)
Penataan SDM Yang Berkualitas dan Berkarakter, Daya Saing Daerah dan Basis Pertumbuhan Ekonomi dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan Tema pembangunan tahun pertama RPJMD diarahkan pada penataan SDM yang berkualitas dan berkarakter sebagai fondasi peningkatan daya saing daerah serta penguatan basis pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan ini	Pemantapan SDM Yang Berkualitas dan Berkarakter, Daya Saing Daerah dan Basis Pertumbuhan Ekonomi dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan Tema pembangunan tahun kedua RPJMD difokuskan pada pemantapan SDM yang berkualitas dan berkarakter melalui peningkatan kompetensi, inovasi, dan produktivitas kerja. Upaya ini didorong untuk memperkuat daya	Pengembangan SDM Yang Berkualitas dan Berkarakter Daya Saing Daerah dan Basis Pertumbuhan Ekonomi dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan Penekanan pada pengembangan sektor agribisnis, Usaha Mikro, koperasi, pariwisata, serta investasi daerah. prioritas diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan	Integrasi Pembangunan daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan menuju Agam Yang Maju, Adil dan Sejahtera Tema pembangunan tahun ketiga RPJMD diarahkan pada pengembangan SDM yang berkualitas dan berkarakter melalui perluasan akses, peningkatan keterampilan, serta penguatan ekosistem inovasi. Strategi ini ditujukan untuk mendorong daya saing daerah dan	Konsolidasi fondasi transformasi menuju akselerasi Agam Madani, Maju dan Berkelanjutan Tema Pembangunan tahun keempat RPJMD menitikberatkan pada konsolidasi fondasi transformasi melalui penguatan tata kelola, integrasi program prioritas, dan pemantapan kapasitas daerah. Langkah ini

Tahap I (2026) (1)	Tahap II (2027) (2)		Tahap III (2028) (3)	Tahap IV (2029) (4)	Tahap V (2030) (5)
menekankan keseimbangan antara peningkatan kapasitas manusia, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan untuk menjamin pertumbuhan yang inklusif.	saing daerah memperkokoh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berkeadilan.	serta basis yang dan	ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan	memperluas basis pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.	diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Agam yang madani, maju, dan berkelanjutan.



Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Per Tahun

1. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 1: Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”

Tabel 3.16 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi I

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama	Penguatan pendidikan keagamaan, kelembagaan keagamaan, dan kehidupan sosial religius masyarakat	sosialisasi pemahaman gerakan Nagari Madani berbasis partisipatif	Pemantapan kelembagaan lokal dalam mendukung gerakan nagari madani	Pengembangan Gerakan Nagari Madani	Integrasi nilai-nilai Nagari Madani ke dalam pembangunan daerah	pengimplementasian gerakan nagari madani dalam pembangunan daerah
		penyediaan akses pendidikan keagamaan nonformal	Penguatan kurikulum dan kapasitas pendidik keagamaan lokal	Integrasi pendidikan keagamaan ke jalur pendidikan formal dan informal	Pengembangan jejaring pendidikan keagamaan antar lembaga	Penjaminan mutu dan keberlanjutan sistem pendidikan keagamaan
		Fasilitasi penguatan kelembagaan keagamaan	Pelatihan manajemen kelembagaan dan jejaring antar institusi	Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pelayanan sosial keagamaan	Revitalisasi fungsi kelembagaan sebagai pusat nilai dan etika sosial	Konsolidasi kelembagaan yang berkelanjutan dan berdaya saing
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal	Penguatan dan pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Penguatan Harmonisasi kelembagaan dan tokoh adat	Pelibatan aktif kelembagaan dan tokoh adat dalam proses pembangunan	Pembentukan forum musyawarah adat tingkat nagari dan kecamatan	Penguatan peran strategis lembaga adat dalam kehidupan sosial	Institusionalisasi nilai adat ke dalam kebijakan publik daerah
		Penyusunan modul pembelajaran berbasis nilai lokal dan ABS-SBK	Penerapan kurikulum lokal disekolah	Perluasan dan penguatan muatan lokal berbasis adat dan budaya	Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum nilai lokal	Penerapan kurikulum lokal di semua jenjang pendidikan

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Identifikasi, dokumentasi, dan penguatan basis data budaya takbenda dan benda	Pelaksanaan event budaya lokal berbasis komunitas	Penguatan jejaring dan promosi budaya lintas daerah	Penetapan event budaya sebagai agenda tetap daerah	Pengembangan warisan budaya sebagai identitas dan daya tarik daerah
Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kapasitas dan sinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur Satpol PP dan Linmas	Pengembangan sistem kerja responsif	Penerapan SOP pengawasan dan penegakan perda secara partisipatif	Kolaborasi terpadu lintas sektor dalam penyelesaian gangguan tramtibum	Penataan kelembagaan tramtibum yang adaptif dan berbasis teknologi
		Sosialisasi hak dan kewajiban warga dalam menjaga ketertiban umum	Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat sadar hukum	Penguatan program “Nagari Tertib” berbasis komunitas	Penguatan program “Nagari Tertib” berbasis komunitas	Pembangunan budaya sadar hukum dan ketertiban sebagai bagian dari identitas sosial

2. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 2: Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

Tabel 3.17 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi II

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, berbasis kinerja, dan didukung oleh penguatan pengawasan internal serta	Melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan penyusunan rencana pengembangan SDM aparatur.	Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan, sertifikasi, dan penerapan sistem merit.	Mengembangkan kelembagaan yang adaptif berbasis kebutuhan daerah dan dinamika pembangunan.	Mengintegrasikan sistem manajemen SDM aparatur dengan sistem perencanaan dan kinerja daerah.	Melakukan konsolidasi kelembagaan dan penguatan ASN yang profesional dan berintegritas.
		Menyusun pedoman	Menerapkan manajemen risiko	Meningkatkan kapasitas APIP	Mengintegrasikan sistem pengawasan	Konsolidasi sistem manajemen risiko dan

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	pemanfaatan teknologi informasi	manajemen risiko dan standar pengawasan internal.	dalam program prioritas pembangunan.	dalam pengawasan berbasis risiko.	internal dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan.	pengawasan internal yang efektif dan menyeluruh.
		Menata sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang selaras dengan RPJMD.	Memperkuat integrasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja.	Mengembangkan indikator kinerja daerah yang lebih komprehensif dan outcome-oriented.	Mewujudkan integrasi penuh perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, dan pelaporan daerah.	Konsolidasi sistem berbasis kinerja sebagai budaya kerja organisasi.
		Melakukan pemutakhiran basis data potensi PAD.	Mengimplementasikan digitalisasi layanan pajak dan retribusi daerah.	Menggali potensi sumber pendapatan baru sesuai karakteristik daerah.	Mengintegrasikan sistem perpajakan daerah dengan sistem digital nasional.	Konsolidasi pendapatan daerah melalui optimalisasi PAD dan kerja sama investasi.
		Menata infrastruktur sistem informasi pemerintahan daerah (e-government).	Mengoptimalkan keterbukaan informasi publik melalui kanal digital.	Mengembangkan layanan publik digital terintegrasi (smart governance).	Mengintegrasikan kanal transparansi dan partisipasi publik dalam sistem informasi daerah.	Konsolidasi e-government menuju layanan publik yang efisien dan inklusif.
		Menyusun pedoman penerapan prinsip good governance di lingkungan Pemda.	Menginternalisasi prinsip good governance dalam perencanaan dan penganggaran.	Mengembangkan mekanisme audit kinerja berbasis prinsip good governance.	Mengintegrasikan prinsip good governance ke seluruh perangkat daerah melalui evaluasi kinerja.	Konsolidasi penerapan prinsip good governance sebagai standar tata kelola daerah.
		Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait persiapan DOB.	Menyediakan dokumen pendukung DOB secara administratif dan teknis.	Mengintegrasikan kesiapan kelembagaan, SDM, dan layanan publik dalam proses pembentukan DOB.	Menuntaskan fasilitasi pembentukan DOB	Fasilitasi pembentukan DOB sesuai ketentuan dan memastikan keberlanjutannya.
	Penguatan sistem pelayanan publik	Menyusun standar pelayanan publik	Menerapkan sistem pelayanan digital dan	Mengembangkan platform layanan	Mengintegrasikan seluruh layanan	Menyempurnakan sistem pelayanan

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	berbasis digital, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	digital dan peta jalan transformasi layanan serta penyederhanaan regulasi serta alur prosedur layanan dasar.	Memperkuat standar waktu pelayanan dan monitoring berbasis indikator kinerja.	publik digital yang lebih luas dan terintegrasi lintas perangkat daerah.	digital daerah ke dalam satu portal terpadu yang mudah diakses masyarakat.	publik digital sebagai platform utama layanan masyarakat menjamin keberlanjutan penyederhanaan prosedur
		Melakukan asesmen kompetensi aparatur pelayanan untuk kebutuhan peningkatan kapasitas.	Melaksanakan pelatihan dasar dan upskilling aparatur dalam pemanfaatan teknologi layanan	Mendorong program sertifikasi kompetensi aparatur pelayanan serta pembinaan service excellence.	Mengimplementasikan penilaian kinerja berbasis kepuasan masyarakat secara real-time.	Mengkonsolidasikan kompetensi aparatur melalui pelatihan lanjutan, insentif, dan budaya pelayanan prima.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 3: Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing

Tabel 3.18 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi III

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan yang mendorong pembentukan karakter dan daya saing peserta didik.	Pengembangan dan implementasi awal kurikulum muatan lokal berlandaskan ABS-SBK sebagai upaya penguatan nilai-nilai kearifan lokal, budaya daerah, dan relevansi	Implementasi terbatas kurikulum muatan lokal dengan pendampingan tenaga pendidik ataupun akademik guna mendukung relevansi materi ajar dengan potensi dan karakteristik daerah	Perluasan implementasi kurikulum muatan lokal dan mendorong pengembangan pendidikan berbasis karakter melalui pembentukan boarding school di setiap kecamatan	Mengintegrasikan muatan lokal melalui proyek lintas mata pelajaran	Penyebarluasan praktik baik agar dipahami dan diadopsi lebih luas oleh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan serta dan penjaminan mutu berkelanjutan

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		pendidikan dengan potensi wilayah	dan menerapkan asesmen untuk memantau capaian literasi-numerasi dan karakter berbasis konteks lokal.	yang memadukan kurikulum pendidikan umum, keagamaan, dan adat istiadat lokal sebagai wujud sekolah madani.		
		Pemetaan spasial sebaran satuan pendidikan, peserta didik, dan kelompok rentan serta menyusun kebijakan zonasi dan skema layanan inklusif berbasis data.	Memperkuat akses pendidikan melalui skema bantuan biaya, zonasi, dan layanan inklusif.	Pengembangan layanan pendidikan inklusif terutama bagi kelompok rentan dan distribusi pendidik berkualitas ke wilayah tertinggal untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan	Mengintegrasikan data pendidikan dengan data sosial untuk penargetan bantuan yang lebih presisi dan membangun kemitraan pendidikan berbasis komunitas	Mengonsolidasikan skema pendanaan multi-sumber untuk kesinambungan bantuan biaya, transportasi, dan layanan inklusif yang berkelanjutan.
		Pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemetaan distribusi guru, serta rasio guru-murid sebagai dasar pengembangan profesi dan merancang pengembangan profesi berkelanjutan	Memperkuat kompetensi guru melalui pelatihan berjenjang dan penataan distribusi.	Mengembangkan sistem berjenjang untuk menyiapkan guru potensial menjadi pemimpin pembelajaran melalui proses seleksi, pelatihan, penugasan, dan evaluasi yang terstruktur serta sistem penilaian kinerja berbasis hasil belajar.	Mengintegrasikan pengembangan profesi guru dengan sistem karier dan manajemen kinerja. Membangun platform satu data pendidik untuk perencanaan rekrutmen, redistribusi, dan pelatihan.	Menetapkan sistem pengembangan profesi dan evaluasi kinerja guru yang terlembaga.
		Inventarisasi sarana pendidikan	Rehabilitasi sarana prioritas serta	Membangun sarana dan prasarana	Mengintegrasikan sistem manajemen	Menyelesaikan konsolidasi aset,

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		dan menyusun rencana kebutuhan jangka menengah.	memperkuat pengelolaan berbasis sistem informasi.	sesuai proyeksi demografi dan memperluas konektivitas internet serta perpustakaan digital dan ruang belajar inklusif	aset, data sarpras, dan penganggaran untuk perencanaan multi-tahun. Menyiapkan skema kemitraan pendanaan dan standardisasi interoperabilitas peralatan/TIK antar sekolah.	rencana operasi-pemeliharaan jangka panjang, dan standar layanan minimum sarpras. Melakukan evaluasi ketahanan bencana/keamanan dan penetapan peta investasi lima tahun mendatang.
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Penguatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata dan responsif melalui pendekatan promotif dan preventif..	Pemetaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk mengetahui kesenjangan layanan dasar dan rujukan dan Revitalisasi puskesmas dan pustu di daerah prioritas	Memperkuat kapasitas puskesmas, rumah sakit, dan tenaga medis melalui peningkatan kompetensi, sarana, serta standar pelayanan	Penguatan sistem rujukan berbasis teknologi	Mengintegrasikan sistem layanan kesehatan dasar dengan rujukan, termasuk pencatatan data pasien, pembiayaan, dan program promotif-preventif dan perluasan jejaring layanan antarwilayah	Mengokohkan sistem kesehatan daerah melalui regulasi, pembiayaan berkelanjutan, dan evaluasi mutu layanan secara periodik
		Penguatan ketersediaan tenaga kesehatan di daerah terpencil melalui mekanisme rekrutmen dan penugasan berbasis kebutuhan wilayah."	"Peningkatan kapasitas dan kompetensi dokter serta tenaga medis	Pemerataan distribusi SDM melalui kebijakan afirmatif dan Mengembangkan skema insentif, beasiswa, dan penempatan tenaga kesehatan baru untuk mengatasi	Penguatan dukungan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah khusus guna menjamin keberlangsungan layanan kesehatan dasar.	Penerapan sistem merit dan tata kelola mobilitas SDM kesehatan yang adil dan berbasis kinerja untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
				kesenjangan distribusi.		
		Sosialisasi pola hidup sehat berbasis budaya lokal	Pelaksanaan imunisasi dasar dan sanitasi lingkungan	Pembentukan kader kesehatan berbasis nagari	Edukasi keluarga dan sekolah tentang PHBS	Kolaborasi pencegahan berbasis komunitas
		Penguatan tata kelola percepatan penanganan stunting, termasuk koordinasi lintas sektor dan pelibatan aktif pemerintah nagari, masyarakat, serta mitra pembangunan.	Peningkatan cakupan dan kualitas intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, serta penguatan pelayanan gizi di posyandu dan fasilitas kesehatan dasar.	Optimalisasi intervensi sensitif, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi layak, akses terhadap pendidikan dan perlindungan sosial bagi keluarga berisiko stunting	Pemberdayaan keluarga dan perubahan perilaku melalui edukasi gizi, promosi ASI eksklusif, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola asuh dan pola makan sehat.	Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi stunting, berbasis data mikro (by name by address) dan sistem informasi yang terintegrasi antar sektor.
		Pemetaan dan pendaftaran kelompok miskin dan rentan (pemanfaatan Dtsen)	Sinkronisasi data JKN/Jamkesda lintas instansi	Fasilitasi layanan dan kepesertaan nonaktif	Penguatan sistem informasi dan mekanisme pengaduan masyarakat secara terpadu	Evaluasi dan penguatan kebijakan subsidi kesehatan
		Pemetaan keluarga berisiko stunting, baseline gizi balita, serta kondisi sanitasi per nagari/kecamatan dan peta jalan intervensi spesifik	Intervensi gizi spesifik melalui peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan layanan posyandu.	Pengembangan program inovatif seperti dapur sehat nagari, pemberdayaan kader posyandu digital, dan kerja sama lintas sektor	integrasi penurunan stunting dengan perlindungan sosial, sanitasi, dan ketahanan pangan. Basis data stunting dihubungkan dengan sistem	konsolidasi melalui regulasi daerah yang mengikat, penguatan kelembagaan pencegahan stunting di nagari, serta pelembagaan model intervensi terbaik.

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		dan sensitif sebagai acuan awal.	Sistem monitoring stunting berbasis data desa diperkuat agar intervensi lebih tepat sasaran	(pendidikan, pertanian, perikanan) untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga	perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan alokasi anggaran berkelanjutan	Evaluasi menyeluruh digunakan untuk menyusun strategi periode berikutnya
		Melakukan pendataan sasaran penerima program dan penyusunan standar menu bergizi sesuai kebutuhan gizi daerah	Memperkuat pelaksanaan program melalui dukungan anggaran, peningkatan kapasitas pelaksana, dan pengawasan kualitas menu	Mengembangkan inovasi program seperti kantin sehat sekolah, dapur nagari, dan kemitraan dengan penyedia pangan lokal	Mengintegrasikan program makan bergizi gratis dengan intervensi stunting, ketahanan pangan, serta layanan pendidikan dan kesehatan	Mengokohkan kelembagaan, regulasi, dan mekanisme evaluasi agar program berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.
Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang inklusif melalui pemberdayaan pemuda dan kesetaraan gender	Melakukan pemetaan akses pendidikan dan pelatihan, terutama bagi kelompok rentan dan perempuan	Meningkatkan ketersediaan program pelatihan vokasi dengan memperhatikan kebutuhan gender dan daerah terpencil.	Pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk memperluas akses beasiswa dan pelatihan kerja	Mengintegrasikan layanan pendidikan dan pelatihan ke dalam sistem pembangunan daerah berbasis inklusi.	Menetapkan mekanisme permanen untuk menjamin kesetaraan akses pendidikan dan pelatihan bagi semua kelompok.
		Pemetaan potensi pemuda di bidang ekonomi, organisasi, dan olahraga	Memberikan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan manajemen organisasi bagi pemuda.	Mengembangkan program inkubasi wirausaha muda serta pembinaan prestasi olahraga.	Menghubungkan pemuda dengan jejaring ekonomi, organisasi masyarakat, dan federasi olahraga tingkat regional/nasional	Membentuk ekosistem pemuda yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing global.
		Menyusun peta isu kesetaraan gender serta kondisi	Mengadakan edukasi publik dan peningkatan	Menyelenggarakan kampanye inklusif berbasis sekolah,	Mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam	Menetapkan regulasi, pendanaan berkelanjutan, dan

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		lingkungan sosial yang belum inklusif	kapasitas aparatur serta masyarakat tentang kesetaraan gender	komunitas, dan media digital.	kebijakan, program pembangunan, dan layanan publik	monitoring daerah untuk menjaga lingkungan yang inklusif.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 4: Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

Tabel 3.19 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi IV

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan dan sektor industri pengolahan melalui penguatan kapasitas produksi, sistem agribisnis dan kemitraan	Penataan dan Penguatan basis produksi komoditas unggulan, melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, adopsi teknologi tepat guna, dan pendampingan berkelanjutan serta pengembangan pertanian selaras alam melalui insentif dan disinsentif untuk LP2B/LSD	Pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi pertanian dengan pengembangan kawasan agrobisnis dan agroindustri yang modern.	Kemitraan strategis dan kolaborasi multipihak, antara petani/Usaha Mikro dengan koperasi, BUMnag, pelaku industri, dan lembaga keuangan, serta penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator.	Penguatan konektivitas hulu-hilir, melalui dukungan infrastruktur produksi dan Penerapan dan perluasan teknologi tepat guna.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan
		Peningkatan efisiensi rantai pasok, melalui pemangkasan mata rantai pemasaran, penguatan kelembagaan petani/nelayan, dan	Penguatan infrastruktur distribusi dan logistik, melalui pengembangan jalan produksi, pelabuhan perikanan, gudang penyimpanan, cold	Pengembangan kelembagaan ekonomi lokal, termasuk koperasi, BUMnag, dan sentra industri kecil menengah (IKM) sebagai simpul	Digitalisasi sistem distribusi melalui pemanfaatan platform e-commerce, sistem informasi pasar, serta integrasi data	Fasilitasi standar mutu, sertifikasi, dan akses pasar nasional/internasional, untuk memastikan produk unggulan daerah dapat bersaing secara berkelanjutan.

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		pengembangan sistem kemitraan	chain system, dan pasar induk/agro-logistik.	distribusi dan agregator produksi lokal.	produksi dan permintaan	
		Penataan agroindustri dan industri pengolahan berbasis potensi lokal dan diversifikasi produk turunan.	Peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur penunjang, dan akses pembiayaan untuk memperkuat fondasi produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan..	Pengembangan industri pengolahan melalui penerapan teknologi, hilirisasi produk unggulan, serta peningkatan standar mutu.	integrasi industri pengolahan dengan sektor perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta memastikan penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan	Penyempurnaan tata kelola dan ekosistem industri sebagai pilar daya saing daerah jangka panjang
		Menetapkan baseline produktivitas dan kondisi lingkungan pada sentra perkebunan serta menyiapkan kerangka kemitraan yang memasukkan prinsip konservasi lahan dan penggunaan input yang terkendali.	Mendorong peningkatan produktivitas melalui adopsi materi tanam unggul yang efisien lahan dan air serta memperkuat kelembagaan petani agar mampu menerapkan praktik budidaya ramah lingkungan.	Memperluas intervensi peningkatan produktivitas pada sentra perkebunan dengan penerapan pengelolaan tanah dan air yang menjaga daya dukung lahan serta mengembangkan kelembagaan petani sebagai penggerak praktik usaha berkelanjutan	Mengoptimalkan produktivitas melalui teknologi budidaya terukur seperti pengendalian hama terpadu dan pemupukan presisi serta memperkuat kemampuan kelembagaan petani dalam akses pembiayaan yang mendukung praktik keberlanjutan.	Konsolidasi standardisasi mutu dan keberlanjutan melalui penerapan sertifikasi, penataan tata kebun, serta memantapkan kemitraan yang menjamin rantai pasok stabil dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya.
Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian	Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap	Identifikasi potensi dan penataan destinasi wisata berbasis lokal dan halal	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang destinasi wisata halal	Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekosistem pariwisata dan Penguatan promosi, branding, dan	Integrasi kawasan wisata halal ke dalam jaringan pariwisata regional dan nasional	Konsolidasi pariwisata halal melalui penyempurnaan tata kelola destinasi, penguatan kelembagaan pariwisata berbasis

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	perekonomian daerah			sertifikasi destinasi pariwisata halal		masyarakat, serta pemantapan jejaring kemitraan regional, nasional, dan global untuk menjadikan Agam sebagai destinasi halal unggulan.
		Pemetaan potensi, karakteristik, dan kebutuhan pengembangan Usaha Mikro serta penguatan kelembagaan pendukung sebagai fondasi penguatan ekosistem usaha mikro.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui peningkatan keterampilan manajerial dan teknis, dukungan permodalan, serta penyediaan sarana prasarana dasar guna memperkuat keberlanjutan usaha.	Pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif melalui diversifikasi produk, inovasi model bisnis, perluasan akses pasar, serta penguatan digitalisasi usaha guna meningkatkan daya saing	Integrasi usaha mikro dan ekonomi kreatif ke dalam rantai nilai ekonomi lokal dan regional melalui kemitraan dengan usaha menengah, koperasi, dan sektor industri dengan menerapkan prinsip usaha berkelanjutan dan kolaborasi dengan sektor pariwisata, perdagangan, industri	Konsolidasi ekosistem usaha mikro dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan usaha mikro menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.
		Fasilitasi pembentukan koperasi “Merah Putih” serta penataan kelembagaan ekonomi berbasis syariah baik dalam pembiayaan usaha, pengelolaan zakat dan wakaf produktif,	Pendampingan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kapasitas manajerial, literasi keuangan syariah, serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.	Pengembangan koperasi syariah melalui inovasi model usaha, peningkatan akses pembiayaan berbasis syariah	Integrasi koperasi syariah dengan sektor keuangan syariah, dunia usaha, dan lembaga keuangan mikro, dalam memperluas jejaring dan memperkuat	Konsolidasi kelembagaan ekonomi syariah dan pemantapan tata kelola koperasi syariah, serta jejaring kemitraan multipihak sebagai fondasi utama perekonomian daerah

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		maupun dalam pengembangan UKM			ekosistem ekonomi syariah daerah.	yang inklusif dan berkelanjutan
Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan daya tarik dan realisasi investasi melalui penataan iklim usaha, penguatan infrastruktur pendukung, pemanfaatan potensi lokal, serta promosi dan kemitraan	Pemetaan potensi unggulan daerah secara komprehensif, penguatan basis data, peluang investasi yang terintegrasi, serta penyederhanaan regulasi dan perizinan untuk menciptakan kepastian berusaha	Fasilitasi kemitraan strategis antara investor dengan pelaku usaha lokal, optimalisasi peran BUMD/BUMNag sebagai mitra usaha, serta penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan investasi	Promosi investasi secara sistematis berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung investasi, serta pengembangan insentif daerah yang adaptif terhadap kebutuhan pasar.	Integrasi sistem informasi investasi daerah dengan layanan digital, perluasan jaringan kerja sama dengan lembaga keuangan dan mitra, serta penguatan ekosistem investasi yang inklusif.	Konsolidasi dan perluasan investasi berkelanjutan yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan inklusif, serta memperkuat daya saing daerah
Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	Pemetaan komoditas pangan strategis dan potensi lokal untuk diversifikasi pangan serta alur distribusi pelaku rantai pasok dan ketersediaan pangan	Penguatan kapasitas petani dan penyuluh dalam teknik budidaya produktif dan berkelanjutan serta sarana dan kelembagaan rantai pasok pangan	Optimalisasi dukungan infrastruktur dan sarana produksi dan teknologi pangan untuk meningkatkan produktivitas pangan secara merata dan berkelanjutan dan efisiensi distribusi pangan	Diversifikasi olahan pangan lokal dan peningkatan nilai tambah produk pertanian dan Pembentukan dan pengelolaan cadangan pangan daerah yang adaptif dan berbasis risiko	Konsolidasi sistem pangan daerah dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi ketahanan pangan yang adaptif dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan
		Membangun kerangka promosi pangan bergizi pada tingkat nagari, memperluas kapasitas edukasi gizi berbasis layanan	Memperluas jangkauan intervensi promosi konsumsi pangan beragam kepada kelompok sasaran prioritas, meningkatkan	Mendorong percepatan adopsi konsumsi pangan sehat melalui penguatan aktivitas komunitas, memperluas	Mengintegrasikan promosi pangan bergizi melalui kemitraan dengan media dan kelembagaan lokal, memperkuat	Konsolidasi capaian promosi dan edukasi gizi, menetapkan program pangan sehat sebagai bagian dari program reguler pemerintah daerah,

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		dasar, serta menyiapkan struktur awal sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan pada level daerah.	kompetensi kader gizi melalui penguatan kapasitas terstruktur, serta mengimplementasikan mekanisme pemeriksaan mutu dan keamanan pangan dengan pola terjadwal.	jangkauan edukasi gizi antar lembaga layanan, serta mengoperasikan sistem pelaporan cepat terkait keamanan pangan.	jejaring kerja kader gizi antar wilayah, serta menyelaraskan standar dan prosedur pengawasan keamanan pangan pada tingkat daerah.	serta memantapkan sistem pengendalian mutu dan keamanan pangan yang berkelanjutan pada tingkat daerah.
Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja yang inklusif	Pemetaan kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha/industri lokal	Peningkatan akses dan kualitas pelatihan kerja yang inklusif serta pendidikan vokasi yang link and match	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi dan standardisasi	Fasilitasi penempatan tenaga kerja yang terlatih dan peningkatan mobilitas tenaga kerja antar wilayah	Pengembangan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif
		Pemetaan potensi wirausaha dan sektor padat karya berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar	Peningkatan literasi kewirausahaan dan pelatihan bagi wirausaha baru dan tenaga kerja produktif	Penguatan akses terhadap pembiayaan, pendampingan usaha, dan inkubasi wirausaha	Integrasi kemitraan, jejaring pemasaran, dan kemandirian pelaku usaha mikro dan padat karya	Konsolidasi ekosistem kewirausahaan dan sektor padat karya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan
		Pemetaan potensi sektor unggulan dan identifikasi kebutuhan keterampilan tenaga kerja lokal serta penyusunan basis data pasar kerja daerah.	Memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan program padat karya produktif, fasilitasi kemitraan usaha, serta penciptaan peluang wirausaha baru berbasis potensi lokal.	Mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru dengan mengembangkan Usaha mikro, ekonomi kreatif, dan usaha berbasis teknologi, disertai dukungan akses pembiayaan dan	integrasi ekosistem ketenagakerjaan dan kewirausahaan dengan melibatkan sektor swasta, BUMD/BUMNag, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk memperluas jaringan kerja dan pasar	konsolidasi sistem penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam menjamin keberlanjutan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
				pendampingan usaha.		
Meningkatnya perlindungan sosial	Penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan	Pemetaan kelompok rentan dan penataan basis data perlindungan sosial yang terintegrasi	Memperkuat akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial melalui penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan, peningkatan akurasi data penerima manfaat, serta penyediaan layanan pengaduan yang responsif.	mengembangkan inovasi program perlindungan sosial adaptif berbasis teknologi dan kearifan lokal, termasuk skema jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi	integrasi program perlindungan sosial lintas sektor dan lintas lembaga melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem perlindungan yang inklusif dan berkeadilan.	Konsolidasi sistem perlindungan sosial daerah dan evaluasi terpadu sistem perlindungan sosial.

5. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 5: Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana

Tabel 3.20 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi V

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penataan basis data kualitas lingkungan dan potensi sumber pencemaran serta kerusakan lingkungan.	Peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	Pengembangan sarana prasarana pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan	Keterpaduan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta keterlibatan masyarakat dan sektor usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	Konsolidasi sistem pengendalian pencemaran dan adaptasi terhadap perubahan iklim secara berkelanjutan.

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Penataan basis data timbunan dan karakteristik sampah/limbah, pemetaan titik-titik kritis pengelolaan, serta penguatan peranan ninik mamak dan tokoh masyarakat dalam edukasi guna mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan (sustainable lifestyle)	Penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan keterpaduan pelibatan ninik mamak, tokoh masyarakat, pemerintah nagari dan kemitraan swasta dalam pengelolaan sampah, dan limbah yang ramah lingkungan.	Keterpaduan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan limbah, dan sampah secara terpilah yang ramah lingkungan, serta pengembangan hilirisasi produk berbasis sampah	Integrasi pengelolaan limbah, dan sampah dari hulu ke hilir, serta kesadaran dan perilaku hidup berkelanjutan (sustainable lifestyle).	Konsolidasi pengelolaan sampah dan limbah berbasis ekonomi sirkular dan berkelanjutan.
		Penataan kawasan prioritas rehabilitasi dan konservasi serta penyusunan basis kondisi ekosistem.	Penguatan dan harmonisasi kebijakan perlindungan lingkungan, dan penguatan kapasitas kelembagaan konservasi.	Keterpaduan kebijakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penyelamatan Danau Maninjau.	Integrasi implementasi kebijakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penyelamatan Danau Maninjau.	Pemantapan rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penyelamatan Danau Maninjau
		Penataan basis data dan identifikasi potensi kawasan dan kelompok masyarakat calon penerima akses pengelola hutan sosial	Fasilitasi legalisasi akses hutan sosial dan penguatan tata kelola kelompok usaha perhutanan sosial	Pengembangan unit usaha produktif berbasis HHBK, ekowisata, agroforestri, dan jasa lingkungan	Fasilitasi pengembangan rantai pasok usaha hutan sosial dan promosi produk ekonomi hijau masyarakat	Konsolidasi usaha hutan sosial dalam ekosistem ekonomi hijau daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Pemetaan basis data risiko bencana, degradasi lingkungan, dan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW yang berlaku, serta penyusunan dokumen tata ruang yang adaptif terhadap risiko dan mendukung keberlanjutan sumber daya.	Penguatan kelembagaan pengawasan serta penegakan hukum tata ruang, peningkatan kapasitas stakeholder, serta pemantapan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang berkelanjutan.	Pengembangan kebijakan tata ruang yang adaptif, serta keterpaduan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku.	Integrasi dan keterpaduan pengelolaan serta pemanfaatan tata ruang dan sumber daya alam yang berkelanjutan.	Konsolidasi pengelolaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim.
	Meningkatnya ketahanan daerah	Penataan basis data dan identifikasi jenis, tingkat risiko, dan wilayah rawan bencana sebagai dasar perencanaan mitigasi terpadu.	Penyusunan regulasi daerah dan penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, serta pengembangan sistem informasi kebencanaan yang valid secara terbuka kepada masyarakat	Keterpaduan pengelolaan penanggulangan bencana dan peningkatan prasarana pengendali risiko, serta pengembangan sistem peringatan dini dan tanggap darurat bencana berbasis teknologi.	Integrasi penanggulangan bencana, dan pelibatan aktif masyarakat dan stakeholder dalam edukasi dan kesiapsiagaan bencana, serta optimalisasi penerapan sistem peringatan dini dan tanggap darurat bencana.	Konsolidasi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana melalui sistem digital monitoring risiko dan integrasi data lintas sektor.
		Penataan basis data dan identifikasi infrastruktur strategis dan kawasan rawan risiko untuk	Penguatan kebijakan perencanaan dan pengendalian ruang dengan pendekatan	Keterpaduan kebijakan pembangunan dan penyediaan infrastruktur dengan standar	Integrasi pembangunan dan penyediaan infrastruktur melalui pemanfaatan	Keterpaduan pembangunan dan penyediaan infrastruktur dengan standar ketahanan dan keberlanjutan.

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		penguatan daya tahan dan fungsi ruang.	ketahanan iklim dan risiko bencana.	ketahanan dan keberlanjutan.	teknologi cerdas dan pelibatan warga.	
		Mengembangkan kerangka awal sistem informasi risiko sebagai basis analisis daerah, menetapkan prosedur operasional terpadu antar perangkat daerah untuk penanganan bencana, serta melaksanakan pemetaan awal kondisi ekosistem rawan sebagai dasar penentuan prioritas intervensi.	penyusunan pemetaan rinci risiko pada wilayah prioritas, Implementasi sistem informasi risiko sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan, serta rehabilitasi ekosistem pada lokasi strategis untuk memperkuat fungsi perlindungan wilayah.	Mengoperasionalkan sistem informasi risiko pada seluruh wilayah prioritas sebagai bagian dari sistem pendukung keputusan daerah, mempercepat pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan rawan untuk meningkatkan kapasitas proteksi alami, serta mengintegrasikan hasil analisis risiko ke dalam proses penataan ruang sebagai dasar penetapan arahan pemanfaatan ruang yang aman.	Meningkatkan analisis risiko untuk memperkuat akurasi peringatan dan proyeksi dampak, memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu bencana pada kawasan rawan, serta memperkuat kapasitas teknis perangkat daerah melalui pengembangan kompetensi dan standardisasi prosedur operasional.	Konsolidasi sistem informasi risiko, menuntaskan pemulihan ekosistem prioritas, dan memantapkan tata kelola kebencanaan daerah.
Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar.	Penataan basis data, peningkatan validitas data hidrologi daerah, dan pemetaan kebutuhan, serta peningkatan akses layanan air minum.	Pengembangan akses layanan dan peningkatan jaringan air minum pedesaan.	Optimalisasi akses layanan dan pembiayaan layanan air minum, serta implementasi inovasi penyediaan air minum berbasis sumber alternatif.	Optimalisasi akses layanan dan implementasi inovasi penyediaan air minum berbasis sumber alternatif.	Pemantapan layanan dan sistem penyediaan air minum, serta pembiayaan layanan air minum berkelanjutan

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Optimalisasi IPAL komunal dan tangki septik sehat	Peningkatan akses sanitasi dan limbah domestik serta edukasi sanitasi berbasis keluarga dan sekolah	Pengembangan akses sanitasi dan limbah domestik, serta inovasi sanitasi.	Keterpaduan akses sanitasi dan limbah domestik, dan peran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi dan pengurangan limbah dari sumbernya.	Konsolidasi pengelolaan sanitasi dan limbah domestik serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
		Penataan basis data dan inventarisasi titik genangan dan desain teknis drainase.	Peningkatan infrastruktur dan normalisasi saluran drainase	Pengembangan jaringan drainase dan perbaikan sistem eksisting di wilayah terdampak langsung.	Keterpaduan pengelolaan jaringan drainase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan fungsi sistem drainase lingkungan	Pemantapan pengelolaan jaringan drainase dan implementasi sistem monitoring dan integrasi teknologi untuk respon cepat penanganan genangan.
		Penataan dan penyusunan regulasi pedoman bangunan berstandar yang berketahanan bencana dan iklim	Optimalisasi penerapan standar dan sertifikasi bangunan.	Pendampingan pembangunan rumah layak dan tahan bencana	Integrasi dan monitoring penerapan standar keandalan bangunan.	Pemantapan keandalan bangunan berstandar berketahanan bencana dan iklim.
	Meningkatnya konektivitas wilayah	Pemetaan kondisi jalan eksisting, klasifikasi jalan berdasarkan fungsi pelayanan, serta identifikasi ruas prioritas peningkatan	Penyusunan rencana teknis dan rencana pembiayaan pembangunan atau peningkatan jalan berdasarkan daya dukung wilayah dan risiko kerusakan	Pelaksanaan fisik pembangunan jalan baru, pelebaran, pengaspalan dan perbaikan konstruksi jalan dengan standar teknis yang memadai	Penguatan sistem pemeliharaan jalan melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat serta adopsi teknologi monitoring kerusakan jalan	Pengembangan sistem informasi jalan daerah untuk perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan berbasis data

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Penataan dan identifikasi sarana transportasi eksisting, tingkat risiko kecelakaan, dan kebutuhan layanan transportasi masyarakat di wilayah strategis	Penguatan regulasi daerah terkait standar pelayanan minimal (SPM), standar teknis keselamatan, dan prosedur darurat sarana transportasi	Revitalisasi dan pengadaan sarana transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan karakteristik wilayah	Peningkatan kesadaran keselamatan transportasi dan penguatan kapasitas SDM operator transportasi melalui pelatihan dan sertifikasi	Pengembangan sistem informasi dan kontrol layanan transportasi berbasis teknologi untuk peningkatan kualitas, efisiensi, dan keselamatan
		Pentaan basis data dan identifikasi wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi dan internet serta analisis hambatan teknis dan ekonomi	Penyusunan skema kolaborasi dengan penyedia layanan telekomunikasi dan mekanisme pembiayaan kemitraan pemerintah-swasta.	Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet pada wilayah blank spot yang telah dipetakan sebagai prioritas	Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur digital melalui peningkatan kualitas layanan dan pelatihan literasi digital dasar di masyarakat	Pengembangan layanan publik berbasis jaringan internet yang telah terbangun dan integrasi sistem informasi daerah untuk pengawasan konektivitas
	Peningkatan pemukiman rumah layak huni	Pemetaan, penataan data dan verifikasi rumah tidak layak huni (RTLH)	Penyusunan program pembangunan dan peningkatan kualitas rumah melalui skema bantuan stimulan, subsidi, dan kemitraan dengan sektor swasta	Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan memperhatikan kelengkapan infrastruktur dasar	Penguatan pendekatan kawasan dalam pengembangan perumahan dengan integrasi ruang terbuka, fasilitas sosial, dan tata lingkungan sehat	Penerapan sistem informasi hunian untuk monitoring, pemeliharaan, dan perencanaan jangka panjang ketersediaan rumah layak dan terjangkau
		Pemetaan kawasan permukiman kumuh, rawan bencana, tidak layak huni	Penyusunan rencana penataan permukiman yang terintegrasi dengan mitigasi bencana, akses pelayanan	Penataan kawasan melalui penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air bersih, dan ruang terbuka hijau	Integrasi kawasan permukiman dengan transportasi publik	Kota dan nagari layak huni berbasis tata ruang berkelanjutan

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
			dasar, dan partisipasi masyarakat			

6. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 6:

AGAM

Tabel 3.21 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Per Tahun Misi VI

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (Tahun 2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari	Meningkatnya kemandirian desa	Standarisasi tata kelola dan pemetaan kapasitas kelembagaan nagari	Peningkatan kapasitas aparatur nagari melalui pelatihan dan asistensi tata kelola	Penerapan sistem transparansi dan pengawasan publik	Digitalisasi layanan dan pengelolaan keuangan nagari yang transparan	Penguatan kolaborasi lintas nagari dan kemitraan pembangunan partisipatif
		Pemetaan potensi ekonomi lokal tiap nagari	Inkubasi usaha nagari (BUMNag) dan Usaha Mikro berbasis sektor unggulan	Pemasaran produk unggulan melalui platform digital	Penguatan jaringan kemitraan usaha antar nagari	Integrasi produk lokal ke rantai nilai ekonomi daerah
		Pelatihan dasar SDM nagari: manajemen, organisasi, wirausaha	Penguatan kelembagaan masyarakat melalui fasilitasi organisasi lokal dan peraturan desa/nagari	Kolaborasi kelembagaan masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah	Pengarusutamaan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Institusionalisasi SDM unggul dan kelembagaan berbasis nilai lokal
		Pemetaan potensi, tantangan, dan peluang kerja sama antar nagari dan wilayah	Fasilitasi forum komunikasi dan koordinasi antar nagari serta antar wilayah administratif	Pengembangan program kolaboratif lintas nagari dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan dasar	Pembangunan mekanisme kelembagaan kolaboratif dan model tata kelola bersama antar wilayah	Penguatan integrasi perencanaan pembangunan antar nagari dan wilayah berbasis potensi kawasan

3. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2025-2029

Program prioritas daerah merupakan program yang memberi daya ungkit langsung terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD. Program ini dirancang secara strategis untuk menjawab isu-isu pembangunan utama dan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

Program ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan strategi pembangunan daerah selama periode lima tahunan RPJMD. Artinya, keberhasilan pelaksanaan program prioritas sangat menentukan tingkat pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Berikut tabel penyusunan program prioritas daerah Kabupaten Agam dalam RPJMD:



Tabel 3.22 Program Prioritas RPJMD

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
Misi I : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”								
	1.1.	Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat	1.1.1	Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama	meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama melalui gerakan nagari madani	capaian nagari madani	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Agam Madani
							Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
			1.1.2	Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan kebudayaan	
					Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
					Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
						Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan		

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			1.1.3	Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	
					Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan tibumtransmas		
					Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan masyarakat yang dilindungi		
					Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kopetensinya		
					Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Meninghkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional								
	2.1	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	2.1.1	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Nilai Sakip	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah/ Bagian Organisasi)	AgamMelayani

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	
							Program Penelitian dan Pengembangan	
							Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	
					Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah	opini BPK	Program Pengelolaan keuangan Daerah	
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Meningkatnya profesionalisme aparatur sipil negara (ASN)	indeks profesionalitas ASN	Program Kepegawaian	
					Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis digital dan terintegrasi.	Indeks SPBE	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
							Program Aplikasi Informatika	
					Meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
					dan prinsip-prinsip good governance.			
			2.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Pemerintah (Bagian Organisasi)	Agam Melayani
					meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	persentase kepemilikan kartu identitas kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	
					meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase penerbitan akte kelahiran, kematian dan perceraian	Program Pencatatan Sipil	
					Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Pelayanan penanaman modal	
Misi III : Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing								
	3.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter..	3.1.1.	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan	Agam Cerdas
						Persentase anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
					Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	
					Meningkatnya mutu dan didtribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks pemerataan guru	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	
						Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik		
					Meningkatnya kualitas dan ditribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaha rui	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
					Terlestarinya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
					Terlestarinya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
			3.1.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Agam Sehat
						Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		
					Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	
					Meningkatnya kualitas dan	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat	Program Sediaan Faramasi, Alat	

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan	
					distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	kesehatan dan makanan minuman	Kesehatan dan Makanan Minuman		
					Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
					Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Program Akreditasi pelayanan kesehatan		
						Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)			
						Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)			
					3.1.3	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusi	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuand alam pembangunan		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
				Menurunnya kekerasan terhadap perempuan			Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Perlindungan Perempuan	

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
					Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan Perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Peningkatan kualitas keluarga	
					Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Pemenuhan Hak Anak	
					Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penellantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Perlindungan Khusus Anak	
					Meningkatnya daya saing kepemudaan	rasio wirausaha pemuda	pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
					meningkatnya pembudidayaan dan prestasi olahraga	persentase atlet yang masuk pelatnas	Pengembangan daya saing keolahragaan	
					meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Pengembangan kapasitas kepramukaan.	

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
Misi IV Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan								
		Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan	4.1.1	Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	Agam Sejahtera
					Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan, produksi holtikultura dan peroduksi komoditas peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
					meningatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertaniakn	persentase penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
					meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	
					Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
					meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	pengawasan keamanan pangan	
					meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	pengelolaan perikanan tangkap	
					Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budi daya	pengelolaan perikanan budidaya	
					meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	pengelolaan	
			4.1.2	Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	meningkatnya realisasi pembangunan industri	persentase rea;lisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Agam Melayani
					Meningkatnya kemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
					meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
					meningkatnya kualilats SDM perkoperasian	persentase koperasi yang diberikan fasilitas dukungan faslitasi pelatihan	Program Pendidikan dan latihan Koperasi	
					meningkatnya kapasitas UMKM	pertumbuh wirausaha	pemberdayaan UMKM	

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
					yang tangguh dan mandiri			
					meningkatnya daya saing UMKM	proporsi Usaha Mikro yang menjalin kemitraan	Pengembangan UMKM	
					Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Agam Sejahtera
					Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Pemasaran Pariwisata	
					Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
					Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			4.1.3	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	
					meningktanya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Promosi penanaman modal	
					terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihdapai pelaku	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
						usaha dalam membuka usaha		
	4.2	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	4.2.1	Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola Harapan Pangan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Agam Sejahtera
					Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	persentase daerah rentan rawan pangan	penanganan kerawanan pangan	
	4.2.2		Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	persentase TK yang meningkat produktivitasnya	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Agam Melayani	
				terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah TK yang terlindungi hak-haknya	pengawasan Ketenagakerjaan		
	4.2.2		Meningkatnya perlindungan sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Perlindungan Jaminan Sosial		
					Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan			
Misi 5 : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana								
	5.1	Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan	1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara	pengendalian, Pencemaran dan/atau kerusakan LH	Agam Sehat

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
		serta adaptif terhadap risiko bencana.			meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Pengelolaan Kenakeragaman Hayati	
					Meningktanya tata kelola persampahan	indeks kinerja pengelolaan sampah	pengelolaan persampahan	
				2. Meningkatkan ketahanan daerah	meningktanya kualutas latanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persentase cakupan edukasi rawan bencana	penanggulangan bencana	Agam Melayani
					meningktanya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggbap darurat bencana		
	5.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase masyarakat dengan akses air minum aman	Pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air minum	Agam Sehat
					Meningkatnya akses masyarakat terhadao sistem pengelolaan aie limbah	Persentase masyarakat dengan sanitasi layak	pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	
					meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	
					meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	tingkat kemantapan jalan	penyelenggaraan jalan	

MISI		TUJUAN		SASARAN	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			2	Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatnya konektivitas wilayah	persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang	Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
			3	Meningkatnya pemukiman rumah layak huni	terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	persentase WN korban bencana dan WN yang terkena relokasi yang memperoleh fasilitas penyediaan RLH	pengembangan perumahan	
					meningkatnya kualitas kawasan permukiman	persentase luas kawasan kumuh >10 Ha yang ditangani	kawasan Pemukiman	
					meningkatnya penyediaan PSU permukiman	persentase permukiman yang dilengkapi PSU	Peningkatan PSU	
Misi VI. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat								
	6.1	Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari	1.	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	persentase fasilitasi penataan desa	Penataan Desa	
					meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat.	pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	

3.6 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 (Program Strategis Nasional)

3.6.1 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan

1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Agam yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan visi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesempatan kerja dan usaha.

Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan dirancang secara holistik dan terintegrasi, dengan mengedepankan pendekatan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini diorientasikan pada peningkatan kualitas hidup rumah tangga miskin, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

- 1) Penguatan data dan informasi kemiskinan yang akurat dan terpadu sebagai dasar penentuan sasaran program yang lebih tepat.
- 2) Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar bagi penduduk miskin, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan.
- 3) Penguatan perlindungan sosial dan jaminan sosial terpadu bagi masyarakat rentan dan miskin ekstrem melalui integrasi program pusat dan daerah.
- 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, khususnya melalui pengembangan usaha mikro, ekonomi kreatif, dan kegiatan padat karya berbasis potensi lokal.
- 5) Peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, dan jaringan internet di wilayah tertinggal atau rawan kemiskinan.
- 6) Perluasan kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

2. Program Sekolah Rakyat

Pemerintah memperkuat akses pendidikan bagi anak dari keluarga rentan melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini menjadi instrumen untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan serta dukungan lintas perangkat daerah supaya layanan pendidikan, sosial, dan kesehatan terintegrasi. Dengan memanfaatkan Data sosial untuk menentukan sasaran dan memastikan penanganan berjalan tepat. peran nagari dan masyarakat perlu diperkuat dalam pengawasan dan dukungan operasional. Pelaksanaan Sekolah Rakyat diarahkan agar mampu meningkatkan ketuntasan belajar, menurunkan risiko putus sekolah, dan memperbaiki kondisi sosial keluarga. Dalam hal ini daerah dapat mendukung Sekolah Rakyat melalui:

- 1) Menyediakan dukungan fasilitasi dan rekomendasi teknis, koordinasi wilayah, serta pendampingan operasional yang dibutuhkan untuk Sekolah Rakyat.
- 2) Sinkronisasi program daerah dengan menyelaraskan program Sekolah Rakyat dengan layanan sosial, pendidikan nonformal, kesehatan dasar, serta pemberdayaan keluarga yang sudah menjadi kewenangan daerah.
- 3) Menyediakan data dan pemetaan anak rentan melalui basis data daerah dan memfasilitasi verifikasi data supaya tepat sasaran.
- 4) Memfasilitasi pemanfaatan sarana dengan menyediakan lahan, atau dukungan rehabilitasi ringan sebagai fasilitas pendukung.
- 5) Memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah agar layanan kesehatan, pendampingan sosial, dan perlindungan anak terhubung dengan kegiatan Sekolah Rakyat.
- 6) Mendukung penggerakan masyarakat, nagari dan tokoh lokal untuk membantu sosialisasi, pemantauan, dan dukungan lingkungan belajar.

3. Pembangunan 3 Juta Rumah

Kabupaten Agam memastikan dukungan yang selaras dengan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk memperkuat akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah berperan pada penataan ruang, penyediaan data kebutuhan perumahan, fasilitasi perizinan, dan penguatan ekosistem pembangunan perumahan. Upaya ini meningkatkan kualitas permukiman serta memperluas kesempatan ekonomi lokal. Dukungan daerah juga memastikan pembangunan berjalan terarah dan terintegrasi dengan perencanaan jangka menengah.

- 1) Mengembangkan basis data kebutuhan perumahan dengan pemutakhiran rutin agar perencanaan pembangunan rumah rakyat tepat sasaran.
- 2) Menetapkan zona prioritas perumahan dalam rencana tata ruang dan memastikan kesesuaian pemanfaatan lahan untuk pengembangan hunian baru.
- 3) Memfasilitasi akses masyarakat terhadap skema pembiayaan perumahan bersubsidi dengan dukungan sosialisasi dan pelayanan administrasi yang lebih cepat.
- 4) Mempercepat perizinan pembangunan perumahan dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah.
- 5) Mendorong pengembang dan UMKM konstruksi lokal berpartisipasi dalam pembangunan rumah agar ekonomi daerah bergerak dan biaya pembangunan lebih efisien.
- 6) Mengintegrasikan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni ke dalam perencanaan tahunan daerah agar perbaikan permukiman berjalan konsisten.
- 7) Mengembangkan kemitraan dengan kementerian terkait untuk penyediaan lahan, pendampingan teknis, dan dukungan pembiayaan pembangunan rumah rakyat.
- 8) Memastikan pembangunan perumahan terhubung dengan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, dan jaringan utilitas agar kualitas hunian meningkat.

3.6.2 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Ketahanan Pangan

Kabupaten Agam perlu menjaga ketahanan pangan yang stabil sepanjang tahun. Kondisi iklim yang berubah cepat, tekanan lahan, dan kebutuhan konsumsi yang meningkat membuat daerah perlu menjaga produksi, distribusi, dan cadangan pangan agar tetap aman. Pemerintah daerah mengarahkan kebijakan pada penguatan ekosistem pangan dari hulu sampai hilir. Fokus utamanya meningkatkan penggunaan data, memperkuat pelaku usaha, dan memastikan akses pangan untuk seluruh rumah tangga. Dalam mendukung program strategis nasional dalam ketahanan pangan, daerah perlu melakukan:

- 1) Meningkatkan produktivitas pangan daerah melalui pengelolaan lahan yang efisien, pemilihan varietas adaptif, penggunaan teknologi budidaya, dan peningkatan layanan penyuluhan.

- 2) Mengembangkan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pangan.
- 3) Memperbaiki rantai pasok dan konektivitas distribusi agar harga tetap terjangkau dan pangan mudah diakses sepanjang tahun.
- 4) Membangun cadangan pangan daerah melalui penguatan lumbung pangan nagari dan sistem logistik sederhana yang menjamin pasokan saat kondisi darurat.
- 5) Meningkatkan pengawasan keamanan pangan melalui standardisasi mutu, pelatihan pelaku usaha, dan integrasi pengujian pangan.
- 6) Memperkuat literasi konsumsi pangan bergizi melalui kampanye publik, program edukasi sekolah, dan kolaborasi lembaga desa.
- 7) Mengembangkan kemitraan usaha pangan antara petani, UMKM, dan sektor swasta untuk mendorong nilai tambah dan stabilitas pendapatan.

3.6.3 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kesehatan Untuk Semua

Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Fokusnya pada penguatan layanan dasar, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dan konsolidasi sistem pendukung agar kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah.

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional

- 1) Perbaiki layanan kesehatan dasar, termasuk pemenuhan tenaga kesehatan dan fasilitas di wilayah terpencil dan tertinggal.
- 2) Penguatan upaya promotif dan preventif, termasuk penanganan stunting, gizi buruk, dan penyakit menular maupun tidak menular.
- 3) Pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
- 4) Mengembangkan sistem monitoring berbasis data untuk melihat tren pemanfaatan layanan dan kebutuhan pembiayaan.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk sinkronisasi data, evaluasi kinerja layanan dan penyelesaian kendala operasional.
- 6) Memperkuat edukasi publik tentang hak peserta, prosedur layanan dan pentingnya kepesertaan aktif.

2. Makan Bergizi Gratis (MBG)

- 1) penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan pangan lokal untuk menu Makan Bergizi Gratis
- 2) Menggunakan pangan lokal sebagai pasokan utama dengan melibatkan petani, UMKM pangan dan koperasi.
- 3) Membentuk mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan lintas sektor.

3.6.4 Perluasan Akses Pendidikan dengan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Agam, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas strategis yang mendasar. Kualitas dan daya saing SDM memiliki peran kunci dalam mendukung transformasi sosial, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan SDM di Kabupaten Agam diarahkan pada peningkatan akses, kualitas, pemerataan, serta relevansi layanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah serta dinamika pasar kerja. Upaya ini juga didukung oleh penguatan karakter, etika kerja, serta nilai-nilai lokal dan keagamaan yang menjadi fondasi moral masyarakat Agam.

Secara umum, arah kebijakan dan program pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam meliputi:

- 1) Perluasan akses pendidikan yang merata dan inklusif di semua jenjang, termasuk pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal.
- 2) Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan kompetensi guru, sarana prasarana pendidikan, serta pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Pengembangan kurikulum berbasis karakter dan potensi lokal untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan daerah.

3.6.5 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat struktur ekonomi berbasis potensi lokal, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, serta mendorong pemerataan akses dan kesempatan ekonomi bagi seluruh

lapisan masyarakat. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta peningkatan daya saing daerah melalui inovasi dan digitalisasi. Arah kebijakan Kabupaten Agam difokuskan pada:

1. Pengendalian Inflasi

Pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas harga agar daya beli tetap terjaga. Daerah berperan pada penguatan pasokan, kelancaran distribusi dan koordinasi dengan pelaku pasar. Dukungan ini membantu menjaga kestabilan harga komoditas strategis, dengan arah kebijakan:

- 1) Mengembangkan basis data komoditas strategis yang memuat produksi, kebutuhan wilayah, tren harga dan peta kerentanan
- 2) Memperkuat cadangan pangan dan komoditas penting melalui optimalisasi peran BUMD, kemitraan dengan petani
- 3) Meningkatkan efisiensi distribusi melalui penataan jaringan logistik, penyediaan sarana angkut dan perbaikan akses infrastruktur wilayah dan Mengintegrasikan digitalisasi rantai pasok ke dalam sistem informasi daerah untuk penguatan pemantauan stok dan distribusi.
- 4) Melaksanakan intervensi pasar terukur untuk komoditas bergejolak melalui operasi pasar dan pengaturan pasokan.
- 5) Mengembangkan sistem pemantauan harga real time sebagai dasar pengambilan keputusan stabilisasi.
- 6) Memfungsikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagai forum koordinasi kebijakan yang responsif terhadap perubahan harga.
- 7) Mengoptimalkan peran pelaku usaha lokal dalam penyediaan dan distribusi komoditas strategis melalui skema kemitraan yang efisien.
- 8) Mengonsolidasikan edukasi konsumsi pangan sesuai musim dan ketersediaan untuk menjaga keseimbangan permintaan.

2. Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat nagari melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Koperasi ini menjadi wadah usaha bersama yang mendorong kemandirian ekonomi warga, memperkuat rantai nilai lokal dan mendukung peningkatan kesejahteraan melalui tata kelola yang terstruktur.

- 1) Menyiapkan kerangka regulasi daerah yang memfasilitasi pembentukan, pendaftaran dan operasional koperasi merah putih.

- 2) Mengembangkan program peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan manajemen koperasi, akuntansi sederhana dan tata kelola usaha.
- 3) Mengintegrasikan pendampingan usaha dengan perangkat daerah terkait untuk menguatkan rantai nilai produk lokal.
- 4) Menyediakan dukungan fasilitasi legalitas melalui layanan konsultasi, asistensi dokumen dan sinkronisasi data dengan sistem pusat.
- 5) Memfasilitasi akses pembiayaan koperasi melalui kemitraan BUMD, lembaga keuangan dan program pemberdayaan ekonomi daerah.
- 6) Mengembangkan sistem monitoring pembentukan dan kinerja koperasi di tingkat nagari sebagai dasar evaluasi.
- 7) Mengoptimalkan peran pendamping nagari untuk mempercepat proses konsolidasi anggota dan penyusunan rencana usaha.
- 8) Mengarahkan program pemberdayaan ekonomi daerah agar selaras dengan kebutuhan koperasi yang baru terbentuk.

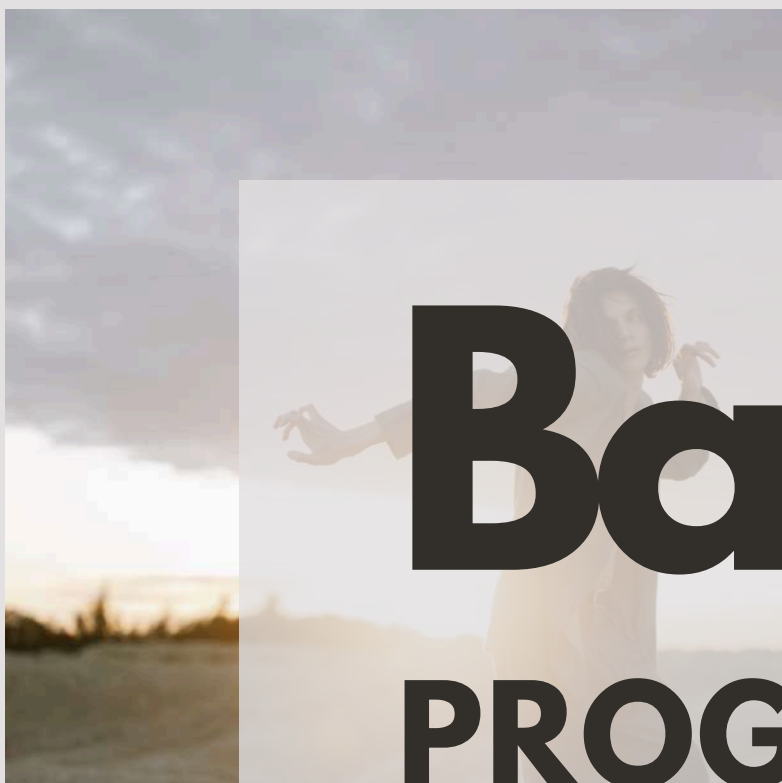
3. Kemudahan perizinan di daerah

Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pelayanan perizinan agar proses usaha berjalan cepat, akurat dan terstandar. Dukungan ini memastikan penataan regulasi, konsolidasi data dan peningkatan kapasitas layanan berlangsung selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan pelaku usaha, dengan arah kebijakan:

- 1) Mengembangkan tata kelola perizinan terpadu melalui pemutakhiran regulasi, penyederhanaan prosedur dan penetapan standar waktu layanan.
- 2) Meningkatkan kapasitas sistem OSS daerah melalui integrasi data usaha, verifikasi teknis dan pemantauan otomatis status layanan.
- 3) Memperkuat fungsi pelayanan DPMPSTSP melalui peningkatan kompetensi petugas, penyiapan helpdesk dan penerapan evaluasi kinerja berkala.
- 4) Menata mekanisme perizinan teknis lintas perangkat daerah agar alur rekomendasi lebih terkoordinasi dan tidak menimbulkan duplikasi proses.
- 5) Menyediakan dukungan asistensi bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam pemenuhan persyaratan dasar dan kelengkapan dokumen.

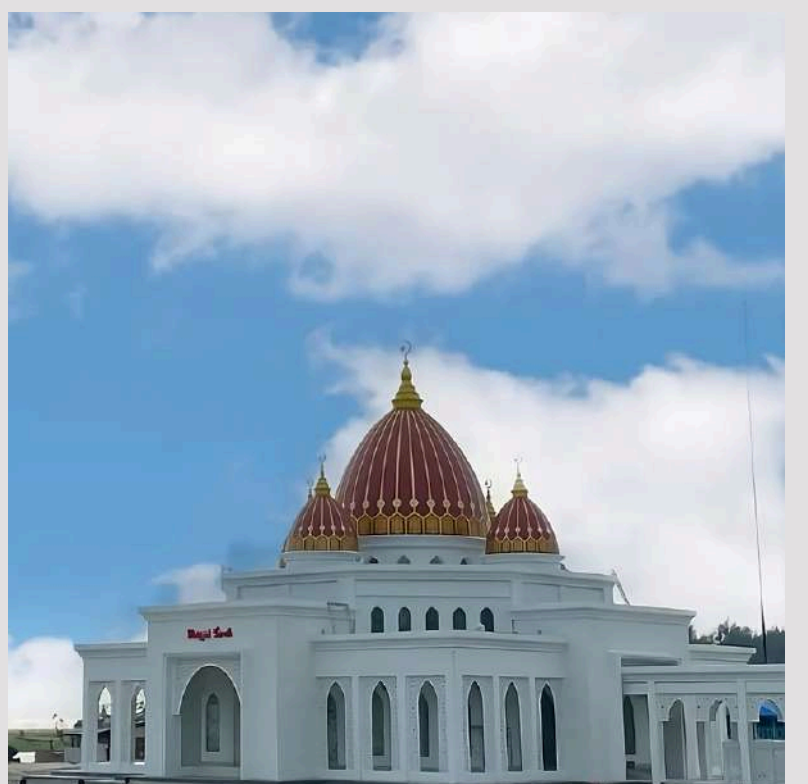
- 6) Mengembangkan sistem pengawasan pasca perizinan berbasis risiko untuk menjamin kepatuhan terhadap standar teknis dan perlindungan masyarakat.
- 7) Memperkuat penyediaan informasi layanan melalui kanal digital dan pusat informasi agar pelaku usaha dapat mengakses persyaratan dengan jelas.
- 8) Mengelola basis data perizinan sektor unggulan sebagai bahan perencanaan investasi dan arah pengembangan ekonomi daerah.





Bab 4

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Program perangkat daerah dapat dikategorikan sebagai berikut: (i). Program pelayanan dasar yaitu program-program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. (ii) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (iii) Program pengembangan ekonomi yaitu program-program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. (iv) Program lingkungan hidup yaitu program-program yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. (v) program tata kelola pemerintahan: program-program yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Bidang Urusan dibagi menjadi (i) Urusan Wajib Pelayanan Dasar. (ii) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. (iii) Urusan Pemerintahan Pilihan. (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. (v) Unsur Penunjang Urusan. (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. (vii) Unsur Kewilayahan. dan (viii) Unsur Pemerintahan Umum.

Program perangkat daerah merupakan semua program yang terdapat pada Rencana Strategis yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026-2030 tersaji pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
1	Urusan Pendidikan					659.948.479.359		694.621.301.490		695.232.218.299		695.843.135.108		696.342.976.134	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	99,74	92	95.855.503.233	94	118.028.057.752	94	118.131.862.982	98	118.235.668.213	99	118.320.599.765	PD yang menangani Urusan Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Penerapan Silabus Muatan Lokal	Persentase Penerapan Silabus Muatan Lokal	100	100	200.000.000	100	561.997.477	100	562.491.751	100	562.986.026	100	563.390.433	
	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar	Persentase sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar	100	100	50.000.000	100	113.567.637	100	113.667.519	100	113.767.402	100	113.849.124	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kepemilikan izin pengelolaan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal yang dikelola masyarakat	Persentase pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal yang dikelola masyarakat yang memiliki izin.	N/A	100	-	100	150.000.000	100	150.131.924	100	150.263.849	100	150.371.787	
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya penerapan bahasa dan sastra daerah di sekolah	Persentase penerapan bahasa dan sastra daerah di sekolah	N/A	50	-	70	84.000.000	70	84.073.878	90	84.147.755	100	84.208.201	
	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya tatakelola administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan	100	100	563.842.976.126	100	575.683.678.625	100	576.189.990.244	100	576.696.301.863	100	577.110.556.825	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	operasional kantor dan ASN.												
2	Urusan Kesehatan					310.427.208.349		388.993.696.267		389.335.814.753		389.677.933.238		389.957.848.363	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	61,9	61,9	73.246.179.304	61,9	131.343.086.898	71,4 2	131.458.602.646	71,4 2	131.574.118.395	71,4 2	131.668.631.280	PD yang menangani Urusan Kesehatan
			Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100		
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	36,7	37,5		42		48		50,3		60		
			Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	82	86		89		92		95		95		
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	87,8 2	88,5		89		89,5		89,7		89,9		

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
			Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%) (%)	13,9	13,7		13,6		13,5		13,4		13,2		
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	10,4	9,8		9,6		9,4		9,2		9		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	45,56	45,9		46		46,15		46,3		46,45		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional (%)	85,7	85,7		100		100		100		100		
			Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	52	53,5		54		54,5		55		55,5		
			Persentase depresi pada usia > 15 Tahun (%)	N/A	1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	52,58	54		54,5		55		55,5		56		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	11,94	13,27	1.183.390.000	14,16	2.829.364.336	16,81	2.831.852.751	16,81	2.834.341.166	17,36	2.836.377.143	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Manusia Kesehatan	SDM Kesehatan													
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (per 1000 orang) (Rasio)	4,9	5,5		5,5		5,5		5,5		5,5		
			Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	50	51,5		52,5		53,5		54		55		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya efektifitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	24	24	641.268.000	26	12.265.649.086	28	12.276.436.678	30	12.287.224.270	32	12.296.050.482	
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	51,7	51,7		52		52,5		53		53,5		
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	58,3	58,3		58,8		59,3		59,9		60,2		
			Persentase peneribitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT (%)	24	24		26		28		30		32		

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sedian farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	58,3	58,3		58,8		59,3		59,9		60,2		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	45	50	350.116.400	52.17	1.674.184.936	54.3	1.675.657.375	56.5	1.677.129.814	58.69	1.678.334.538	
			Persentase Posyandu aktif	91	91,9		92		92,3		92,4		92,6		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	235.006.254.645	100	240.881.411.012	100	241.093.265.302	100	241.305.119.593	100	241.478.454.921	
3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					151.686.706.810		263.895.714.788		264.127.810.072		264.359.905.355		264.549.801.497	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	51,20	52,54	15.280.243.400	52,94	25.573.448.318	53,34	25.595.940.069	53,74	25.618.431.820	54,14	25.636.834.162	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		akses masyarakat terhadap irigasi													dan Penataan
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	4,07	8,11		9,99		11,86		13,73		15,61		
	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase masyarakat dengan akses air minum aman	59,01	59,23	4.605.845.971	59,34	10.461.500.867	59,45	10.470.701.718	59,56	10.479.902.568	59,67	10.487.430.537	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase masyarakat dengan sanitasi layak	79,05	79,71	7.404.598.000	79,81	13.597.545.521	79,91	13.609.504.511	80,01	13.621.463.501	80,11	13.631.248.129	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	39,21	42,50	13.542.310.888	44	27.521.537.055	45,5	27.545.742.143	47	27.569.947.231	47	27.589.751.393	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100	100	8.292.186.400	100	18.834.480.302	100	18.851.045.156	100	18.867.610.011	100	18.881.163.073	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya Jalan Lingkungan Kondisi Baik	Persentase jalan lingkungan permukiman kondisi baik	52	58	19.964.397.801	61	33.412.981.848	64	33.442.368.439	67	33.471.755.030	70	33.495.798.605	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan an
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	
	Program Penyelenggara an Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	58,91	60,16	71.870.012.936	61,16	123.589.356.674	62,16	123.698.053.046	63,16	123.806.749.418	64,16	123.895.682.813	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi Kualifikasi Ahli	2,33	3,5	131.395.000	3,75	157.075.996	4	157.214.144	4,25	157.352.292	4,5	157.465.322	
	Program Penyelenggara an Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggara an pentaan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	98,3	98,4	248.665.000	98,4	297.266.278	98,4	297.527.723	98,5	297.789.168	98,5	298.003.077	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	91	93	10.347.051.414	94	10.450.521.928	95	10.459.713.123	96	10.468.904.317	97	10.476.424.385	
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					14.386.533.673		30.360.374.143		30.387.075.977		30.413.777.812		30.435.624.767	
	Program Pengembangan n Perumahan	Terpenuhinya Rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Peresentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	405.005.206	100	5.912.443.818	100	5.917.643.790	100	5.922.843.762	100	5.927.098.284	PD yang menang ani urusan Perumah an dan Permuki man
			2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program yang	N/A	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
			memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni												
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 ha	0,55	3,83	710.000.000	7,66	5.994.606.341	11,4	5.999.878.574	15,3	6.005.150.808	19,1	6.009.464.453	
	Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum)	50	66,67	399.882.500	72,22	5.486.920.413	77,78	5.491.746.138	83,33	5.496.571.864	88,89	5.500.520.185	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman di luar kawasan kumuh	Persentase luas kawasan permukiman di luar kawasan kumuh yang ditangani	0,07	0,18	6.300.000.000	0,27	9.037.593.008	0,53	9.045.541.537	0,8	9.053.490.066	0,16	9.059.993.408	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	98	100	3.571.645.967	100	3.928.810.564	100	3.932.265.938	100	3.935.721.312	100	3.938.548.436	
5	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					23.590.109.428		27.638.243.923		27.662.551.654		27.686.859.385		27.706.747.529	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	1.277.659.200	100	1.527.376.171	100	1.528.719.493	100	1.530.062.814	100	1.531.161.895	PD yang menangani urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan trantibum	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kopetensinya	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Pencegahan Penanggulangan an. Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	100	100	3.761.803.025	100	6.520.712.280	100	6.526.447.222	100	6.532.182.164	100	6.536.874.389	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	12.655.209.594	100	13.287.970.073	100	13.299.656.793	100	13.311.343.512	100	13.320.905.374	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		kinerja perangkat daerah													
	Program Penanggulangan an Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penanggulang an Bencana pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Persentase Pelayanan Penanggulanga n Bencana pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	83	91	940.207.477	92	1.123.969.910	93	1.124.958.437	94	1.125.946.965	95	1.126.755.760	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	4.955.230.132	100	5.178.215.488	100	5.182.769.709	100	5.187.323.930	100	5.191.050.111	
6	Urusan Sosial					5.772.557.959		8.123.881.529		8.131.026.452		8.138.171.375		8.144.017.221	
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PPKS dan PSKS yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan	60	71	885.955.640	74	2.594.830.809	77	2.597.112.953	80	2.599.395.097	82	2.601.262.306	PD yang menang ani Urusan Sosial

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng terlantar diluar panti serta PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng terlantar diluar panti serta PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza yg terpenuhi kebutuhan dasarnya	60	85	278.171.450	88	332.539.729	90	332.832.196	93	333.124.664	95	333.363.955	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang dilakukan perlindungan dan Jaminan Sosial	78	100	236.739.770	100	622.622.608	100	623.170.202	100	623.717.797	100	624.165.828	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terkelolanya taman makam pahlawan nasional	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100	9.094.100	100	10.871.531	100	10.881.092	100	10.890.654	100	10.898.477	
	Program Penanganan Bencana	Terkelolanya pemenuhan kebutuhan dasar korban Bencana Alam dan Bencana sosial	Persentase korban Bencana Alam dan Bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	308.771.672	100	387.576.764	100	387.917.637	100	388.258.509	100	388.537.405	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	90	100	4.053.825.327	100	4.175.440.087	100	4.179.112.371	100	4.182.784.654	100	4.185.789.250	
7	Urusan Tenaga Kerja					4.868.188.176		6.628.347.113		6.634.176.719		6.640.006.326		6.644.776.004	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	60	-	-	100	510.000.000	100	510.448.543	100	510.897.086	100	511.264.076	PD yang menangani urusan Ketenagakerjaan
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih	7	21,82	297.734.780	23,65	1.174.558.072	26,67	1.175.591.092	30,72	1.176.624.111	32	1.177.469.309	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	65	72	142.117.200	74	322.798.292	76	323.082.192	78	323.366.091	80	323.598.373	
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Dilindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit. Struktur Skala Upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	75	8,42	361.468.100	9,21	432.116.610	10	432.496.655	10,53	432.876.700	11,05	433.187.646	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	88	100	4.066.868.096	100	4.188.874.139	100	4.192.558.238	100	4.196.242.337	100	4.199.256.600	
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6.406.138.184		7.389.307.812		7.395.806.680		7.402.305.549		7.407.622.804	
	Progran Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase anggaran responsif gender (ARG)	31	36,44	586.726.000	36,6	911.821.169	37	912.623.112	38	913.425.055	40	914.081.190	PD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TTPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	110.911.451	100	172.365.651	100	172.517.246	100	172.668.841	100	172.792.873	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender,	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai	1	1	277.000.000	2	430.481.117	3	430.859.723	4	431.238.330	6	431.548.099	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	standar (Lembaga)												
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan. evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	100	100	32.002.000	100	49.733.779	100	49.777.519	100	49.821.260	100	49.857.048	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eks ploitasi,penel ntaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	330.192.457	100	513.146.634	100	513.597.945	100	514.049.255	100	514.418.509	
	Program pemenuhan hak anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara konferhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,75	62,25	172.442.000	62,75	267.989.259	63,25	268.224.954	63,75	268.460.650	64,25	268.653.492	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	88	100	4.896.864.276	100	5.043.770.204	100	5.048.206.181	100	5.052.642.158	100	5.056.271.594	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		perangkat daerah													
9	Urusan Pangan					4.971.547.798		6.911.021.288		6.917.099.505		6.923.177.722		6.928.150.809	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan daerah yang tersimpan dan terkelola di lumbung pangan aktif (%)	18,57	0	-	20	200.000.000	40	200.175.899	60	200.351.798	80	200.495.716	PD yang menangani urusan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	eningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	skor Pola Pangan Harapan	81	85,5	716.744.357	86	1.799.345.497	86,5	1.800.928.015	87	1.802.510.532	87,5	1.803.805.319	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Pangan	1,22 (1 dari 82 Naga ri)	5,4 (5 Naga ri)	277.950.019	4,3 (4 Naga ri)	697.777.541	3,2 (3 Naga ri)	698.391.234	2,17 (2 Naga ri)	699.004.927	1,08 (1 Naga ri)	699.507.039	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	90 (terjadi perbedaan formulasi)	81	79.529.752	82	199.654.870	83	199.830.465	84	200.006.061	85	200.149.730	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Operasional untuk Efektifitas	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	3.897.323.670	100	4.014.243.380	100	4.017.773.892	100	4.021.304.404	100	4.024.193.004	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		Kinerja Perangkat Daerah													
10	Urusan Pertanahan					190.000.000		410.000.000		410.360.593		410.721.187		411.016.218	
	Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	100	100	75.000.000	100	160.000.000	100	160.140.719	100	160.281.439	100	160.396.573	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100	100	50.000.000	100	150.000.000	100	150.131.924	100	150.263.849	100	150.371.787	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	71,42	100	65.000.000	100	100.000.000	100	100.087.950	100	100.175.899	100	100.247.858	
11	Urusan Lingkungan Hidup					20.526.878.082		30.016.199.088		30.042.598.222		30.068.997.355		30.090.596.647	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP (Kebijakan Rencana Program)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	30	187.126.800	50	223.700.510	70	223.897.254	90	224.093.998	100	224.254.970	PD yang menangani urusan Lingkungan Hidup

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	0,05	0,26	1.233.439.986	0,52	2.990.594.392	0,78	2.993.224.609	1,04	2.995.854.825	1,3	2.998.006.820	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola	14	16	547.983.061	33	884.365.693	33	885.143.489	50	885.921.286	50	886.557.664	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya beracun (B3) Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3)	Persentase kepatuhan pengelolaan Limbah B3	100	100	130.000.000	100	310.000.000	100	310.272.644	100	310.545.288	100	310.768.360	
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH. dan PUU LH	14,74	35	170.109.500	40	274.532.219	42	274.773.669	44	275.015.119	46	275.212.669	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kearifan		Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	-		6,25	20.000.000	12,5	20.017.590	18,75	20.035.180	25	20.049.572	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Lokal. dan MHA yang Terkait dengan PPLH														
	Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	N/A	32	-	34	250.000.000	36	250.219.874	38	250.439.748	40	250.619.645	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Kinerja pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup yang diterima	N/A	10	44.999.875	15	70.000.000	20	70.061.565	25	70.123.129	30	70.173.501	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	100	100	30.082.000	100	60.000.000	100	60.052.770	100	60.105.540	100	60.148.715	
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Timbulan sampah terkelola	N/A	35 (17 terdaur ulang , 18 terolah)	12.363.656.724	36 (18 terdaur ulang)	18.997.136.535	37 (19 terdaur ulang	19.013.844.444	38 (20 terdaur ulang	19.030.552.354	39 (21 terdaur ul	19.044.222.462	
	Program Penunjang	Meningkatnya Tata Kelola	Persentase pemenuhan	100	100	5.819.480.136	100	5.935.869.739	100	5.941.090.314	100	5.946.310.889	100	5.950.582.268	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi dan Operasional untuk efektifitas kinerja perangkat Daerah	kebutuhan operasonal kantor dan ASN.												
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					5.176.736.046		6.343.504.767		6.349.083.855		6.354.662.943		6.359.227.652	
	Program Pendaftaran penduduk	Meningkatnya kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	5	12	1.403.612.400	14	2.138.690.848	16	2.140.580.613	20	2.142.470.379	25	2.144.016.551	PD yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil	1. Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	23.110.000	100	320.000.000	100	320.281.439	100	320.562.878	100	320.793.146	
			2. Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100		100		100		100		100		
			3. Persentase Akte Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
			4. Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100		100		100		100		100		
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100	100	-	100	60.000.000	100	60.052.770	100	60.105.540	100	60.148.715	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	30	30	10.000.000	40	10.000.000	50	10.000.000	60	10.000.000	80	10.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Operasional untuk efektifitas kinerja perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	88	100	3.740.013.646	100	3.814.813.919	100	3.818.169.033	100	3.821.524.147	100	3.824.269.241	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					9.930.743.361		11.984.205.640		11.994.745.704		12.005.285.767		12.013.909.456	
	Program Penataan Desa	Terlaksananya pemekaran, penggabungan, atau penghapusan desa secara terencana dan sesuai regulasi.	Persentase pasilitasi penataan desa	69	100	128.440.000	100	606.496.609	100	607.030.020	100	607.563.432	100	607.999.859	PD yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Tumbuhnya kolaborasi strategis antar desa dalam pengelolaan sumber daya alam, pariwisata, dan pengembangan usaha ekonomi produktif.	Persentase fasilitasi kerjasama desa	80	100	100.010.000	100	472.249.500	100	472.664.842	100	473.080.184	100	473.420.009	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur desa dan anggota BPD	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	773.684.300	100	1.156.124.970	100	1.157.141.778	100	1.158.158.585	100	1.158.990.519	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKD dalam mendukung pembangunan desa.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	58	60	3.127.344.206	70	3.832.044.409	80	3.835.414.677	90	3.838.784.946	100	3.841.542.438	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Operasional untuk efektifitas kinerja perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	5.801.264.855	55	5.917.290.152	100	5.922.494.386	100	5.927.698.621	100	5.931.956.631	
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					8.094.363.029		9.676.396.656		9.684.907.010		9.693.417.364		9.700.380.381	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	5,2	3,6	288.484.117	3,2	344.867.995	2,9	345.171.305	2,8	345.474.615	2,6	345.722.778	PD yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modren Contraceptif (mCPR)	54,17	58,5	5.173.073.912	58,5	6.184.145.055	58,5	6.189.583.988	58,6	6.195.022.920	58,8	6.199.472.955	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	70,01	80	2.632.805.000	80	3.147.383.606	80	3.150.151.718	80	3.152.919.830	80	3.155.184.649	
15	Urusan Perhubungan					27.361.533.374		29.745.217.127		29.771.377.933		29.797.538.739		29.818.943.035	
	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	37	72,7	19.843.163.581	82,07	21.827.479.939	83,1	21.846.677.125	84,13	21.865.874.311	86	21.881.581.099	PD yang menangani urusan Perhubungan
	Program Pengelolaan pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan Angkutan sungai danau	Persentase dermaga dan angkutan danau yang	66	100	50.000.000	100	300.000.000	100	300.263.849	100	300.527.698	100	300.743.574	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		dan penyebrangan	sesuai standar kelayakan												
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	7.468.369.793	100	7.617.737.189	100	7.624.436.960	100	7.631.136.731	100	7.636.618.362	
16	Urusan Komunikasi dan Informatika					8.936.038.850		11.000.139.692		11.009.814.273		11.019.488.854		11.027.404.421	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya penyebaran Informasi pada masyarakat melalui media informasi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik pemerintah daerah	82	82	1.528.492.189	85	1.827.234.170	86	1.828.841.215	87	1.830.448.261	88	1.831.763.116	PD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya ketersediaan akses internet pada perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang terhubung akses internet yang disediakan	25	59,09	2.723.232.931	27,29	4.394.905.517	29,58	4.398.770.820	31,87	4.402.636.123	34,16	4.405.798.643	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektifitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	4.684.313.730	100	4.778.000.004	100	4.782.202.237	100	4.786.404.470	100	4.789.842.661	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
17	Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah					10.215.226.797		11.951.855.324		11.962.366.935		11.972.878.547		11.981.478.956	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawas Koperasi	Persentase cakupan koperasi yang diawasi	18,0	18,80	5.000.000	27,97	160.000.000	38,56	160.140.718	50,00	160.281.439	62,71	160.396.573	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas pelatihan	N/A	12,82	113.809.000	14,83	136.052.834	15,55	136.172.492	16,67	136.292.150	17,36	136.390.052	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	N/A	31,82	775.639.006	31,82	932.236.727	31,82	933.056.625	31,82	933.876.524	31,82	934.547.350	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya UMKM yang terfasilitasi pemberdayaanya	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi dan mendapatkan pendampingan	N/A	0,64	1.639.373.669	0,96	8.287.942.984	1,03	8.295.232.198	1,1	8.302.521.413	1,17	8.308.485.316	
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing umkm	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Telah meningkat skala usahanya	0	0,16	5.293.539.652	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	2.387.865.470	100	2.435.622.779	100	2.437.764.900	100	2.439.907.021	100	2.441.659.666	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Kabupaten/Kota	efektivitas kinerja perangkat daerah													
18	Urusan Penanaman Modal					3.219.000.667		4.684.908.879		4.689.029.238		4.693.149.598		4.696.520.801	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	0	100	130.665.000	100	554.521.782	100	555.009.482	100	555.497.182	100	555.896.209	PD yang menangani urusan Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	8	100	60.440.000	100	256.497.888	100	256.723.477	100	256.949.066	100	257.133.638	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	87	100	197.105.000	100	836.482.729	100	837.218.413	100	837.954.096	100	838.556.019	
	Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase badan usaha yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal (penyampaian LKPM)	60	0	-	100	50.000.000	100	50.043.975	100	50.087.950	100	50.123.929	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase sistem informasi yang menginformasikan data penanaman modal kepada publik	33	0	-	66	100.000.000	66	100.087.950	83	100.175.899	100	100.247.858	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	2.830.790.667	100	2.887.406.480	100	2.889.945.943	100	2.892.485.406	100	2.894.563.149	
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga					15.279.332.583		17.710.066.710		17.725.642.647		17.741.218.584		17.753.962.532	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan wirausaha muda	20	25	1.909.191.182	28	2.282.340.328	32	2.284.347.637	35	2.286.354.947	40	2.287.997.291	PD yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan	30	47	7.461.453.349	15	9.365.774.808	47	9.374.011.971	20	9.382.249.135	20	9.388.988.632	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	50	55	200.000.000	65	239.089.762	75	239.300.041	85	239.510.319	95	239.682.365	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	90	90	5.708.688.052	90	5.822.861.813	90	5.827.982.998	90	5.833.104.183	90	5.837.294.243	
20	Urusan Statistik					123.463.000		450.000.000		450.395.773		450.791.547		451.115.361	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya data statistik yang berkualitas dan bermanfaat untuk perencanaan pembangunan , pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik	80	82	123.463.000	84	450.000.000	86	450.395.773	88	450.791.547	90	451.115.361	PD yang menangani Urusan Statistik
21	Urusan Persandian					6.931.000		220.000.000		220.193.489		220.386.978		220.545.288	
	Program Penyelenggaraan untuk Keamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Indeks KAMI	125	340	6.931.000	341	220.000.000	342	220.193.489	343	220.386.978	344	220.545.288	PD yang menangani Urusan Persandian
22	Unsur Kebudayaan					3.565.927.870		4.476.028.443		4.479.965.093		4.483.901.743		4.487.122.638	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya kapasitas lembaga adat dalam menjaga identitas dan kearifan lokal melalui pelaksanaan tradisi adat	Persentase Lembaga Adat Yang menerapkan Tradisi Adat	100	100	1.235.700.700	100	1.515.077.779	100	1.516.410.284	100	1.517.742.789	100	1.518.833.021	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengembangan	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	100	100	1.100.000.000	100	1.380.743.376	100	1.381.957.735	100	1.383.172.093	100	1.384.165.660	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		n kesenian tradisonal													
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	215.454.930	100	270.443.607	100	270.681.461	100	270.919.315	100	271.113.923	
	Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya tata Kelola museum	Persentase Kunjungan Museum	100	100	1.014.772.240	100	1.273.763.681	100	1.274.883.951	100	1.276.004.221	100	1.276.920.806	
	Program Pembinaan Sejarah	Meniingkatkan a partisipasi penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah	N/A	100	-	100	36.000.000	100	36.031.662	100	36.063.324	100	36.089.229	
23	Urusan Perpustakaan					3.803.000.523		4.287.844.283		4.291.619.823		4.295.395.363		4.298.484.441	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat	Persentase Kegiatan Gemar Membaca Masyarakat	100	100	99.920.990	100	320.422.950	100	320.709.158	100	320.995.367	100	321.229.537	PD yang menangani Urusan Perpustakaan
			Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai standar nasional perpustakaan	N/A	10,5		11,4				80		85		
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	meningkatkan koleksi naskah kuno dan budaya etnis nusantara	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	N/A	1	10.660.800	1	90.381.663	1	90.461.153	1	90.540.643	1	90.605.680	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	100	100	3.692.418.733	100	3.877.039.670	100	3.880.449.512	100	3.883.859.353	100	3.886.649.224	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Daerah Kabupaten/Kota		kantor dan ASN.												
24	Urusan Kearsipan					178.886.729		539.542.424		540.016.949		540.491.475		540.879.723	
	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis	Persentase arsip dinamis yang dikelola	50	100	178.886.729	100	524.542.424	100	525.003.757	100	525.465.090	100	525.842.544	PD yang menangani Urusan Kearsipan
			Persentase arsip statis yang dikelola sesuai NSPK	N/A	100	-	100	10.000.000	100		100		100		
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya penyelamatan dan perlindungan arsip sesuai NSPK	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	N/A	-	-	15	5.000.000	20	10.008.795	25	10.017.590	30	10.024.786	
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Terkelolanya perizinan penggunaan arsip sesuai NSPK	Persentase Tingkat Kesesuaian penerbitan izin pengguna arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	N/A	-	-	100	5.000.000	100	5.004.397	100	5.008.795	100	5.012.393	
25	Urusan Kelautan dan Perikanan					3.126.715.010		4.403.983.028		4.407.856.314		4.411.729.601		4.414.898.653	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	8139,98	8180	1.691.968.139	8190	2.550.920.173	8200	2.553.691.396	8210	2.556.462.618	8220	2.558.729.982	PD yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	33.409,39	33.775	758.720.214	33.900	1.043.062.854	34.025	1.043.980.224	34.150	1.044.897.594	34.280	1.045.648.169	
	Program Pengolahan	Meningkatnya Angka	Angka Konsumsi Ikan			603.316.341		720.000.000		720.105.540		720.211.079		720.297.430	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan		30,42	31,62		32,19		32,74		33,26		33,50		
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah memiliki izin usaha terhadap peraturan	N/A	30	72.710.316	45	90.000.000	60	90.079.155	75	90.158.309	85	90.223.072	
26	Urusan Pariwisata					4.509.396.800		11.620.252.557		11.630.472.525		11.640.692.493		11.649.054.285	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	25	28	3.789.894.100	31	8.155.123.910	36	8.162.296.310	42	8.169.468.711	47	8.175.337.039	PD yang menangani Urusan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase wisatawan yang mendapatkan informasi dari media pemasaran wisata	63,98	70,35	517.857.400	74,14	1.619.072.013	77,94	1.620.495.981	81,92	1.621.919.948	85,96	1.623.085.013	
	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase peningkatan jumlah produk ekonomi kreatif	N/A	5	-	5	100.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	50	4	201.645.300	5	1.746.056.634	5	1.797.680.233	5	1.799.393.834	5	1.800.632.234	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
27	Urusan Pertanian					36.755.817.524		54.998.869.207		55.047.240.505		55.095.611.802		55.135.188.319	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah capaian produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (ton)	482.560	485.961	2.762.777.595	489.440	8.256.897.975	493.006	8.264.159.885	496.648	8.271.421.795	500.392	8.277.363.359	PD yang menangani urusan Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (ha)	1200	1400	16.208.391.865	1600	25.189.193.610	1900	25.211.347.411	2500	25.233.501.211	2900	25.251.627.048	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pelayanan penyakit hewan menular strategis	Persentase peningkatan pelayanan penyakit hewan menular strategis (PHMS) tahun n (%)	4,53	5,48	650.020.296	6,03	3.010.185.787	6,63	3.012.833.234	8,03	3.015.480.681	15,5	3.017.646.774	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase peningkatan luas areal yang difasilitasi pengendalian dan penanggulanga n bencana OPT	0,40	0,60	100.552.300	0,70	656.266.666	0,80	656.843.850	0,90	657.421.034	1,00	657.893.275	
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang dibina	Persentase peningkatan Jumlah Kelompok tani yang aktif	10	10,02	1.068.058.291	10,03	1.659.851.718	10,04	1.661.311.551	10,05	1.662.771.384	10,06	1.663.965.793	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	15.966.017.177	100	16.221.473.452	100	16.235.740.177	100	16.250.006.901	100	16.261.679.676	
28	Urusan Perdagangan					2.258.270.699		5.395.657.464		5.400.402.924		5.405.148.384		5.409.031.034	
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya Kemudahan Proses perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha perdagangan yang difasilitasi	N/A	100	13.881.600	100	150.000.000	100	150.131.924	100	150.263.849	100	150.371.787	PD yang menangani urusan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Perdagangan Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya	2,63	5,26	2.002.606.000	5,26	4.356.618.145	5,26	4.360.449.774	5,26	4.364.281.404	5,26	4.367.416.373	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Mendekati Harga Acuan Pemerintah	100	100	186.717.499	100	823.211.212	100	823.935.224	100	824.659.235	100	825.251.608	
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Standardisasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan	Persentase Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)	20	22,11	55.065.600	23,98	65.828.106	25,85	65.886.002	27,73	65.943.897	31,47	65.991.266	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		Perlengkapannya yang digunakan untuk Perdagangan dalam upaya Perlindungan Konsumen	Bertanda terasah yang berlaku												
29	Urusan Perindustrian					4.815.283.218		5.990.356.378		5.995.624.873		6.000.893.369		6.005.203.957	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Kebijakan Daerah dalam Mendukung Pengembangan Industri	Persentase Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang Disusun	N/A	100	4.787.569.736	100	5.952.226.329	100	5.957.461.289	100	5.962.696.250	100	5.966.979.399	PD yang menangani urusan Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Persentase Pelaku IKM yang Terdaftar di SIIN/AS	50	100	27.713.482	100	38.130.049	100	38.163.584	100	38.197.120	100	38.224.558	
30	Unsur Sekretariat Daerah					61.291.449.468		65.418.427.669		65.475.962.929		65.533.498.189		65.580.572.493	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Optimalisasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dibidang Administrasi pemerintahan, Administrasi kewilayahan dan Otonomi, serta kerjasama daerah yang terlaksana (Bagian Tapem)	100	100	26.423.811.728	100	28.078.314.302	100	28.103.009.073	100	28.127.703.845	100	28.147.908.658	
			Persentase Kebijakan dibidang bina	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
			mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana (Bagian Kesra)												
			Persentase Kebijakan dibidang Perundang undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana (Bagian Hukum)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Optimalisasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan SDA yang terlaksana (Perekonomian dan SDA)	100	100	450.361.362	100	538.383.955	100	538.857.461	100	539.330.967	100	539.718.382	
			Persentase Kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, Pengelolaan layanan secara elektronik,	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
			pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana (PBJ)												
			Persentase Kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan yang terlaksana (AP)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi kebijakan di bidang pemerintahan umum	Persentase Kebijakan di bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana (Bagian Organisasi)	100	100	34.417.276.379	100	36.801.729.413	100	36.834.096.395	100	36.866.463.377	100	36.892.945.453	
			Persentase Kebijakan di bidang Protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana (Bagian Prokopim)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
			Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga yang terlaksana (Bagian Umum)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah (Bagian Perenkeu)	74	74	-	74	-	75	-	75	-	76	-	
			Nilai IKM Perangkat Daerah (Bagian Perenkeu)	83	84	-	85	-	86	-	87	-	88	-	
			Persentase realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum yang terlaksana (semua bagian)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
31	Urusan Sekretariat DPRD					44.441.223.972		48.493.853.854		48.536.504.016		48.579.154.177		48.614.049.763	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya fasilitasi layanan fungsi Anggaran dan pengawasan	Persentase Fungsi Anggaran dan Pengawasan yang difasilitasi	100	100	18.621.300.900	100	22.260.812.013	100	22.280.390.313	100	22.299.968.613	100	22.315.987.222	Sekretari at DPRD
		Terlaksananya fasilitasi penjangkaran aspirasi	Persentase penjangkaran aspirasi yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
			sesuai ketentuan												
		Terlaksananya fasilitas fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase layanan pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100		
		Terpenuhinya Fasilitas Peningkatan Kapasitas dan Protoler DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD dan protokoler yang difasilitasi sesuai renja DPRD	100	100		100		100		100		100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai NSPK	100	100	25.819.923.072	100	26.233.041.841	100	26.256.113.702	100	26.279.185.564	100	26.298.062.541	
		Terlaksananya koordinasi layanan administrasi keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan sesuai dengan NSPK	100	100		100		100		100		100		
		Terlaksananya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun sesuai NSPK	100	100		100		100		100		100		
32	Unsur Perencanaan					5.295.614.840		7.433.557.061		7.440.094.847		7.446.632.632		7.451.981.729	
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD	100	100	570.870.000	100	1.985.088.921	100	1.986.834.800	100	1.988.580.678	100	1.990.009.124	PD yang menangani Unsur Perencanaan

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan dan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Ketercapaian Program Bidang Sosial SDM Pemerintahan	100	100	263.098.000	100	897.588.363	100	898.377.789	100	899.167.214	100	899.813.108	
			Peraentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	4.461.646.840	100	4.550.879.777	100	4.554.882.258	100	4.558.884.740	100	4.562.159.498	
33	Unsur Keuangan					224.935.007.547		232.903.618.545		233.108.456.397		233.313.294.249		233.480.888.855	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah tepat waktu	Persentase Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	N/A	40,96	208.752.363.481	30	214.806.182.022	30	214.995.103.247	30	215.184.024.472	30	215.338.596.383	PD yang menangani Unsur Keuangan

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai aset Tetap	N/A	0,04	556.691.200	0,05	771.309.670	0,06	771.988.034	0,07	772.666.398	0,08	773.221.423	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	97	100	4.792.514.947	100	4.888.365.246	100	4.892.664.545	100	4.896.963.844	100	4.900.481.452	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Bid. Pengendalian Evaluasi)	N/A	100	4.161.398.025	100	5.765.721.712	100	5.770.792.643	100	5.775.863.573	100	5.780.012.516	
			Tingkat kepatuhan WP (Bid. Pendataan)	N/A	46,97		50,76		52,08		52,81		53,58		
			Persentase Potensi Objek Pajak yang dioptimalkan (Bid. Perencanaan Pengembangan)	N/A	15		20,00		25,00		30,00		35,00		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	6.672.039.894	100	6.672.039.894	100	6.677.907.928	100	6.683.775.962	100	6.688.577.080	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		perangkat daerah													
34	Urusan Kepegawaian					7.377.912.806		8.019.207.336		8.026.260.198		8.033.313.061		8.039.083.585	
	Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	67	67,5	2.814.132.920	68	3.364.151.852	68,5	3.367.110.611	69	3.370.069.370	70	3.372.490.173	PD yang menangani Unsur Kepegawaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	99	99	4.563.779.886	100	4.655.055.484	100	4.659.149.587	100	4.663.243.691	100	4.666.593.412	
35	Urusan Penelitian dan Pengembangan					352.553.700		2.162.439.145		2.164.341.002		2.166.242.859		2.167.798.924	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kualitas Penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	91,67	100	352.553.700	100	2.062.439.145	100	2.064.253.052	100	2.066.066.960	100	2.067.551.006	PD yang menangani Unsur Penelitian dan Pengembangan
	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya produk inovasi yang dimanfaatkan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	-	N/A	-	100	100.000.000	100	100.087.950	100	100.175.899	100	100.247.858	
36	Urusan Pengawasan					10.742.693.869		12.494.818.118		12.505.807.264		12.516.796.409		12.525.787.528	
	Program Penyelenggara	Menurunnya penyelewengan	Presentase Penyelesaian	18	25	871.764.900	30	1.917.882.780	35	1.919.569.551	40	1.921.256.321	50	1.922.636.406	PD yang menang

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan an
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	an Pengawasan	n atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses kewenangan	Penyimpangan dalam penyelenggaraa n pemerintahan daerah												ani Unsur Pengawa san
	Program Perumusan Kebijakan. Pendampinga n dan Asistensi	Meningkatnya Implementasi Manajemen Resiko	Persentase OPD yang telah menerapkan manajemen risiko	N/A	34	179.713.000	45	691.895.050	50	692.503.569	57	693.112.088	68	693.609.967	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	9.691.215.969	100	9.885.040.288	100	9.893.734.144	100	9.902.428.000	100	9.909.541.154	
37	Urusan Pemerintah Umum					6.267.862.667		7.815.487.179		7.822.360.871		7.829.234.562		7.834.858.491	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	100	1.312.193.534	100	2.070.631.463	100	2.072.452.576	100	2.074.273.688	100	2.075.763.690	PD yang menang ani Unsur Pemerint ahan Umum
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat	100	100	949.975.512	100	1.271.924.747	100	1.273.043.400	100	1.274.162.053	100	1.275.077.315	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik														
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat	Persentase organisasi masyarakat yang aktif	14	14	14.999.900	25	20.083.406	34	20.101.069	40	20.118.733	44	20.133.184	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan. Ekonomi. Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial budaya masyarakat	Persentase pembinaan dan pengembangan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	100	77.222.200	100	103.393.010	100	103.483.943	100	103.574.877	100	103.649.277	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang difasilitasi	Persentase fasilitasi penanganan konflik sosial	100	100	1.121.701.500	100	1.501.849.131	100	1.503.170.002	100	1.504.490.872	100	1.505.571.585	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	97	100	2.791.770.021	100	2.847.605.422	100	2.850.109.880	100	2.852.614.338	100	2.854.663.440	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
38	Unsur Kecamatan							-		-		-		-	
	Kecamatan Baso					1.823.821.239		2.180.284.931		2.182.202.483		2.184.120.035		2.185.688.942	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	94	100	1.743.659.596	100	2.084.455.791	100	2.086.289.062	100	2.088.122.333	100	2.089.622.282	PD yang menangani urusan Kewilayahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	5.150.000	100	6.156.561	100	6.161.976	100	6.167.391	100	6.171.821	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	10.435.000	100	12.474.508	100	12.485.480	100	12.496.451	100	12.505.427	
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	89,61	100	58.479.000	100	69.908.651	100	69.970.135	100	70.031.620	100	70.081.925	
	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	2.450.000	100	2.928.850	100	2.931.425	100	2.934.001	100	2.936.109	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	3.647.642	100	4.360.570	100	4.364.405	100	4.368.240	100	4.371.378	PD yang menangani urusan Kewilayahan
	Kecamatan Ampek Angkek					2.408.838.873		2.879.643.566		2.882.176.201		2.884.708.837		2.886.780.993	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	97	100	2.327.696.695	100	2.782.642.246	100	2.785.089.569	100	2.787.536.893	100	2.789.539.248	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggara n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	9.699.500	100	11.595.256	100	11.605.454	100	11.615.652	100	11.623.996	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	12.545.000	100	14.996.905	100	15.010.095	100	15.023.285	100	15.034.076	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	87	100	53.180.000	100	63.573.968	100	63.629.881	100	63.685.794	100	63.731.541	
	Program Penyelenggaraan Urusan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	Persentase penyelenggara n urusan pemerintahan	100	100	900.000	100	1.075.904	100	1.076.850	100	1.077.796	100	1.078.571	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Pemerintahan Umum	pemerintahan umum	umum yang difasilitasi.												
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	4.817.678	100	5.759.287	100	5.764.352	100	5.769.418	100	5.773.562	
	Kecamatan Ampek Nagari					2.124.073.039		2.539.220.588		2.541.453.823		2.543.687.058		2.545.514.250	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	87,5	100	1.944.274.893	100	2.324.281.108	101	2.326.325.305	102	2.328.369.501	103	2.330.042.026	PD yang menangani urusan Kewilayahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggara n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	45.200.000	100	54.034.286	100	54.081.809	100	54.129.332	100	54.168.215	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	36.100.000	100	43.155.702	100	43.193.657	100	43.231.613	100	43.262.667	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	100	100	87.250.000	100	104.302.909	100	104.394.643	100	104.486.377	100	104.561.432	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	7.000.000	100	8.368.142	100	8.375.501	100	8.382.861	100	8.388.883	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	4.248.146	100	5.078.441	100	5.082.908	100	5.087.374	100	5.091.029	
	Kecamatan Banuhampu					2.470.445.031		2.953.290.574		2.955.887.982		2.958.485.390		2.960.610.542	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	2.150.208.641	100	2.570.464.362	100	2.572.725.076	100	2.574.985.790	100	2.576.835.465	PD yang menangani urusan Kewilayahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	18.470.000	100	22.079.940	100	22.099.359	100	22.118.778	100	22.134.666	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	37.492.000	100	44.819.767	100	44.859.186	100	44.898.604	100	44.930.856	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	88,56	100	246.083.500	100	294.180.227	100	294.438.958	100	294.697.688	100	294.909.377	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		dan pelayanan publik	dilaksanakan (Aktivitas)												
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	13.250.000	100	15.839.697	100	15.853.628	100	15.867.559	100	15.878.957	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	4.940.890	100	5.906.581	100	5.911.776	100	5.916.971	100	5.921.221	
	Kecamatan Candung					1.922.004.208		2.297.657.644		2.299.678.426		2.301.699.207		2.303.352.573	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	80	99	1.802.440.950	100	2.154.725.889	100	2.156.620.963	100	2.158.516.036	100	2.160.066.550	PD yang menangan i urusan Kewilaya han
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	2.750.000	100	3.287.484	100	3.290.376	100	3.293.267	100	3.295.633	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	5.950.000	100	7.112.920	100	7.119.176	100	7.125.432	100	7.130.550	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	88,03	100	103.229.250	100	123.405.284	100	123.513.819	100	123.622.353	100	123.711.154	PD yang menangani urusan Kewilayahan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	3.790.000	100	4.530.751	100	4.534.736	100	4.538.721	100	4.541.981	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	3.844.008	100	4.595.315	100	4.599.357	100	4.603.398	100	4.606.705	
	Kecamatan IV Koto					1.979.048.718		2.365.773.201		2.367.853.889		2.369.934.578		2.371.636.960	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	1.815.546.621	100	2.170.393.205	100	2.172.302.057	100	2.174.210.910	100	2.175.772.698	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	2.750.000	100	3.340.000	100	3.342.938	100	3.345.875	100	3.348.278	
	Program Pembinaan dan Pengawasan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	25.890.000	100	30.950.170	100	30.977.390	100	31.004.611	100	31.026.882	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Pemerintahan Desa	pemerintahan nagari													
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	80,33	100	127.114.000	100	151.958.280	100	152.091.927	100	152.225.574	100	152.334.921	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggara n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	3.790.000	100	4.400.000	100	4.403.870	100	4.407.740	100	4.410.906	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	3.958.097	100	4.731.546	100	4.735.708	100	4.739.869	100	4.743.274	
	Kecamatan Kamang Magek					1.987.756.659		2.376.261.334		2.378.351.247		2.380.441.160		2.382.151.088	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	95	100	1.802.118.501	100	2.154.340.418	100	2.156.235.153	100	2.158.129.887	100	2.159.680.124	PD yang menang ani urusan Kewilayahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggara n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	7.750.000	100	9.264.728	100	9.272.877	100	9.281.025	100	9.287.692	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	11.500.000	100	13.747.661	100	13.759.752	100	13.771.843	100	13.781.736	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	86	100	157.312.645	100	188.059.214	100	188.224.612	100	188.390.009	100	188.525.334	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	5.100.000	100	6.096.789	100	6.102.151	100	6.107.513	100	6.111.900	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	3.975.513	100	4.752.523	100	4.756.702	100	4.760.882	100	4.764.302	
	Kecamatan Lubuk Basung					2.085.792.636		2.493.458.326		2.495.651.313		2.497.844.300		2.499.638.562	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	1.997.261.050	100	2.387.623.347	100	2.389.723.253	100	2.391.823.159	100	2.393.541.263	PD yang menang ani urusan Kewilaya han
	Program Koordinasi Ketentraman dan	Meningkatnya koordinasi ketentraman	Persentase penyelenggaraa n ketenteraman	100	100	1.750.000	100	2.092.035	100	2.093.875	100	2.095.715	100	2.097.221	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Ketertiban Umum	dan ketertiban umum	dan ketertiban umum												
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	4.770.000	100	5.702.291	100	5.707.306	100	5.712.321	100	5.716.424	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	100	100	73.940.000	100	88.391.485	100	88.469.225	100	88.546.965	100	88.610.570	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggara n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	3.900.000	100	4.662.250	100	4.666.351	100	4.670.451	100	4.673.806	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	4.171.585	100	4.986.917	100	4.991.303	100	4.995.689	100	4.999.277	
	Kecamatan Malalak					1.996.049.912		2.386.175.493		2.388.274.126		2.390.372.758		2.392.089.821	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	85	100	1.729.237.312	100	2.067.214.688	100	2.069.032.796	100	2.070.850.903	100	2.072.338.446	PD yang menang ani urusan Kewilayahan

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	6.750.000	100	8.069.279	100	8.076.376	100	8.083.473	100	8.089.280	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	28.500.000	100	34.070.291	100	34.100.256	100	34.130.220	100	34.154.737	
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	100	100	215.845.500	100	258.032.246	100	258.259.185	100	258.486.123	100	258.671.800	
	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	11.725.000	100	14.016.637	100	14.028.965	100	14.041.292	100	14.051.379	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	3.992.100	100	4.772.351	100	4.776.548	100	4.780.746	100	4.784.180	
	Kecamatan Matur					2.045.465.908		2.445.249.787		2.447.400.375		2.449.550.963		2.451.310.535	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	85	100	1.982.392.472	100	2.369.848.722	100	2.371.932.995	100	2.374.017.268	100	2.375.722.583	PD yang menang ani urusan Kecamatan

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan an
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
		perangkat daerah													
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggara n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	2.550.000	100	3.048.394	100	3.051.076	100	3.053.757	100	3.055.950	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	12.400.000	100	14.823.565	100	14.836.603	100	14.849.640	100	14.860.307	
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	100	100	41.532.505	100	49.649.983	100	49.693.650	100	49.737.317	100	49.773.045	
	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	2.500.000	100	2.988.622	100	2.991.251	100	2.993.879	100	2.996.030	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	4.090.932	100	4.890.500	100	4.894.801	100	4.899.102	100	4.902.621	
	Kecamatan Palembang					1.909.315.817		2.282.489.323		2.284.496.763		2.286.504.204		2.288.146.656	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	1.839.584.985	100	2.199.129.683	100	2.201.063.809	100	2.202.997.935	100	2.204.580.402	PD yang menang ani urusan Kewilaya han

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Kabupaten/Kota	efektivitas kinerja perangkat daerah													
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	16.277.200	100	19.458.559	100	19.475.673	100	19.492.787	100	19.506.789	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	13.630.000	100	16.293.967	100	16.308.298	100	16.322.628	100	16.334.353	
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	88,56	100	33.780.000	100	40.382.261	100	40.417.777	100	40.453.293	100	40.482.351	
	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	2.225.000	100	2.659.874	100	2.662.213	100	2.664.552	100	2.666.466	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	3.818.632	100	4.564.979	100	4.568.994	100	4.573.008	100	4.576.293	
	Kecamatan Palupuh					1.810.118.356		2.163.903.836		2.165.806.981		2.167.710.126		2.169.267.245	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	97	100	1.668.183.399	100	1.994.227.860	100	1.995.981.776	100	1.997.735.692	100	1.999.170.714	PD yang menang ani urusan

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Kabupaten/Kota	untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	kantor dan ASN.												Kewilayahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggara n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	5.725.000	100	6.843.944	100	6.849.964	100	6.855.983	100	6.860.908	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	23.680.000	100	28.308.228	100	28.333.125	100	28.358.022	100	28.378.392	
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	88,56	100	102.984.720	100	123.112.961	100	123.221.238	100	123.329.516	100	123.418.106	
	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	5.925.000	100	7.083.034	100	7.089.264	100	7.095.493	100	7.100.590	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	3.620.237	100	4.327.808	100	4.331.614	100	4.335.420	100	4.338.534	
	Kecamatan Sungai Pua					1.826.127.841		2.183.042.355		2.184.962.333		2.186.882.310		2.188.453.201	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Meningkatnya tatakelola administrasi dan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	94	100	1.727.758.835	100	2.065.447.244	100	2.067.263.797	100	2.069.080.350	100	2.070.566.621	PD yang menangani urusan

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Daerah Kabupaten/Kota	operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	kantor dan ASN.												Kewilayahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggara n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	5.270.000	100	6.300.015	100	6.305.556	100	6.311.097	100	6.315.630	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	19.964.500	100	23.866.538	100	23.887.528	100	23.908.519	100	23.925.693	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	89	93	67.732.250	94	80.970.438	95	81.041.651	96	81.112.864	97	81.171.129	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggara n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	1.750.000	100	2.092.035	100	2.093.875	100	2.095.715	100	2.097.221	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	3.652.256	100	4.366.085	100	4.369.925	100	4.373.765	100	4.376.906	
	Kecamatan Tanjung Mutiara					2.077.980.093		2.484.118.830		2.486.303.603		2.488.488.376		2.490.275.918	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	100	2.023.974.133	100	2.419.557.469	100	2.421.685.461	100	2.423.813.452	100	2.425.554.537	PD yang menangani urusan Kewilayahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggara n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	6.625.000	100	7.919.848	100	7.926.814	100	7.933.779	100	7.939.478	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	5.250.000	100	6.276.106	100	6.281.626	100	6.287.146	100	6.291.662	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	89,6	100	33.225.000	100	39.718.787	100	39.753.719	100	39.788.652	100	39.817.233	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggara n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	4.750.000	100	5.678.382	100	5.683.376	100	5.688.370	100	5.692.456	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	4.155.960	100	4.968.238	100	4.972.607	100	4.976.977	100	4.980.552	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Kecamatan Tanjung Raya					2.278.900.721		2.724.309.157		2.726.705.177		2.729.101.196		2.731.061.576	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan - Opkebutuhan operasional kantor dan ASN.	96,1	100	2.059.592.920	100	2.462.137.907	100	2.464.303.348	100	2.466.468.788	100	2.468.240.513	PD yang menangani urusan Kewilayahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	5.250.000	100	6.276.106	100	6.281.626	100	6.287.146	100	6.291.662	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	11.550.000	100	13.807.434	100	13.819.577	100	13.831.721	100	13.841.657	
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	86,91	90	192.700.000	100	230.362.986	100	230.565.589	100	230.768.193	100	230.933.959	
	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	5.250.000	100	6.276.106	100	6.281.626	100	6.287.146	100	6.291.662	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi	N/A	100	4.557.801	100	5.448.618	100	5.453.410	100	5.458.202	100	5.462.123	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Desa dan Kelurahan		pemberdayaan masyarakat												
	Kecamatan Tilatang Kamang					2.144.360.154		2.563.472.795		2.565.727.360		2.567.981.925		2.569.826.568	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	97	100	1.974.301.433	100	2.360.176.300	100	2.362.252.067	100	2.364.327.833	100	2.366.026.187	PD yang menangani urusan Kewilayahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggara n ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	15.300.000	100	18.290.367	100	18.306.453	100	18.322.539	100	18.335.701	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	100	27.310.000	100	32.647.707	100	32.676.421	100	32.705.134	100	32.728.627	
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	88,56	100	112.690.000	100	134.715.126	100	134.833.608	100	134.952.089	100	135.049.029	
	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	10.470.000	100	12.516.349	100	12.527.357	100	12.538.365	100	12.547.372	

Bidang Urusan / Program		Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target Kinerja (K) dan Pagu Anggaran (Rp.)										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	100	4.288.720	100	5.126.946	100	5.131.455	100	5.135.964	100	5.139.653	
		TOTAL BELANJA			1.743.725.432.970		2.084.526.676.665		2.086.360.009.999		2.088.193.343.332		2.089.693.343.332		



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. menyatakan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dan diukur dari laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Kementrian Dalam Negeri yang disebut dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Repunlik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

4.2.1 Indikator Makro Pembangunan

Tabel 4.2 : Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Agam tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.41	4.70	5.00	5.29	5.58	5.87	
2	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta	57.85	66.91	77.38	89.49	103.51	119.71	
3	Indeks Gini (Gini Rasio)	Angka	0.248	0.246	0.245	0.243	0.242	0.240	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6.50	6.19	5.90	5.61	5.35	5.09	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.71	4.69	4.67	4.64	4.62	4.60	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75.75	76.01	76.27	76.54	76.80	77.06	
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.40	14.48	14.56	14.64	14.72	14.80	
8	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9.75	9.88	10.01	10.14	10.27	10.40	
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.51	74.65	74.79	74.94	75.08	75.22	

4.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Visi

Tabel 4.2 : Indikator Sasaran Visi Kabupaten Agam tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp. Juta	55.78	63.35	71.95	8..71	92.8	119.71	
2	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	4.79	4.81	4.84	4.86	4.89	4.91	

3	Kontribusi PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan	Persen	10.44	10.56	10.67	10.78	10.89	11.00	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6.50	6.19	5.90	5.61	5.35	5.09	
5	Rasio Gini (Indek)	Angka	0.248	0.246	0.245	0.243	0.242	0.240	
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.41	4.70	5.00	5.29	5.58	5.87	
7	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3.581	3.585	3.589	3.592	3.596	3.600	
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75.75	76.01	76.27	76.54	76.80	77.06	
9	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta	98.35	104.01	110.00	116.33	123.03	130.00	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71.93	77.10	77.30	77.50	77.70	77.90	

4.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dibuat secara terukur untuk menunjukkan seberapa berhasil kepala daerah dan wakilnya mencapai visi dan misi mereka pada akhir periode masa jabatan. untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan setiap tahun.

Penetapan IKU bertujuan (i) mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. dimana Instansi pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai dengan mengukur pencapaian IKU.(ii) Meningkatkan akuntabilitas kinerja. dimana IKU meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana lembaga pemerintah bekerja. Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Agam Tahun 2025-2030 sebagaimana disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 : Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Baseline 2024	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi I : Tata Kehidupan Yang Harmonis. Agamais. Beradat Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah. Syarak Mangato Adat Mamakai”									
Tujuan I : Terciptanya Masyarakat Yang Beradab Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama Dan Adat									
I	Persentase Nagari Dengan Level Madani V	14.13	21.00	24.00	27.00	29.00	32.00	34.78	
1	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	68.64	69.61	70.59	71.56	72.53	73.50	74.48	
2	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat. Budaya. dan Kearifan Lokal	62.55	63.70	64.86	66.01	67.16	68.32	69.47	
3	Indeks Keamanan	N/A	91.50	91.62	91.74	91.86	91.99	92.10	
Misi II : Tata Pemerintahan Yang Baik. Bersih Dan Profesional									
Tujuan I : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel									
II	Indeks Reformasi Birokrasi	75.84	79 (BB)	81 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)	86 (A)	
1	Maturitas SPIP	Level 3 (3.152)	3.16	3.17	3.18	3.18	3.19	3.20	
2	Nilai SAKIP	B (67.11)	B (68.61)	B (70.11)	B (71.61)	B (73.11)	B (74.61)	B (76.11)	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan (74.03)	77.50	79.00	80.00	81.50	81.60	81.70	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.56	2.66	2.76	2.86	2.96	3.06	3.16	
5	Indeks Sistem Merit	278.00	270	275	280	285	290	295	
6	EPPD	3.577	3.581	3.585	3.589	3.592	3.596	3.600	
7	Indeks Pelayanan Publik	3.25	3.50	3.70	3.90	4.15	4.35	4.55	
Misi III : Sumber Daya Manusia Yang Cerdas. Sehat. Beriman. Berkarakter. Berkualitas. Inovatif Dan Berdaya Saing									
Tujuan I : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berkarakter.									
III	IPM	75.08	75.75	76.01	76.27	76.54	76.80	77.06	
1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9.23	9.75	9.88	10.01	10.14	10.27	10.40	

2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.16	14.40	14.48	14.56	14.64	14.72	14.80	
3	Usia Harapan Hidup (tahun)	74.39	74.51	74.65	74.79	74.94	75.08	75.22	
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.35	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	
5	Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	N/A	61.62	62.03	62.4	61.34	61.73	62.13	
Misi IV Ekonomi Yang Tangguh Dan Berkeadilan									
Tujuan I : Terwujudnya Ekonomi Daerah Yang Kuat. Inklusif. Berdaya Saing Dan Berkelanjutan									
IV.a	Laju pertumbuhan ekonomi	4.12	4.41	4.70	5.00	5.29	5.58	5.87	
IV.b	IDSD	3.62	3.64	3.65	3.67	3.68	3.70	3.71	
1	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	82.54	82.61	82.83	83.32	83.78	84.21	84.62	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10.33	10.44	10.56	10.67	10.78	10.89	11.00	
3	Rasio Kewirausahaan		3.89	4.09	4.29	4.49	4.69	4.89	
4	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0.89	0.96	1.00	1.05	1.09	1.14	1.18	
5	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)	0.91	0.93	0.95	0.97	0.99	1.01	1.03	
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		30.02	30.34	30.65	30.97	31.28	31.60	
Tujuan II : Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah									
IV.c	Gini Rasio	0.249	0.248	0.246	0.245	0.243	0.242	0.240	
IV.d	Pendapatan per kapita (ribu)		57.850	66.906	77.381	89.495	103.506	119.710	
IV.e	Tingkat Kemiskinan	6.83	6.50	6.19	5.90	5.61	5.35	5.09	
1	Indeks Ketahanan Pangan	86.92	86.93	86.94	86.95	86.96	86.97	86.98	
2	Tingkat Pengangguran terbuka	4.73	4.71	4.69	4.67	4.64	4.62	4.60	
3	Produktivitas tenaga kerja	92.97	98.35	104.01	110.00	116.33	123.03	130.00	
4	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	90.89	90.91	90.94	90.97	91.08	91.13	91.18	

Misi 5 : Infrastruktur Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan. Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan. Dan Meningkatkan Ketangguhan Mitigasi Bencana									
Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Yang Inklusif Dan Ramah Lingkungan Serta Adaptif Terhadap Risiko Bencana.									
V.a	Indeks Risiko Bencana (IRB)	204.61	200.28	195.95	191.63	187.30	182.97	188.64-178.64	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.74	71.93	77.10	77.30	77.50	77.70	77.90	
2	Indeks Ketahanan Daerah	0.33	0.55	0.60	0.66	0.71	0.77	0.82	
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata								
V.b	Indeks Pembangunan Infrastruktur		41.52	42.88	44.24	45.63	46.78	48.26	
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	15.23	15.40	16.37	17.41	18.52	19.69	20.94	
2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	18.00	19.25	20.50	21.75	23.00	24.25	25.50	
3	Jalan dalam kondisi mantap	58.91	60	62	64	66	68	70	
4	Rasio Konvektivitas	65.88	69.00	69.25	69.50	70.00	70.50	71.00	
5	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	70.75	73.75	75.06	76.37	77.69	79.00	80.31	
Misi VI. Pengembangan Wilayah Berbasis Nagari Untuk Membangun Kemandirian. Mengurangi Kesenjangan Dan Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat									
Tujuan I : Terselenggaranya Pengembangan Wilayah Berbasis Nagari									
VI	Persentase Nagari Mandiri	45.65	46.37	47.82	48.91	50.00	51.08	52.27	
1	Jumlah Nagari Mandiri	42	43	44	45	46	47	48	

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian target atau tujuan pembangunan daerah dalam bentuk keluaran (output) kegiatan, hasil (outcome) program, dan dampak (impact) terhadap sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah (IKD) terdiri dari beberapa aspek yaitu (i) aspek kesejahteraan masyarakat mencakup indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya dan olahraga; (ii) Aspek pelayanan umum mengukur seberapa baik pemerintah memberikan pelayanan publik; (iii) Aspek daya saing daerah mencakup indikator yang terkait dengan daya saing ekonomi dan investasi; dan (iv) Aspek geografis dan demografis memberikan gambaran tentang kondisi geografis dan kependudukan suatu wilayah, yang sangat relevan untuk perencanaan pembangunan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Agam secara rinci disajikan pada tabel 4.3.

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator keberhasilan kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan. Indikator Kinerja kunci disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

No.	INDIKATOR	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	Aspek Geografi Dan Demografi								
1	Konsumsi listrik per kapita	kWh/kapita	452	494.4	536.8	579.2	621.6	664	
2	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	86.93	86.94	86.95	86.96	86.97	86.98	
3	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	9.40	9.03	8.66	8.28	7.91	7.54	
4	Kapasitas Air Baku	M ³ /detik	0.114	0.118	0.122	0.126	0.130	0.135	
5	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum	Persen	18.00	19.50	21.00	22.50	24.00	25.50	
6	Indeks tutupan lahan	Angka	53.43	56.67	59.92	63.17	66.41	69.66	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	71.93	73.13	74.32	75.51	76.71	77.90	
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	15.23	16.37	17.41	18.52	19.69	20.94	
9	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	19.00	22.55	26.11	29.66	33.22	36.77	
10	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh pengumpulan Sampah	Persen	28.99	32.61	36.24	39.86	43.49	47.11	
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	200.28	195.95	191.63	187.30	182.97	188.64-178.64	
12	Jumlah Penduduk	Orang	545.058	556.862	568.666	580.470	592.274	604.078	
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	2.21	2.17	2.12	2.08	2.03	1.99	
14	Rasio Penduduk	Persen	102	101.87	101.88	101.90	101.91	101.94	
15	Kepadatan Penduduk	Orang/Km ²	239	244	249	254	260	265	
B	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.41	4.70	5.00	5.29	5.58	5.87	
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6.50	6.19	5.90	5.61	5.35	5.09	
3	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta	55.78	63.35	71.95	81.71	92.8	119.71	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.71	4.69	4.67	4.64	4.62	4.60	

No.	INDIKATOR	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Indeks Gini	Angka	0.2475	0.246	0.2445	0.243	0.2415	0.24	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75.75	76.012	76.274	76.536	76.798	77.06	
7	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Juta/orang	98.35	104.01	110.00	116.33	123.03	130.00	
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.51	74.65	74.79	74.94	75.08	75.22	
9	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	120	113	106	99	92	85	
10	Prevalensi Stunting	Persen	14	13.6	13.2	12.8	12.4	12	
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	80	80.8	81.6	82.4	83.2	84	
12	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persen	91	91.4	91.8	92.2	92.6	93	
13	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	Persen	92.57	93.46	94.34	95.23	96.11	97	
14	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Angka Literasi/Numerasi)	Angka	Literasi : 84.09; Numerasi : 70.45	Literasi : 84.092; Numerasi : 70.63	Literasi : 84.094; Numerasi : 70.81	Literasi : 84.096; Numerasi : 70.99	Literasi : 84.098; Numerasi : 71.17	Literasi : 84.10; Numerasi : 71.35	
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.75	9.88	10.01	10.14	10.27	10.4	
16	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	14.4	14.48	14.56	14.64	14.72	14.8	
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	13.96	14.01	14.06	14.10	14.15	14.2	
18	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persen	76.97	77.13	77.30	77.47	77.63	77.8	
19	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	39.70	40.69	41.68	42.67	43.65	45.63	
20	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	7	11	14	17	21	24	
21	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	7.33	10.67	14.00	17.33	20.67	24.00	
22	Persentase Nagari Dengan Level Madani V	Persen	21	24	27	29	32	34.78	

No.	INDIKATOR	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	69.53 - 69.54	69.78 – 69.79	70.03 - 70.04	70.28 – 70.29	70.53 – 70.54	70.78 - 70.80	
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	
25	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	66.15	66.25	66.35	66.45	66.55	66.65	
C	Aspek Daya Saing Daerah								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	10.44	10.56	10.67	10.78	10.89	11.00	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0.96	1.00	1.05	1.09	1.14	1.18	
3	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang	Orang	2.296	2.412	2.529	2.645	2.761	2.877	
4	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	0.93	0.95	0.97	0.99	1.01	1.03	
5	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian	Persen	11.87	12.13	12.40	12.67	12.93	13.2	
6	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah	Persen	3.39	3.60	3.82	4.04	4.25	4.47	
7	Rasio Kewirausahaan	Persen	3.89	4.09	4.29	4.49	4.69	4.89	
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	1.62	1.90	2.19	2.47	2.75	3.03	
9	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	0.75	0.79	0.83	0.87	0.90	0.94	
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	38.73	40.79	42.86	44.93	46.99	49.06	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	59.45	59.80	60.15	60.50	60.85	61.2	
12	Indek Inovasi Daerah	Angka	46.00	46.80	47.60	48.40	49.20	50	
13	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	Persen	28.21	28.16	28.10	28.05	28.00	27.95	
14	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Juta/Orang	82.61	82.83	83.32	83.78	84.21	84.62	
15	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	53.0	55.5	58.0	60.5	63.0	65.5	
16	Persentase stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	34	35	37	39	41	43	
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	30.02	30.34	30.65	30.97	31.28	31.6	
18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	9.91	10.49	11.07	11.64	12.22	12.8	

No.	INDIKATOR	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Rumah Tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Persen	73.75	75.06	76.37	77.69	79.00	80.31	
20	Persentase Desa Mandiri	Persen	8.88	9.06	9.24	9.42	9.6	9.78	
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0.21	0.24	0.28	0.31	0.35	0.38	
22	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Persen	4.63	8.33	12.02	15.71	19.41	23.1	
23	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Tahun	Rupiah	1.388.687	1.587.936	1.787.186	1.986.435	2.185.685	2.384.934	
24	Total Kredit/PDRB	Persen	3.95	4.12	4.29	4.46	4.63	4.8	
25	Rasio PDRB Sektro Jasa Keuangan	Persen	1.29	1.33	1.38	1.42	1.46	1.5	
26	Angka Ketergantungan	Angka	49.03	49.60	50.16	50.72	51.29	51.85	
27	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	n/a						
28	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Angka	n/a						
D	Aspek Pelayanan Umum								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	80.83	81.67	82.50	83.33	84.17	85	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2.66	2.76	2.86	2.96	3.06	3.16	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3.5	3.7	3.9	4.15	4.35	4.55	
4	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Angka	79.67	80.33	81.00	81.67	82.33	83	
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	2.95	3.00	3.05	3.10	3.15	3.2	
6	Persentase potensi ATHG/Konflik sosial yang dapat diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	Angka	2.75	2.6	2.45	2.3	2.15	2	
8	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu	Persen	71.17	72.33	73.50	74.67	75.83	77	
9	Indeks Keamanan	Angka	91.50	91.62	91.74	91.86	91.99	92.10	
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.64	3.65	3.67	3.68	3.70	3.71	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Urusan Pendidikan									
1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,75	9,88	10,01	10,14	10,27	10,40	
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,40	14,48	14,56	14,64	14,72	14,80	
3	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD/RA/TK	Persen	67,41	70,78	74,32	78,04	81,94	86,03	
4	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI	Persen	98,80	99,01	99,23	99,45	99,67	99,89	
5	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTS	Persen	98,78	98,97	99,17	99,37	99,57	99,77	
6	Angka Partisipasi Kasar PAUD/TK/RA	Persen	63,05	66,21	69,52	72,99	76,64	80,47	
7	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persen	97,38	97,58	97,77	97,97	98,17	98,36	
8	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	Persen	101,76	101,97	102,17	102,37	102,58	102,78	
9	Aangka Partisipasi Murni SD /MI	Persen	88,56	88,73	88,91	89,09	89,27	89,45	
10	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	Persen	78,68	78,83	78,99	79,15	79,31	79,47	
11	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	
12	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	Persen	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	
13	Persentase Satuan Pendidikan PAUD/TK yang Terakreditasi Minimal B	Persen	77,62	78,00	78,39	78,79	79,18	79,58	
14	Persentase Satuan Kesetaraan Terakreditasi	Persen	80,40	80,80	81,21	81,61	82,02	82,43	
15	Persentase Satuan Pendidikan SD/MI Akreditasi Minimal B	Persen	87,74	88,18	88,62	89,06	89,50	89,95	
16	Persentase Satuan Pendidikan SMP/MTS Akreditasi Minimal B	Persen	85,72	86,15	86,58	87,01	87,44	87,88	
17	Kemampuan literasi SD/MI	Persen	80,03	80,19	80,35	80,51	80,67	80,83	
18	Kemampuan numerasi SD/MI	Persen	71,14	71,28	71,43	71,57	71,71	71,86	
19	Indeks iklim keamanan SD/MI	Persen	76,11	76,26	76,42	76,57	76,72	76,88	
20	Indeks iklim kebhinekaan SD/MI	Persen	74,66	74,81	74,96	75,11	75,26	75,41	
21	Indeks iklim inklusivitas SD/MI	Persen	58,83	58,95	59,06	59,18	59,30	59,42	
22	Kemampuan literasi SMP/MTS	Persen	71,45	71,60	71,74	71,88	72,03	72,17	
23	Kemampuan numerasi SMP/MTS	Persen	63,98	64,11	64,23	64,36	64,49	64,62	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
24	Indeks iklim keamanan SMP/MTS	Persen	68,39	68,52	68,66	68,80	68,94	69,07	
25	Indeks iklim kebhinnekaan SMP/MTS	Persen	70,90	71,04	71,19	71,33	71,47	71,61	
26	Indeks iklim inklusivitas SMP/MTS	Persen	55,89	56,00	56,12	56,23	56,34	56,45	
27	Jumlah Satuan Pendidikan TK, PAUD Yang menerapkan Pendidikan Karakter, Tahfiz Qur'an dan Muatan ABS SBK	satuan pendidikan	387	387	387	387	387	387	
28	Jumlah Satuan Pendidikan SD/MI Yang menerapkan Pendidikan Karakter, Tahfiz Qur'an dan Muatan ABS SBK	satuan pendidikan	441	441	441	441	441	441	
29	Jumlah Satuan Pendidikan SMP/MTS Yang menerapkan Pendidikan Karakter, Tahfiz Qur'an dan Muatan ABS SBK	satuan pendidikan	68	68	68	68	68	68	
2. Urusan Kesehatan									
1	Indeks Kesehatan Masyarakat	Persen	86,8	87,2	87,5	87,9	88,3	88,5	
2	Persentase Faskes yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	Persen	16	21	26	34	43	53	
3	Tingkat keamanan makanan minuman dan obat yang beredar	Persen	97,14	97,21	97,31	97,35	97,42	97,49	
4	Indeks Penerapan Germas	Persen	60,8	61,5	62	62,5	63	63,5	
5	Jumlah Kematian ibu	orang	9	9	8	8	7	7	
6	Jumlah Kematian Bayi	orang	71	69	67	65	63	61	
7	Jumlah Kematian Balita	orang	87	85	83	81	79	77	
8	Persentase Balita Stunting	Persen	6,07	6,02	5,08	5,03	4,08	4,08	
9	Cakupan imunisasi Dasar Lengkap	Persen	30	38	48	55	60	65	
10	Persentase keberhasilan pengobatan TB	Persen	85,3	86	87	88	89	90	
11	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,9	90,93	90,96	90,99	91,02	91,02	
12	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	7,5	15	30	40	50	60	
13	Persentase depresi pada usia > 15 Tahun	persen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
14	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	
15	Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%)	persen	13,8	13,7	13,6	13,5	13,4	13,2	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	53,5	54	54,5	55	55,5	56	
17	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	88	88,5	89	89,5	89,7	89,9	
18	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen	45,72	45,9	46	46,15	46,3	46,45	
19	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	persen	85,7	85,7	100	100	100	100	
20	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	persen	61,9	61,9	61,9	71,42	71,42	71,42	
21	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	persen	83	86	89	92	95	95	
22	Persentase lanjut usia yang mandiri	persen	53	53,5	54	54,5	55	55,5	
23	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	persen	10	9,8	9,6	9,4	9,2	9	
24	Cakupan penemuan kasus TB	persen	36,9	37,5	42	48	50,3	60	
25	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	persen	4,9 : 1000	5,5 : 1000	5,5 : 1000	5,5 : 1000	5,5 : 1000	5,5 : 1000	
26	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	persen	50,5	51,5	52,5	53,5	54	55	
27	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	persen	12,39	13,27	14,16	16,81	16,81	17,36	
28	Persentase peneribitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT	persen	24	24	26	28	30	32	
29	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	58,3	58,3	58,8	59,3	59,9	60,2	
30	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	persen	24	24	26	28	30	32	
31	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	persen	51,7	51,7	52	52,5	53	53,5	
32	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	58,3	58,3	58,8	59,3	59,9	60,2	
33	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	Persen	47,8	50	52,17	54,3	56,5	58,69	
34	Persentase Posyandu aktif	Persen	91,7	91,9	92	92,3	92,4	92,6	
35	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	93,57	93,60	93,63	93,66	93,69	93,72	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
36	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	99	99,03	99,06	99,09	99,11	99,14	
37	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	93,67	93,7	93,73	93,76	93,79	93,82	
38	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	73,79	73,82	73,85	73,88	73,91	73,94	
39	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	97,83	97,86	97,89	97,92	97,95	97,98	
40	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	89,44	89,47	89,50	89,53	89,56	89,59	
41	Persentase orang usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	73,71	73,74	73,77	73,80	73,83	73,86	
42	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,9	90,93	90,96	90,99	91,02	91,05	
43	Persentase penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,86	90,89	90,92	90,95	90,98	91,01	
44	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
45	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	83,76	83,79	83,82	83,85	83,88	83,91	
46	Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	93	93,03	93,06	93,09	93,12	93,15	
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	41,52	42,88	44,24	45,63	46,78	48,26	
2	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	59,16	60,16	61,16	62,16	63,16	64,16	
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	15,40	16,37	17,41	18,52	19,69	20,94	
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	%	17,95	19,25	20,65	22,16	23,77	25,50	
5	Persentase Luas Layanan Irigasi Multi Komoditas kewenangan kab/kota	%	6.09	8.11	9.99	11.86	13.73	15.61	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	52,14	52,54	52,94	53,34	53,74	54,14	
7	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	59,12	59,23	59,34	59,45	59,56	59,67	
8	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	80,50	81,00	83,00	85,00	88,00	90,00	
9	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	8,23	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	
10	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	59,16	60,16	61,16	62,16	63,16	64,16	
11	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	10	12	14	16	18	20	
12	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	hari	15	15	15	15	15	15	
13	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	20	20	20	20	20	20	
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Persen	73,75	75,06	76,37	77,69	79,00	80,31	
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	55,56	66,67	72,22	77,78	83,33	88,89	
3	Persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Persen	3,83	7,66	11,49	15,32	19,15	22,98	
4	Persentase luas kawasan permukiman di luar kawasan kumuh yang ditangani	Persen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persen	92	93	94	95	96	97	
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Indeks Trantibumlinmas	Angka	68	71	74	79	82	86	
2	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka	72	76	79	83	87	91	
3	Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Angka	60	64	67	70	73	77	
4	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Angka	73	73	75	85	85	90	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75	79	83	87	91	95	
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase penyelenggaraan Trantibum	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan akibat penegakan Perda/ Perkada	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase warga negara korban kebakaran yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
14	Jumlah PPNS Pada Satpol PP	Orang	3	5	7	9	11	13	
15	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persen	50	65	75	85	90	100	
16	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	59	72	85	97	100	100	
17	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	
18	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,55	0,60	0,66	0,71	0,77	0,82	
19	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	Persentase Nagari yang Siap Menghadapi Bencana	Persen	80	84	88	92	96	100	
21	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persen	90	90	90	90	90	90	
23	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
6. Urusan Sosial									
1	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persen	90,95	90,97	90,99	91,12	91,25	91,35	
2	Persentase PSKS dan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Persen	85,95	89,90	90,50	90,65	90,85	90,90	
3	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	90,91	90,94	90,97	91,08	91,13	91,18	
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	14	30	31	64	82	100	
5	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	17	34	50	66	82	100	
6	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	10	20	30	40	50	60	
7	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persen	80	85	90	95	98	100	
9	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
7. Urusan Tenaga Kerja									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71	4,69	4,67	4,64	4,62	4,6	
2	Produktivitas Tenaga Kerja	%	98,35	104,01	110	116,33	123,03	130	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,55	69,67	69,78	69,89	69,99	70,5	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	6,1	21,82	23,65	26,67	30,72	32	
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit. Struktur Skala Upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	7,89	8,42	9,21	10,00	10,53	11,05	
7	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	70	72	74	76	78	80	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	93,3	93,5	93,7	93,9	94,1	94,3	
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0,21	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,54	64,29	65,04	65,79	66,54	67,29	
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97.17	97.25	97.33	97.41	97.49	97.57	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	57,91	58,19	58,39	58,42	58,57	58,75	
5	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	64.21	64,65	65,15	65,65	66,15	66,65	
9. Urusan Pangan									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	86,93	86,94	86,95	86,96	Persentase Nagari Dengan Level Madani V86,97	86,98	
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Angka	9,10	9,03	8,66	8,28	7,91	7,54	
3	Persentase Cadangan Pangan(%)	Persen	20	30	40	50	60	70	
4	Skor Pola Pangan Harapan(PPH)	Angka	85,0	85,5	86,0	86,5	87,0	87,5	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	Persen	81	82	83	84	85	86	
6	Persentase Daerah Rentan Pangan(%)	Persen	6,5 (6 Nagari)	5,4 (5 Nagari)	4,3 (4 Nagari)	3,2 (3 Nagari)	2,17 (2 Nagari)	1,08 (1 Nagari)	
10. Urusan Pertanian									
1	Persentase fasilitasi urusan pertanian untuk kepentingan umum dan pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	72	73	74	75	76	77	
3	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	
11. Urusan Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Likungan Hidup (IKLH)	%	76,9	77,1	77,3	77,5	77,7	77,9	
3	Ketaatan penanggungjawab usaha/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah	%	35	35	40	42	44	46	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	Indeks	50	59	61	63	65	67	
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	88.5	88.8	90	90.5	91.5	92.5	
2	Cakupan layanan administrasi kependudukan yang terlayani	persen	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan kepemilikan akte kelahiran balita	persen	92	94	95	96	97	98	
4	Cakupan kepemilikan akte perceraian	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Cakupan kepemilikan akte perkawinan	persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Cakupan kepemilikan akte kematian	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Rate nett recent migrasi	orang	50	50	50	50	50	50	
8	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	60	63	65	70	72	75	
9	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	
10	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	persen	100	100	100	100	100	100	
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase Nagari Mandiri	Persen	46,37	47,82	48,91	50,00	51,08	52,27	
2	Persentase Nagari dengan Level Madani V	Persen	21,00	24,00	27,00	29,00	32,00	34,78	
3	Tingkat Penerapan Nilai-nilai Agama	Persen	69,61	70,59	71,56	72,53	73,50	74,48	
4	Indeks Desa	Indeks	83,20	86,2	89,2	92,2	95,2	98,2	
5	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	4	5,44	5,43	5,44	5,43	5,44	
6	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	50	60	70	80	90	100	
9	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Aparatur Desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	100	100	100	100	100	
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,7	62,1	63,3	64,5	65,7	66,8	
2	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka/Rate	2,39	2,36	2,34	2,32	2,30	2,39	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	12,5	12,5	12,5	12,4	12,3	12,1	
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demaint statisfied by modern)	Persen	58,4	58,5	58,5	58,5	58,6	58,8	
5	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	66	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	85,3	86,6	87,7	88,8	89,7	90,6	
7	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	47,5	53,3	58,7	64,1	68,5	73,4	
8	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	69,6	70,1	70,6	71,6	72,1	73	
9	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	Persen	47	50	55	60	65	70	
10	Jumlah kelompok sasaran Pendamping keluarga 1000 HPK	Kelompok	57	60	62	64	66	68	
11	Jumlah ibu nifas menerima pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Orang	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
12	Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	Orang	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
15. Urusan Perhubungan									
1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan	%	50	52	54	56	58	60	
2	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	69,00	69,25	69,50	70,00	70,50	71,00	
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	80	81	82	83	84	85	
4	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	50	50	100	100	100	100	
16. Urusan Komunikasi dan Informatika									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2.66	2.76	2.86	2.96	3.06	3.16	
2	Indeks keterbukaan informasi publik	Nilai	79.79	79.80	79.81	79.82	79.83	79.84	
3	Indeks domain kebijakan internal SPBE	Nilai	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	
4	Indeks domain tatakelola SPBE	Nilai	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	
5	Indeks domain manajemen SPBE	Nilai	1.46	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	
6	Indeks Domain layanan SPBE	Nilai	3.38	3.39	3.40	3.41	3.42	3.43	
7	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis	PD	20	20	20	20	20	20	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo								
8	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	5	5	5	5	5	5	
10	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70	70	70	70	70	70	
11	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten / Kota	%	100	100	100	100	100	100	
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Persentase Koperasi berkualitas	%	73,24	44,87	44,92	44,96	45,00	45,04	
2	Persentase Koperasi Aktif	%	43,03	70,91	71,52	72,12	72,73	73,33	
3	Persentase umkm yang berdaya saing	%	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	
4	Persentase pelaku usaha mikro yang produktif	%	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	
5	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0	10	12	14	16	18	
6	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah/kabupaten kota	%	70	71	72,5	74	75,5	77	
7	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	3,52	5,56	6,36	7,14	8,33	10,33	
8	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	64,9	65	66	67	68	69	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	18	13	15	16	17	17	
11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	18	13	15	16	17	17	
12	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Angka	0	10	15	20	25	30	
13	Persentase jumlah usaha mikro yang yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,00	0,09	0,14	0,16	0,18	0,21	
14	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,23	0,28	0,32	0,37	0,41	0,46	
15	Pertumbuhan Wirausaha	%	69	59	69	79	89	99	
16	Proporsi Usaha Mikro Menjalin kemitraan dan ekspor	%	0	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	
17	indeks kepuasan masyarakat	%	85	85,5	85,7	85,9	86,1	86,3	
18. Urusan Penanaman Modal									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	80	82	84	86	88	90	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	N/A	5	5.5	6	6.5	7	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	88	90	93	96	99	100	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	60.5	61	62	64	66	68	
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	N/A	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	%	N/A	10	12	14	16	18	
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
1	Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	Nilai	61,62	62,03	62,4	61,34	61,73	62,13	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	persen	49,5	50	55	60	65	70	
3	Jumlah Perolehan Medali (tingkat Prop. Nasional. Regional)	Medali	55	180	95	200	100	210	
4	Rasio wirausaha muda/ entrepreneur muda	persen	52,73	53,58	54,44	51,71	52,57	53,43	
5	Persentase partisipasi masyarakat dalam kepramukaan (usia Sekolah)	orang	2,7	2,9	3,1	3,3	4	4,5	
20. Urusan Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,77	2,77	2,78	2,79	2,80	2,81	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OP) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	82	82	84	86	88	90	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OP) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	82	82	84	86	88	90	
21. Urusan Persandian									
1	Indeks KAMI (terkait Keamanan)	Nilai	36.93	37.04	37.15	37.25	37.36	37.47	
2	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan	KAMI	340	340	341	342	343	344	
22. Urusan Kebudayaan									
1	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	Persen	63,7	64,86	66,01	67,16	68,32	69,47	
2	Persentase lembaga adat yang aktif dalam membina nilai Kearifan Lokal, adat dan budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	92,73	89,47	86,44	85,00	82,26	79,69	
5	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang di Tetapkan	CB	52	54	56	58	60	62	
6	Laju Peningkatan Kunjungan Ke museum	Persen	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	
23. Urusan Perpustakaan									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	73	74	75.5	77	78.5	80	
2	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	Nilai	82	82.5	83	83.5	84	84.5	
24. Urusan Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai	52	53.5	55	56	58	60	
2	Indeks Ketersediaan Arsip	Nilai	65	66	67	68	69	70	
3	Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Nilai	67	67,66	68	68,66	69	69,66	
4	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	58,12	58,15	58,18	58,21	58,24	58,27	
5	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan)	Nilai	58	58,56	59	59,56	60	60,56	
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	67	67,66	68	68,66	69	69,66	
25. Urusan Kelautan dan Perikanan									
1	Rasio PDRB SubSektor Perikanan(%)	(%)	4,66	4,71	4,76	4,81	4,86	4,91	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	ton	41.854	41.955	42.090	42.225	42.360	42.500	
3	Jumlah produksi perikanan tangkap (jadikan %)	Ton	8.170	8.180	8.190	8.200	8.210	8.220	
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	33.684	33.775	33.900	34.025	34.150	34.280	
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah memiliki izin usaha terhadap peraturan	Persen	20	30	45	60	75	85	
6	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	31,03	31,62	32,19	32,74	33,26	33,50	
26. Urusan Pariwisata									
1	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	Persen	0,96	1	1,05	1,09	1,14	1,18	
2	PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	Nilai	0,91	31	0,96	0,98	1,01	1,03	
3	Rata rata pengeluaran wisatawan	Rupiah	541.350	546.750	552.250	557.750	563.350	569.000	
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	Orang	17.459	17.809	18.343	19.077	20.030	21.232	
5	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	Orang	958.996	1.016.536	1.087.693	1.174.709	1.280.433	1.408.476	
6	Jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di Hotel berbintang	Orang	988	1.135,00	1.344,00	1.651,00	2.110,00	2.819,00	
7	Lama tinggal wisatawan/ length of stay (LOS)	Hari	2	2	2	2	2	2	
8	Kontibusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	0,85	0,86	0,88	0,94	0,97	1	
9	Jumlah Diversifikasi Destinasi	destinasi	1	1	1	1	1	1	
10	Persentase peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata	persen	16,41	19,15	24,62	27,35	32,82	41,03	
11	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	rupiah	9,5 M	11 M	11,5 M	12,5 M	13 M	14 M	
27. Urusan Pertanian									
1	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta Rupiah	82,61	82,83	83,32	83,78	84,21	84,62	
2	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	%	0,70	0,73	0,74	0,75	0,76	0,78	
3	Persentase peningkatan Jumlah Kelompok tani yang dibina	%	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	
4	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian	Angka	1,60	1,76	1,92	2,18	2,34	2,50	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase peningkatan pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	
6	Luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian	Ha	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	
7	Persentase pelayanan penyakit hewan menular strategis (PHMS) tahun n	%	5,00	5,48	6,03	6,63	7,30	8,03	
8	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN (%)	%	90	91	92	93	94	95	
9	Jumlah capaian produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Ton	482.560	485.961	489.440	493.006	496.648	500.392	
10	Persentase peningkatan luas areal yang difasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	
11	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)	%	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	
12	Persentase peningkatan produksi komoditi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	%	0,70	0,73	0,74	0,75	0,76	0,78	
13	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani aktif	%	10,00	10,02	10,03	10,04	10,05	10,06	
28. Urusan Perdagangan									
1	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	19,8	19,84	19,88	19,9	19,94	19,98	
2	Persentase Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku	%	20,23	22,11	23,98	25,85	27,73	31,47	
29. Urusan Perindustrian									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,44	10,56	10,67	10,78	10,89	11	
2	Persentase Pertumbuhan Industri yang Berdaya Saing	%	0,5	0,7	0,9	0,11	0,13	0,15	
30. Unsur Sekretariat Daerah									
1	Nilai LPPD	Nilai	2,578	3,579	3,580	3,585	3,590	3,591	
2	Indek reformasi Birokrasi	Indek	BB (79)	A (81)	A (83)	A (84)	A (85)	4	
3	Efektifitas Kerjasama Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	2,578	3,579	3,580	3,585	3,590	3,591	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Dokumen	660	450	450	450	450	450	
7	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Kematangan UKPBJ	Proaktif	100	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	
9	Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	
31. Unsur Sekretariat DPRD									
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	77	78	80	80,5	81	81,5	
2	Persentase Pelaksaaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
4	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Persentase	80	82	85	87	90	92	
32. Unsur Perencanaan									
1	Indeks kualitas perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keselarasan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD)	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kebijakan berbasis bukti	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	%	35	38	40	42	44	46	
6	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Rasio Produk inovasi yang di manfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan Badan Usaha di daerah	%	100	100	100	100	100	100	
33. Unsur Keuangan									
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD)	nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pengelolaan manajemen Barang Milik Daerah sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	(0.09)	(0.085)	(0.08)	(0.075)	(0.07)	(0.065)	
5	Manajemen Aset	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
6	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
7	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	19	20	21	22	23	24	
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	
9	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
10	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	40,96	40,96	30	30	30	30	
11	Persentase Penambahan nilai aset tetap	Persen	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	
12	Persentase penurunan SILPA	Persen	7	6,5	6	5,5	5	4,5	
13	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	91	92	93	94	95	96	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	35,29	35,29	40	40	40	40	
15	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Rupiah	13,13	13,34	13,41	13,54	13,75	13,96	
16	Persentase Pertumbuhan PAD	Persen	1,49	1,53	1,61	1,71	1,72	1,81	
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85	87	90	95	99	99	
18	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	13,13	13,34	13,41	13,54	13,75	13,96	
19	Rasio PAD	Persen	1,49	1,53	1,61	1,71	1,72	1,81	
34. Unsur Kepegawaian									
1	Indeks Sistem Merit	Angka	270	275	280	285	290	295	
2	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Angka	77,8	77,9	78	78,5	79	80	
3	Rasio pegawai pendidikan tinggi, dan menengah/dasar (%), (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	255	256	257	258	259	260	
4	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	31	31,47	31,62	31,77	31,93	32,08	
5	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	28	28,19	28,43	28,68	28,92	29,17	
35. Unsur Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	Persen	35	38	40	42	44	46	
3	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Rasio Produk inovasi yang di manfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan Badan Usaha di daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
36. Unsur Pengawasan									
1	Tingkat Efektifitas pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah	Rata- Rata (tingkat Efektifitas)	85,5	86	87	88	89	90	
2	Indek Efektifitas Pencegahan korupsi	Indeks	2,908	3,014	3,120	3,226	3,332	3,438	
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	86	87	88	89	90	93	
4	Indeks Manajemen Resiko	Nilai	3,020	3,150	3,160	3,180	3,190	3,200	
5	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	Nilai 3,00 (level 3)	Nilai 3,10 (level 3)	Nilai 3,12 (level 3)	Nilai 3,13 (level 3)	Nilai 3,14 (level 3)	Nilai 3,15 (level 3)	
37. Unsur Pemerintahan Umum									
1	Persentase Ppotensi ATHG yang dapat diatas	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penanganan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase parpol yang melaksanakan Pendidikan politik kepada masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase ormas yang aktif	Persen	7	14	25	34	40	44	
38. Unsur Kewilayahan									
1	KEC. Baso								
1	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	93	93,25	93,50	93,75	94	94,25	
2	Presentase pelayanan publik sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	KEC.Ampek Angkek								
1	Indeks kepuasan masyakarakat	Nilai	90	90,25	90,50	90,75	90,80	100	
2	Presentase pelayanan publik sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	persen	90,25	90,50	90,75	90,75	90,80	100	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari	persen	100	100	100	100	100	100	
3	Kec. Ampek Nagari								
1	Indeks kepuasan masyakarakat	Nilai	86.21	87,95	88,18	89,45	90,57	91,95	
2	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	persen	86,21	87,95	88,18	89,45	90,57	91,95	
4	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Kec. Banuhampu								
1	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	89	90	90,18	90,45	93,57	93,95	
2	Persentase pelayanan publik sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhankebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase nagari yang termonitoring dan terevaluasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Kec. Candung								
1	Indeks kepuasan masyakarakat	Nilai	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,10	
2	Persentase pelayanan Publik sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan (aktivitas)	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakatnya	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Kec. IV Koto								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	90	91	92	93	94	
2	Persentase pelayanan publik sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persen	89	90	91	92	93	94	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Kec. Kamang Magek								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86	87	88	89	90	92	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Presentase Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	91	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Kec. Lubuk Basung								
1	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	80	81	82	83	84	85	
2	Persentase Pelayanan Publik dan Pemerintahan sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Nagari yang tertib administrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Kec. Malalak								

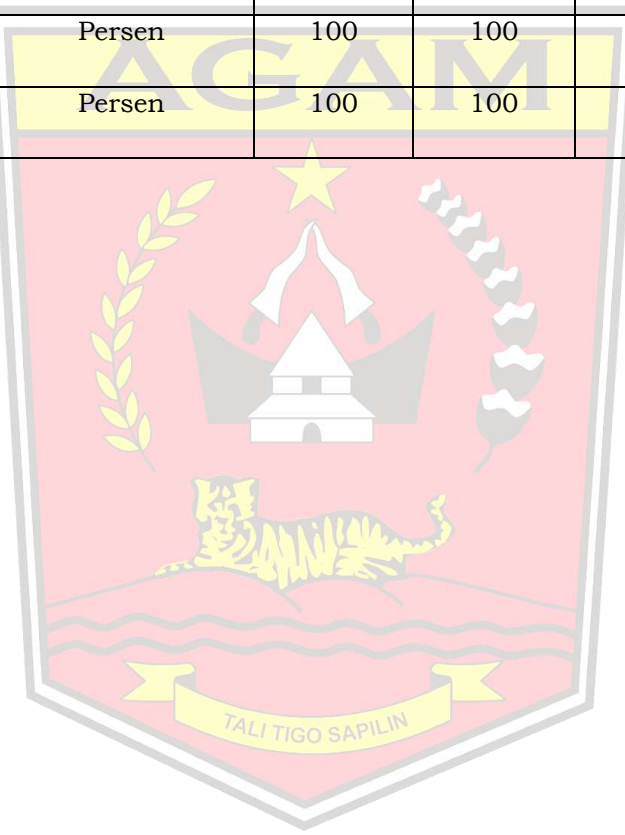
No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	83	84	85	86	87	
2	Presentase pelayanan publik sesuai standa	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari	persen	100	100	100	100	100	100	
10	Kec. Matur								
1	Indeks kepuasan masyakarakat	Nilai	89	87,95	88,18	89,45	90,57	91,95	
2	Persentase pelayanan publik sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang dilaksanakan (Aktivitas)	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	persen	100	100	100	100	100	100	

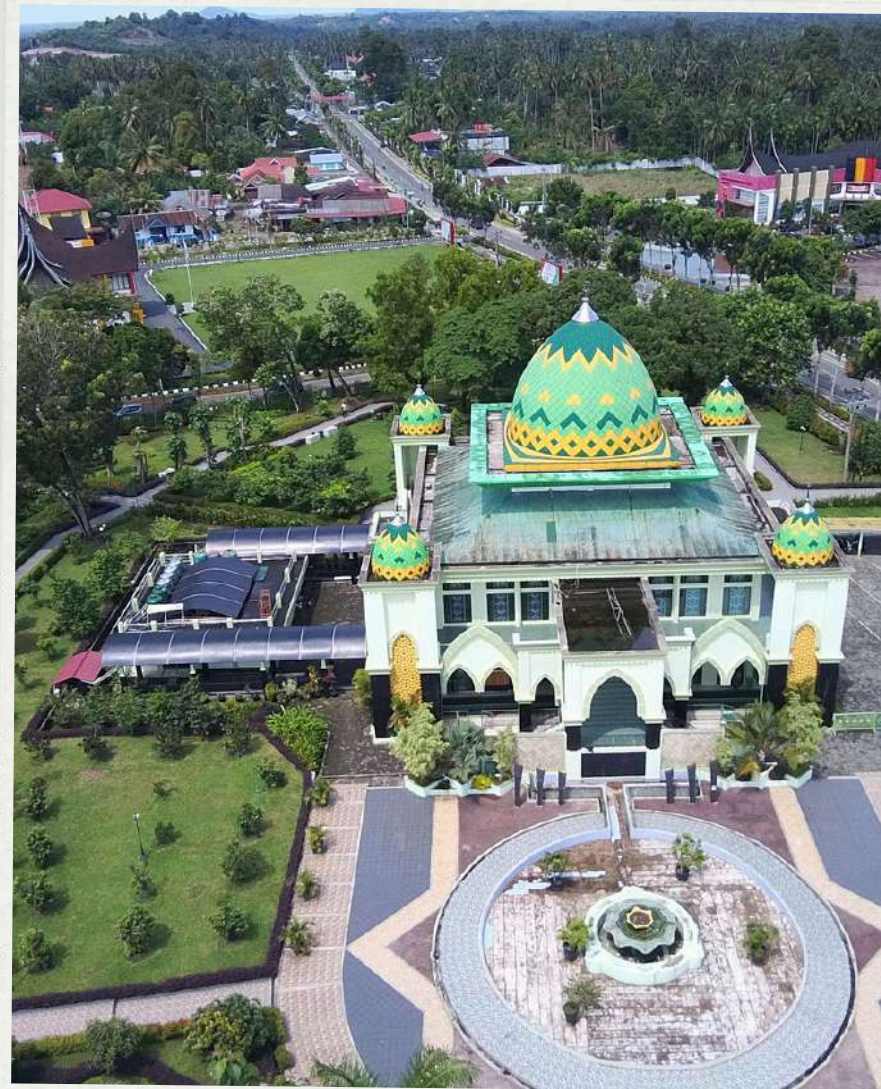
No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	-	100	100	100	100	100	
11	Kec. Palembang								
1	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	83,5	85,71	87,5	88,6	89,5	90,5	
2	Persentase pelayanan publik sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	persen	83,5	85,71	87,5	88,6	89,5	90,5	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase kegiatan pemberdayaan Masyarakat Nagari	persen	100	100	100	100	100	100	
12	Kec. Palupuh								
1	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	83,5	85,71	87,5	88,6	89,5	90,5	
2	Persentase pelayanan publik sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan AS	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase nagari yang termonitoring dan terevaluasi	persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	
13	Kec. Sungai Pua								
1	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	87,75	87,95	88,18	89,45	90,57	91,95	
2	Persentase pelayanan publik sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persen	89	93	94	95	96	97	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persen	100	100	100	100	100	100	
14	Kec. Tanjung Mutiara								
1	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	89	89,5	90	90,5	91	91	
2	Presentase pelayanan publik sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	Persen	89	89,5	90	90,5	91	91	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
15	Kec. Tanjung Raya								
1	Indeks Kepuasan Mayarakat di kecamatan	Persen	87	87,5	88	88,5	89	89,5	
2	Persentase Pelayanan Publik sesuai Standar	Persen	90	90	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Persen	87	87,5	88	88,5	89	89,5	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase nagari yang termonitoring dan terevaluasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
16	Kec. Tilatang Kamang								
1	Indeks kepuasan masyakarakat	Indeks	89	90	90,18	90,45	93,57	93,95	
2	Persentase pelayanan publik sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase nagari yang termonitoring dan terevaluasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	





Bab 5

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Dengan pendekatan penyusunan secara holistik tematik, integrative, dan spasial, diharapkan dokumen RPJMD ini dapat menjadi pemandu dan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Kabupaten Agam dalam 5 (lima) tahun ke depan hingga tahun 2029.

RPJMD Tahun 2025-2029 agar menjadi perhatian dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga diharapkan mampu mendorong dan menghadirkan Kabupaten Agam sebagai daerah yang Madani, Maju dan Berkelanjutan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan RPJMD

5.1.1 Pedoman Transisi

Secara keseluruhan, pedoman transisi memuat arahan mengenai berbagai aspek yang harus dilakukan pada saat transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini guna menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 ini berakhir. Beberapa aspek yang perlu diatur yakni sebagai berikut:

1. Permasalahan–permasalahan pembangunan yang belum tertangani pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 akan diakomodasi sebagai permasalahan pembangunan dalam RPJMD periode berikutnya.
2. Target Indikator Kinerja yang belum terealisasi pada periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian target pada periode RPJMD berikutnya.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau prinsip guna melaksanakan suatu rencana atau kebijakan. Tujuan dari disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk membuat gambaran umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam melaksanakan visi dan misi

RPJMD secara efektif dan efisien. Hal tersebut bertujuan untuk mengelola sumber daya pembangunan secara optimal dan dapat membagi peran secara akurat agar tujuan pembangunan jangka menengah dapat terealisasi. Berikut ini adalah Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, yaitu :

1. Penanggungjawab Urusan Penunjang Perencanaan Daerah dapat menkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah atau unit kerja yang ada pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, guna mencermati tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi perumusan RPJMD.
2. Perancangan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD periode Tahun 2025 – 2029 perlu diperhatikan dan diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025–2029.
3. Target Kinerja Pembangunan yang ditetapkan dalam Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Agam 2025–2029 merupakan tolok ukur dalam menetapkan target Indikator Kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada periode berkenaan.
4. Untuk memastikan realisasi target kinerja RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, Perangkat Daerah Penanggungjawab Perencanaan harus melakukan pengawasan dan evaluasi berdasarkan peraturan yang ada, guna menghadapi perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal.
5. Jika terdapat perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, maka Penanggungjawab Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan memastikan semua urusan terakomodir dan termuat dengan baik.

5.1.3 Komunikasi Publik

Komunikasi publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 diupayakan melalui sinergi yang terstruktur antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kecamatan, desa, serta seluruh perangkat daerah dan masyarakat luas. Komunikasi yang baik, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci penting untuk mendukung keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka panjang ini. Dalam hal ini, komunikasi publik mencakup empat kelompok pemangku kepentingan utama: Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa, serta masyarakat umum.

Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi diwujudkan melalui rapat konsultasi untuk memperoleh pandangan strategis dan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah. Pada tingkat perangkat daerah, komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang bertujuan mengakomodasi masukan dan menguatkan keterpaduan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, komunikasi dengan pihak kecamatan dan desa dilaksanakan secara bertahap melalui forum musyawarah di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman yang kokoh dan meningkatkan partisipasi dari tingkat akar rumput. Komunikasi dengan masyarakat umum melibatkan beragam pihak, termasuk sektor swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, serta kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Melalui metode komunikasi yang inklusif, pemerintah berupaya menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam memahami, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, baik melalui saran, kritik, maupun dukungan langsung.

5.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif harus menyediakan ruang fleksibilitas untuk mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali. Dalam kondisi *force majeure*, yang mencakup perubahan geopolitik, geoekonomi, perubahan kebijakan nasional, bencana alam, serta penyimpangan signifikan dalam pencapaian sasaran pembangunan dari tahapan sebelumnya, diperlukan penyesuaian yang memungkinkan. Apabila situasi tersebut menghambat pencapaian target pembangunan jangka panjang, maka target dalam RPJMD dapat direvisi dan dimutakhirkan pada RPJMD melalui evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk merespons secara efektif terhadap dinamika yang berpotensi mempengaruhi perencanaan strategis jangka panjang.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.2.1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMD

Pengendalian dan evaluasi merupakan proses penting yang saling terkait dalam berbagai bidang. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa suatu kegiatan atau program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi adalah proses untuk menilai kinerja suatu kebijakan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mengetahui :

1. Realisasi antara tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi RPJMD Kabupaten Agam dengan capaian sasaran Renstra Perangkat Daerah; dan
2. Realisasi antara antara tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi RPJMD Kabupaten Agam dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian ketentuan Peralihan dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 sebagai landasan implementasi. Berbagai hal yang belum diatur pada dokumen ini dapat dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

5.2.1 Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD 2025-2029

Evaluasi Akhir RPJMD Kabupaten Agam dilaksanakan pada tahun akhir periode pelaksanaan dokumen dan dapat diperbarui pada triwulan pertama tahun berikutnya. Evaluasi ini merupakan tahapan strategis untuk menilai secara menyeluruh keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pada periode berikutnya. Evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai capaian sasaran pembangunan daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tercantum dalam RPJMD.
2. Mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk ketercapaian target output dan outcome.
3. Mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan faktor penghambat selama periode pelaksanaan.
4. Menganalisis faktor pendorong keberhasilan yang dapat direplikasi pada periode berikutnya.
5. Memberikan masukan strategis untuk penyempurnaan dokumen RPJMD periode berikutnya, selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025–2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Mekanisme evaluasi akhir mencakup:

- Evaluasi kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh, melalui pengukuran capaian indikator makro, sasaran strategis, dan program prioritas.

- Evaluasi kebijakan dan program strategis, untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap masyarakat.
- Analisis kesenjangan (gap analysis) antara target dan realisasi untuk setiap indikator serta penyebab terjadinya deviasi.
- Kajian keterpaduan pendanaan dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk optimalisasi sumber-sumber pendanaan alternatif.

Hasil evaluasi akhir menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah berikutnya.

5.3 Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029 disusun sebagai kerangka kerja yang sistematis guna memastikan pencapaian sasaran strategis secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, menganalisis tingkat ancaman berdasarkan probabilitas dan dampaknya, mengevaluasi prioritas penanganan, serta merumuskan strategi mitigasi yang terukur dan terintegrasi dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Proses manajemen risiko dimulai dengan penetapan konteks perencanaan, meliputi tujuan, ruang lingkup, kriteria penilaian, dan pemangku kepentingan. Setiap risiko dianalisis dengan mengukur probabilitas terjadinya dan tingkat dampaknya terhadap capaian indikator RPJMD, sehingga diperoleh skor risiko yang digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian. Penanganan risiko dapat dilakukan melalui strategi penghindaran, pengurangan, pembagian, penerimaan, atau penahanan sementara, dengan rencana aksi yang jelas, indikator mitigasi, penanggung jawab, jangka waktu, dan kebutuhan anggaran.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, risiko dapat dimaknai sebagai segala bentuk ketidakpastian yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan. Risiko ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti praktik korupsi, penurunan penerimaan daerah, keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan program prioritas, hingga menurunnya mutu pelayanan publik. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko tersebut bukan hanya menghambat efektivitas kinerja pemerintah, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang terencana, terukur, dan berkesinambungan menjadi kebutuhan

mendesak agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak dini dan ditangani secara tepat

Dalam penerapannya, pengendalian yang dilakukan dalam proses manajemen risiko terutama dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian pada tahapan perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan memastikan penyusunan rencana pembangunan daerah sejalan sesuai arah kebijakan, prioritas dan ketentuan yang berlaku sehingga rencana yang dihasilkan relevan, realistis dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Pengendalian pada tahapan perencanaan bersifat preventif, yang mencakup:

- a. Kesesuaian antara kebijakan dan regulasi, memastikan dokumen perencanaan mematuhi peraturan perundangan, pedoman teknis dan arah kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Memastikan keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi maupun lintas sektor, sehingga tidak terjadi inkonsistensi.
- c. Mengkaji ketersediaan sumber daya, agar rencana pembangunan dapat direalisasikan secara efektif.
- d. Melakukan reviu dan evaluasi rancangan rencana sebelum ditetapkan, baik melalui mekanisme konsultasi publik, forum perangkat daerah, maupun fasilitasi oleh pemerintah provinsi.
- e. Memastikan indikator kinerja yang ditetapkan terukur dan relevan, sehingga memudahkan proses evaluasi di tahap pelaksanaan dan pelaporan.

2. Pengendalian pada tahapan pelaksanaan.

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan memastikan program/kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, kualitas, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, mencakup:

- a. Inventarisasi potensi risiko yang muncul selama pelaksanaan, seperti keterlambatan penyaluran anggaran, kendala pengadaan barang/jasa, hambatan teknis di lapangan, perubahan kondisi sosial/ekonomi, hingga bencana alam atau kondisi darurat lainnya.

- b. Menilai tingkat kemungkinan terjadinya resiko dampak terhadap pencapaian target program/kegiatan dalam rangka menentukan prioritas penanganan resiko.
- c. Strategi mitigasi risiko dan rencana kontijensi sebagai langkah alternatif penyelesaian risiko.
- d. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah
- e. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

5.4 Tata Kelola Satu Data Indonesia Kabupaten Agam

Dalam era transformasi digital dan keterbukaan informasi, ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Agam memandang sebagai aset strategis yang mampu mengarahkan pengambilan keputusan secara tepat, terukur, dan berbasis bukti. Untuk itu, dibutuhkan tata kelola data yang terintegrasi, sistematis, dan sesuai dengan kebijakan nasional melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta regulasi daerah terkait pengelolaan data, tata Kelola Satu Data Indonesia merupakan kerangka pengelolaan data yang bertujuan menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Prinsip satu data meliputi keseragaman standar data, kesatuan metadata, pemusatan data pada satu portal resmi pemerintah daerah, serta interoperabilitas sistem agar seluruh perangkat daerah dapat saling terhubung dan berbagi data secara efisien. Proses pengelolaan data dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan kebutuhan data, pengumpulan, verifikasi dan validasi, penyimpanan dan integrasi, publikasi melalui portal SDI Kabupaten Agam, hingga pemutakhiran secara berkala.

Strategi implementasi mencakup penguatan regulasi daerah melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Satu Data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data, pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang aman dan terintegrasi, sinkronisasi dengan Satu Data Provinsi Sumatera Barat dan Satu Data Indonesia nasional, serta optimalisasi

pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan tata kelola yang baik, data pembangunan Kabupaten Agam akan menjadi lebih lengkap, valid, dan mutakhir, sehingga proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Agam menempatkan Satu Data Indonesia basis transformasi tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Melalui sistem data yang terintegrasi, setiap kebijakan yang dihasilkan akan berlandaskan informasi yang tepat, mengurangi potensi kesalahan perencanaan, serta meningkatkan kepercayaan publik. Penguatan ekosistem data ini diharapkan tidak hanya menjadi alat dukung pembangunan, tetapi juga mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan Agam yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

5.5 Kolaborasi Multipihak dalam Perencanaan Pembangunan

Kolaborasi multipihak dalam perencanaan pembangunan merupakan pendekatan strategis yang mengedepankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sebagai mitra sejajar dalam perumusan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah. Dengan menghimpun aspirasi dan mengintegrasikan dengan data empiris, hasil kajian, serta analisis kebijakan secara sistematis akan menghasilkan dokumen perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan kolaborasi multipihak dilakukan melalui berbagai mekanisme partisipatif, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat nagari hingga kabupaten, konsultasi publik, forum perangkat daerah, diskusi tematik, kajian dan analisis kebijakan, lokakarya, seminar, hingga penyampaian saran tertulis. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan adanya ruang pertukaran gagasan, serta validasi data dan informasi secara terbuka. Hasil dari proses ini diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan, sekaligus membangun rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dari seluruh pihak terhadap arah pembangunan daerah.

1. Kolaborasi multipihak dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan

Kolaborasi multipihak dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan dalam merumuskan arah, prioritas, dan strategi pembangunan daerah. Keterlibatan pihak-pihak seperti perangkat daerah, DPRD, organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, komunitas lokal, dan media menjadi penting untuk memastikan rencana pembangunan yang disusun bersifat inklusif, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Pelaksanaan kolaborasi multipihak pada tahap penyusunan dilakukan melalui berbagai mekanisme partisipasi, antara lain forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), diskusi tematik, lokakarya, seminar, serta pengkajian dan analisis kebijakan.

2. Kolaborasi multipihak dalam tahapan penetapan perencanaan pembangunan

Kolaborasi multipihak dalam tahapan penetapan perencanaan pembangunan memastikan rancangan dokumen perencanaan yang ditetapkan mencerminkan kesepakatan bersama yang merespon kebutuhan semua stakeholder terkait. Tahap ini melibatkan koordinasi intensif antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan strategis lainnya untuk melakukan penelaahan akhir terhadap substansi rancangan rencana. Penetapan dilakukan dengan memperhatikan hasil pembahasan pada tahap penyusunan, kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang lebih tinggi, serta kemampuan fiskal daerah. Proses ini bertujuan memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disahkan memiliki legitimasi hukum, keterpaduan kebijakan, dan kesiapan implementasi.

3. Kolaborasi multipihak dalam tahapan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan

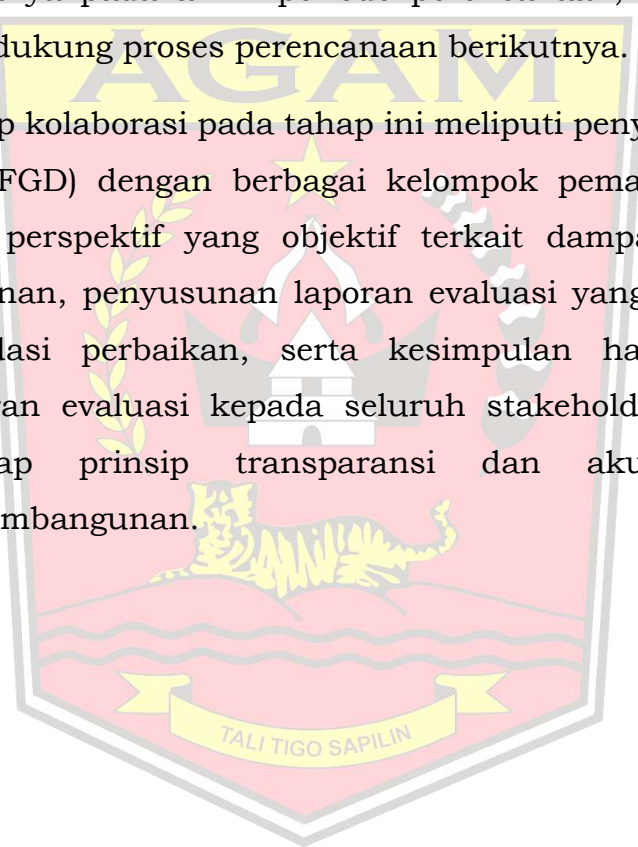
Bertujuan untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target, indikator, dan alokasi sumber daya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Tahap ini melibatkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, perangkat daerah pelaksana, DPRD, lembaga pengawas, serta unsur masyarakat seperti organisasi masyarakat,

media, dan akademisi. Kolaborasi dilakukan melalui pemantauan berkala, verifikasi capaian, dan evaluasi kinerja.

4. Kolaborasi multipihak dalam tahapan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

Bertujuan untuk penilaian menyeluruh terhadap kinerja pembangunan, mencakup tingkat pencapaian target, efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tahap ini melibatkan peran aktif pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, lembaga pengawas, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan media untuk memberikan perspektif yang objektif. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada akhir periode perencanaan, tetapi juga secara berkala untuk mendukung proses perencanaan berikutnya.

Ruang lingkup kolaborasi pada tahap ini meliputi penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan guna memperoleh perspektif yang objektif terkait dampak dan efektivitas rencana pembangunan, penyusunan laporan evaluasi yang memuat temuan, analisis, rekomendasi perbaikan, serta kesimpulan hasil evaluasi, dan penyampaian laporan evaluasi kepada seluruh stakeholder, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan.





Bangkit dari Surau



LAMPIRAN



No	Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data
1. Metadata Indikator Kinerja Makro					
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase kenaikan atau penurunan nilai total produksi barang dan jasa (Produk Domestik Bruto/PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu (biasanya per tahun atau per kuartal), dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Laju pertumbuhan ekonomi $= \frac{\text{PDB tahun ini} - \text{PDB Tahun lalu}}{\text{PDB Tahun lalu}} \times 100 \%$	- Laju pertumbuhan positif (misalnya, +5%) menunjukkan Ekonomi tumbuh, produksi meningkat, dan biasanya lapangan kerja bertambah. - Laju pertumbuhan negatif (misalnya, -2%) menunjukkan bahwa Ekonomi menyusut, bisa berarti terjadi krisis atau perlambatan ekonomi. Laju pertumbuhan tinggi tidak selalu berarti kesejahteraan merata—distribusi pendapatan dan inflasi juga perlu diperhatikan.	Badan Pusat Statistik (BPS)
2	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) dari satu periode ke periode berikutnya. PDRB per kapita ADHK mencerminkan nilai rata-rata output ekonomi per orang dalam suatu wilayah dengan mempertimbangkan inflasi (harga konstan), sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil per individu.	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHK) $= \frac{\text{PDRB Per Kapita ADHK tahun ini} - \text{PDRB Per Kapita ADHK Tahun lalu}}{\text{PDRB Per Kapita ADHK Tahun lalu}} \times 100 \%$	- Angkanya positif dan meningkat: berarti ekonomi per orang di wilayah tersebut tumbuh secara riil, masyarakat secara rata-rata menjadi lebih sejahtera dari tahun sebelumnya. - Angkanya negatif: terjadi penurunan kesejahteraan ekonomi rata-rata masyarakat secara riil. Bisa disebabkan oleh kontraksi ekonomi, krisis, atau pertumbuhan penduduk yang melebihi pertumbuhan ekonomi. - Angkanya stagnan (mendekati nol): tidak ada perubahan signifikan dalam output atau pendapatan riil per kapita.	Badan Pusat Statistik (BPS)
3	Indeks Gini (Gini Rasio)	Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah. Nilai Gini Rasio berada dalam rentang 0 hingga 1		Semakin mendekati 0, semakin merata distribusi pendapatan. Semakin mendekati 1, semakin tidak merata (timpang) distribusi pendapatan.	Badan Pusat Statistik (BPS)
4	Persentase Penduduk Miskin	Persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk di suatu	Persentase penduduk miskin	Semakin tinggi tingkat kemiskinan → semakin besar jumlah penduduk yang	Badan Pusat Statistik (BPS)

		wilayah pada waktu tertentu. Penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	$= \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk total}} \times 100\%$	mengalami kesulitan ekonomi dalam hal kebutuhan pokok (pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan). • Semakin rendah tingkat kemiskinan → menunjukkan perbaikan kesejahteraan dan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka $\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
6	Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah	Dimensi Dasar IPM IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yang merepresentasikan pilihan-pilihan utama yang harus dimiliki seseorang untuk menikmati kehidupan yang layak: 1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (A Long and Healthy Life): - Diukur dengan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH). Indikator ini mencerminkan kualitas kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan,	Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau wilayah (mendekati 1 atau 100%), menunjukkan semakin baik pula pencapaian pembangunan manusianya. Sebaliknya, nilai IPM yang rendah mengindikasikan bahwa masih banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk.	Badan Pusat Statistik (BPS)

			sanitasi, dan lingkungan yang sehat. 2. Pengetahuan (Knowledge): - Diukur dengan dua indikator pendidikan: ▪ Harapan Lama Sekolah (HLS): Jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada usia tertentu di masa depan, mencerminkan akses pendidikan. ▪ Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, mencerminkan capaian pendidikan yang riil. 3. Standar Hidup Layak (A Decent Standard of Living): - Diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (dalam <i>Purchasing Power Parity</i> - PPP dolar AS). Indikator ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.		
7	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang	Harapan Lama Sekolah $FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I	Susenas, Badan Pusat Statistik

8	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: - Tidak punya ijazah = 0 tahun; - SD = 6 tahun; - SMP = 9 tahun; - SMA = 12 tahun; - D1/D2 = 14 tahun; - D3 = 15 tahun; - D4 = 16 tahun; - S1 = 17 tahun; - S2 = 19 tahun; - S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: - Tidak pernah sekolah = 0 tahun; - Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1	Rata-rata Lama Sekolah $\frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke- i	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.	Susenas, Badan Pusat Statistik
---	--------------------------------	---	---	---	---------------------------------------

9	Usia Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
---	----------------------------	--	---	---	--

2. Metadata Indikator Kinerja Sasaran Visi

1	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rata-rata nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah dalam satu tahun berdasarkan harga pasar saat ini (harga berlaku).	PDRB Per Kapita (ADHB) $\frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	• Angka Tinggi: Menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk di wilayah tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Ini seringkali terjadi di daerah yang memiliki sektor industri, pertambangan, atau jasa yang maju. • Angka Rendah: Menandakan bahwa tingkat pendapatan rata-rata per penduduk cenderung rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya aktivitas ekonomi, terbatasnya sumber daya, atau jumlah penduduk yang besar.	Badan Pusat Statistik (BPS)
2	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase sumbangan nilai tambah (output ekonomi) dari sub sektor perikanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan = $\frac{\text{PDRB Sub Sektor Perikanan}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100 \%$ ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku): untuk melihat kontribusi secara nominal. ADHK (Atas Dasar Harga Konstan): untuk melihat kontribusi riil tanpa efek inflasi.	• Angkanya tinggi: Perikanan merupakan sektor ekonomi penting di daerah tersebut, terjadi di wilayah pesisir, pulau-pulau, atau daerah yang mengandalkan perikanan tangkap dan budidaya, potensi besar untuk pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan. • Angkanya rendah: Sektor perikanan belum menjadi sektor	Badan Pusat Statistik (BPS)

				unggulan dalam struktur ekonomi wilayah tersebut.	
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB .	Rasio PDRB Industri Pengolahan $= \frac{\text{Nilai tambah sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100\%$	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus	Badan Pusat Statistik
4	Tingkat Kemiskinan	Persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. Penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	Tingkat kemiskinan $= \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk total}} \times 100\%$	- Semakin tinggi tingkat kemiskinan → semakin besar jumlah penduduk yang mengalami kesulitan ekonomi dalam hal kebutuhan pokok (pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan). - Semakin rendah tingkat kemiskinan → menunjukkan perbaikan kesejahteraan dan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.	Badan Pusat Statistik (BPS)
5	Indeks Gini (Gini Rasio)	Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah. Nilai Gini Rasio berada dalam rentang 0 hingga 1		Semakin mendekati 0, semakin merata distribusi pendapatan. Semakin mendekati 1, semakin tidak merata (timpang) distribusi pendapatan.	Badan Pusat Statistik (BPS)
6	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase kenaikan atau penurunan nilai total produksi barang dan jasa (Produk Domestik Bruto/PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu (biasanya per tahun atau per kuartal), dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Laju pertumbuhan ekonomi $= \frac{\text{PDB tahun ini} - \text{PDB Tahun lalu}}{\text{PDB Tahun lalu}} \times 100\%$	- Laju pertumbuhan positif (misalnya, +5%) menunjukkan Ekonomi tumbuh, produksi meningkat, dan biasanya lapangan kerja bertambah. - Laju pertumbuhan negatif (misalnya, -2%) menunjukkan bahwa Ekonomi menyusut, bisa berarti terjadi krisis atau perlambatan ekonomi. - Laju pertumbuhan tinggi tidak selalu berarti kesejahteraan merata—distribusi	BPS

				pendapatan dan inflasi juga perlu diperhatikan.																
7	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Hasil penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah.	Nilai EPPD = = $\sum$ (Skor capaian Kinerja per indikator x bobot indikator) Skor Capaian Kinerja = Nilai kinerja aktual (berdasarkan LPPD) Bobot Indikator = Tingkat kepentingan indikator dalam keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Komponen Penilaian EPPD: urusan pemerintahan, misalnya: 1. Urusan wajib (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dll.) 2. Urusan pilihan (kelautan, pariwisata, dll.) 3. Urusan penunjang dan fungsi pemerintahan umum 4. Inovasi daerah 5. Pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan <table><tr><td>No</td><td>Kategori</td><td>Angka Rentang</td></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Tinggi</td><td>$\geq 3,51 - 4,00$</td></tr><tr><td>2</td><td>Tinggi</td><td>$2,76 - 3,50$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$2,51 - 2,75$</td></tr><tr><td>4</td><td>Rendah</td><td>$\leq 2,50$</td></tr></table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Tinggi	$\geq 3,51 - 4,00$	2	Tinggi	$2,76 - 3,50$	3	Sedang	$2,51 - 2,75$	4	Rendah	$\leq 2,50$	• Sangat Tinggi Pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan efisien dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. • Tinggi Kinerja pemerintahan daerah sudah baik dan efektif, tetapi masih ada ruang peningkatan. • Sedang Kinerja pemerintah daerah cukup, namun terdapat kelemahan yang perlu segera diperbaiki. • Rendah Pemerintah daerah dinilai belum optimal dalam menjalankan tugasnya; perlu pembinaan lebih lanjut.	Kementerian Dalam Negeri
No	Kategori	Angka Rentang																		
1	Sangat Tinggi	$\geq 3,51 - 4,00$																		
2	Tinggi	$2,76 - 3,50$																		
3	Sedang	$2,51 - 2,75$																		
4	Rendah	$\leq 2,50$																		
8	Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah	Dimensi Dasar IPM IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yang merepresentasikan pilihan-pilihan utama yang harus dimiliki seseorang untuk menikmati kehidupan yang layak: 4. Umur Panjang dan Hidup Sehat (A Long and Healthy Life):	• Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau wilayah (mendekati 1 atau 100%), menunjukkan semakin baik pula pencapaian pembangunan manusianya. Sebaliknya, nilai IPM yang rendah mengindikasikan bahwa masih banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk.	Badan Pusat Statistik (BPS)															

			- Diukur dengan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH). Indikator ini mencerminkan kualitas kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, dan lingkungan yang sehat. 5. Pengetahuan (Knowledge): - Diukur dengan dua indikator pendidikan: ▪ Harapan Lama Sekolah (HLS): Jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada usia tertentu di masa depan, mencerminkan akses pendidikan. ▪ Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, mencerminkan capaian pendidikan yang riil. 6. Standar Hidup Layak (A Decent Standard of Living): - Diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (dalam <i>Purchasing Power Parity</i> - PPP dolar AS). Indikator ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.		
9	Produktivitas tenaga kerja	Ukuran efisiensi produksi yang menunjukkan seberapa banyak output (barang dan/atau jasa) yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja (atau sekelompok pekerja) dalam periode waktu tertentu.	Produktifitas Tenaga Kerja $= \frac{\text{Total Output}}{\text{Jumlah tenaga Kerja}}$	1. Produktivitas Tinggi • Tenaga kerja mampu menghasilkan lebih banyak barang atau jasa. • Menunjukkan efisiensi kerja, penggunaan teknologi yang baik, dan keterampilan yang memadai. • Positif bagi pertumbuhan ekonomi,	Badan Pusat Statistik (BPS)

				peningkatan daya saing, dan keuntungan perusahaan. 2. Produktivitas Rendah • Tenaga kerja menghasilkan output dalam jumlah kecil dibandingkan input yang digunakan. • Mungkin disebabkan oleh rendahnya keterampilan, teknologi yang kurang, manajemen buruk, atau motivasi kerja yang rendah. • Dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing.																			
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH : $(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,0478 \times IKAL)$	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
No	Kategori	Angka Rentang																					
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																					
2	Baik	$70 \leq x < 90$																					
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																					
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																					
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																					

3. Indikator Kinerja Utama

MISI I : TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIS, BERADAT DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH “ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH, SYARAK MANGATO ADAT MAMAKAI”

1	Persentase Nagari Dengan Level Madani V	Angka yang menunjukkan berapa banyak (dalam persentase) nagari di suatu wilayah yang telah mencapai predikat tertinggi dalam penerapan Gerakan Nagari Madani, yang berarti nagari-nagari tersebut telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan untuk menjadi	$\frac{\text{Jumlah Nagari dengan Level Madani V}}{\text{Total Jumlah Nagari}} \times 100\%$ Jumlah Nagari dengan Level Madani V: Ini adalah angka absolut dari nagari-nagari yang, setelah dievaluasi berdasarkan kriteria Gerakan Nagari Madani, berhasil	Persentase Nagari Dengan Level Madani V adalah cerminan dari kemajuan pembangunan nagari yang ideal, di mana nilai-nilai agama, adat, dan sosial menjadi fondasi bagi masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.	
---	---	--	--	--	--

		nagari yang maju, religius, dan berbudaya.	mencapai skor tertinggi dan dikategorikan sebagai Level V. Penentuan Level V ini didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani, seperti Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016, yang memuat berbagai indikator dan bobot nilai untuk setiap aspek. Nagari yang mencapai skor tertentu (misalnya, 171-215 dari total skor maksimal) akan masuk kategori Level V. • Total Jumlah Nagari: Ini adalah keseluruhan jumlah nagari yang ada di wilayah yang menjadi objek pengukuran (misalnya, total nagari di Kabupaten Agam).		
2	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	Ukuran seberapa dalam ajaran agama dihayati dan diaplikasikan dalam perilaku, interaksi sosial, dan tatanan masyarakat			
3	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal				
4	Indeks Keamanan	Indeks Keamanan merupakan indeks yang mengukur capaian dari beberapa indikator yang terkait dengan ketentraman dan keamanan daerah. Persentase yang dihitung dari capaian 3 indikator : 1) Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk (bobot : 40%), 2) Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (bobot : 30%), 3) Persentase Capaian Layanan Waktu	$= (AK \times 40\%) + (PrKTPPO \times 30\%) + (RT \times 30\%)$ AK : Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk PrKTPPO : Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif RT : Persentase Capaian Layanan Waktu Tanggap Kebakaran (bobot : 30%)	Semakin tinggi nilai Indeks Keamanan, mencerminkan tingkat ketentraman dan keamanan yang semakin baik.	

		Tanggap Kebakaran (bobot : 30%)	Bobot maksimal dari setiap indikator pembentuk disesuaikan dengan bobot masing-masing, misalnya utk indikator AK, ketika hasil perhitungannya melebihi bobot 40%, maka tetap dihitung sebesar 40%.		
MISI II : TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah berhasil melaksanakan perbaikan fundamental dalam tata kelola pemerintahannya	$\sum_{i=1}^n (Bobot\ Komponen\ Utama_i \times Skor\ Komponen\ Utama_i)$ 1. Komponen Utama (i): • Komponen Pengungkit: Mengukur upaya dan proses reformasi. Ini memiliki bobot yang lebih besar. Contohnya: - Manajemen Perubahan - Penataan Peraturan Perundang-undangan - Penataan dan Penguatan Organisasi - Penataan Tata Laksana - Sistem Manajemen SDM Aparatur - Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Penguatan Pengawasan • Komponen Hasil: Mengukur dampak dan capaian reformasi. Ini memiliki bobot yang lebih kecil. Contohnya: - Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan - Kualitas Pelayanan Publik - Pemerintah Bersih dan Bebas KKN - Kinerja Organisasi 2. Skor Komponen Utama (i): Setiap komponen utama ini dihitung berdasarkan penjumlahan skor dari berbagai sub-komponen atau indikator yang lebih rinci di dalamnya. Masing-masing sub-komponen juga memiliki bobotnya sendiri dan dinilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh instansi pemerintah (misalnya, dokumen kebijakan, laporan kinerja, hasil survei kepuasan masyarakat, data kasus korupsi, dll.). $Skor\ Komponen\ Utama_i = \sum_{j=1}^m (Bobot\ sub - Komponen_j \times Nilai\ Indikator\ Sub - komponen_j)$ • Sub-komponen (j): Merupakan rincian dari setiap komponen utama. Misalnya, di bawah "Kualitas Pelayanan Publik," sub-komponennya bisa berupa "Penerapan Standar Pelayanan," "Survei Kepuasan Masyarakat," "Penanganan Pengaduan," dll. • Bobot Sub-komponen (Bobot Sub-komponen_j): Setiap sub-komponen juga memiliki bobot yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB. • Nilai Indikator Sub-komponen (Nilai Indikator Sub-	Indeks Reformasi Birokrasi adalah barometer kesehatan tata kelola pemerintahan sebuah instansi. Semakin tinggi nilainya, semakin sehat, efisien, bersih, dan melayani instansi tersebut dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

			komponen): Ini adalah skor aktual yang diberikan setelah verifikasi dan evaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh instansi. Nilai ini biasanya dalam skala 0-100 atau 0-5. Penilaian ini sangat detail, melibatkan cek dokumen, wawancara, dan observasi. Skala Penilaian dan Predikat <table><tr><td>AA (Istimewa)</td><td>>90-100</td></tr><tr><td>A (Sangat Baik)</td><td>>80-90</td></tr><tr><td>BB (Baik)</td><td>>70-80</td></tr><tr><td>B (Cukup Baik)</td><td>>60-70</td></tr><tr><td>CC (Cukup)</td><td>>50-60</td></tr><tr><td>C (Buruk)</td><td>>30-50</td></tr><tr><td>D (Sangat Buruk)</td><td>0-30</td></tr></table>	AA (Istimewa)	>90-100	A (Sangat Baik)	>80-90	BB (Baik)	>70-80	B (Cukup Baik)	>60-70	CC (Cukup)	>50-60	C (Buruk)	>30-50	D (Sangat Buruk)	0-30		
AA (Istimewa)	>90-100																		
A (Sangat Baik)	>80-90																		
BB (Baik)	>70-80																		
B (Cukup Baik)	>60-70																		
CC (Cukup)	>50-60																		
C (Buruk)	>30-50																		
D (Sangat Buruk)	0-30																		
2	IPKD MCP	Kriteria atau metrik yang digunakan oleh KPK dalam sistem MCP untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan utama pencegahan korupsi. Indikator ini membantu KPK dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan, serta memonitor kemajuan upaya perbaikan.		Alat strategis untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah , yang pada akhirnya bertujuan untuk mempersempit ruang gerak korupsi di sektor publik.	Komisi Pemberantas Korupsi														
3	Nilai SAKIP	Tolok ukur penting untuk menilai seberapa akuntabel dan berorientasi hasil sebuah instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	Nilai SAKIP = (Nilai Perencanaan Kinerja × 30%) + (Nilai Pengukuran Kinerja × 25%) + (Nilai Pelaporan Kinerja × 15%) + (Nilai Evaluasi Internal × 10%) + (Nilai Capaian Kinerja × 20%) Perencanaan Kinerja: - Penilaian: mengevaluasi kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja). Kejelasan tujuan dan sasaran, indikator kinerja yang terukur, relevansi program/kegiatan dengan visi/misi, serta cascading kinerja dari level strategis ke operasional. Pengukuran Kinerja: - Penilaian: Meliputi keberadaan dan kualitas sistem pengukuran kinerja. Apakah instansi memiliki mekanisme yang jelas untuk mengukur capaian indikator, apakah data pengukuran valid, reliabel, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.	Nilai SAKIP memberikan gambaran komprehensif tentang seberapa jauh sebuah instansi pemerintah telah mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam melayani masyarakat.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi														

			Pelaporan Kinerja: - Penilaian: Fokus pada kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Kelengkapan informasi, akurasi data, ketepatan waktu penyampaian, transparansi, dan kemudahan pemahaman laporan bagi publik. Evaluasi Internal: - Penilaian: Menilai apakah instansi melakukan evaluasi mandiri terhadap kinerja mereka, bagaimana hasil evaluasi tersebut dianalisis, dan apakah rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan. Capaian Kinerja: - Penilaian: Meskipun SAKIP berfokus pada sistemnya, capaian kinerja aktual juga menjadi pertimbangan. Ini melihat seberapa efektif instansi dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Biasanya, aspek ini menilai persentase realisasi target dibandingkan dengan perencanaan. Skala Penilaian <table><tr><td>AA (Sangat Memuaskan)</td><td>Di atas 90</td></tr><tr><td>A (Memuaskan)</td><td>80-90</td></tr><tr><td>BB (Sangat Baik)</td><td>70-80</td></tr><tr><td>B (Baik)</td><td>60-70</td></tr><tr><td>CC (Cukup Baik)</td><td>50-60</td></tr><tr><td>C (Kurang Baik)</td><td>30-50</td></tr><tr><td>D (Sangat Buruk)</td><td>Di bawah 30</td></tr></table>	AA (Sangat Memuaskan)	Di atas 90	A (Memuaskan)	80-90	BB (Sangat Baik)	70-80	B (Baik)	60-70	CC (Cukup Baik)	50-60	C (Kurang Baik)	30-50	D (Sangat Buruk)	Di bawah 30		
AA (Sangat Memuaskan)	Di atas 90																		
A (Memuaskan)	80-90																		
BB (Sangat Baik)	70-80																		
B (Baik)	60-70																		
CC (Cukup Baik)	50-60																		
C (Kurang Baik)	30-50																		
D (Sangat Buruk)	Di bawah 30																		
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.		IPKD menjadi alat strategis bagi Kemendagri dan pemda untuk terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah demi pembangunan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat.	Kementerian Dalam Negeri														
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Indeks Domain (i) $= \frac{1}{BD(i)} \sum_{j=m}^n NA (ij) x BA (ij)$	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi														

		layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	NDj adalah nilai indeks domain ke-j BDj adalah nilai bobot domain ke-j.		
6	Indeks Sistem Merit	Alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi pemerintah telah menerapkan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).		Indeks Sistem Merit memberikan gambaran tentang sejauh mana instansi pemerintah telah bergerak menuju birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja demi pelayanan publik yang lebih baik.	KASN/KemenPA NRB/BKN
7	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\frac{\text{Nilai F01} + \text{Nilai F02} + \text{Nilai F03}}{3} \times \text{Bobot Per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $\Sigma \text{ nilai per indikator}$ 3. Menentukan Indeks $\Sigma (\text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})$	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (Fairness); 2. Partisipasi (Participation); 3. Akuntabilitas (Accountability); 4. Transparansi (transparency); 5. Berdayaguna (useful); 6. Aksesibilitas (accessibility) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pegguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

				dikategorikan menjadi:<table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	
Range Nilai	Kategori	Makna																																	
0 – 1,00	F	Gagal																																	
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																																	
1,51 – 2,00	D	Buruk																																	
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																																	
2,51 – 3,00	C	Cukup																																	
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																																	
3,51 – 4,00	B	Baik																																	
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																																	
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																																	
MISI III : SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, BERKUALITAS, INOVATIF DAN BERDAYA SAING																																			
1	IPM	Ukuran yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah	Dimensi Dasar IPM IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yang merepresentasikan pilihan-pilihan utama yang harus dimiliki seseorang untuk menikmati kehidupan yang layak: 1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (A Long and Healthy Life): - Diukur dengan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) . Indikator ini mencerminkan kualitas kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, dan lingkungan yang sehat. 2. Pengetahuan (Knowledge): - Diukur dengan dua indikator pendidikan: ▪ Harapan Lama Sekolah (HLS): Jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada usia tertentu di masa depan, mencerminkan akses pendidikan. ▪ Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, mencerminkan capaian pendidikan	Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau wilayah (mendekati 1 atau 100%), menunjukkan semakin baik pula pencapaian pembangunan manusianya. Sebaliknya, nilai IPM yang rendah mengindikasikan bahwa masih banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk.	Badan Pusat Statistik (BPS)																														

			yang riil. 3. Standar Hidup Layak (A Decent Standard of Living): - Diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (dalam <i>Purchasing Power Parity</i> - PPP dolar AS). Indikator ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.		
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: k. Tidak punya ijazah = 0 tahun; l. SD = 6 tahun; m. SMP = 9 tahun; n. SMA = 12 tahun; o. D1/D2 = 14 tahun; p. D3 = 15 tahun; q. D4 = 16 tahun; r. S1 = 17 tahun; s. S2 = 19 tahun; t. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya	Rata-rata Lama Sekolah $\frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke- i	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.	Susenas, Badan Pusat Statistik

		waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 5. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 6. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 7. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 8. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1			
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang	Harapan Lama Sekolah $FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I	Susenas, Badan Pusat Statistik
4	Usia Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
5	Pendapatan per kapita (ribu)	Besarnya pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh setiap penduduk di suatu		Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai tingkat kemakmuran atau	BPS

		negara atau wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.	<i>Pendapatan per Kapita</i> $= \frac{\text{Pendapatan Nasional}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ Pendapatan Nasional dapat merujuk pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) suatu negara/wilayah. • PDB (Produk Domestik Bruto): Total nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam periode tertentu, tanpa memandang siapa pemilik faktor produksinya. • PNB (Produk Nasional Bruto): Total nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi (warga negara) suatu negara, baik yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri, dalam periode tertentu	kesejahteraan ekonomi suatu negara. • Tingkat Kemakmuran dan Kesejahteraan Rata-rata: Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi pula perkiraan standar hidup rata-rata penduduk di negara tersebut. • Perkembangan Ekonomi: Perubahan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun menunjukkan suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi atau stagnasi/penurunan. • Daya Beli Masyarakat: kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa.	
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_P \times PSE_P)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_P}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times PSE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonic		

		angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR : \frac{\left(\sqrt{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} \right) + 1} \right)}{2}$ $IPK : \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP : \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{P,L} : \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $\frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan : G_p : Indeks Perempuan G_L : Indeks Laki-laki MTF : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan		
--	--	---	--	--

			MHPK20 : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P : Persentase perempuan di legislatif PR_L : Persentase laki-laki di legislatif SE_P : Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L : Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$: Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$: Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$: Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR : Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP : Indeks dimensi pemberdayaan IPK : Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{P,L}$: Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG : Indeks Ketimpangan Gender		
7	Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga				
MISI IV: EKONOMI YANG TANGGUH DAN BERKEADILAN					
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase kenaikan atau penurunan nilai total produksi barang dan jasa (Produk Domestik Bruto/PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu (biasanya per tahun atau per kuartal), dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Laju pertumbuhan ekonomi $= \frac{\text{PDB tahun ini} - \text{PDB Tahun lalu}}{\text{PDB Tahun lalu}} \times 100 \%$	- Laju pertumbuhan positif (misalnya, +5%) menunjukkan Ekonomi tumbuh, produksi meningkat, dan biasanya lapangan kerja bertambah. - Laju pertumbuhan negatif (misalnya, -2%) menunjukkan bahwa Ekonomi menyusut, bisa berarti terjadi krisis atau perlambatan ekonomi. - Laju pertumbuhan tinggi tidak selalu berarti kesejahteraan merata—distribusi pendapatan dan inflasi juga perlu	BPS

				diperhatikan.	
2	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB .	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan $= \frac{\text{Nilai tambah sektor Pertanian,kehutanan dan Perikanan}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100$	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.	Badan Pusat Statistik
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB .	Rasio PDRB Industri Pengolahan $= \frac{\text{Nilai tambah sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100$ %	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus	Badan Pusat Statistik
4	Rasio Kewirausahaan	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	Rasio Kewirausahaan $\frac{\text{Jumlah Orang Berusaha dibantu butuh tetap}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100\%$	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
5	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB .	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum $= \frac{\text{Nilai tambah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100$	Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum , semakin tinggi proporsinya terhadap Produk	Badan Pusat Statistik

				Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus	
6	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior. Berdasarkan kesepakatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan BPS, maka untuk mengukur Rasio PDRB Ekonomi Kreatif digunakan rasio pada sektor lapangan usaha Jasa Lainnya	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif $= \frac{\text{Nilai tambah sektor Jasa Lainnya}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100$	Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.	Badan Pusat Statistik daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) merupakan share PMTB terhadap PDB Nasional.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) $= \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ PMTB = Total Pembentukan Modal Tetap Bruto berdasarkan PDRB Pengeluaran PDRB ADHK = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.	Badan Pusat Statistik
8	Gini Rasio	Ukuran ketimpangan distribusi		• Semakin mendekati 0, semakin merata	Badan Pusat

		pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah. Nilai Gini Rasio berada dalam rentang 0 hingga 1		distribusi pendapatan. • Semakin mendekati 1 , semakin tidak merata (timpang) distribusi pendapatan.	Statistik (BPS)
9	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk suatu negara atau wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan (tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar)	Angka kemiskinan (%) $= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah total penduduk}} \times 100\%$	- Semakin rendah angka kemiskinan, semakin banyak penduduk yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. - Semakin tinggi angka kemiskinan, semakin besar bagian masyarakat yang hidup dalam kondisi kekurangan.	Badan Pusat Statistik (BPS)
10	Indeks Ketahanan Pangan	Ukuran yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu negara, wilayah, atau daerah dalam menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan bagi seluruh penduduknya.			Badan Pangan Nasional (Bapanas)
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka $\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
13	Produktivitas tenaga kerja	Ukuran efisiensi produksi yang menunjukkan seberapa banyak output (barang dan/atau jasa) yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja (atau	Produktifitas Tenaga Kerja $= \frac{\text{Total Output}}{\text{Jumlah tenaga Kerja}}$	3. Produktivitas Tinggi - Tenaga kerja mampu menghasilkan lebih banyak barang atau jasa. - Menunjukkan efisiensi kerja,	Badan Pusat Statistik (BPS)

		sekelompok pekerja) dalam periode waktu tertentu.		penggunaan teknologi yang baik, dan keterampilan yang memadai. • Positif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan keuntungan perusahaan. 4. Produktivitas Rendah • Tenaga kerja menghasilkan output dalam jumlah kecil dibandingkan input yang digunakan. • Mungkin disebabkan oleh rendahnya keterampilan, teknologi yang kurang, manajemen buruk, atau motivasi kerja yang rendah. • Dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing.	
14	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah memperoleh akses terhadap program atau layanan perlindungan sosial tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial = $\frac{\text{Jumlah PPKS yang menerima perlindungan sosial}}{\text{Total Jumlah PPKS}} \times 100\%$	Persentase Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan bahwa program perlindungan sosial memiliki jangkauan yang luas dan efektif dalam menjangkau kelompok PPKS yang teridentifikasi Persentase Rendah: Mengindikasikan adanya kesenjangan dalam cakupan perlindungan sosial.	Kementerian Sosial (Kemensos)
MISI V: INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN, BERKEADILAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN MENINGKATKAN KETANGGUHAN MITIGASI BENCANA					
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga)	Indeks Risiko Bencana (IRBI) $\text{Risk} : \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 -144 adalah Sedang	BNPB

		komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana	• Indeks > 144 adalah Tinggi																			
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH : $(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,0478 \times IKAL)$	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$	Data yang digunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
No	Kategori	Angka Rentang																					
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																					
2	Baik	$70 \leq x < 90$																					
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																					
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																					
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																					
3	Indeks Ketahanan Daerah	Ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat resiliensi atau ketangguhan suatu wilayah administrasi (baik provinsi maupun kabupaten/kota) dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana. Skor IKD biasanya berkisar dari 0 hingga 100		• Skor IKD Tinggi: Menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi bencana. • Skor IKD Rendah: Mengindikasikan kerentanan tinggi terhadap bencana	BNPB																		

4	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Tingkat kemajuan pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup akses, kualitas, dan ketersediaan sarana fisik seperti transportasi, energi, air bersih, sanitasi, serta teknologi informasi dan komunikasi.		Nilai IPI biasanya berkisar antara 0 hingga 1 (jika dinormalisasi) atau 0 hingga 100 (jika dikalikan 100). Semakin tinggi nilai IPI, semakin baik kondisi pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. • Nilai IPI Tinggi (mendekati 1 atau 100): Menunjukkan bahwa infrastruktur di wilayah tersebut sangat maju, tersedia secara luas, dan berkualitas baik. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk memiliki akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi, serta memiliki jaringan jalan yang memadai. Wilayah ini cenderung memiliki daya dukung yang kuat untuk aktivitas ekonomi dan sosial. • Nilai IPI Sedang: Menunjukkan bahwa ada kemajuan yang cukup baik dalam pembangunan infrastruktur, namun masih ada beberapa area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Mungkin ada disparitas akses antar wilayah atau kualitas infrastruktur yang belum merata. • Nilai IPI Rendah (mendekati 0): Menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut masih sangat kurang. Akses terhadap layanan dasar mungkin terbatas, dan kualitas infrastruktur yang ada pun cenderung buruk. Ini mengindikasikan tantangan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi, kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup.	DPUTR, Dinas Perhubungan, Dinas Pekim
5	Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase rumah tangga yang memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi layak yang dilengkapi dengan sistem	Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman = $\frac{\text{Jumlah RT dengan sanitasi aman}}{\text{Total Jumlah RT}} \times 100\%$	• Persentase Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah tersebut	

		pengelolaan limbah tinja secara aman		memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak dan limbah tinja mereka dikelola dengan aman (baik di lokasi maupun melalui sistem terpusat). • Persentase Sedang: Menunjukkan bahwa ada kemajuan yang signifikan, tetapi masih ada sebagian rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi aman. • Persentase Rendah: Menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga belum memiliki akses sanitasi yang aman. Ini bisa berarti banyak rumah tangga masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS) atau menggunakan fasilitas yang tidak layak/tidak aman dalam pengelolaan limbahnya.	
6	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan air minum melalui jaringan perpipaan dan air tersebut memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan sehingga dikategorikan sebagai "aman" untuk dikonsumsi	Persentase Akses Air Minum Aman (Perpipaan) = $\frac{\text{Jumlah RT yang menggunakan air perpipaan aman}}{\text{Total Jumlah RT}} \times 100\%$	• Persentase Tinggi (mendekati 100%): Ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah tersebut mendapatkan air minum yang aman, berkualitas, cukup, mengalir terus-menerus, dan terjangkau melalui jaringan perpipaan • Persentase Sedang: Mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam penyediaan air perpipaan aman, namun masih ada kesenjangan. • Persentase Rendah: Menandakan bahwa mayoritas rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air minum perpipaan yang aman. Mereka mungkin bergantung pada sumber air alternatif yang kurang aman (sumur tak terlindungi, mata air tak terolah, air permukaan)	DPUTR
7	Jalan dalam kondisi mantap	Kondisi jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) yang telah ditetapkan, sehingga mampu melayani	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap =	• Persentase Tinggi/Panjang yang Besar (mendekati 100% dari total jaringan): Ini menunjukkan bahwa sebagian besar	DPUTR

		lalu lintas secara aman, nyaman, dan efisien sesuai dengan fungsi dan kelas jalan	$\frac{\text{Panjang jalan baik+sedang}}{\text{Total panjang jalan}} \times 100\%$	pengguna jalan dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan efisien. • Persentase Sedang: Mengindikasikan bahwa sebagian besar jalan sudah baik, tetapi masih ada ruas-ruas yang kurang nyaman atau memiliki kerusakan minor. • Persentase Rendah: Menandakan bahwa mayoritas jalan berada dalam kondisi rusak (ringan atau berat).	
8	Rasio Konektivitas Wilayah	Menggambarkan tingkat keterhubungan antar wilayah, baik secara fisik maupun non-fisik, yang memungkinkan pergerakan orang, barang, jasa, dan informasi secara efisien dan efektif. Ini mencerminkan seberapa mudah dan cepat suatu wilayah dapat terhubung dengan wilayah lain atau pusat-pusat kegiatan ekonomi.			
9	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator	Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $\text{PHLTB} = \frac{\text{JRTHLTB}}{\text{JRT} \times 100}$ PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB: jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT: Jumlah rumah tangga Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)

		tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak	tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $\text{PHLTB (Proksi)} = \frac{\text{JRTHLTB (Proxi)}}{\text{JRT} \times 100}$ PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT: Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaanperdesaan, dan desil pengeluaran.		
MISI VI : PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS NAGARI UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN, MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENINGKATKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Indeks Desa	Indeks pengukuran terhadap Tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan.	Permen DPDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa = $\frac{D \text{ ld} + D \text{ s} + D \text{ e} + D \text{ l} + D \text{ a} + D \text{ tkp}}{6}$ D ld = Indeks Dimensi Layanan Dasar D s = Indeks Dimensi Sosial D e = Indeks Dimensi Ekonomi D l = Indeks Dimensi Lingkungan D a = Indeks Dimensi Aksesibilitas D tkp = Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa Desa Sangat Tertinggal: • Nilai ID: 0,00% s.d 49,48% Desa Tertinggal: • Nilai ID: 49,49% s.d 57,38% Desa Berkembang: • Nilai ID: 57,39% s.d 69,34% Desa Maju: • Nilai ID: 69,35% s.d 79,62% Desa Mandiri:	Desa Sangat Tertinggal • Memiliki infrastruktur sangat minim, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang terbatas, tingkat kemiskinan tinggi, dan kualitas hidup yang rendah. Intervensi pembangunan yang intensif dan terpadu sangat dibutuhkan. Desa Tertinggal • Infrastruktur dasar sudah ada tetapi terbatas, akses layanan dasar masih kurang merata, dan sektor ekonomi belum berkembang optimal. Diperlukan program-program yang berfokus pada peningkatan akses layanan dasar dan penguatan ekonomi lokal. Desa Berkembang: • Infrastruktur dasar cukup tersedia, akses pendidikan dan kesehatan mulai membaik, dan sektor ekonomi mulai menunjukkan pertumbuhan. Fokus	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

			Nilai ID: 79,63% s.d 100%	pembangunan adalah mengoptimalkan potensi yang ada dan mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Desa Maju: - Infrastruktur yang memadai, akses yang baik terhadap layanan dasar, sektor ekonomi yang berkembang, dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan. Strategi pembangunan lebih mengarah pada keberlanjutan dan inovasi untuk terus meningkatkan kesejahteraan. Desa Mandiri: - Memiliki kapasitas yang sangat baik dalam mengelola sumber daya, pelayanan publik yang prima, ekonomi yang kuat, lingkungan yang terjaga, aksesibilitas yang memadai, dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Desa mandiri mampu secara mandiri merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya.	
2	Persentase Desa Mandiri	Perbandingan jumlah desa yang berstatus "Mandiri" terhadap total jumlah desa dalam suatu wilayah	Persentase Desa Mandiri = $\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Total Jumlah Desa}} \times 100\%$		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4. Indikator Kinerja Daerah					
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah total listrik yang dikonsumsi oleh suatu negara, wilayah, atau komunitas dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode tertentu (biasanya per tahun)	Konsumsi listrik per kapita = $\frac{\text{Total konsumsi Listrik (kWh)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Semakin tinggi dan efisien konsumsi listrik per kapita, semakin maju dan sejahtera suatu masyarakat.	PLN
2	Indeks Ketahanan Pangan	Ukuran yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu negara, wilayah, atau			Badan Pangan Nasional

		daerah dalam menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan bagi seluruh penduduknya.			(Bapanas)
3	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persentase penduduk dalam suatu wilayah yang rata-rata konsumsi energinya (kalori) per hari berada di bawah kebutuhan minimum (biasanya ambang batas 2100 kilokalori per kapita per hari)	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan = $\frac{\text{Jumlah penduduk dg konsumsi} < 2100 \text{ kkal/hari}}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas)
4	Kapasitas Air Baku	Jumlah maksimum air alami (belum diolah) yang tersedia atau dapat disediakan dari sumber air tertentu (seperti sungai, danau, waduk, atau air tanah) dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pengguna (rumah tangga, industri, pertanian, dan lain-lain)	Kapasitas Air Baku = $Q \times t \times \eta$ Q = Debit air rata-rata (m^3/detik) t = Waktu operasi (detik per hari atau jam per hari) η (eta) = Efisiensi sistem pengambilan air (biasanya antara 0,7 – 0,95 tergantung sistem dan kerugian) Jika menggunakan satuan liter per detik (L/det): Kapasitas Harian (m^3/hari) = $Q \times 86.400 \times \eta$ 86.400 = jumlah detik dalam 1 hari ($24 \text{ jam} \times 60 \text{ menit} \times 60 \text{ detik}$)	• Kapasitas > Kebutuhan: Ini menunjukkan surplus air. Sumber air memiliki pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masih memiliki cadangan untuk pertumbuhan populasi atau perkembangan industri di masa mendatang. Kondisi ini ideal untuk perencanaan jangka panjang, tetapi perlu diperhatikan juga potensi perubahan iklim yang dapat mengurangi ketersediaan air. • Kapasitas = Kebutuhan: Ini menandakan keseimbangan yang rapuh. Pasokan air mencukupi untuk kebutuhan saat ini, tetapi tidak ada cadangan untuk masa depan. Perlu ada upaya efisiensi penggunaan air dan pemantauan ketat agar tidak terjadi defisit. • Kapasitas < Kebutuhan: Ini adalah kondisi defisit. Sumber air tidak mampu memenuhi total kebutuhan air. Kondisi ini memerlukan tindakan segera, seperti pengembangan sumber air baru, pembangunan infrastruktur (misalnya, bendungan atau waduk), atau penerapan kebijakan konservasi air yang ketat.	PDAM, DPUTR, Balai Wilayah Sungai

5	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan air minum melalui jaringan perpipaan dan air tersebut memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan sehingga dikategorikan sebagai "aman" untuk dikonsumsi	Persentase Akses Air Minum Aman (Perpipaan) = $\frac{\text{Jumlah RT yang menggunakan air perpipaan aman}}{\text{Total Jumlah RT}} \times 100\%$	- Persentase Tinggi (mendekati 100%): Ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah tersebut mendapatkan air minum yang aman, berkualitas, cukup, mengalir terus-menerus, dan terjangkau melalui jaringan perpipaan - Persentase Sedang: Mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam penyediaan air perpipaan aman, namun masih ada kesenjangan. - Persentase Rendah: Menandakan bahwa mayoritas rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air minum perpipaan yang aman. Mereka mungkin bergantung pada sumber air alternatif yang kurang aman (sumur tak terlindungi, mata air tak terolah, air permukaan)	DPUTR
6	Indeks tutupan lahan	Persentase area suatu wilayah yang tertutup oleh vegetasi atau jenis penutup lahan tertentu, (misalnya hutan, sawah, padang rumput, dll).	Indeks Tutupan Lahan (ITL) = $\frac{At}{A}$ At = Luas area dengan tutupan lahan tertentu (misalnya hutan, vegetasi, sawah, dll) A = Luas total wilayah yang dianalisis Hasil ITL dinyatakan dalam nilai antara 0 hingga 1, atau dikalikan 100 jika ingin dalam persen (%)	- Nilai Indeks Tinggi: Menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki tutupan vegetasi yang luas dan sehat, seperti hutan, kebun, atau area hijau. Kondisi ini sering diinterpretasikan sebagai kualitas lingkungan yang baik atau sangat baik. Wilayah dengan indeks tinggi memiliki fungsi ekologis yang optimal, seperti penyerapan karbon yang tinggi, keanekaragaman hayati yang terjaga, dan kualitas udara yang lebih baik. - Nilai Indeks Rendah: Mengindikasikan bahwa suatu wilayah didominasi oleh lahan terbuka, lahan gundul, atau area terbangun (jalan, gedung, perumahan). Interpretasi dari nilai ini adalah kualitas lingkungan yang buruk atau terdegradasi. Hilangnya vegetasi dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti	

				peningkatan suhu, penurunan kualitas udara, dan hilangnya habitat satwa liar.																			
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kesehatan dan kualitas lingkungan di suatu wilayah administratif (provinsi/kabupaten/kota), berdasarkan sejumlah indikator utama yang mewakili kondisi udara, air, dan tutupan lahan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah = $\frac{IKA + IKU + ITL}{3}$ IKU = Indeks Kualitas Udara - Dihitung berdasarkan parameter pencemar utama di sungai atau badan air (seperti BOD, COD, TSS, pH, DO) - Skor 0–100, makin tinggi makin baik IKU = Indeks Kualitas Udara - Biasanya menggunakan parameter PM10 atau PM2.5 (partikulat) sebagai wakil pencemar udara - Diukur dari data stasiun pemantau udara ambien atau model spasi ITL = Indeks Tutupan Lahan - Mengukur persentase wilayah yang masih tertutup oleh vegetasi alami atau lahan yang berfungsi ekologis - Nilainya antara 0–100 <table><tr><td>No</td><td>Kategori</td><td>Angka Rentang</td></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>80 – 100</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>66 – 79,9</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>51 – 65,9</td></tr><tr><td>4</td><td>Buruk</td><td>35 – 50,9</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Buruk</td><td>0 – 34,9</td></tr></table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	80 – 100	2	Baik	66 – 79,9	3	Sedang	51 – 65,9	4	Buruk	35 – 50,9	5	Sangat Buruk	0 – 34,9	- Sangat Baik : Lingkungan hidup sangat sehat, kondisi air, udara, dan tutupan lahan dalam keadaan optimal dan terjaga - Baik : Lingkungan hidup baik, masih cukup sehat dengan sedikit masalah yang dapat dikendalikan. - Sedang : Kualitas lingkungan hidup sedang, ada beberapa tekanan atau degradasi, perlu tindakan pengelolaan serius. - Buruk : Kondisi lingkungan hidup buruk, terjadi degradasi signifikan, risiko kesehatan dan ekosistem meningkat. - Sangat Buruk : Lingkungan hidup sangat terganggu, terjadi pencemaran dan kerusakan berat, perlu penanganan segera.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
No	Kategori	Angka Rentang																					
1	Sangat Baik	80 – 100																					
2	Baik	66 – 79,9																					
3	Sedang	51 – 65,9																					
4	Buruk	35 – 50,9																					
5	Sangat Buruk	0 – 34,9																					
8	Persentase Rumah Tangga dengan Akses	Persentase rumah tangga yang memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi layak yang dilengkapi dengan sistem	Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman =	Persentase Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah tersebut																			

	Sanitasi Aman	pengelolaan limbah tinja secara aman	$\frac{\text{Jumlah RT dengan sanitasi aman}}{\text{Total Jumlah RT}} \times 100\%$	memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak dan limbah tinja mereka dikelola dengan aman (baik di lokasi maupun melalui sistem terpusat). • Persentase Sedang: Menunjukkan bahwa ada kemajuan yang signifikan, tetapi masih ada sebagian rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi aman. • Persentase Rendah: Menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga belum memiliki akses sanitasi yang aman. Ini bisa berarti banyak rumah tangga masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS) atau menggunakan fasilitas yang tidak layak/tidak aman dalam pengelolaan limbahnya.	
9	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Jumlah atau volume sampah yang telah melalui proses pengolahan di berbagai fasilitas yang tersedia, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, atau fasilitas daur ulang.	Timbulan Sampah Terolah = $\sum$ Sampah yang diolah di fasilitas pengolahan (kg atau ton) Persentase Sampah Terolah = $\frac{\text{Jumlah sampah terolah di Fasilitas Pengolahan}}{\text{Total Timbulan Sampah}} \times 100\%$	• Persentase tinggi menandakan pengelolaan sampah yang efektif, berkontribusi pada pengurangan pencemaran tanah, air, dan udara, serta mendukung program lingkungan berkelanjutan. • Persentase rendah menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan, penguatan regulasi, dan edukasi masyarakat agar sampah tidak dibuang sembarangan.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
10	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh pengumpulan Sampah	Persentase rumah tangga dalam suatu wilayah yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara rutin, teratur, dan menyeluruh oleh penyedia jasa pengelolaan sampah (pemerintah, swasta, atau komunitas), sehingga seluruh sampah yang dihasilkan dapat diangkut dan dikelola dengan baik.	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh pengumpulan Sampah = $\frac{\text{Jml RT yg mendapatkn layanan penuh pengumpulan sampah}}{\text{Jumlah Total RT}} \times 100\%$	• Proporsi tinggi menandakan sistem pengelolaan sampah yang baik, lingkungan lebih bersih, dan risiko pencemaran berkurang. • Proporsi rendah menunjukkan perlunya peningkatan layanan, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

				pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan dan pencemaran.	
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	Indeks Risiko Bencana (IRBI) Risk : Hazard x $\frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 -144 adalah Sedang • Indeks > 144 adalah Tinggi	BNPB
12	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persen yang menunjukkan total akumulasi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari tahun dasar (baseline) sampai tahun pelaporan, dibandingkan dengan emisi pada tahun dasar.	Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif) = $\frac{\text{Emisi thn dasar} - \text{Total Emisi kumulatif direalisasikan}}{\text{Emisi tahun dasar}} \times 100\%$ • Kumulatif artinya menjumlahkan seluruh emisi GRK yang berhasil dikurangi dari tahun awal pelaksanaan aksi hingga tahun	- Persentase kumulatif mencerminkan total penurunan emisi yang berhasil dicapai dari tahun dasar (baseline) hingga tahun terakhir yang dihitung. - Jika persentase kumulatif terus meningkat, itu menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan bersifat konsisten dan berkelanjutan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

			pelaporan.	Jika peningkatannya stagnan atau bahkan menurun, itu bisa menjadi sinyal bahwa program mitigasi perlu dievaluasi dan ditingkatkan.	
13	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (Tahunan)	Persen yang menunjukkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan) = $\frac{\text{Emisi tahun sebelumnya} - \text{Emisi tahun berjalan}}{\text{Emisi tahun sebelumnya}} \times 100\%$	- Positif (+) → Ada penurunan emisi GRK → indikasi keberhasilan aksi mitigasi di tahun tersebut. - Negatif (-) → Ada kenaikan emisi GRK → bisa jadi karena peningkatan aktivitas ekonomi, lemahnya implementasi kebijakan, atau faktor eksternal seperti bencana alam, krisis energi, dll. - Stagnan (0%) → Tidak ada perubahan berarti dibanding tahun sebelumnya → bisa menunjukkan perlunya intervensi tambahan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	Jumlah Penduduk	Total individu atau orang yang tinggal di suatu wilayah geografis tertentu pada waktu tertentu, tanpa membedakan status kewarganegaraan, usia, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.	Pertumbuhan penduduk total $Pt = (L - M) + (I - E)$ - Pt = Pertumbuhan Penduduk Total - L = Jumlah kelahiran dalam satu tahun - M = Jumlah kematian dalam satu tahun - I = Jumlah imigrasi (penduduk yang masuk ke suatu wilayah) dalam satu tahun - E = Jumlah emigrasi (penduduk yang keluar dari suatu wilayah) dalam satu tahun $Pn = P0 + Pt$ - Pn = Jumlah penduduk pada tahun yang		Badan Pusat Statistik

			diproyeksikan (n) P0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar atau tahun awal		
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dari tahun ke tahun Laju pertumbuhan penduduk dikategorikan menjadi: - Laju Pertumbuhan Alami: Hanya memperhitungkan kelahiran dan kematian. - Laju Pertumbuhan Total: Memperhitungkan kelahiran, kematian, dan migrasi.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) $\frac{Pt - P_0}{P_0} \times 100\%$ Po = Jumlah penduduk pada awal tahun Pt = Jumlah penduduk pada akhir tahun	- Laju Positif (> 0%): → Jumlah penduduk bertambah setiap tahun. → Bisa disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, masuknya migran, atau penurunan angka kematian. - Laju Negatif (< 0%): → Jumlah penduduk berkurang dari tahun ke tahun. → Menunjukkan tingkat kematian tinggi, penurunan angka kelahiran, atau emigrasi besar-besaran. - Laju Nol (0%): → Jumlah penduduk stabil (tidak bertambah atau berkurang secara signifikan).	Badan Pusat Statistik
16	Rasio Penduduk	Perbandingan antara jumlah penduduk dengan variabel lain dalam suatu wilayah dan periode tertentu, yang digunakan untuk menganalisis struktur, beban, atau distribusi penduduk terhadap aspek tertentu, seperti usia, jenis kelamin, ketergantungan, atau luas wilayah.	- Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) = $\frac{\text{Jumlah penduduk laki-laki}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$ - Rasio Ketergantungan = $\frac{\text{Jumlah penduduk usia non-produktif}}{\text{Jumlah penduduk usia produktif}} \times 100\%$ jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)	Rasio Jenis Kelamin - Rasio > 100: Menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada Perempuan - Rasio < 100: Menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. - Rasio ≈ 100: Menunjukkan bahwa jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang Rasio Ketergantungan - Rasio yang Tinggi: Menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) relatif besar dibandingkan dengan jumlah penduduk	Badan Pusat Statistik

			Rasio Kepadatan Penduduk $\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Luas Wilayah (Km}^2\text{)}}$	usia produktif Rasio yang Rendah: Menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar daripada usia non-produktif.	
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase kenaikan atau penurunan nilai total produksi barang dan jasa (Produk Domestik Bruto/PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu (biasanya per tahun atau per kuartal), dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Laju pertumbuhan ekonomi $= \frac{\text{PDB tahun ini} - \text{PDB Tahun lalu}}{\text{PDB Tahun lalu}} \times 100 \%$	- Laju pertumbuhan positif (misalnya, +5%) menunjukkan Ekonomi tumbuh, produksi meningkat, dan biasanya lapangan kerja bertambah. - Laju pertumbuhan negatif (misalnya, -2%) menunjukkan bahwa Ekonomi menyusut, bisa berarti terjadi krisis atau perlambatan ekonomi. Laju pertumbuhan tinggi tidak selalu berarti kesejahteraan merata—distribusi pendapatan dan inflasi juga perlu diperhatikan.	BPS
2	Tingkat Kemiskinan	Persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. Penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	Tingkat Kemiskinan $= \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk total}} \times 100\%$	- Semakin tinggi tingkat kemiskinan → semakin besar jumlah penduduk yang mengalami kesulitan ekonomi dalam hal kebutuhan pokok (pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan). - Semakin rendah tingkat kemiskinan → menunjukkan perbaikan kesejahteraan dan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.	Badan Pusat Statistik (BPS)
3	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rata-rata nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah dalam satu tahun berdasarkan harga pasar saat ini (harga berlaku).	PDRB Per Kapita (ADHB) $\frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	- Angka Tinggi: Menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk di wilayah tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Ini seringkali terjadi di daerah yang memiliki sektor industri, pertambangan, atau jasa yang maju. - Angka Rendah: Menandakan bahwa tingkat	Badan Pusat Statistik (BPS)

				pendapatan rata-rata per penduduk cenderung rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya aktivitas ekonomi, terbatasnya sumber daya, atau jumlah penduduk yang besar.	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka $\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
5	Gini Rasio	Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah. Nilai Gini Rasio berada dalam rentang 0 hingga 1		• Semakin mendekati 0, semakin merata distribusi pendapatan. • Semakin mendekati 1, semakin tidak merata (timpang) distribusi pendapatan.	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah	Dimensi Dasar IPM IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yang merepresentasikan pilihan-pilihan utama yang harus dimiliki seseorang untuk menikmati kehidupan yang layak: 7. Umur Panjang dan Hidup Sehat (A Long and Healthy Life): - Diukur dengan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) . Indikator ini mencerminkan kualitas kesehatan,	Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau wilayah (mendekati 1 atau 100%), menunjukkan semakin baik pula pencapaian pembangunan manusianya. Sebaliknya, nilai IPM yang rendah mengindikasikan bahwa masih banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk.	Badan Pusat Statistik (BPS)

			akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, dan lingkungan yang sehat. 8. Pengetahuan (Knowledge): - Diukur dengan dua indikator pendidikan: ▪ Harapan Lama Sekolah (HLS): Jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada usia tertentu di masa depan, mencerminkan akses pendidikan. ▪ Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, mencerminkan capaian pendidikan yang riil. 9. Standar Hidup Layak (A Decent Standard of Living): - Diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (dalam <i>Purchasing Power Parity</i> - PPP dolar AS). Indikator ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.		
7	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Ukuran efisiensi produksi yang menunjukkan seberapa banyak output (barang dan/atau jasa) yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja (atau sekelompok pekerja) dalam periode waktu tertentu.	Produktifitas Tenaga Kerja $= \frac{\text{Total Output}}{\text{Jumlah tenaga Kerja}}$	5. Produktivitas Tinggi • Tenaga kerja mampu menghasilkan lebih banyak barang atau jasa. • Menunjukkan efisiensi kerja, penggunaan teknologi yang baik, dan keterampilan yang memadai. • Positif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan keuntungan perusahaan.	Badan Pusat Statistik (BPS)

				6. Produktivitas Rendah - Tenaga kerja menghasilkan output dalam jumlah kecil dibandingkan input yang digunakan. - Mungkin disebabkan oleh rendahnya keterampilan, teknologi yang kurang, manajemen buruk, atau motivasi kerja yang rendah. Dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing.	
8	Usia Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
9	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup	AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting meliputi: - Kualitas Pelayanan Kesehatan - Akses Pelayanan Kesehatan - Pendidikan Kesehatan - Status Gizi Kesadaran Masyarakat:	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) sesuai SSGI	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0	Cara perhitungan Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $\text{PAB Stunting} = \frac{\text{JAB Stunting}}{\text{JAB}}$ Keterangan PAB P stunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek / sangat pendek (stunting) JAB stunting : Jumlah anak balita pendek/ sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB : Jumlah anak balita pada waktu yang sama	Prevalensi stunting di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius meliputi: 1. Kekurangan Gizi 2. Akses Pelayanan Kesehatan: 3. Kemiskinan: 4. Tingkat pendidikan orang tua, Faktor Lingkungan	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana Upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus Pengobatan Kasus	Data Program Kementerian Kesehatan
12	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persentase pasien TB yang dinyatakan sembuh atau telah menyelesaikan seluruh regimen pengobatan dalam periode tertentu, dibandingkan dengan jumlah seluruh pasien TB yang memulai pengobatan pada periode yang sama	Angka Keberhasilan Pengobatan TB = $\frac{\text{Jumlah Pasien sembuh+selesai pengobatan}}{\text{Jumlah seluruh pasien TB yg memulai pengobatan}} \times 100\%$	• Semakin tinggi angkanya, semakin baik kinerja program pengobatan TB di suatu wilayah. • Jika mencapai atau melebihi 85%, maka keberhasilan pengobatan dianggap sesuai dengan standar minimal WHO dan Kementerian Kesehatan RI. • Angka yang rendah (<85%) menunjukkan kemungkinan adanya: - Putus obat (drop out) - Kematian pasien selama pengobatan - Kegagalan pengobatan - Ketidakteraturan minum obat	Data Program Kementerian Kesehatan

				- Masalah akses atau kualitas pelayanan kesehatan	
13	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. Persentase Cakupan Kepesertaan JKN $= \frac{\text{Jumlah Peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Indonesia}} \times 100\%$	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan 2. Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)	BPJS DJSN
14	Angka Literasi/Numerasi	Persentase penduduk atau peserta didik yang mencapai tingkat kompetensi minimum dalam kemampuan membaca (literasi) dan berhitung (numerasi) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	Angka Literasi/Numerasi = $\frac{\text{Jumlah Peserta yg mencapai kompetensi minimum}}{\text{Jumlah seluruh peserta yg diukur}} \times 100\%$	• Angka tinggi (mendekati atau di atas 80%) → Menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik mampu memahami teks atau menyelesaikan persoalan numerik sesuai standar. Ini mengindikasikan pembelajaran dasar berjalan efektif. • Angka rendah (<60%) → Mengindikasikan bahwa banyak peserta didik belum mencapai kemampuan dasar yang diharapkan. Hal ini dapat menjadi sinyal lemahnya proses pembelajaran, kualitas guru, atau ketimpangan akses pendidikan.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
15	Indeks Literasi				
16	Indeks Numerasi				
17	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang	Rata-rata Lama Sekolah	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah	Susenas, Badan Pusat Statistik

		pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: u. Tidak punya ijazah = 0 tahun; v. SD = 6 tahun; w. SMP = 9 tahun; x. SMA = 12 tahun; y. D1/D2 = 14 tahun; z. D3 = 15 tahun; aa. D4 = 16 tahun; bb. S1 = 17 tahun; cc. S2 = 19 tahun; dd. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 9. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 10. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 11. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 12. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1	$\frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke- i	menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.	
18	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang	Harapan Lama Sekolah	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS	Susenas, Badan Pusat Statistik

		pendidikan usia tersebut di masa mendatang	$FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I	
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	- Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. - Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3	Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi $\frac{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas yang lulus berijazah pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas}} \times 100 \%$	Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
20	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	- Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. - Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. - Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi $= \frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja}} \times 100 \%$	Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (demand) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

		membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.			
21	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan $= \frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk bekerja}} \times 100\%$ <i>P e s e r t a</i> = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah <i>S e m e s t a p e n d u d u k b e k e r j a</i> = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.
22	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal $\frac{\Sigma PD_{formal}}{\Sigma AKPD} \times 100 \%$ <i>PD_{formal}</i> = Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

		memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat	AKPD = Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas	formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.	
23	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pembangunan keluarga berdasarkan sejumlah dimensi penting yang mencerminkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.	IPKK tersusun dari 5 dimensi utama , yaitu: Pendidikan → Capaian pendidikan anggota keluarga (misalnya rata-rata lama sekolah) Kesehatan → Akses dan kondisi kesehatan keluarga (misalnya status gizi balita, kepesertaan JKN) Ekonomi → Kondisi ekonomi keluarga (pendapatan, pekerjaan layak, rumah layak huni) Ketahanan dan Fungsi Keluarga → Kelekatan, komunikasi, serta peran antaranggota keluarga Lingkungan → Akses terhadap sanitasi, air bersih, dan lingkungan sehat	IPKK biasanya dinyatakan dalam skor antara 0 sampai 100. 0–49 = Kualitas keluarga rendah 50–74 = Kualitas keluarga sedang 75–100 = Kualitas keluarga tinggi	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_P \times PSE_P)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_P}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times PSE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR : \frac{\left(\sqrt{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)} + 1 \right)}{2}$ $IPK : \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP : \frac{(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{P,L} : \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$		
----	---------------------------------	--	--	--	--

			5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $\frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan : G_P : Indeks Perempuan G_L : Indeks Laki-laki MTF : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P : Persentase perempuan di legislatif PR_L : Persentase laki-laki di legislatif SE_P : Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L : Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$: Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$: Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$: Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR : Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP : Indeks dimensi pemberdayaan IPK : Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{P,L}$: Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik		
--	--	--	---	--	--

			IKG : Indeks Ketimpangan Gender		
25	Indeks Perlindungan Khusus Anak	indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan anak-anak dari kelompok rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.		0 – 49 : Perlindungan rendah – sebagian besar anak rentan belum terlindungi secara memadai. 50 – 74 : Perlindungan sedang – sebagian besar layanan dasar tersedia, tapi belum merata atau optimal. 75 – 100 : Perlindungan baik – sistem perlindungan anak rentan sudah tersedia dan berjalan cukup efektif.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB .	Rasio PDRB Industri Pengolahan $= \frac{\text{Nilai tambah sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100$ %	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus	Badan Pusat Statistik
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB .	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum $= \frac{\text{Nilai tambah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100$	Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus	Badan Pusat Statistik
3	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)	Jumlah total individu warga negara asing yang berkunjung dan menggunakan fasilitas akomodasi (seperti hotel, villa, atau penginapan) di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, dengan tujuan utama berwisata dan bukan untuk bekerja		Indikator Kinerja Ekonomi Jumlah wisatawan mancanegara berbanding lurus dengan devisa (pendapatan valuta asing) yang masuk ke suatu negara. Angka Tinggi: sektor pariwisata sedang dalam kondisi baik dan memberikan	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

		atau menetap secara permanen.		kontribusi besar terhadap perekonomian. Peningkatan jumlah wisatawan berarti peningkatan pendapatan bagi hotel, restoran, transportasi, toko suvenir, dan bisnis lokal lainnya. • Angka Rendah: adanya masalah ekonomi di sektor pariwisata. Ini dapat berarti hilangnya potensi pendapatan, menurunnya lapangan kerja, dan melemahnya daya saing destinasi di mata dunia.	, Direktorat Jenderal Imigrasi, Dinas Pariwisata Daerah
4	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior. Berdasarkan kesepakatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan BPS, maka untuk mengukur Rasio PDRB Ekonomi Kreatif digunakan rasio pada sektor lapangan usaha Jasa Lainnya	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif $= \frac{\text{Nilai tambah sektor Jasa Lainnya}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100$	Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.	Badan Pusat Statistik daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian	Persentase jumlah UKM yang bergerak di luar sektor pertanian dibandingkan dengan total seluruh usaha kecil dan menengah, baik pertanian maupun non-pertanian, dalam suatu wilayah dan periode tertentu.	Proporsi UKM Non-Pertanian = $\frac{\text{Jumlah UKM Non-Pertanian}}{\text{Total UKM (Pertanian + Non-Pertanian)}} \times 100\%$ Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria	• Semakin besar proporsi UKM non-pertanian, artinya sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan industri pengolahan lebih dominan dibanding sektor pertanian. • Jika proporsinya kecil, berarti sektor pertanian masih menjadi penopang utama kegiatan UKM.	Badan Pusat Statistik (BPS)

			tersebut adalah: - Usaha Kecil: Memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta - Rp 500 juta atau hasil penjualan tahunan Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar. - Usaha Menengah: Memiliki kekayaan bersih Rp 500 juta - Rp 10 miliar atau hasil penjualan tahunan Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar. Non-Pertanian: UKM non-pertanian meliputi sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa-jasa, konstruksi, transportasi, dan lain-lain		
6	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah	Persentase jumlah unit industri kecil dan menengah (IKM) terhadap total jumlah industri pengolahan dalam suatu wilayah	Proporsi IKM = $\frac{\text{Jumlah Industri Kecil Menengah}}{\text{Total Jumlah Industri Pengolahan}} \times 100\%$ Industri kecil dan menengah (IKM) adalah bagian dari sektor industri pengolahan (manufaktur) yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, omset, atau aset	- Proporsi Tinggi (misalnya >90%) Mayoritas industri pengolahan didominasi oleh industri kecil dan menengah. Sektor industri yang inklusif, berbasis masyarakat dan padat karya. - Proporsi Rendah (misalnya <50%) Industri besar lebih mendominasi, dan peran IKM relatif kecil.	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perindustrian
7	Rasio Kewirausahaan	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja	Rasio Kewirausahaan $\frac{\text{Jumlah Orang Berusaha dibantu buruh tetap}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100\%$	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik

		atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran			
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah 1 . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.	Proporsi jumlah IKM $\frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100\%$	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.	- Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. - PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
9	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.	Return On Asset (ROA) $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*) *menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut
10	Proporsi	Persentase jumlah lapangan kerja baru	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal =	Proporsi Tinggi (misalnya >60%)	Badan Pusat

	Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	yang terbentuk di sektor formal, dibandingkan dengan total seluruh lapangan kerja baru yang diciptakan dalam suatu periode waktu.	$\frac{\text{Jumlah pekerjaan formal baru}}{\text{Total Pekerjaan Baru}} \times 100\%$	Mayoritas lapangan kerja baru yang tercipta bersifat formal. • Proporsi Rendah (misalnya <40%) sebagian besar pekerjaan baru adalah informal.	Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan $\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
12	Indek Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah harus memenuhi kriteria : 1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi 2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat 3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Merupakan urusan pemerintahan yang	$SPD : \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } - i$ $SID : \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } - i)}{MAX(10,n)}$ Keterangan: n : Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i adalah nomor indikator j : nomor inovasi MAX(10,n) : nilai yang lebih besar antara 10 atau n SPD : Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID : Indikator Satuan Inovasi Daerah		

		menjadi kewenangan daerah			
13	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB .	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan $= \frac{\text{Nilai tambah sektor Pertanian,kehutanan dan Perikanan}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100$	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.	Badan Pusat Statistik
14	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Ukuran efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan output ekonomi (nilai tambah bruto) di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam periode tertentu.	Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan = $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan}}{\text{Jumlah tenaga kerja sektor Pertanian, kehutanan, Perikanan}}$	Semakin tinggi produktivitas, artinya: - Setiap tenaga kerja di sektor tersebut menghasilkan output ekonomi yang lebih besar. - Menunjukkan efisiensi kerja lebih tinggi, kemungkinan karena: - Penggunaan teknologi pertanian/perikanan yang lebih baik - Akses terhadap modal, alat, pupuk, benih unggul, dll. - Pelatihan dan peningkatan keterampilan - Pengelolaan lahan/produksi yang lebih profesional Semakin rendah produktivitas, artinya: - Tenaga kerja di sektor tersebut belum menghasilkan nilai tambah yang optimal. - Disebabkan oleh: - Sistem usaha tani/tradisional yang masih manual - Rendahnya akses terhadap teknologi atau modal - Ketergantungan pada musim/cuaca - Fragmentasi lahan, produktivitas rendah per satuan luas	Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) Badan Pusat Statistik
15	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan, kesiapan, dan pemanfaatan teknologi digital oleh		Sangat Tinggi Daerah sangat maju dalam hal infrastruktur digital, literasi, ekonomi digital, dan	Kementerian Komunikasi dan Informatika

		masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, baik dari aspek infrastruktur, keterampilan digital, penggunaan, hingga sektor ekonomi digital.		pelayanan publik digital. Pemanfaatan teknologi oleh masyarakat sangat optimal. • Tinggi Masyarakat cukup aktif dan mampu menggunakan teknologi digital dengan baik. Infrastruktur dan layanan digital tersedia dan dimanfaatkan. • Sedang Pemanfaatan teknologi sudah berjalan, tetapi masih terdapat kesenjangan akses atau keterampilan digital. Butuh intervensi lebih lanjut • Rendah Infrastruktur atau keterampilan digital masyarakat masih terbatas. Layanan digital dan ekonomi digital belum berkembang optimal. • Sangat Rendah Daerah sangat tertinggal dalam transformasi digital. Akses dan pemanfaatan teknologi digital masih sangat minim.	Republik Indonesia
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) $= \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ PMTB = Total Pembentukan Modal Tetap Bruto berdasarkan PDRB Pengeluaran PDRB ADHK = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal	Badan Pusat Statistik

		juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) merupakan share PMTB terhadap PDB Nasional.		pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.	
17	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanaan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) $= \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.	Badan Pusat Statistik
18	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan	Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $\text{PHLTB} = \frac{\text{JRTHTB}}{\text{JRT} \times 100}$	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG)

		keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak	PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB: jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT: Jumlah rumah tangga Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $\text{PHLTB (Proksi)} = \frac{\text{JRTHLTB (Proxi)}}{\text{JRT} \times 100}$ PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT: Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaanperdesaan, dan desil pengeluaran.		dan SLF di Kabupaten/Kota)
19	Persentase Desa Mandiri	Perbandingan jumlah desa yang berstatus "Mandiri" terhadap total jumlah desa dalam suatu wilayah	Persentase Desa Mandiri = $\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Total Jumlah Desa}} \times 100\%$		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB $= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100$	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

		dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.			
21	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perencanaan Rakyat (BPR-BPRS). Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan terhadap PDRB pada suatu waktu tertentu	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB $= \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB}} \times 100$	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.	Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS)
22	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per	Nilai total seluruh transaksi saham yang terjadi di pasar modal dalam periode tertentu (misalnya per tahun), dibagi dengan jumlah penduduk pada periode yang sama	Nilai Transaksi Saham per Kapita $= \frac{\text{Total Nilai Transaksi saham}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	• Nilai Tinggi Aktivitas pasar saham relatif tinggi terhadap jumlah penduduk. • Nilai Rendah Aktivitas transaksi saham per penduduk relatif rendah	Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoriter Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS)

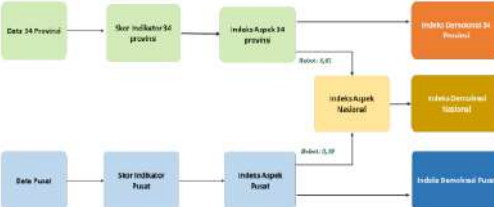
23	Total Kredit/PDRB	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS)	$\frac{\text{Total Kredit}}{\text{PDRB}} \times 100$	Total Kredit /PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha usaha dalam perekonomian	
24	Rasio PDRB Sektro Jasa Keuangan	Persentase kontribusi sektor jasa keuangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) dalam periode tertentu.	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan $= \frac{\text{PDRB Sektor Jasa Keuangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100$ PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, dihitung dalam harga berlaku atau harga konstan. Sektor Jasa Keuangan (dalam klasifikasi lapangan usaha oleh BPS): • Lembaga perbankan (bank umum, BPR) • Asuransi • Dana pensiun • Pasar modal • Sewa guna usaha (leasing), pegadaian, fintech, dll.	Rasio Tinggi sektor jasa keuangan (bank, asuransi, leasing, fintech, dll.) menjadi motor penting ekonomi daerah tersebut. Rasio Rendah Sektor jasa keuangan belum berkembang secara signifikan dalam perekonomian daerah.	Badan Pusat Statistik (BPS)
IV. ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Hukum				
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara,	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Indeks Domain (i)	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

		perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	$= \frac{1}{BD(i)} \sum_{j=m}^n NA(ij) \times BA(ij)$ NDj adalah nilai indeks domain ke-j BDj adalah nilai bobot domain ke-j.		
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 4. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\frac{\text{Nilai F01} + \text{Nilai F02} + \text{Nilai F03}}{3} \times \text{Bobot Per indikator}$ 5. Menentukan nilai setiap aspek $\Sigma \text{ nilai per indikator}$ 6. Menentukan Indeks $\Sigma (\text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})$	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (Fairness); 2. Partisipasi (Participation); 3. Akuntabilitas (Accountability); 4. Transparansi (transparency); 5. Berdayaguna (useful); 6. Aksesibilitas (accessibility) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluators) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

				<table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	
Range Nilai	Kategori	Makna																																	
0 – 1,00	F	Gagal																																	
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																																	
1,51 – 2,00	D	Buruk																																	
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																																	
2,51 – 3,00	C	Cukup																																	
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																																	
3,51 – 4,00	B	Baik																																	
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																																	
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																																	
4	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Instrumen survei nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur risiko dan potensi korupsi di institusi pemerintahan berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pengamatan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.		• Sangat Tinggi Risiko korupsi sangat rendah; sistem pengendalian, budaya antikorupsi, dan pelayanan publik berjalan baik. • Tinggi Integritas cukup baik; risiko korupsi masih ada namun terkendali. Butuh peningkatan di titik-titik rawan tertentu. • Sedang Masih terdapat potensi korupsi yang signifikan; perlu perbaikan tata kelola dan pengawasan. • Rendah Risiko korupsi tinggi; persepsi dan pengalaman menunjukkan kelemahan serius dalam integritas dan pengendalian. <table><tr><th>Nilai SPI</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>85 – 100</td><td>Sangat tinggi</td></tr><tr><td>70 – 84,9</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>50 – 69,9</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>< 50</td><td>Rendah</td></tr></table>	Nilai SPI	Kategori	85 – 100	Sangat tinggi	70 – 84,9	Tinggi	50 – 69,9	Sedang	< 50	Rendah	KPK RI (Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat)																				
Nilai SPI	Kategori																																		
85 – 100	Sangat tinggi																																		
70 – 84,9	Tinggi																																		
50 – 69,9	Sedang																																		
< 50	Rendah																																		
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Ukuran statistik yang menggambarkan tingkat persepsi masyarakat terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya yang dilakukan		• Sangat Baik Masyarakat sangat menolak korupsi. Budaya antikorupsi sudah tertanam kuat.	Badan Pusat Statistik (BPS)																														

		oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan institusi negara lainnya.		• Baik Penolakan terhadap korupsi cukup tinggi. Namun, masih ditemukan sikap permisif • Sedang Sebagian masyarakat permisif terhadap korupsi. Upaya pendidikan antikorupsi perlu diperkuat. • Rendah Toleransi terhadap korupsi masih tinggi. Masyarakat cenderung permisif. • Sangat rendah Penolakan terhadap korupsi sangat lemah. Budaya antikorupsi belum terbentuk. <table border="1"><tr><td>Nilai IPAK</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>4,01 – 5,00</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>Baik</td></tr><tr><td>2,51 – 3,50</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>1,51 – 2,50</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>0,00 – 1,50</td><td>Sangat Rendah</td></tr></table>	Nilai IPAK	Kategori	4,01 – 5,00	Sangat Baik	3,51 – 4,00	Baik	2,51 – 3,50	Sedang	1,51 – 2,50	Rendah	0,00 – 1,50	Sangat Rendah	
Nilai IPAK	Kategori																
4,01 – 5,00	Sangat Baik																
3,51 – 4,00	Baik																
2,51 – 3,50	Sedang																
1,51 – 2,50	Rendah																
0,00 – 1,50	Sangat Rendah																
6	Persentase Penegakan Perda	Tingkat pelaksanaan tindakan hukum atau administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam suatu periode tertentu.	Persentase Penegakan Perda = $\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditindak}}{\text{jumlah pelanggaran yang ditindak}} \times 100$	• Sangat Baik Hampir semua pelanggaran perda ditindak. Pemerintah daerah sangat responsif.. • Baik Penegakan dilakukan secara konsisten, meski ada sedikit pelanggaran yang belum ditindak. • Cukup	Portal Satu Data Indonesia, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),												

				Penegakan belum optimal. Ada cukup banyak pelanggaran yang belum ditangani Kurang Penegakan perda sangat lemah. Banyak pelanggaran tidak ditindaklanjuti. <table><tr><td>Persentase</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>> 90%</td><td>Sangat tinggi</td></tr><tr><td>76 – 90%</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>51 – 75%</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>≤ 50%</td><td>Rendah</td></tr></table>	Persentase	Kategori	> 90%	Sangat tinggi	76 – 90%	Tinggi	51 – 75%	Sedang	≤ 50%	Rendah	
Persentase	Kategori														
> 90%	Sangat tinggi														
76 – 90%	Tinggi														
51 – 75%	Sedang														
≤ 50%	Rendah														
7	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indikator statistik yang mengukur kondisi umum keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dalam suatu wilayah, berdasarkan data gangguan sosial, tindak kriminal ringan, serta efektivitas penegakan peraturan oleh aparat daerah.		- Sangat Baik Lingkungan masyarakat sangat tertib dan tenteram. Gangguan sosial sangat minim. - Baik Ketertiban cukup terjaga, meski masih ada gangguan terbatas di beberapa aspek. - Sedang Gangguan ketertiban masih cukup terasa. Penegakan hukum dan pengawasan perlu ditingkatkan. - Kurang Tingkat gangguan ketertiban tinggi. Penegakan perda/perkada dan penanganan konflik lemah. <table><tr><td>Persentase</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>85 – 100</td><td>Sangat tinggi</td></tr><tr><td>70 – 84,9</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>55 – 69,9</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>< 55</td><td>Kurang</td></tr></table>	Persentase	Kategori	85 – 100	Sangat tinggi	70 – 84,9	Tinggi	55 – 69,9	Sedang	< 55	Kurang	
Persentase	Kategori														
85 – 100	Sangat tinggi														
70 – 84,9	Tinggi														
55 – 69,9	Sedang														
< 55	Kurang														

8	<i>Indeks Demokrasi Indonesia</i>	IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru. IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks: 1. IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi) 2. IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan 3. IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat). IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu: 1. Aspek Kebebasan (7 indikator); 2. Aspek Kesetaraan (7 indikator); 3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).	 <pre> graph LR subgraph Provinsi A[Data 34 Provinsi] --> B[Skor Indikator 34 provinsi] B --> C[Indeks Aspek 34 provinsi] C -- "Rata-rata: 0,57" --> D[Indeks Demokrasi 34 provinsi] end subgraph Pusat E[Data Pusat] --> F[Skor Indikator Pusat] F --> G[Indeks Aspek Pusat] G -- "Rata-rata: 0,50" --> H[Indeks Demokrasi Pusat] end subgraph Nasional I[Indeks Aspek Nasional] --> J[Indeks Demokrasi Nasional] K[Indeks Demokrasi Pusat] --> J end </pre> Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi tersebut. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses web scrapping dari berbagai portal online dan revidu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi (SK Gubernur, Perda, SE, SK DPRD, data pemilih, data pelanggaran pemilu, dan lainnya). Data ini kemudian dikoding. Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjangkau data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator-indikator IDI.	Makin tinggi nilai IDI, makin baik kualitas demokrasi. Ada tiga kategori nilai: 1. Kategori Tinggi (>80) 2. Kategori Sedang (60-80) 3. Kategori Rendah (<60)	Badan Pusat Statistik (BPS) RI (https://www.bps.go.id/subject/34/politik-dankeamanan.html#subjekViewTab3), BPS masing-masing Provinsi

			IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0- 100. • Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas/LSM, serta pers.		
9	Indeks Daya Saing Daerah	IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.	$\text{Skor}_{i,d} = (N_{i,d} - NR_i / NT_i - NR_i) \times 5$ Skor_{i,d} adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; N_{i,d} adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d NR_i adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; NT_i adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95)	Nilai IDSD menjadi data dasar dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan terkait daya saing daerah	

BAPPEDA KABUPATEN AGAM
2025

